



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 188.45-401.021/158 /2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 188.45-401.021/14/2023 TENTANG PENETAPAN PETA

PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya inovasi proses bisnis menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di beberapa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188.45-401.021/14/2023 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188.45-401.021/14/2023 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Madiun;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kecamatan dan Kelurahan;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2023;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 21 Tahun 2023;
19. Peraturan Walikota Madiun Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
20. Peraturan Walikota Madiun Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 24 Tahun 2022;
21. Peraturan Walikota Madiun Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan;
22. Peraturan Walikota Madiun Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2023;
23. Peraturan Walikota Madiun Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
24. Peraturan Walikota Madiun Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

25. Peraturan Walikota Madiun Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 35 Tahun 2023;
26. Peraturan Walikota Madiun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
27. Peraturan Walikota Madiun Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
28. Peraturan Walikota Madiun Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
29. Peraturan Walikota Madiun Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
30. Peraturan Walikota Madiun Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
31. Peraturan Walikota Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
32. Peraturan Walikota Madiun Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
33. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 36 Tahun 2023;
34. Peraturan Walikota Madiun Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

35. Peraturan Walikota Madiun Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 61 Tahun 2023;
36. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188.45-401.021/14/2023 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188.45-401.021/14/2023 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 12 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 188.45-401.021/ 158 /2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA MADIUN NOMOR:
188.45-401.021/14/2023 TENTANG
PENETAPAN PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KOTA MADIUN

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA MADIUN

A. UMUM

1. PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA MADIUN LEVEL 0

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Madiun Level 0 merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Pemerintah Kota Madiun yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan Pemerintah Kota Madiun. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Madiun Tahun 2019-2024 Perubahan, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Berikut merupakan komponen dari Proses Bisnis terdiri atas:

a. Proses Utama

Proses utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama atau ringkasan dari masing-masing proses bisnis.

b. Proses Pendukung

Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik.

c. Proses Manajerial

Proses manajerial adalah proses untuk mengelola perencanaan dan pembangunan daerah, pengelolaan SDM, pengendalian dan pengawasan, pengelolaan pemerintahan dan organisasi, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA MADIUN LEVEL 1

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Madiun Level 1 merupakan penjabaran lebih rinci dari Peta Proses Bisnis Kota Madiun level 0, disebut juga Peta Sub Proses. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.

3. PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA MADIUN LEVEL 2

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Madiun Level 2 merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1, disebut juga Peta Lintas Fungsi. Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi/Perangkat Daerah yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

4. PETA RELASI BISNIS PEMERINTAH KOTA MADIUN

Peta Relasi (*Relationship Map*) Bisnis Pemerintah Kota Madiun adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan..

B. TABEL PENJABARAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA MADIUN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mewujudkan pemerintahan yang baik	Proses Manajerial	MDN-10	Perencanaan Pembangunan Daerah	MDN-10.1	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)	MDN-10.1	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)
					MDN-10.2	Penyusunan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	MDN-10.2	Penyusunan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
					MDN-10.3	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	MDN-10.3	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
					MDN-10.4	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	MDN-10.4	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
					MDN-10.5	Kajian Penelitian dan Pembangunan	MDN-10.5 CFM 1	Kajian Penelitian dan Pembangunan
							MDN-10.5 CFM 2	Penyusunan Dokumen Bidang Ekonomi, Sosial, Fisik dan Prasarana

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Proses Manajerial	MDN-11	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	MDN-11.1	Pengembangan Karier	MDN-11.1	Pengembangan Karier
					MDN-11.2	Penataan Jabatan	MDN-11.2	Penataan Jabatan
					MDN-11.3	Pengembangan Kompetensi	MDN-11.3	Pengembangan Kompetensi
					MDN-11.4	Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)	MDN-11.4	Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)
					MDN-11.5	Penilaian Kinerja dan Kompensansi	MDN-11.5	Penilaian Kinerja dan Kompensansi
		Proses Manajerial	MDN-12	Pengendalian dan Pengawasan	MDN-12.1	Pengendalian dan Pengawasan	MDN-12.1 CFM 1	Pengendalian dan Pengawasan Keuangan
							MDN-12.1 CFM 2	Pembinaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
							MDN-12.1 CFM 3	Pengendalian Gratifikasi
							MDN-12.1 CFM 4	Reviu Dokumen Perencanaan, Penyelenggaraan dan Pelaporan

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
							MDN-12.1 CFM 5	Reviu Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)		
							MDN-12.1 CFM 6	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/ Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA)		
							MDN-12.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	MDN-12.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
		Proses Manajerial	MDN-13	Pengelolaan Pemerintahan dan Organisasi	MDN-13.1	Pengembangan Kelembagaan Perangkat Daerah	MDN-13.1.CFM 1	Peningkatan dan Peningkatan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	MDN-13.1.CFM 1	Pengembangan Kelembagaan Perangkat Daerah
									MDN-13.1.CFM 2	Pengembangan Jabatan Perangkat Daerah
									MDN-13.2.CFM 1	Peningkatan Ketatalaksanaan
									MDN-13.2.CFM 2	Peningkatan Pelayanan Publik
		MDN-13.3	Pengembangan Kinerja Perangkat Daerah	MDN-13.3	Pengembangan Kinerja Perangkat Daerah					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					MDN-13.4	Pengembangan Kinerja Pemerintahan	MDN-13.4 CFM 1	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan
							MDN-13.4 CFM 2	Kerja Sama Pemerintah Daerah
		Proses Manajerial	MDN-14	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	MDN-14.1	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	MDN-14.1 CFM 1	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
							MDN-14.1 CFM 2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
							MDN-14.1 CFM 3	Penyusunan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					MDN-14.2	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah	MDN-14.2	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
					MDN-14.3	Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset	MDN-14.3 CFM 1	Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah
							MDN-14.3 CFM 2	Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Perangkat Daerah
					MDN-14.4	Pengelolaan Pendapatan Daerah	MDN-14.4	Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Proses pendukung	MDN-15	Pelayanan Administrasi dan Kearsipan	MDN-15.1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	MDN-15.1 CFM 1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan
							MDN-15.1 CFM 2	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil
							MDN-15.1 CFM 3	Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							MDN-15.1 CFM 4	Peningkatan Pemanfaatan Data Kependudukan
							MDN-15.1 CFM 5	Pelayanan Administrasi Kependudukan Keliling
							MDN-15.1 CFM 6	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bayi Baru Lahir
					MDN-15.2	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	MDN-15.2	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
					MDN-15.3	Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	MDN-15.3 CFM 1	Fasilitasi Pengusulan dan Pengangkatan Anggota dan Pimpinan DPRD
							MDN-15.3 CFM 2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
							MDN-15.3 CFM 3	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
							MDN-15.3 CFM 4	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							MDN-15.3 CFM 5	Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD
					MDN-15.4	Pengelolaan Kearsipan	MDN-15.4 CFM 1	Pengelolaan dan Layanan Kearsipan
							MDN-15.4 CFM 2	Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
							MDN-15.4 CFM 3	Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
					MDN-15.5	Pelayanan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	MDN-15.5 CFM 1	Pengendalian Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
							MDN-15.5 CFM 2	Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan dari Standar Kegiatan Konstruksi

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							MDN-15.5 CFM 3	Penyusunan Buku Petunjuk Operasional
					MDN-15.6	Pelayanan Penandatanganan secara elektronik Naskah Dinas Sekretaris Daerah	MDN-15.6	Pelayanan Penandatanganan secara Elektronik Naskah Dinas Sekretaris Daerah
		Proses pendukung	MDN-16	Pelayanan Informasi, Komunikasi, Statistik, Keamanan Informasi dan Aplikasi Informatika	MDN-16.1	Penyusunan Konten Lokal dalam rangka Membangun Citra Positif Pemerintah Daerah	MDN-16.1	Penyusunan Konten Lokal dalam rangka Membangun Citra Positif Pemerintah Dearah
					MDN-16.2	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	MDN-16.2	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
					MDN-16.3	Pengelolaan Opini, Aspirasi dan Komunikasi Publik	MDN-16.3	Pengelolaan Opini, Aspirasi dan Komunikasi Publik
					MDN-16.4	Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Pengaduan	MDN-16.4	Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Pengaduan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					MDN-16.5	Penyediaan Data Statistik Sektoral	MDN-16.5	Penyediaan Data Statistik Sektoral
					MDN-16.6	Pengamanan Dokumen dengan Tanda Tangan Digital	MDN-16.6	Pengamanan Dokumen dengan Tanda Tangan Digital
					MDN-16.7	Pengamanan Jaringan Informasi Teknologi (IT)	MDN-16.7	Pengamanan Jaringan Informasi Teknologi (IT)
					MDN-16.8	Pengamanan Pengiriman Informasi Digital	MDN-16.8	Pengamanan Pengiriman Informasi Digital
					MDN-16.9	Pengamanan Dokumen Digital	MDN-16.9	Pengamanan Dokumen Digital
					MDN-16.10	Pengembangan <i>Smart City</i>	MDN-16.10	Pengembangan <i>Smart City</i>
		Proses Pendukung	MDN-17	Pembentukan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	MDN-17.1	Harmonisasi Produk Hukum Daerah	MDN-17.1	Harmonisasi Produk Hukum Daerah
					MDN-17.2	Publikasi Produk Hukum Daerah	MDN-17.2	Publikasi Produk Hukum Daerah
					MDN-17.3	Pemberian Bantuan Hukum	MDN-17.3 CFM 1	Pemberian Bantuan Hukum

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Proses Utama	MDN-01	Peningkatan kualitas layanan infrastruktur	MDN-01.1	Peningkatan Pelayanan Moda Transportasi Umum	MDN-01.1 CFM 1	Pengelolaan Sarana Transportasi Wisata Gratis
							MDN-01.1 CFM 2	Pengelolaan Sarana Transportasi Angkutan Sekolah Gratis
					MDN-01.2	Pelayanan Manajemen dan Rekayasa Transportasi	MDN-01.2 CFM 1	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Transportasi
							MDN-01.2 CFM 2	Penyediaan Marka Jalan
					MDN-01.3	Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Saluran/Drainase dan Gedung	MDN-01.3	Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Saluran/Drainase dan Gedung
					MDN-01.4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman	MDN-01.4 CFM 1	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							MDN-01.4 CFM 2	Penyediaam Sarana Prasarana Permukiman Penerangan Jalan Umum (PJU)
		Proses Utama	MDN-02	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	MDN-02.1	Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	MDN-02.1	Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
					MDN-02.2	Pembinaan dan Pengawasan serta Sinergi Pemanfaatan Ruang	MDN-02.2	Pembinaan dan Pengawasan serta Sinergi Pemanfaatan Ruang
					MDN-02.3	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	MDN-02.3	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
					MDN-02.4	Pengelolaan Sampah secara Berkelanjutan	MDN-02.4	Pengelolaan Sampah menggunakan <i>Smart Waste Bin</i>
					MDN-02.5	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	MDN-02.5 CFM 1	Pengendalian Pencemaran
							MDN-02.5 CFM 2	Peningkatan dan Pengendalian Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun	Proses Utama	MDN-03	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	MDN-03.1	Peningkatan Harapan Lama Sekolah	MDN-03.1	Peningkatan Harapan Lama Sekolah melalui Bantuan Beasiswa Mahasiswa
					MDN-03.2	Peningkatan Kualitas Manajemen Sekolah	MDN-03.2 CFM 1	Sertifikasi Guru
							MDN-03.2 CFM 2	Akreditasi Lembaga Non Formal
							MDN-03.2 CFM 3	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) <i>Online</i>
							MDN-03.2 CFM 4	Peningkatan Ujian Nasional (UN)/Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
					MDN-03.3	Pengembangan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	MDN-03.3	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
MDN-03.4	Pengembangan Layanan Pendidikan Inklusif	MDN-03.4	Pengembangan Layanan Pendidikan Inklusif					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Proses Utama	MDN-04	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	MDN-04.1	Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Kesehatan Terpadu	MDN-04.1 CFM 1	Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah
							MDN-04.1 CFM 2	BOK UKM Sekunder Kesehatan Masyarakat (Penanganan Gizi Buruk)
							MDN 04.1 CFM 3	BOK UKM Sekunder Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kesehatan Jiwa)
							MDN 04.1 CFM 4	Penanganan Anemia Rematri
							MDN 04.1 CFM 5	Penanganan Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							MDN 04.1 CFM 6	Penanganan Kasus <i>Acute Flacid Paralysis</i> (AFP)
					MDN-04.2	Peningkatan Sumber Daya dan Informasi Kesehatan	MDN-04.2 CFM 1	Pembinaan Keluarga Siaga
							MDN-04.2 CFM 2	Pelatihan Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Administratif pada Fasilitas Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
					MDN-04.3	Peningkatan Promosi, Upaya kesehatan Masyarakat dan Lingkungan	MDN-04.3 CFM 1	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja
							MDN-04.3 CFM 2	Promosi Kesehatan melalui Media Pemerintah Kota Madiun
					MDN-04.4	Peningkatan Kesehatan Primer dan Rujukan	MDN-04.4 CFM 1	Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Klinik/Puskesmas
							MDN-04.4 CFM 2	Pengadaan Obat dan Pelayanan Kefarmasian

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							MDN-04.4 CFM 3	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)
							MDN-04.4 CFM 4	Pembangunan atau Rehab Gedung dan Bangunan Rumah Sakit
							MDN-04.4 CFM 5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan (Alat Kesehatan)
							MDN-04.4 CFM 6	Pengadaan Biaya Operasional dan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
							MDN-04.4 CFM 7	Pengadaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan
					MDN-04.5	Peningkatan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana dan Penguatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	MDN-04.5	Pembentukan dan Pengembangan Kampung Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					MDN-04.6	Peningkatan Akses dan Kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang Komprehensif	MDN-04.6	Pelayanan, Pemasangan Medis Operasi (MO), Intra Uterine Device (IUD), Implan dan Pencabutan Implan
					MDN-04.7	Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Holistik dan Integratif sesuai Siklus Hidup, serta menguatkan Karakter Keluarga	MDN-04.7	Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
		Proses Utama	MDN-05	Peningkatan Pemberdayaan Gender	MDN-05.1	Pembangunan Manusia Berbasis Gender	MDN-05.1	Pembangunan Manusia Berbasis Gender
4.	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun	Proses Utama	MDN-06	Penurunan Tingkat pengangguran Terbuka	MDN-06.1	Peningkatan Jaringan Tenaga Kerja	MDN-06.1 CFM 1	Kemudahan Akses Ketenagakerjaan
							MDN-06.1 CFM 2	Mempermudah Akses Lapangan Pekerjaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Proses Utama	MDN-07	Peningkatan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	MDN-07.1	Peningkatan Kondusifitas Iklim Berinvestasi	MDN-07.1 CFM 1	Peningkatan Investasi Daerah
	MDN-07.1 CFM 2						Promosi dan Kerjasama Investasi	
	MDN-07.1 CFM 3						Sosialisasi Peraturan Penanaman Modal	
	MDN-07.1 CFM 4						Workshop Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	
	MDN-07.1 CFM 5						Proses Perizinan yang Berbasis Pelanggan	
					MDN-07.2	Pengembangan Kebudayaan yang Berbasis Kearifan Lokal untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	MDN-07.2 CFM 1	Pelestarian Budaya dan Seni
	MDN-07.2 CFM 2						Penyelenggaraan Festival Seni	
	MDN-07.2 CFM 3						Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya	
	MDN-07.2 CFM 4						Revitalisasi Cagar Budaya	
	MDN-07.2 CFM 5						Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga	
	MDN-07.2 CFM 6						Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							MDN-07.2 CFM 7	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, Prestasi dan Rekreasi
							MDN-07.2 CFM 8	Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan
					MDN-07.3	Peningkatan Kontribusi Sektor Unggulan dalam Perekonomian	MDN-07.3 CFM 1	Mempermudah Akses Arus Perdagangan
							MDN-07.3 CFM 2	Pengembangan Sektor Pariwisata
							MDN-07.3 CFM 3	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam Negeri
							MDN-07.3 CFM 4	Pengembangan Ekonomi Digital Masyarakat
					MDN-07.4	Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Usaha Mikro dan Koperasi	MDN-07.4 CFM 1	Mempermudah Akses Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							MDN-07.4 CFM 2	Mempermudah Akses Industri Rumah Tangga (IRT)
					MDN-07.5	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ketersediaan Pangan	MDN-07.5	Mempermudah Ketersediaan Pangan
		Proses Utama	MDN-08	Pengurangan Kemiskinan	MDN-08.1	Pemberian Subsidi Air Bersih bagi Masyarakat kurang Mampu	MDN-08.1	Pemberian Subsidi Air Bersih bagi Masyarakat kurang Mampu
					MDN-08.2	Pemberian Bantuan Permakaman bagi Masyarakat Tak Berdaya	MDN-08.2	Pemberian Bantuan Permakaman bagi Masyarakat Tak Berdaya
					MDN-08.3	Pemberian Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok	MDN-08.3	Pemberian Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok
		Proses Utama	MDN-09	Peningkatan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	MDN-09.1	Peningkatan Masyarakat yang Tertib dan Patuh terhadap Peraturan Peundang-undangan	MDN-09.1	Pemberdayaan dan Evaluasi Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
					MDN-09.2	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	MDN-09.2 CFM 1	Penertiban Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

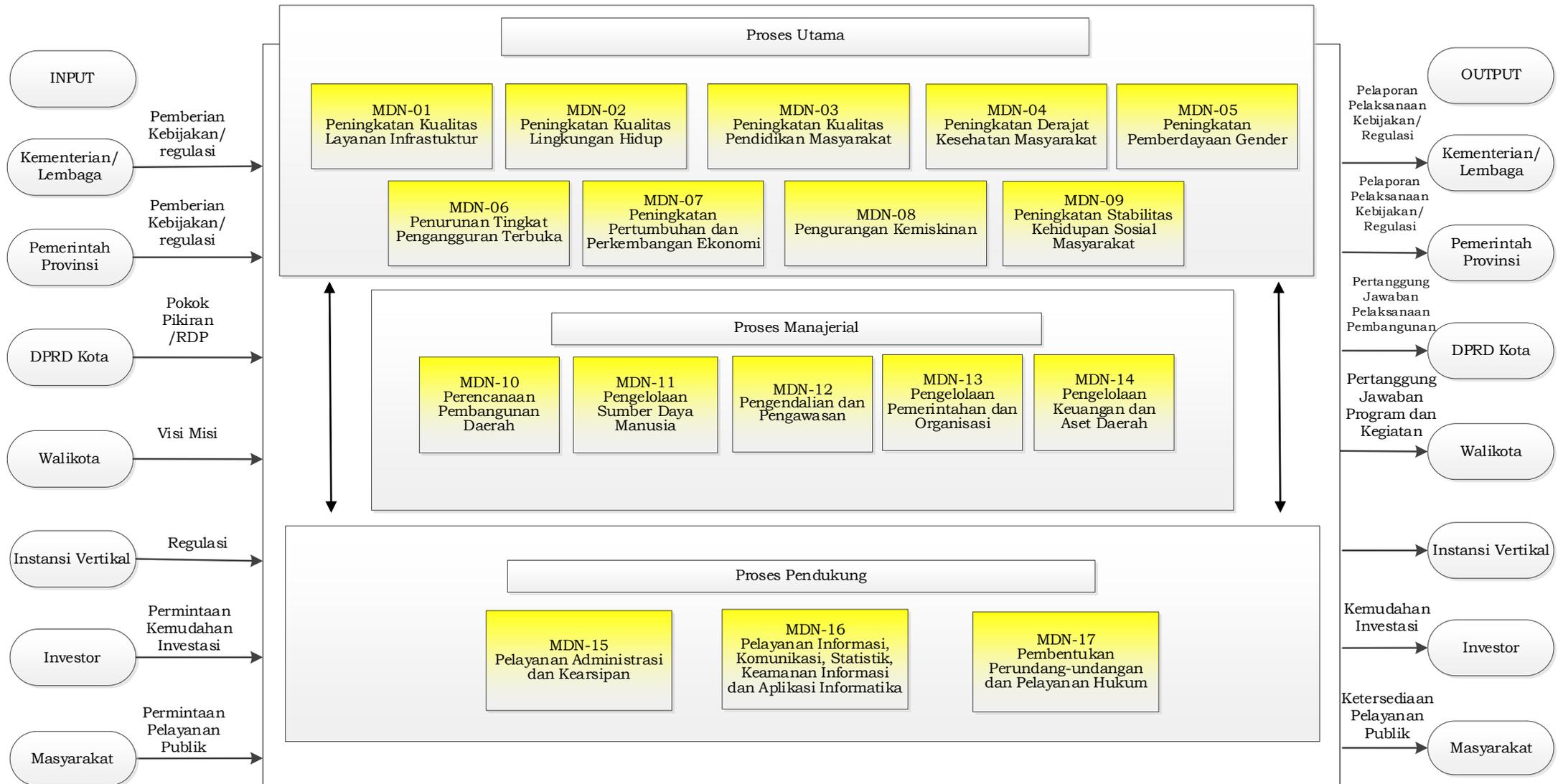
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							MDN-09.2 CFM 2	Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
							MDN-09.2 CFM 3	Pembinaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
							MDN-09.2 CFM 3	Pengamanan Kegiatan Pemerintah
					MDN-09.3	Penguatan Peran Masyarakat dalam Membangun Kerukunan	MDN-09.3 CFM 1	Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
							MDN-09.3 CFM 2	Peningkatan Toleransi Kerukunan Beragama
							MDN-09.3 CFM 3	Pembinaan Kerukunan Antar Ras Suku, Adat dan Budaya Daerah
							MDN-09.3 CFM 4	Pembinaan dan Pelatihan Bela Negara
							MDN-09.3 CFM 5	Pembinaan dan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							MDN-09.3 CFM 6	Pemantauan Ketahanan dan Kebijakan Strategis
							MDN-09.3 CFM 7	Penyelenggaraan Pendidikan Politik bagi Masyarakat
							MDN-09.3 CFM 8	Pos Pemantauan Pemilu Tahun 2024
							MDN-09.3 CFM 9	Pembinaan Manajemen Partai Politik (Parpol) dan Organisasi Masyarakat (Ormas)
					MDN-09.4	Peningkatan Mitigasi Risiko dan Ketangguhan Bencana	MDN-09.4 CFM 1	Penyelenggaraan Kesiapsiagaan Bencana
							MDN-09.4 CFM 2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman Bencana Alam
							MDN-09.4 CFM 3	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana
							MDN-09.4 CFM 4	Penyuluhan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam

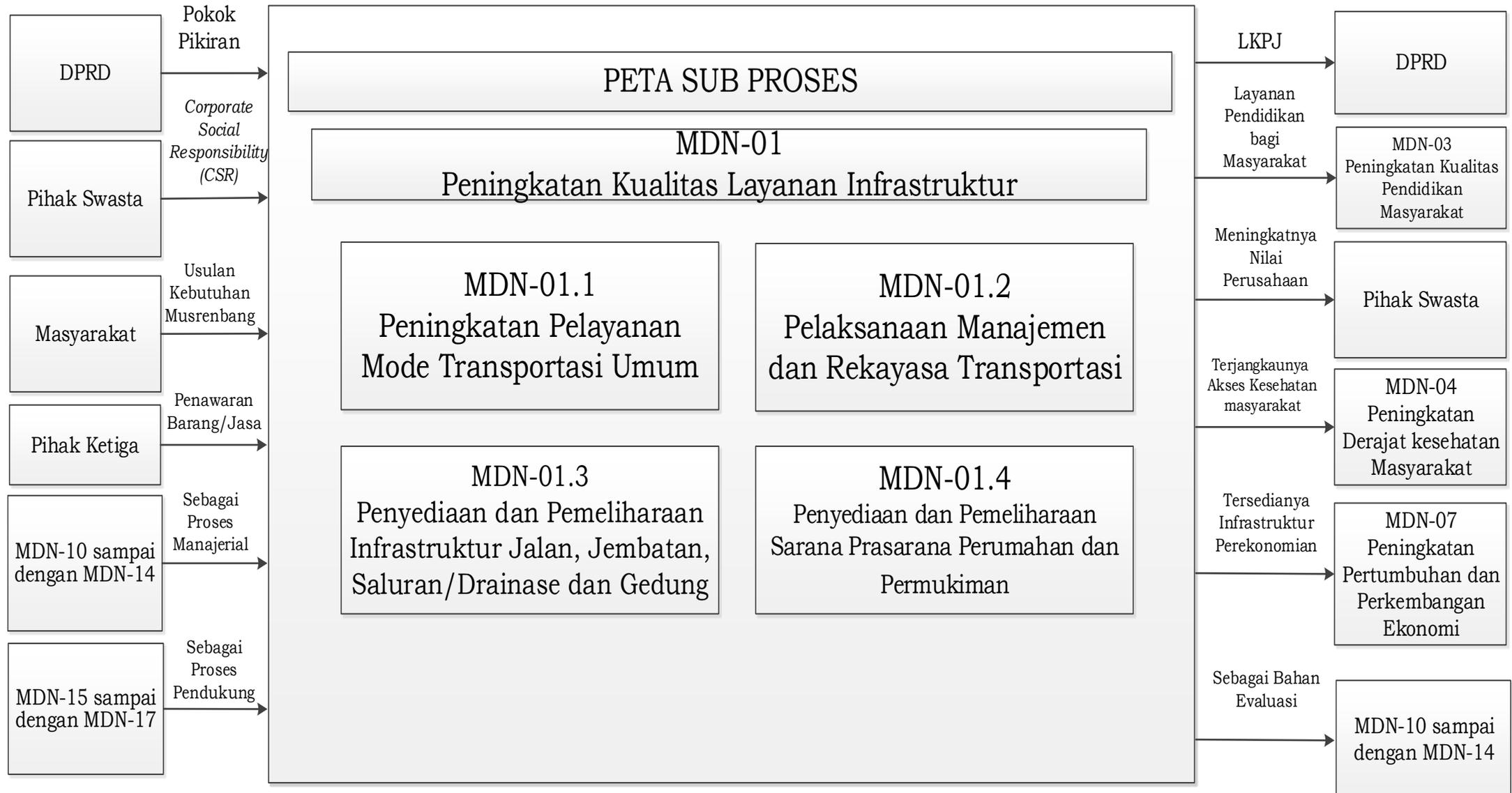
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							MDN-09.4 CFM 5	Mitigasi Penanggulangan Bencana
							MDN-09.4 CFM 6	Peningkatan Sumber Daya Alam dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
							MDN-09.4 CFM 7	Pencegahan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran
							MDN-09.4 CFM 8	Operasi dan Evaluasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran

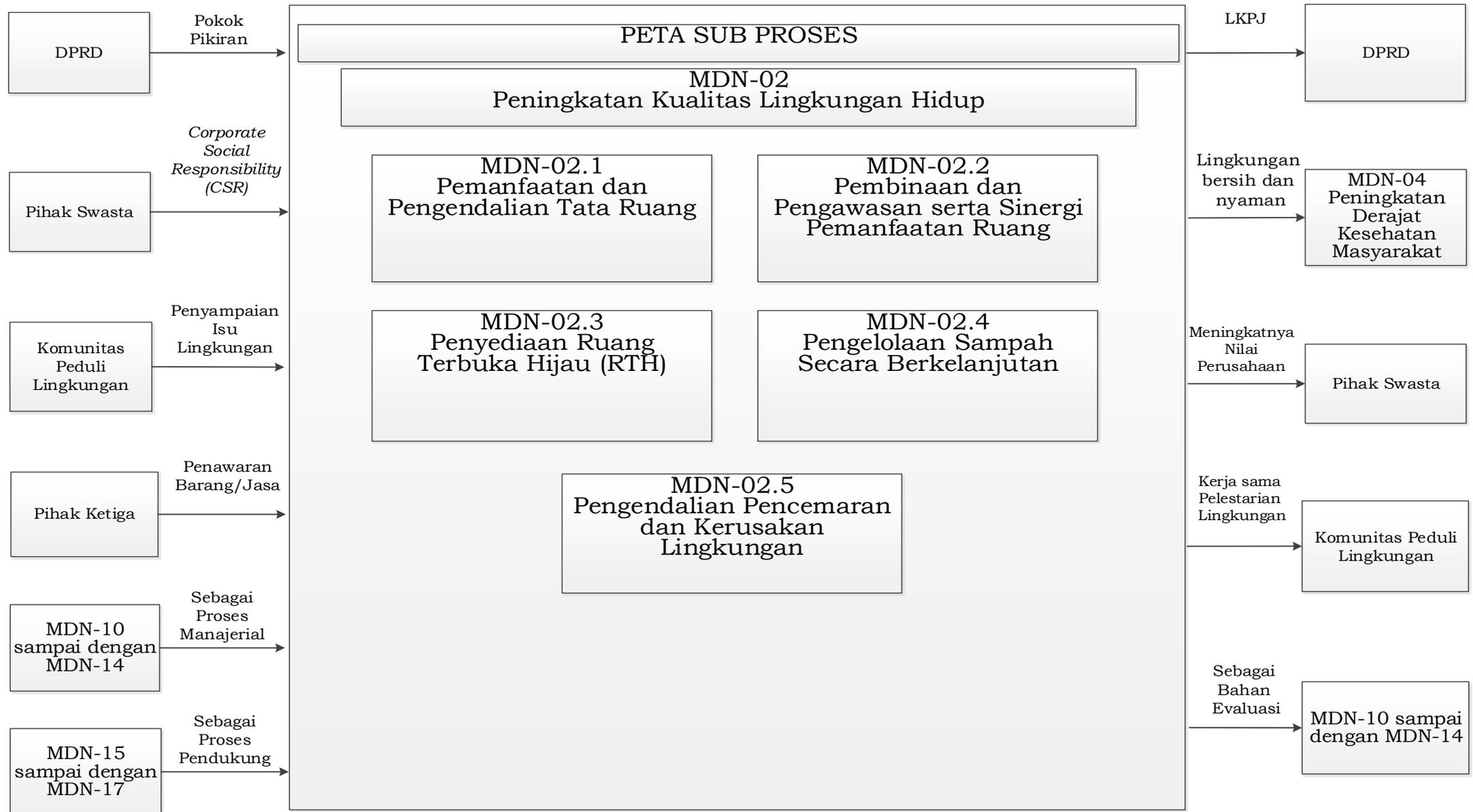
C. BAGAN PETA PROSES BISNIS

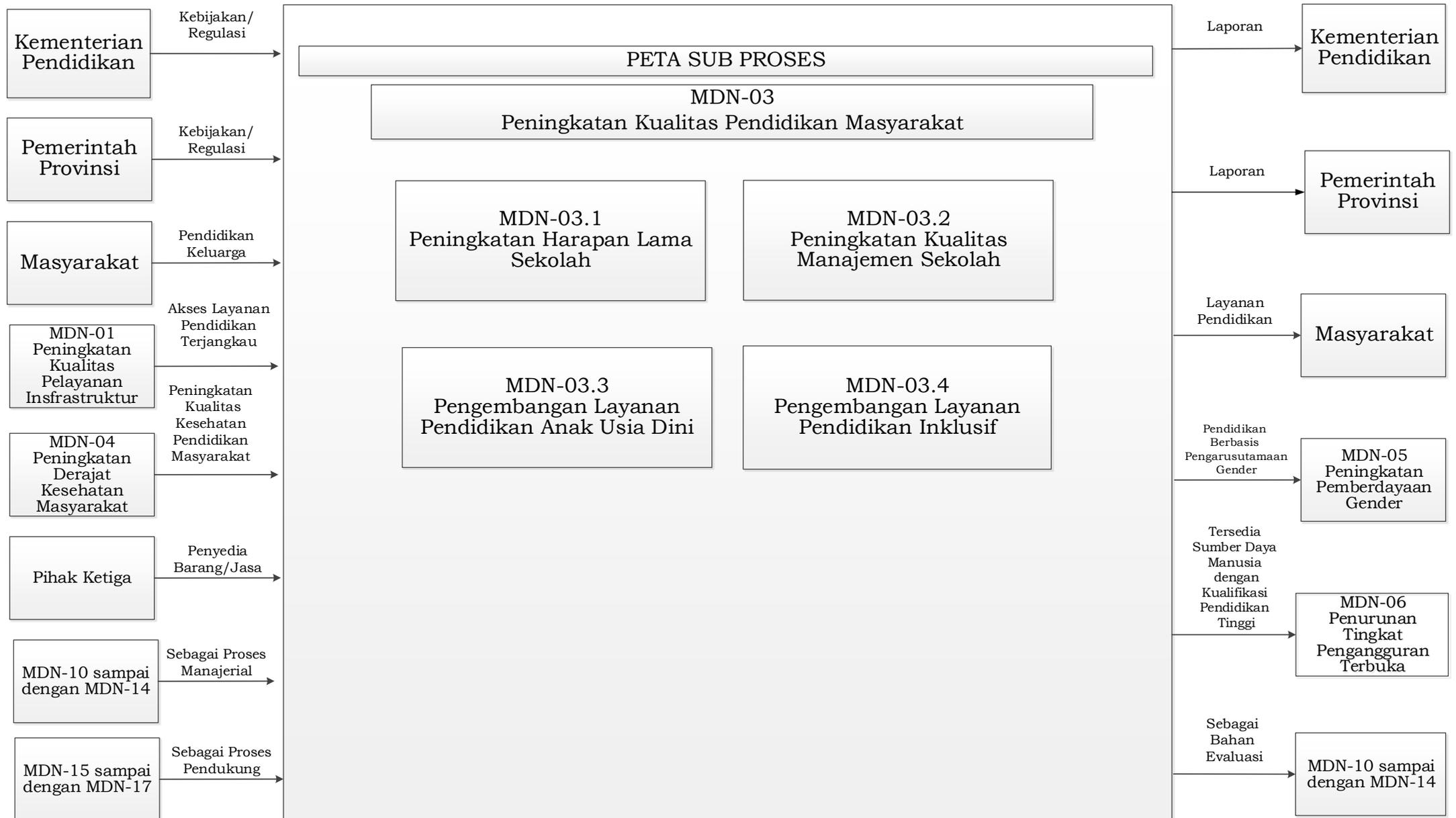
BAGAN PETA PROSES BISNIS LEVEL 0 PEMERINTAH KOTA MADIUN

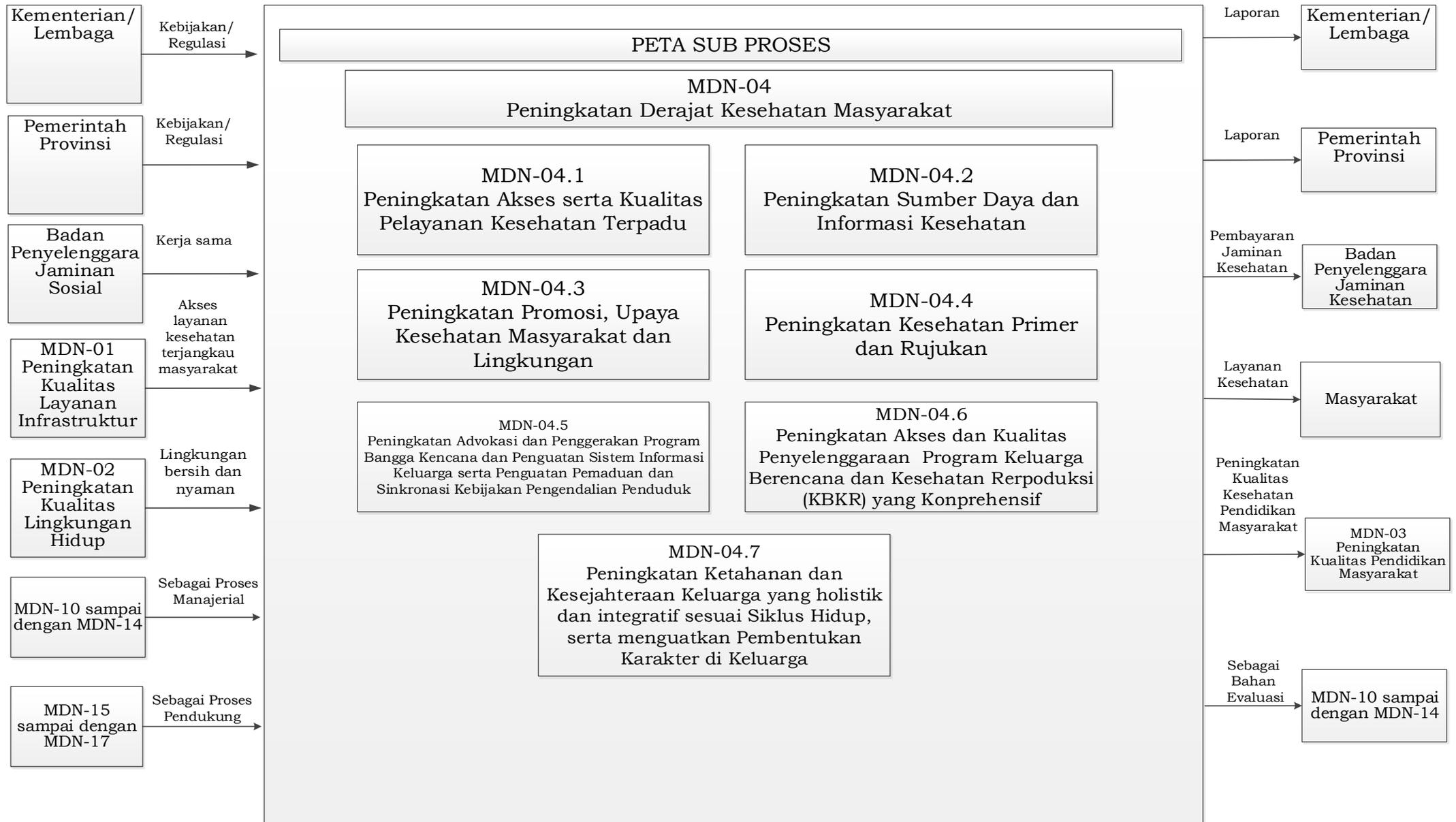


BAGAN PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 PEMERINTAH KOTA MADIUN



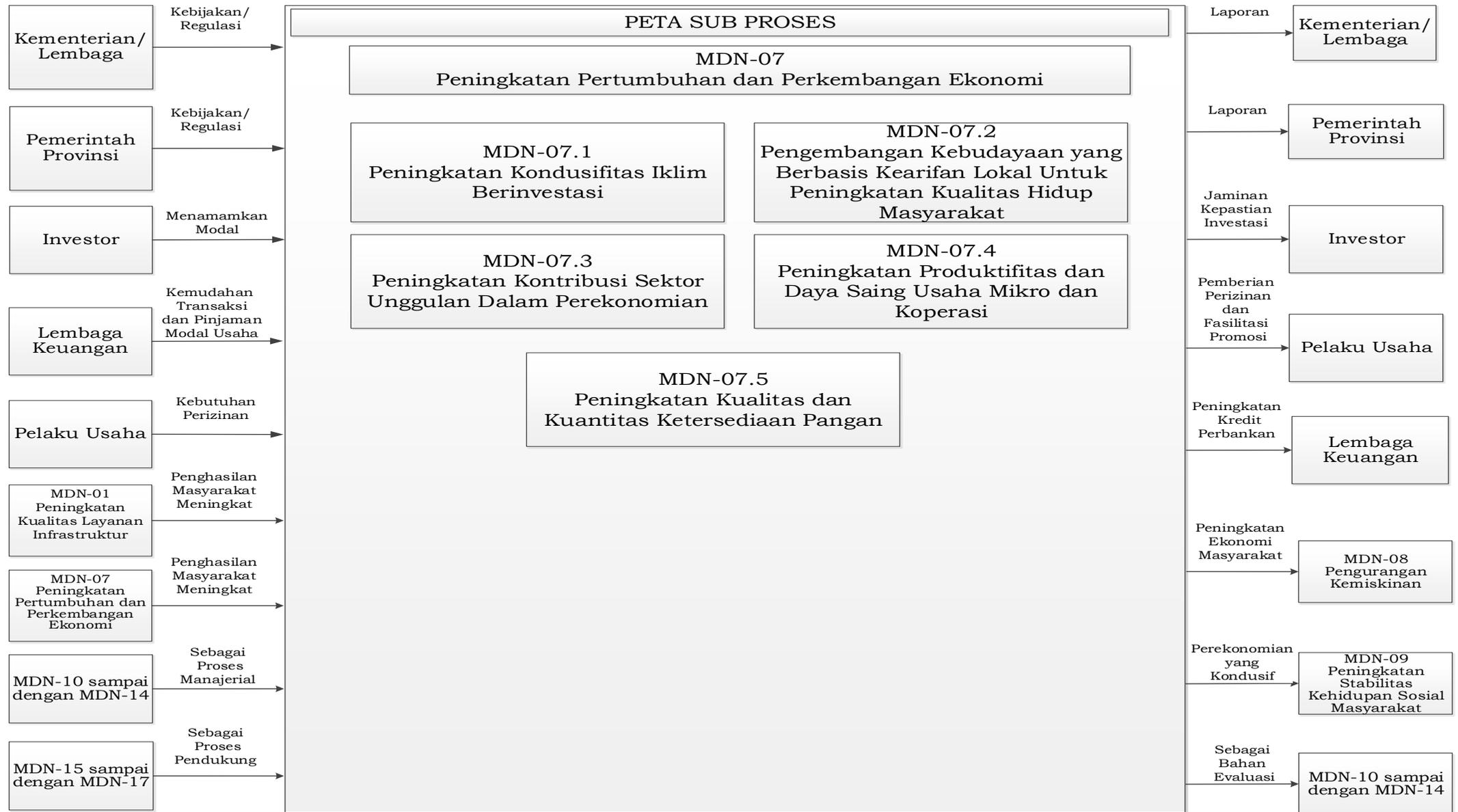


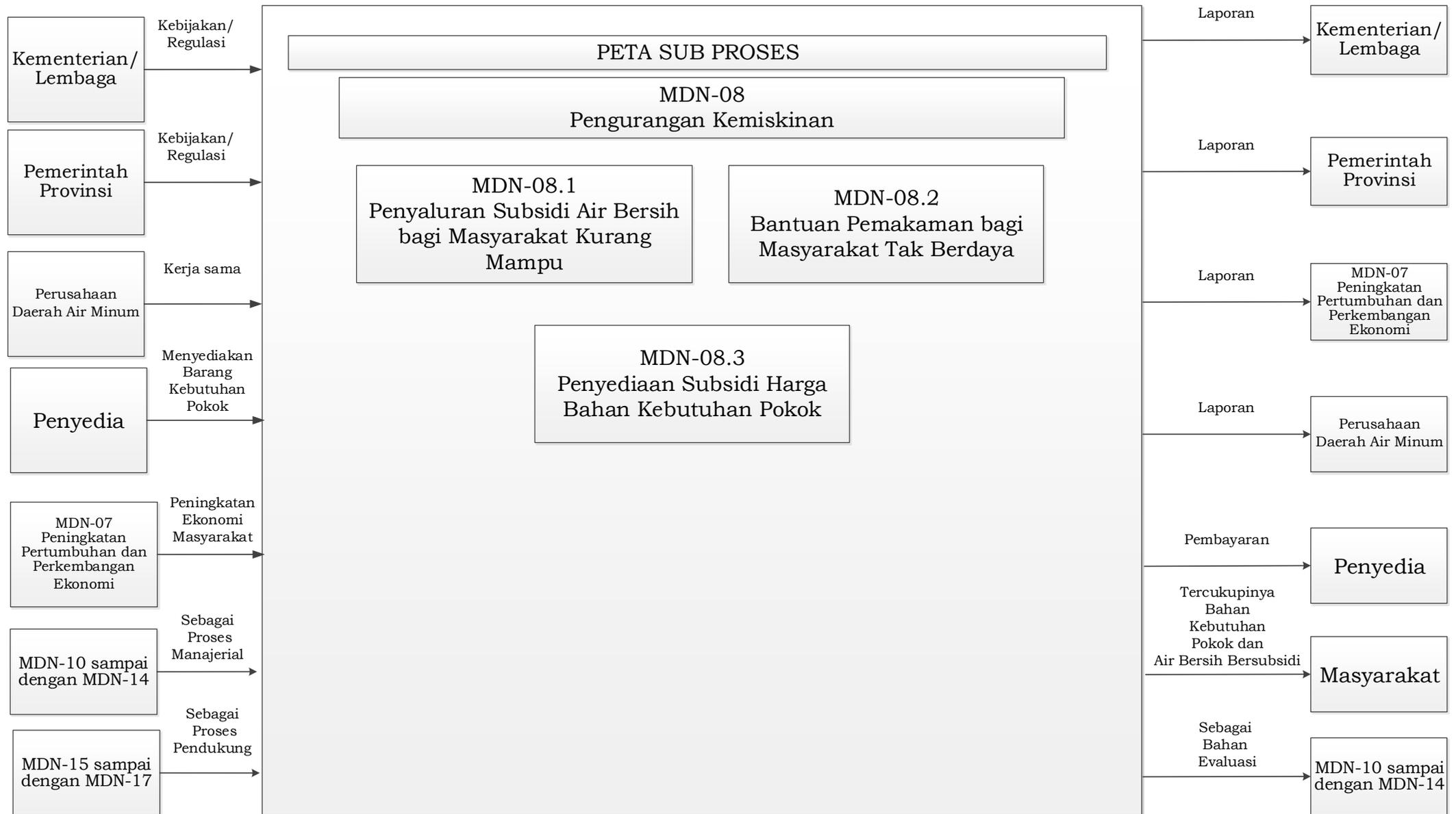


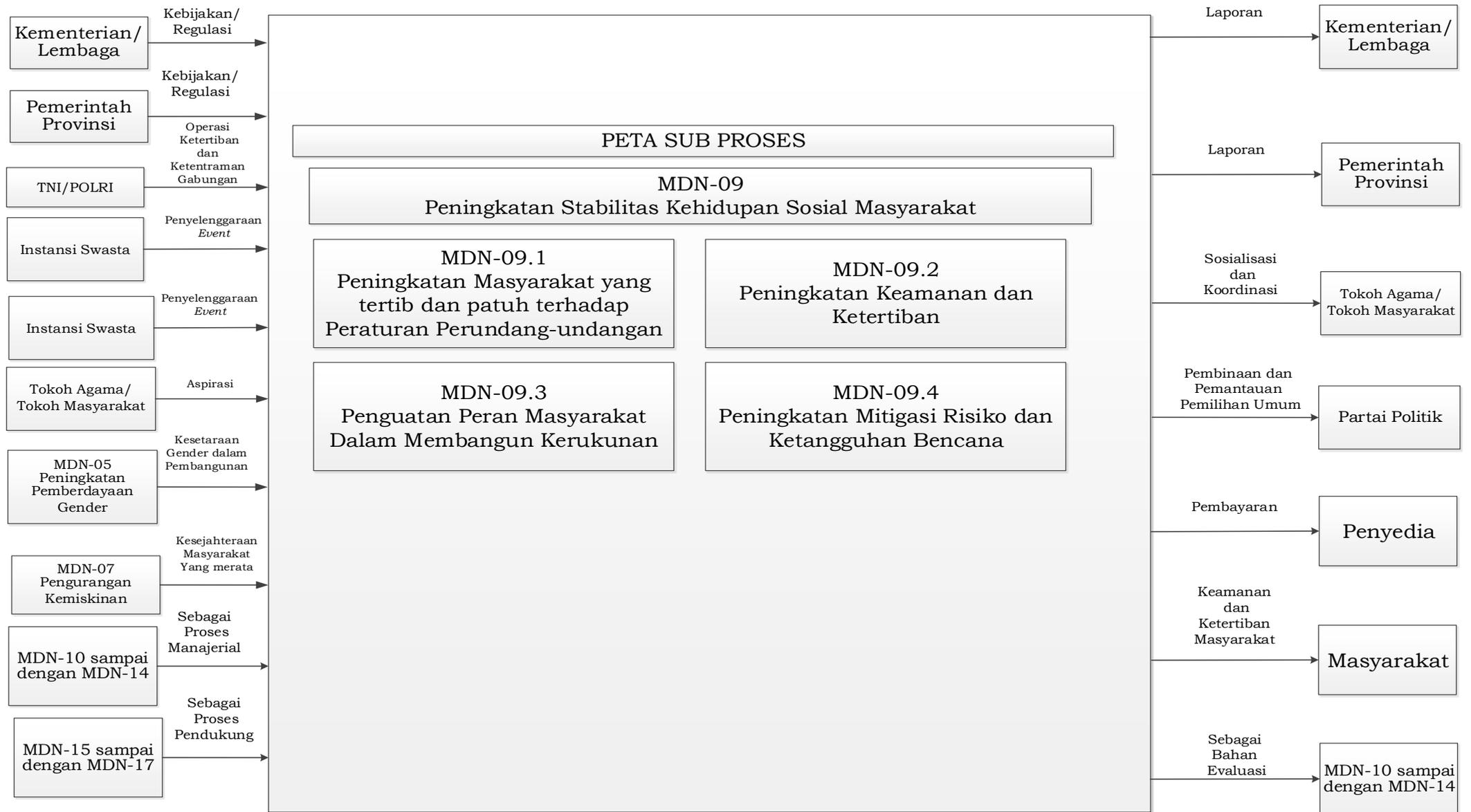


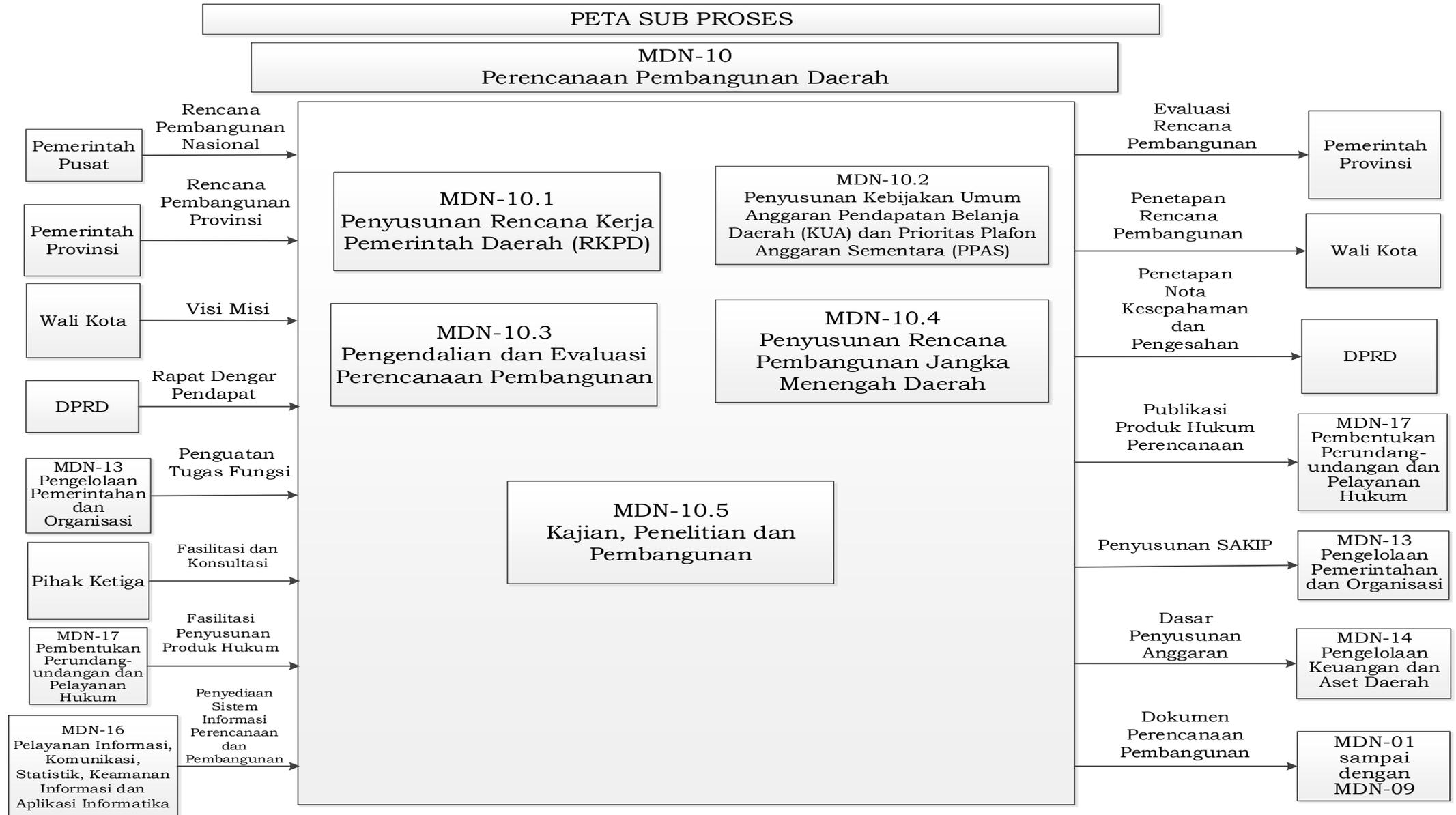












PETA SUB PROSES

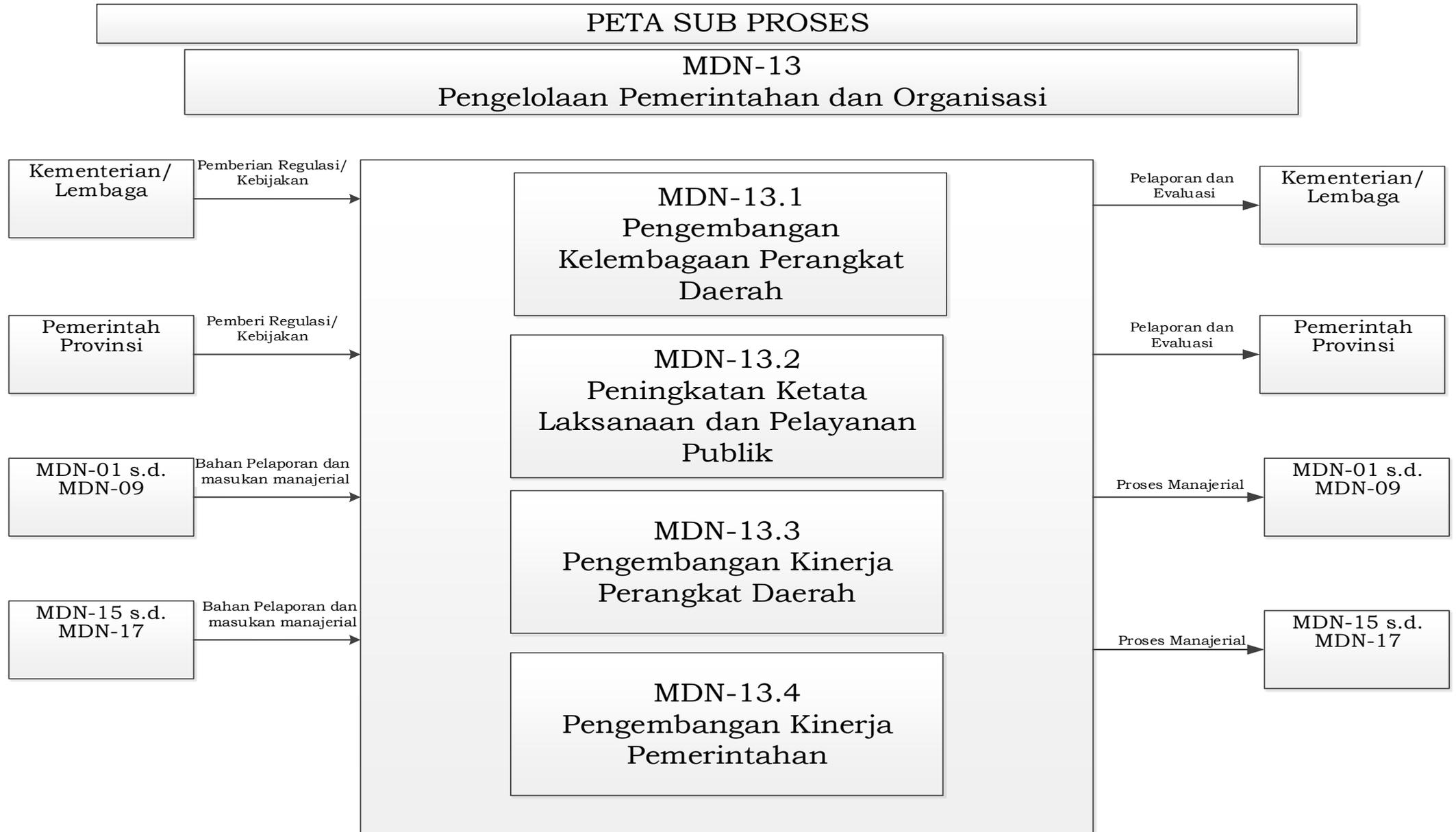
MDN-11 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

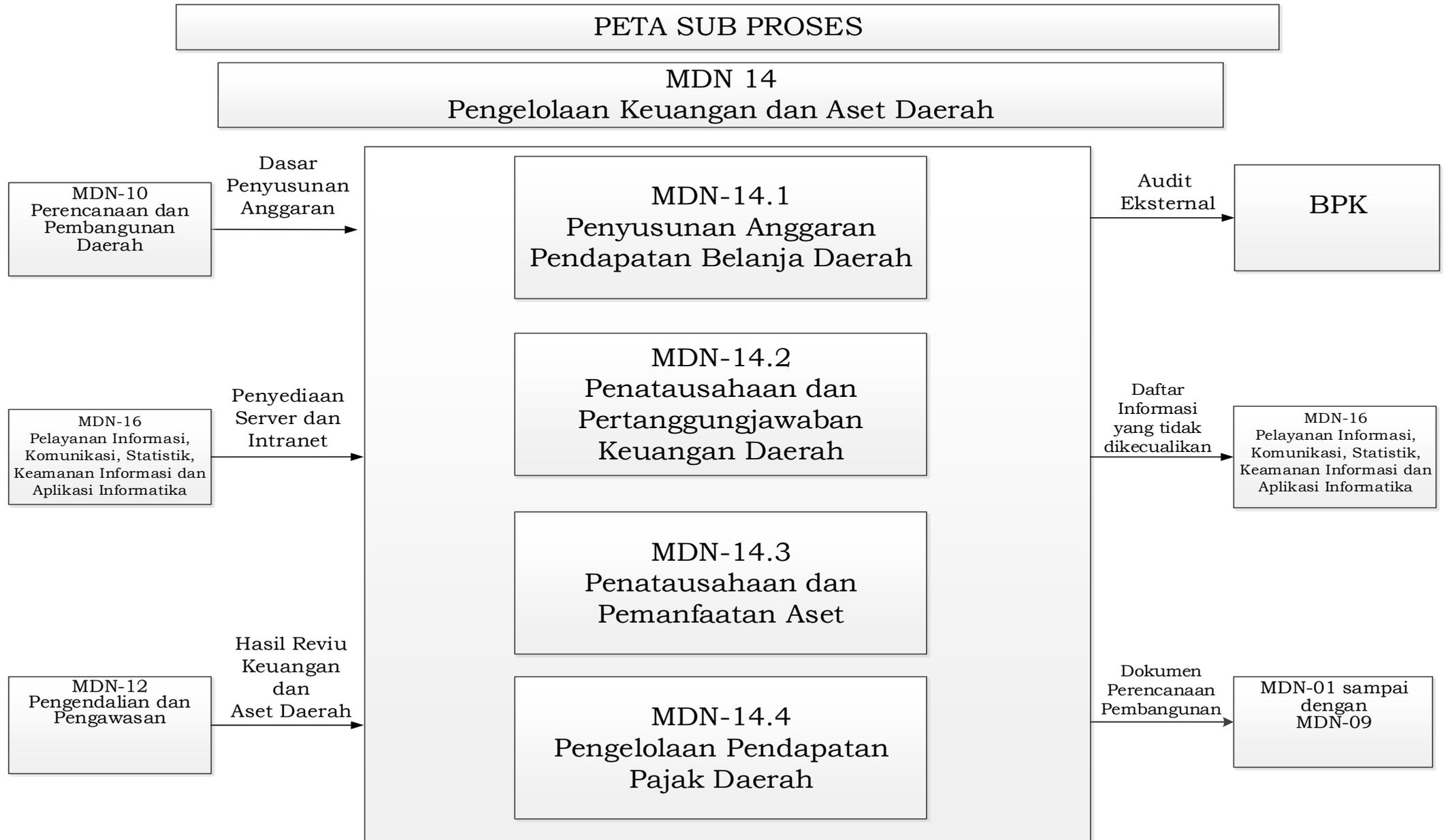


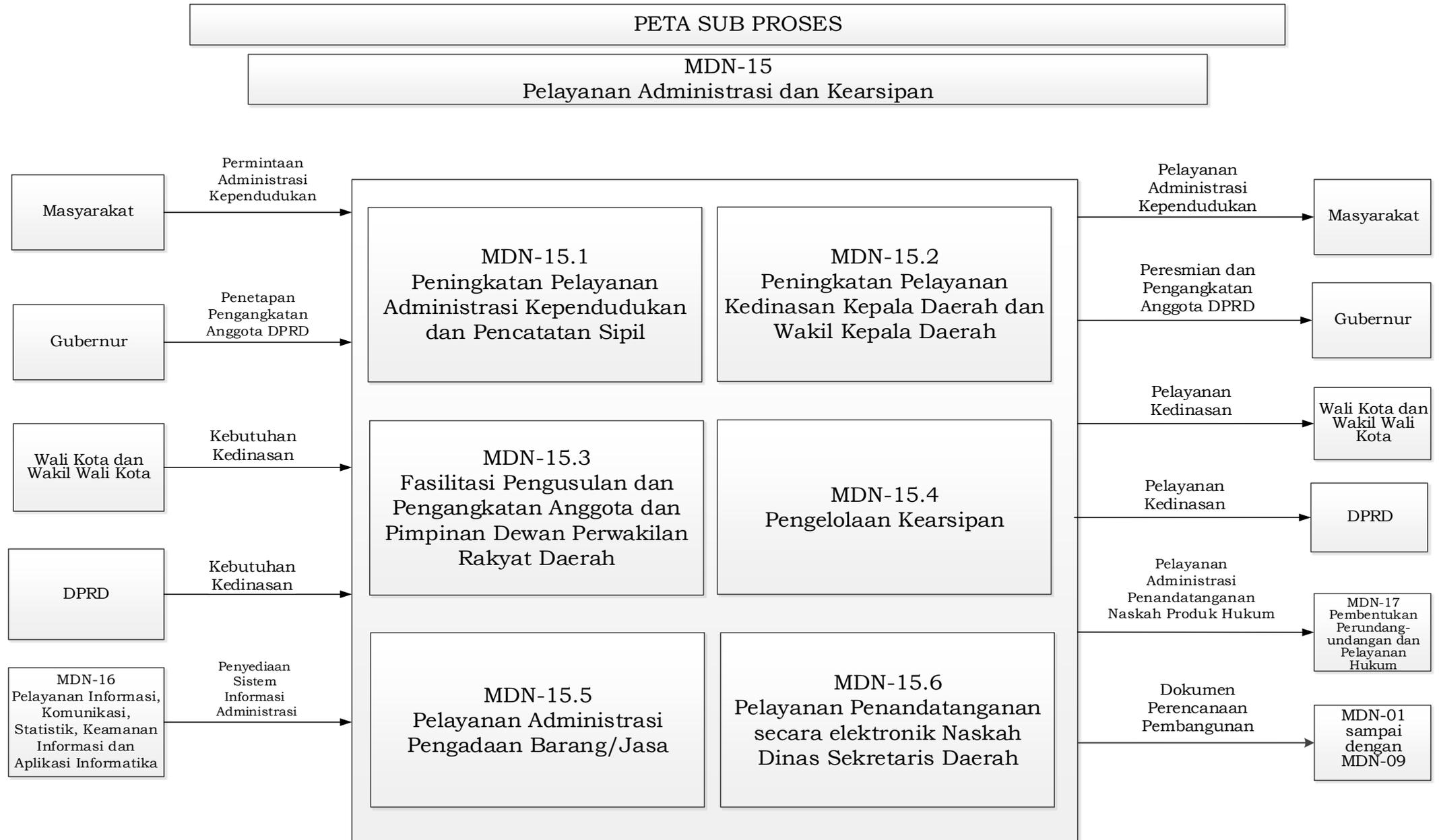
PETA SUB PROSES

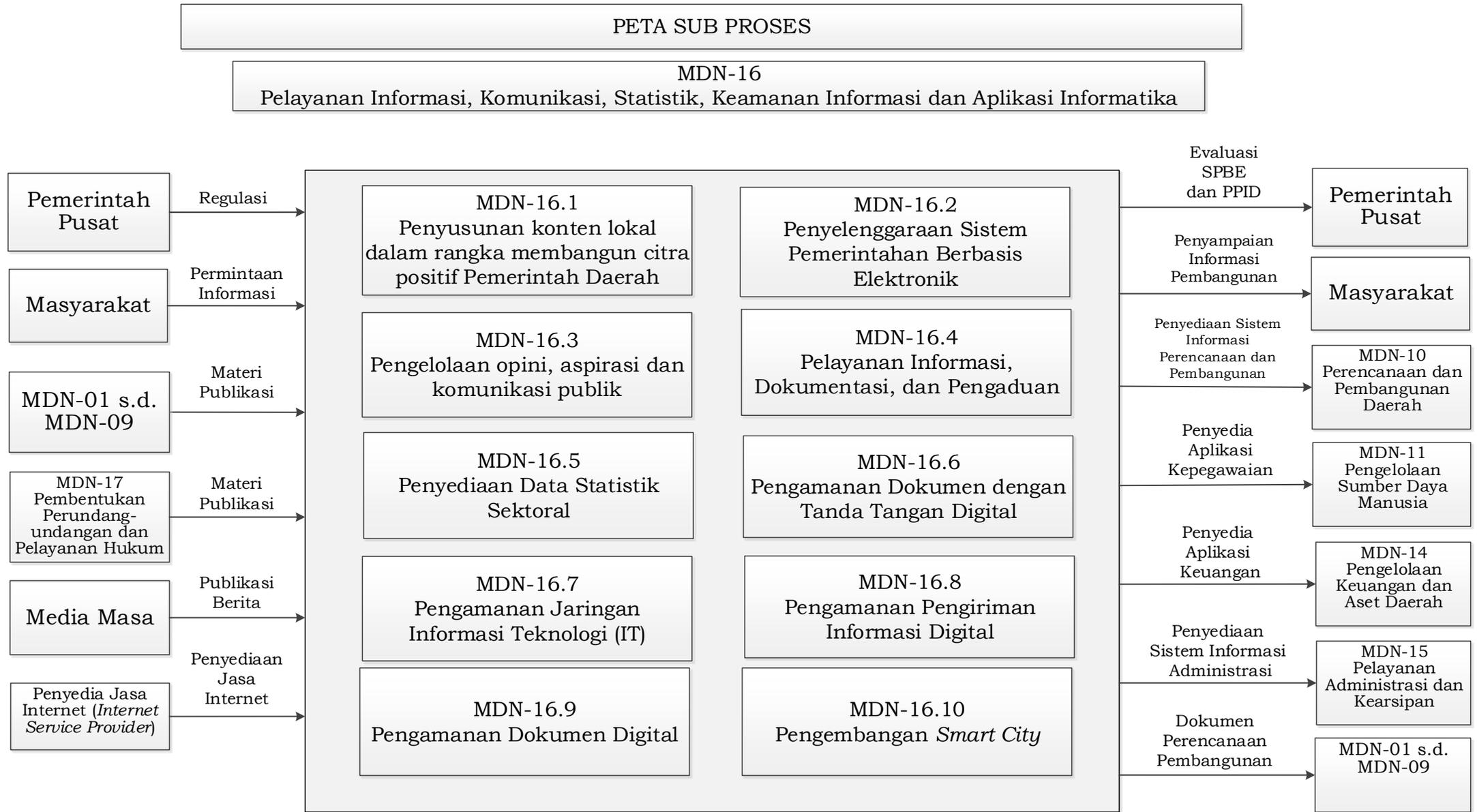
MDN-12
Pengendalian dan Pengawasan

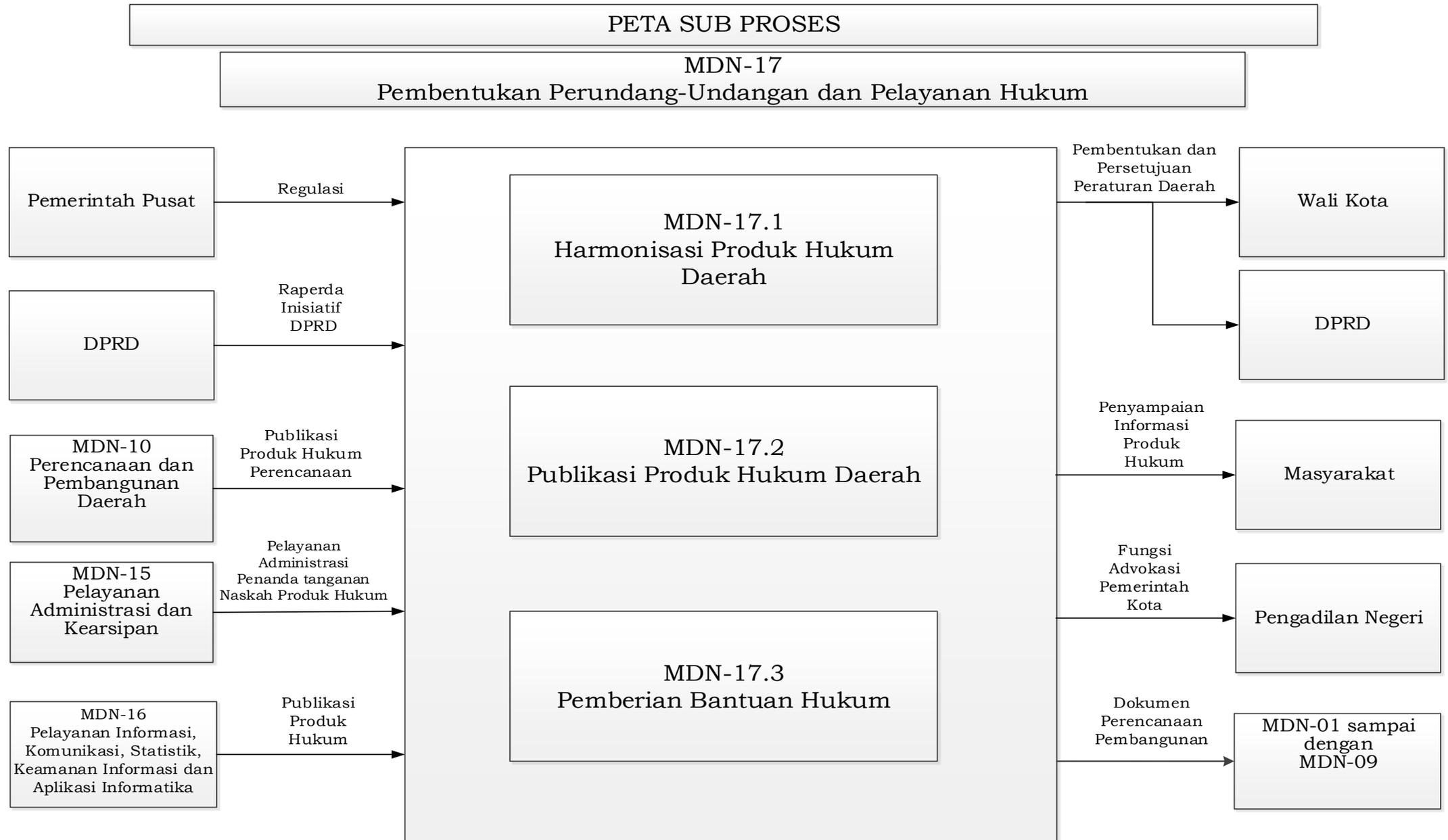




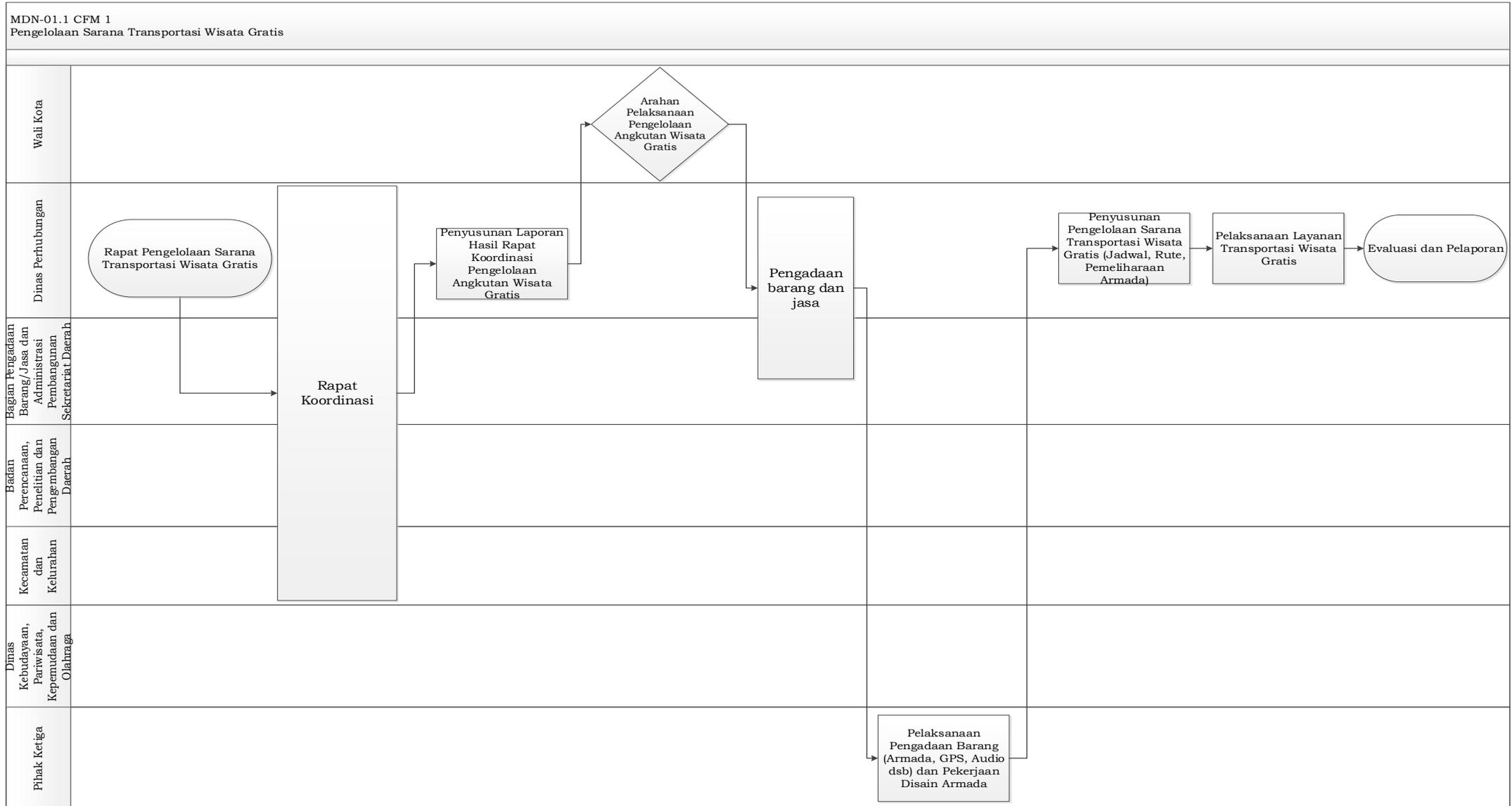


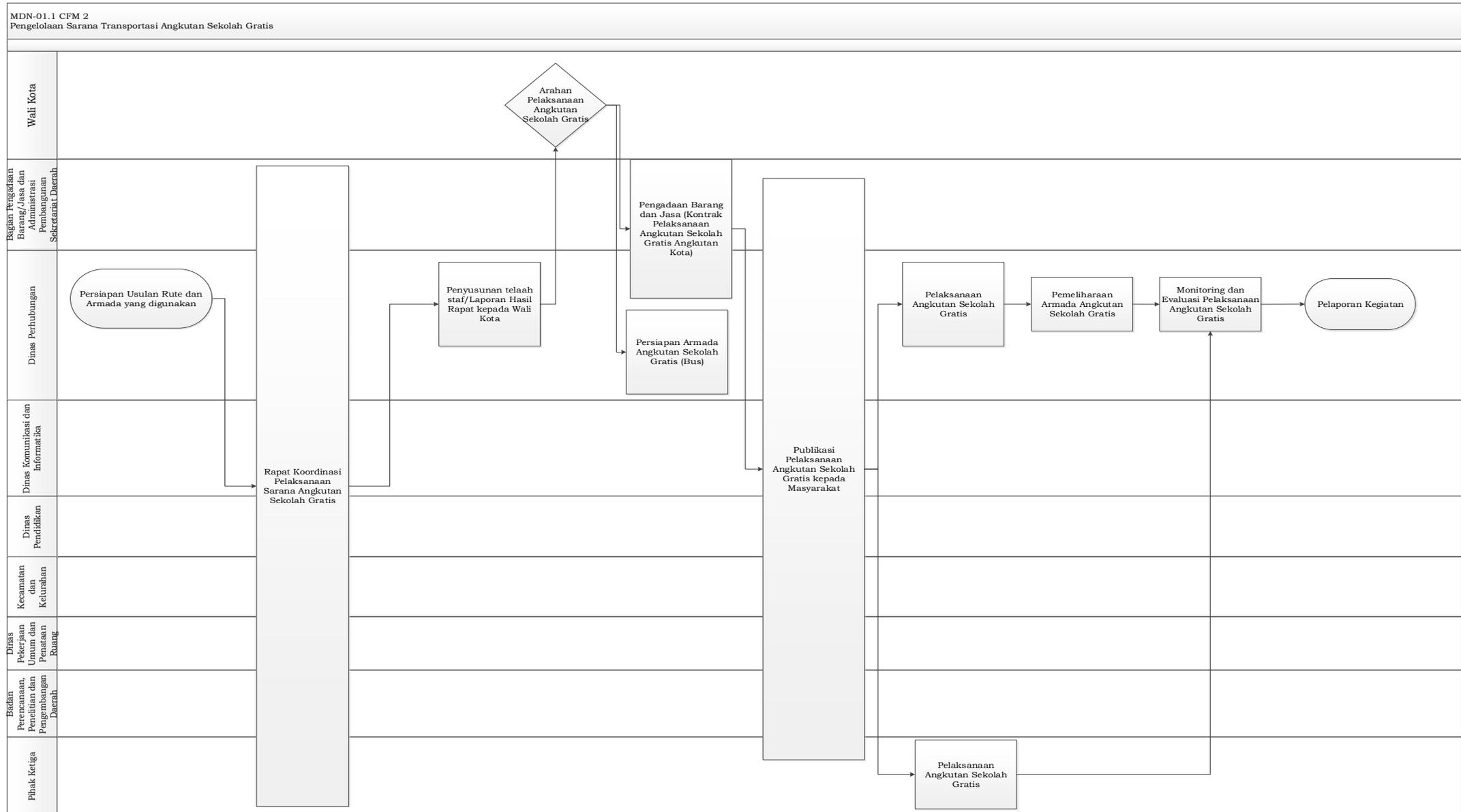


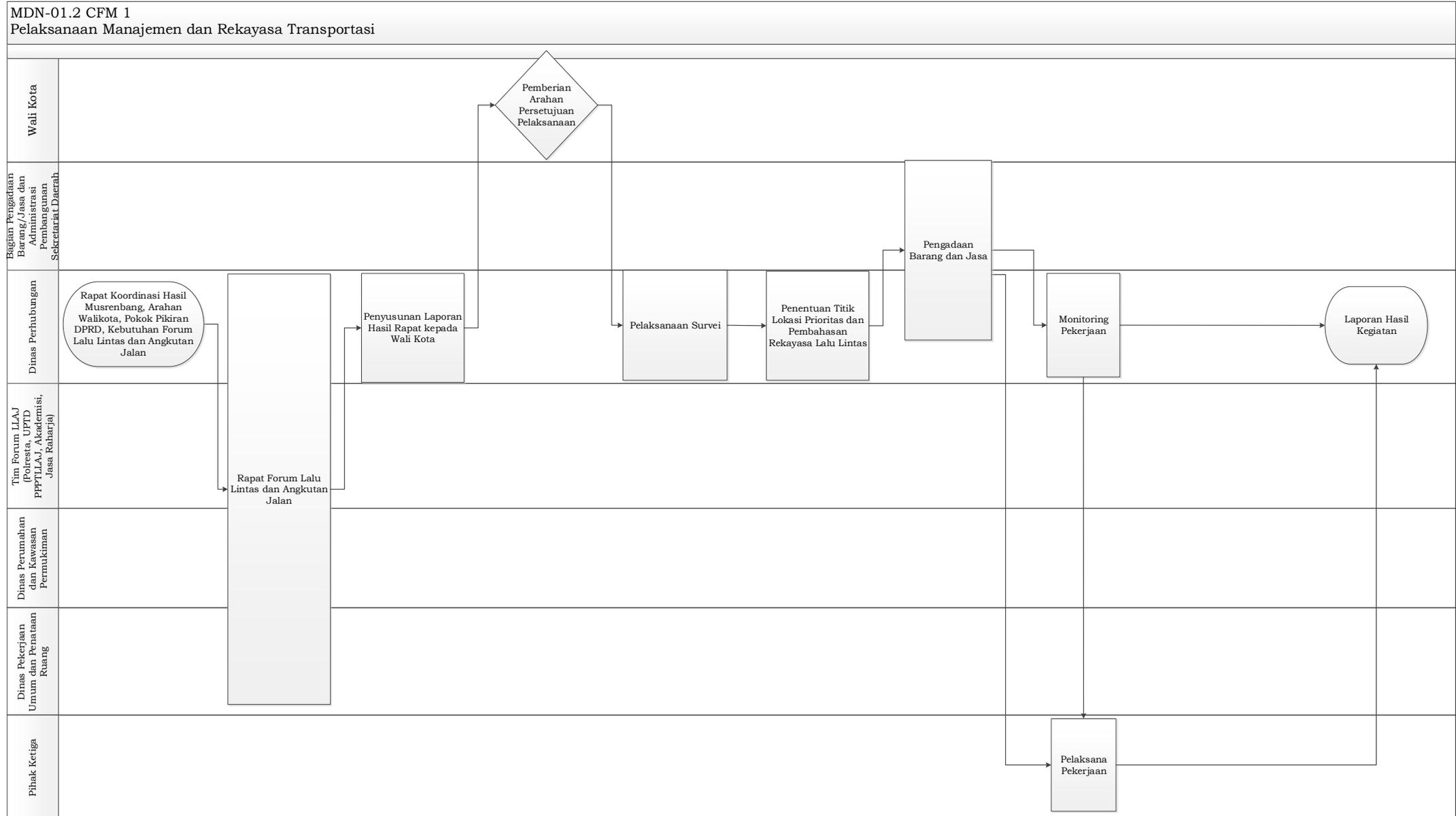




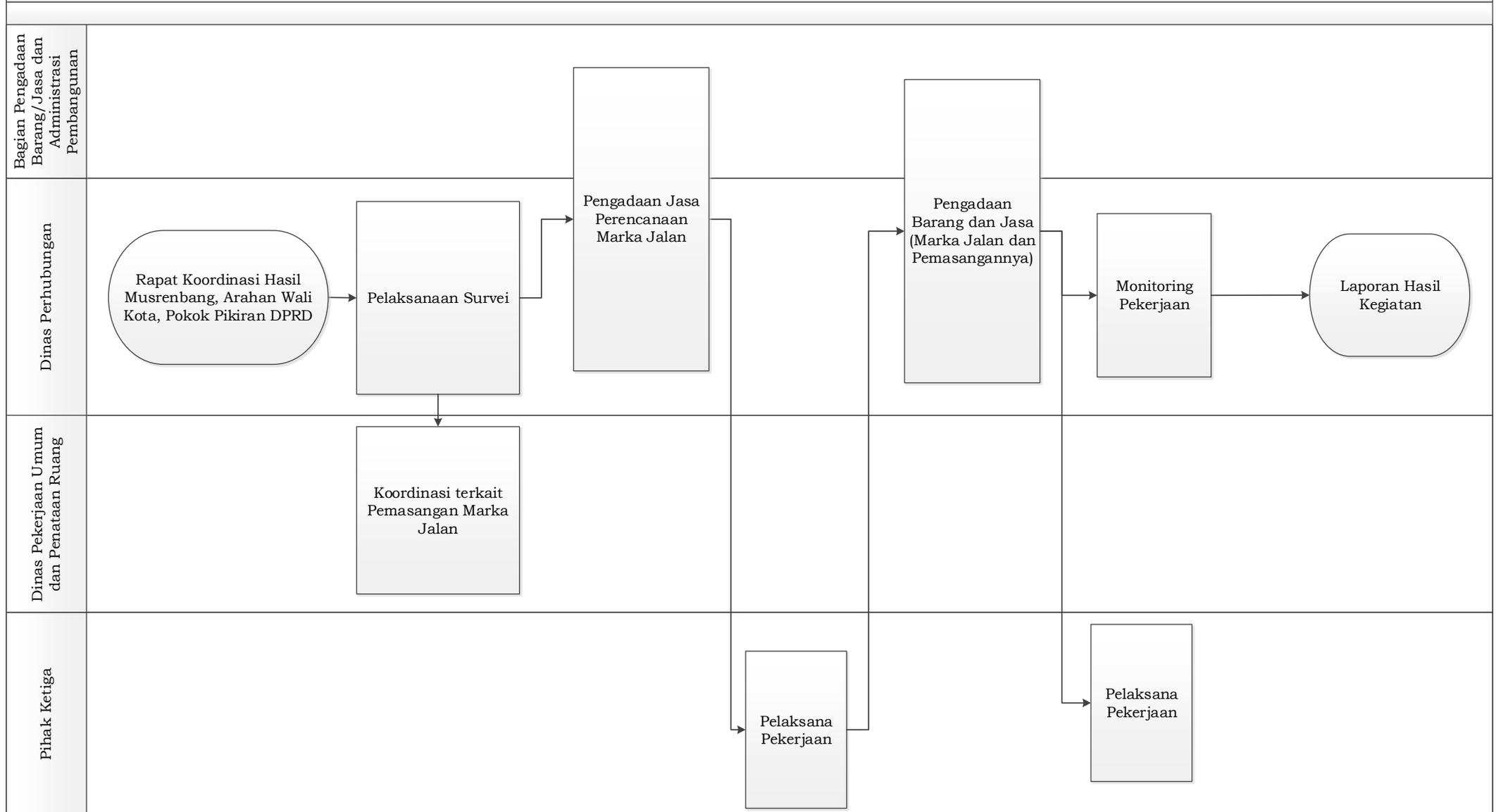
BAGAN PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 PEMERINTAH KOTA MADIUN

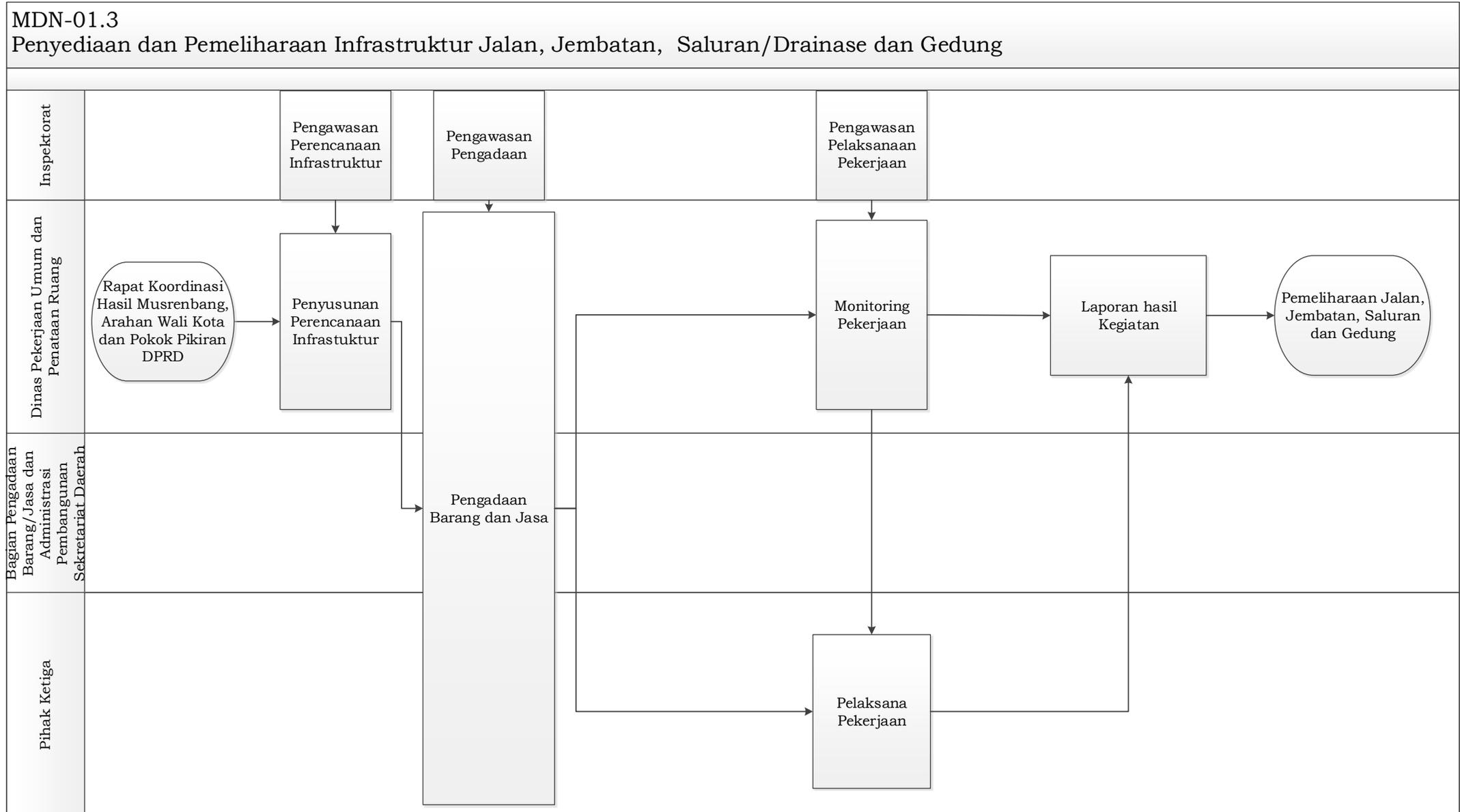


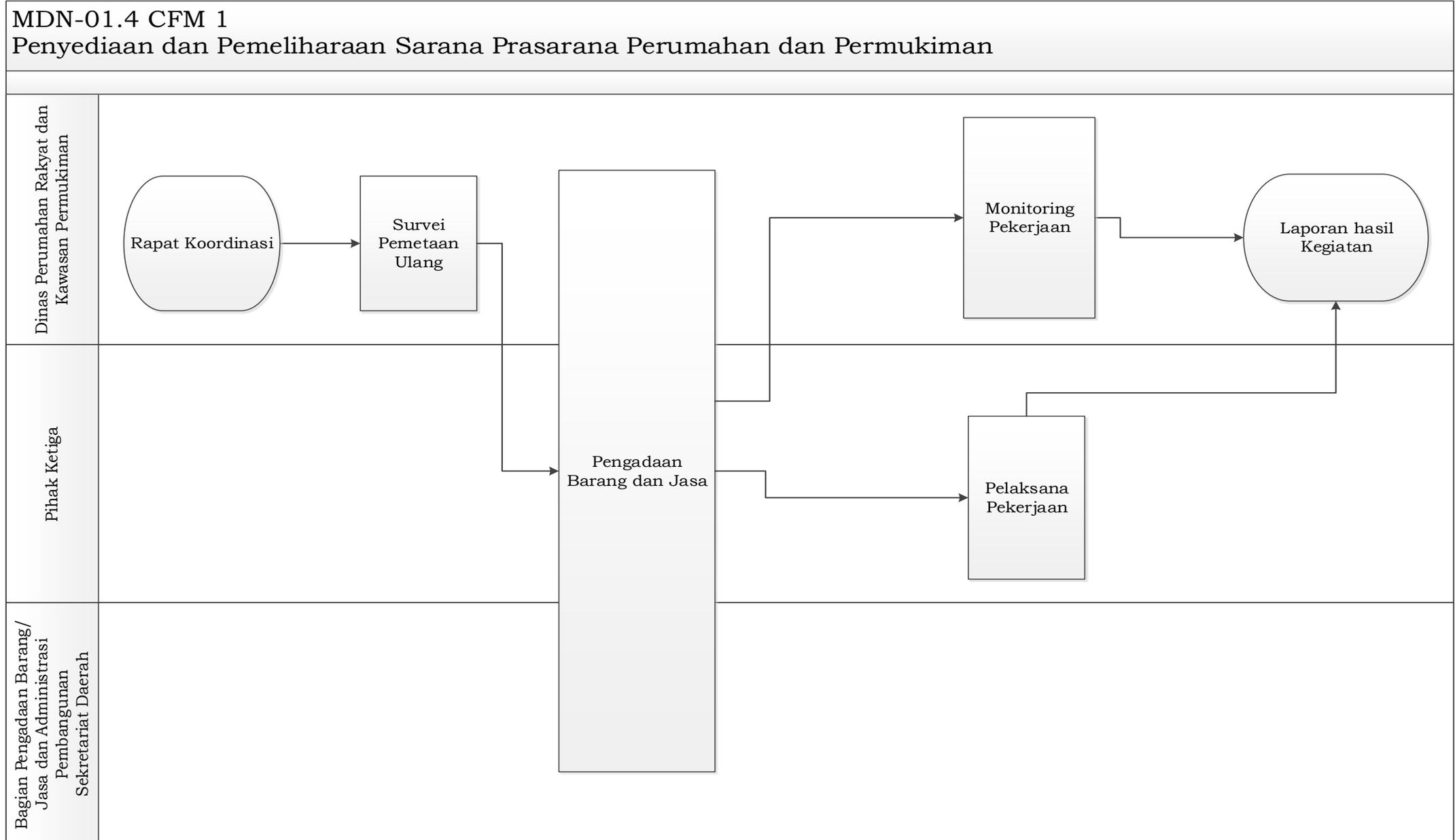




MDN-01.2 CFM 2
Penyediaan Marka Jalan

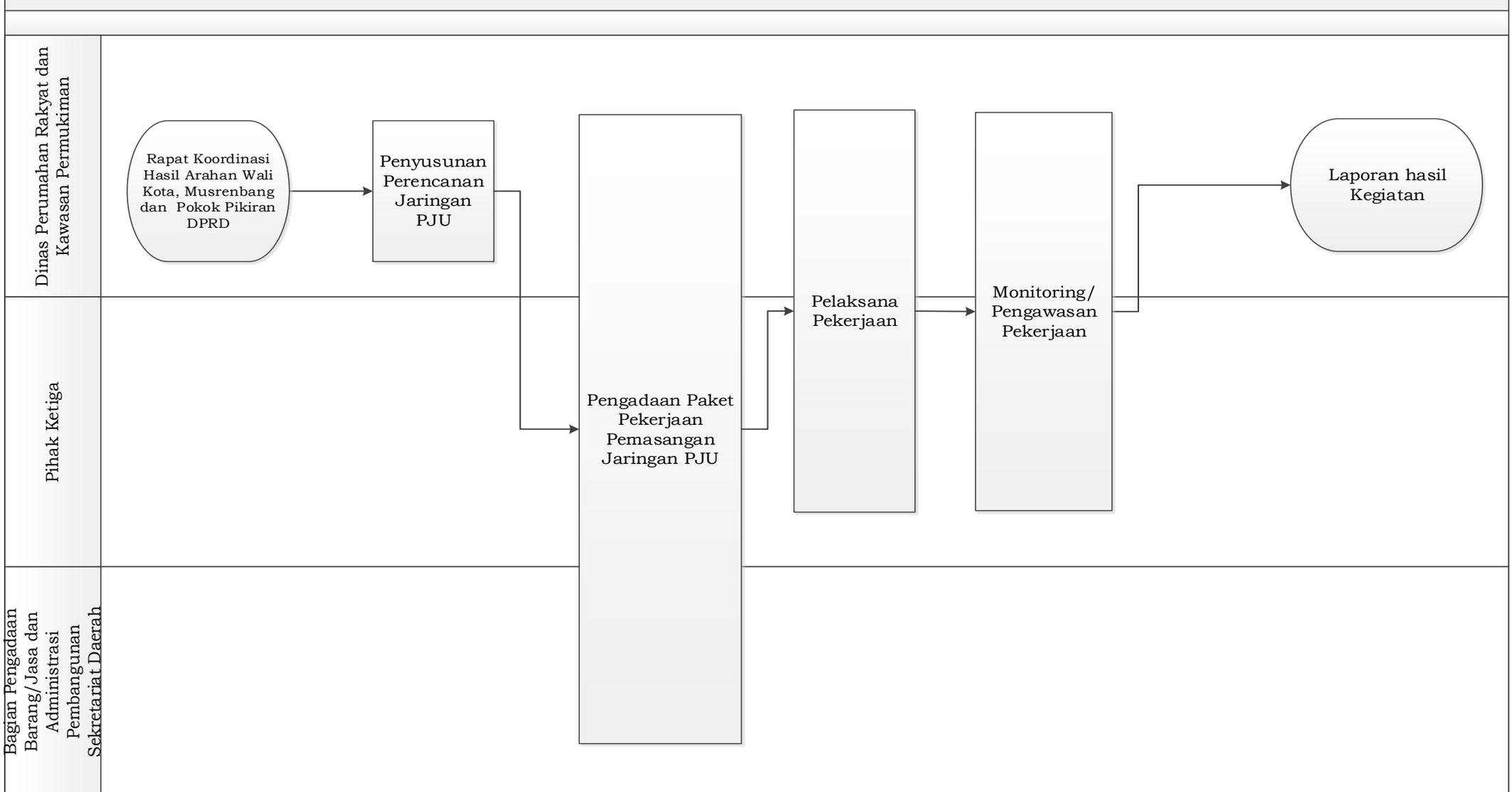


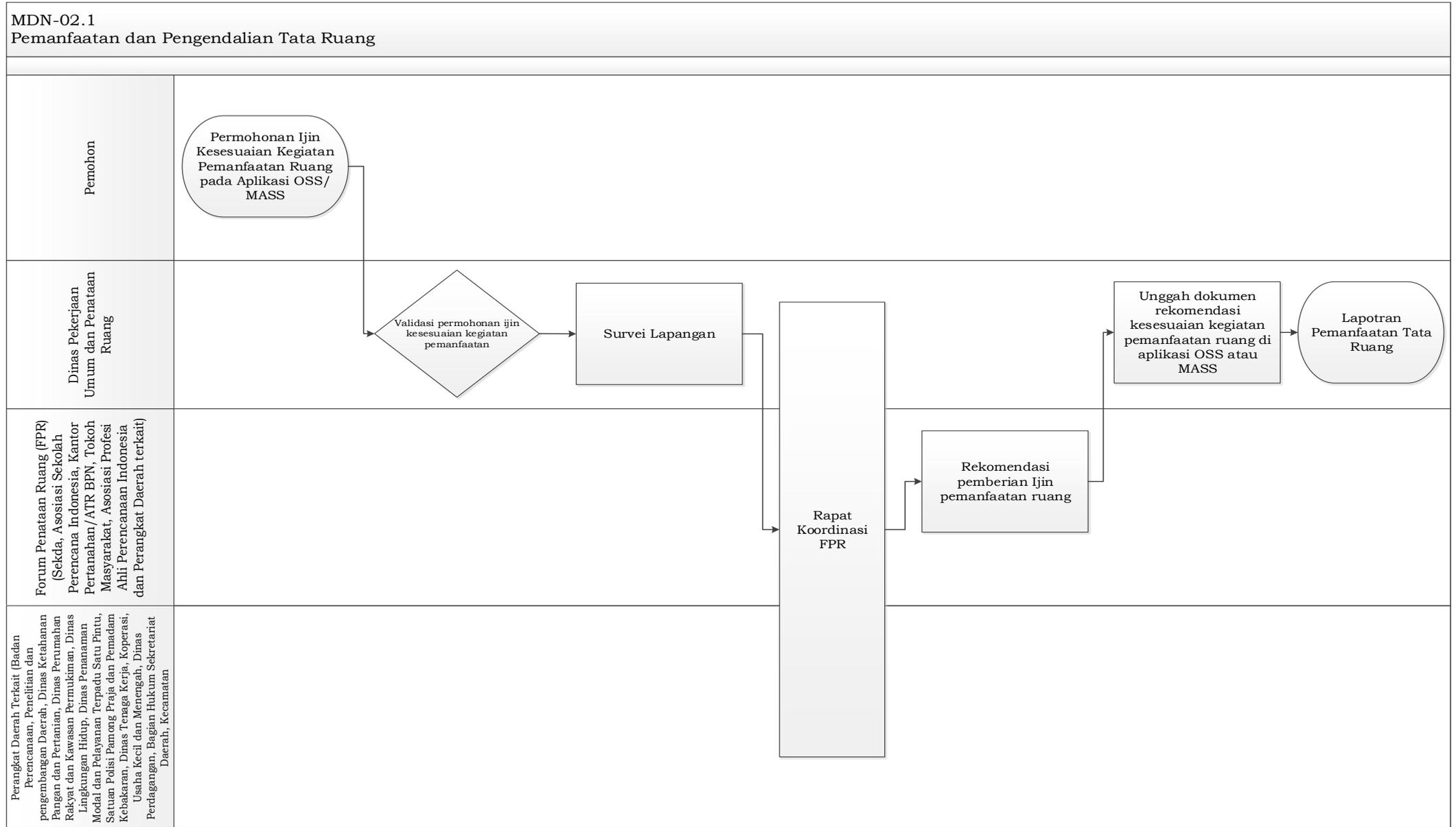


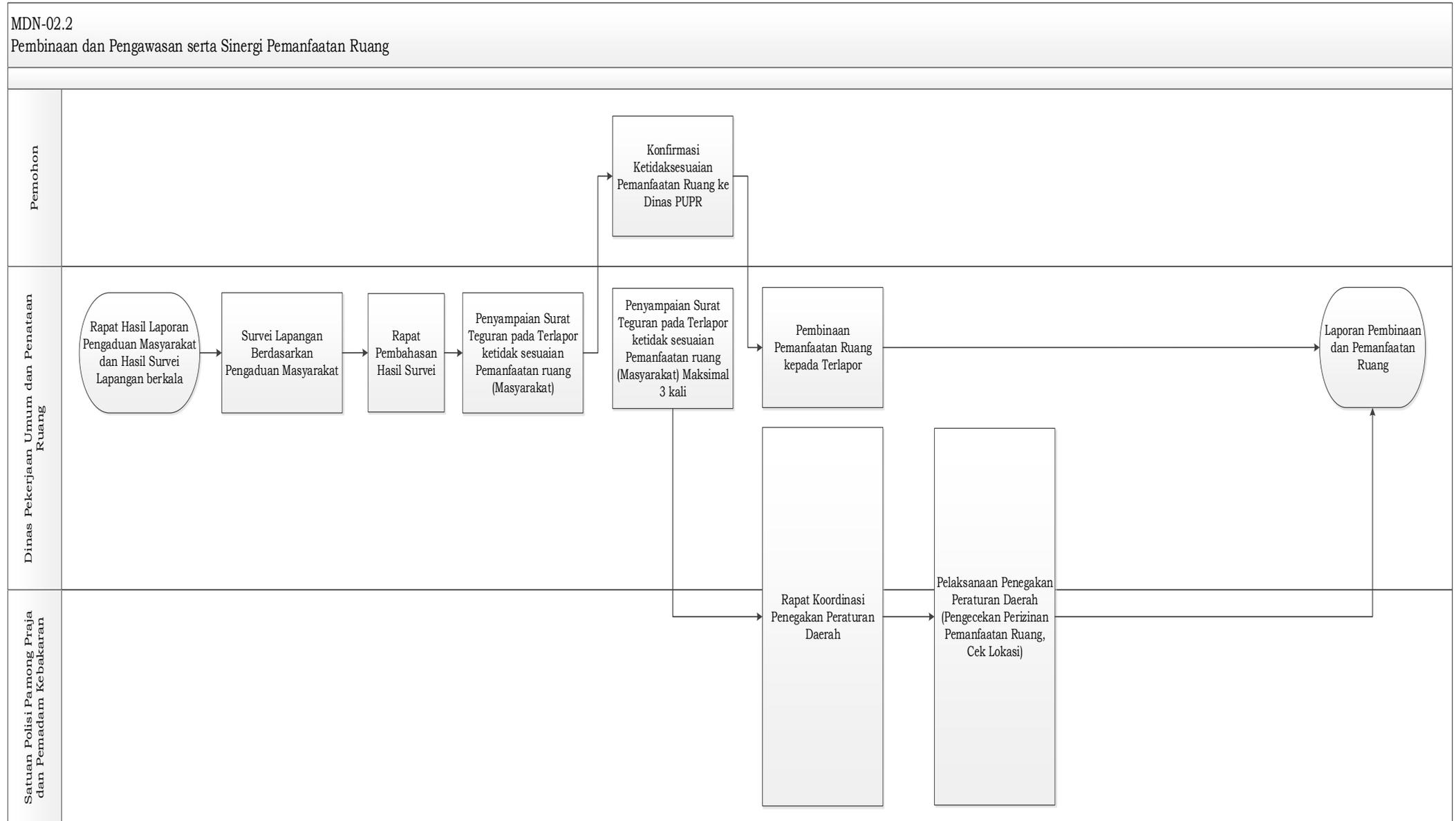


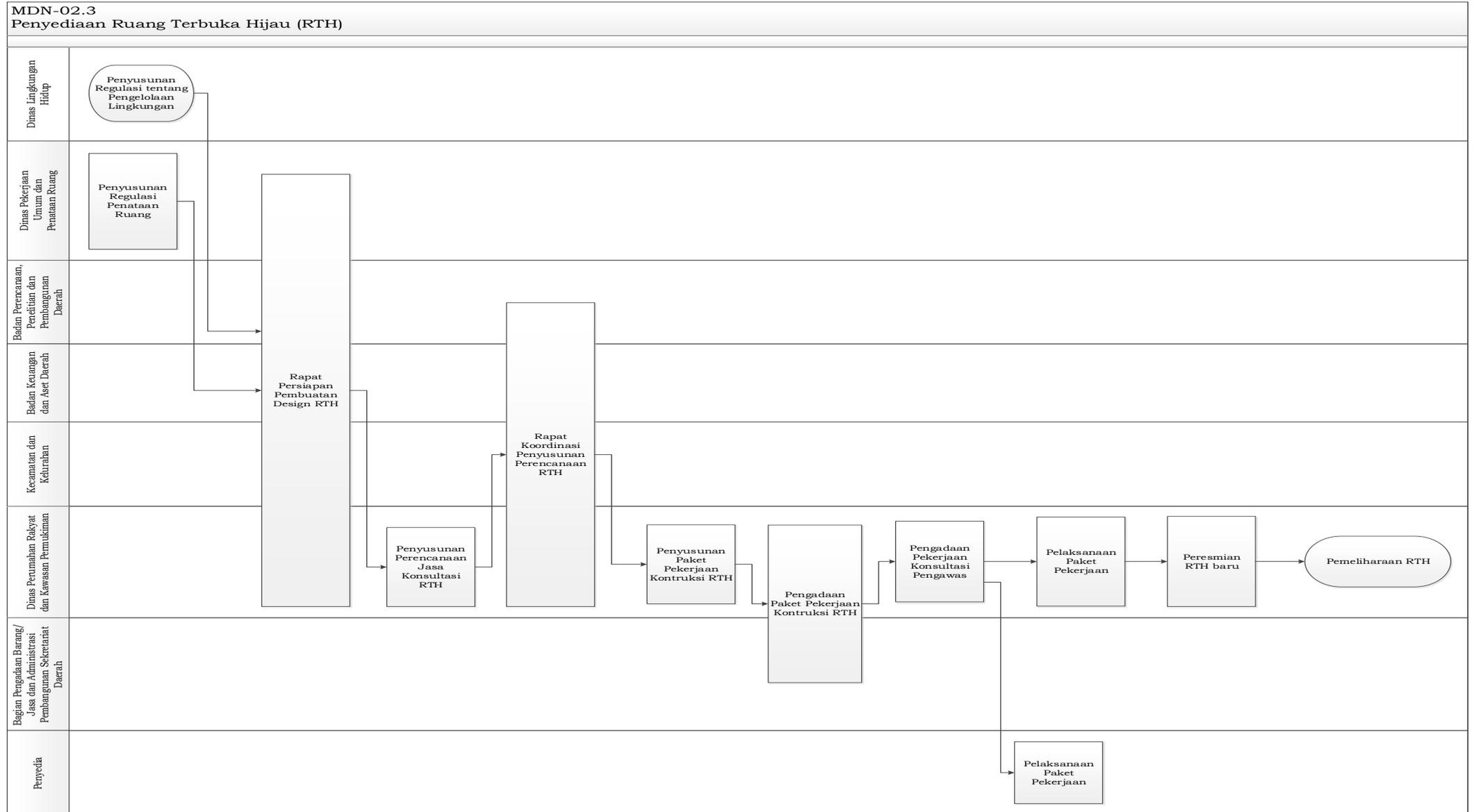
MDN-01.4 CFM 2

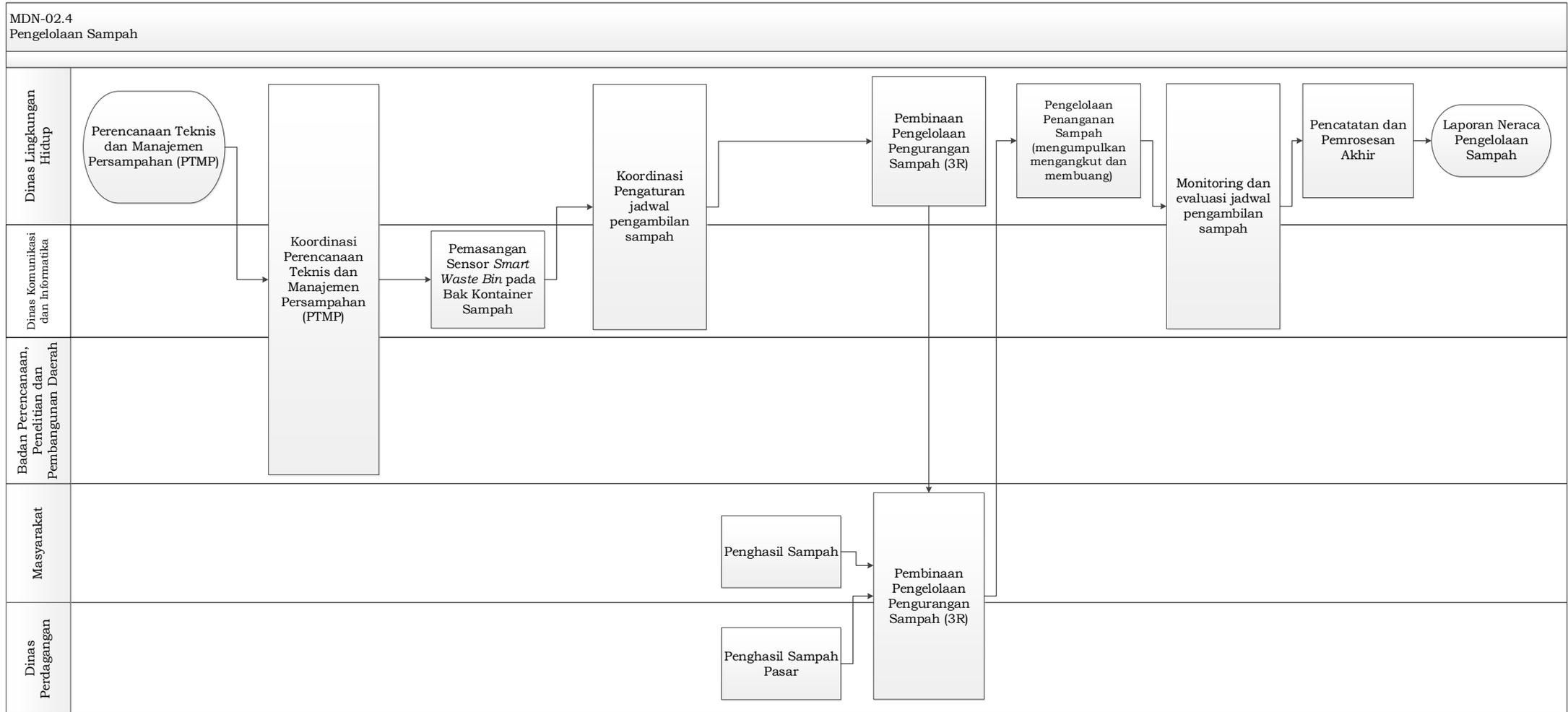
Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman Penerangan Jalan Umum (PJU)

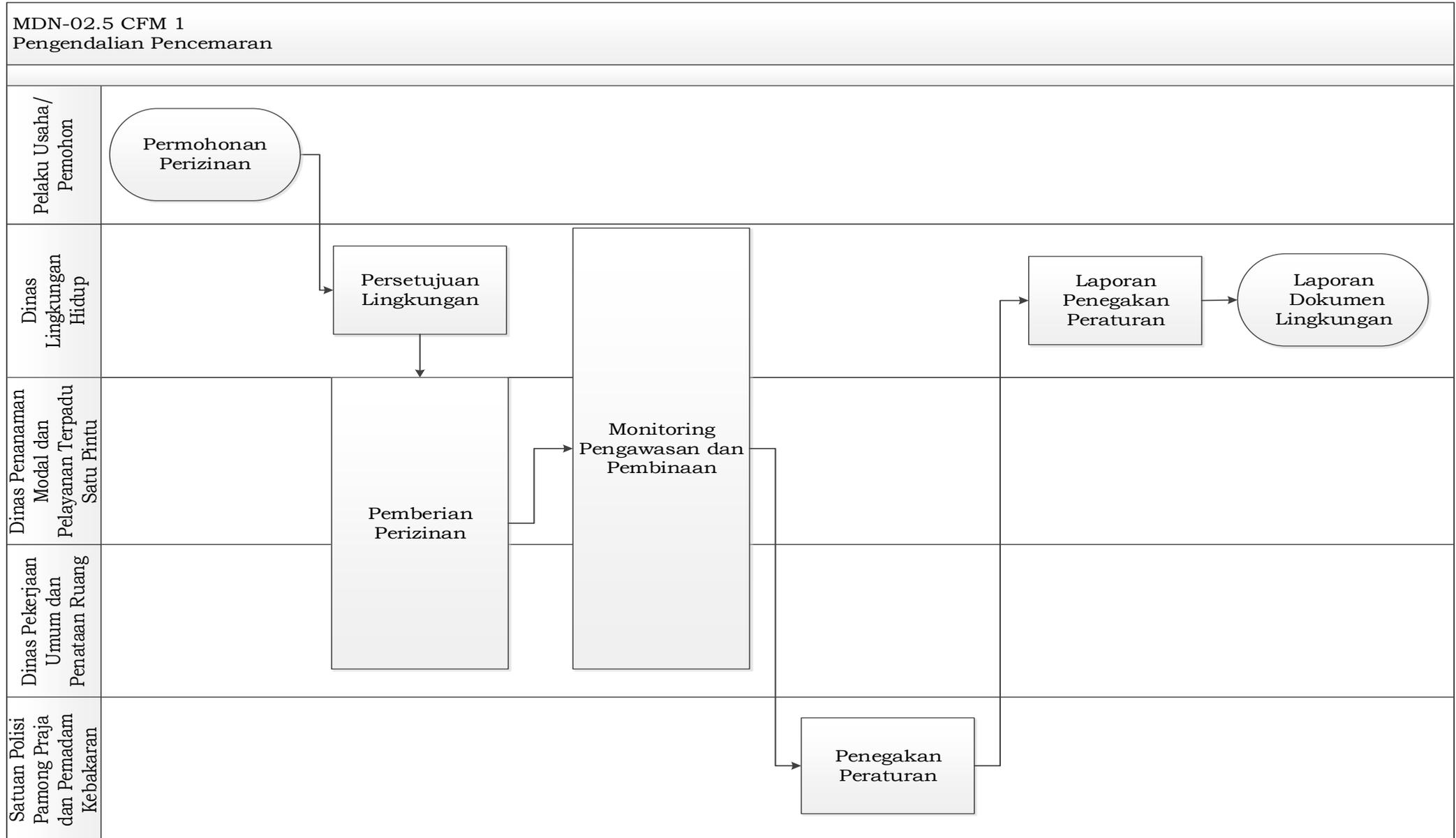


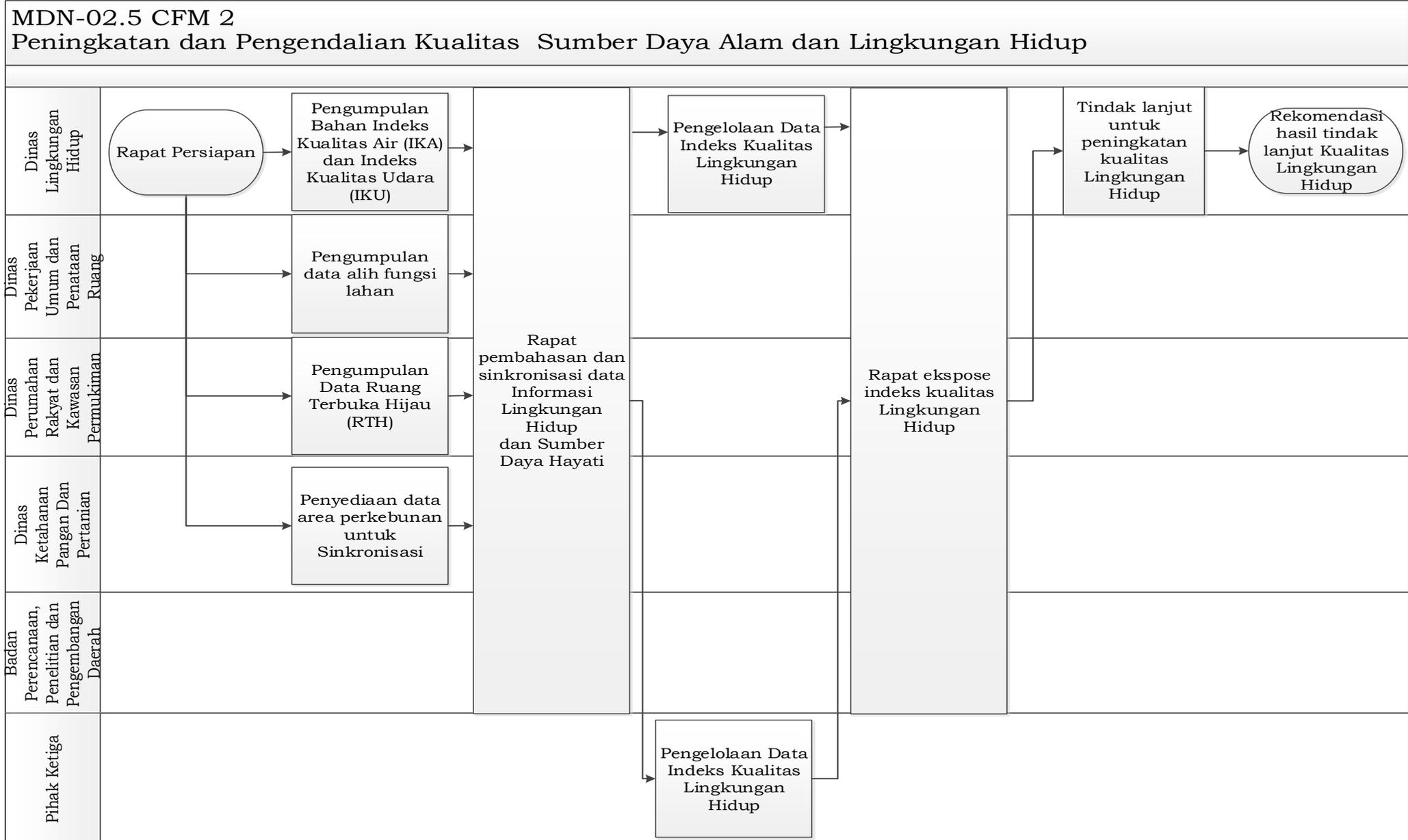


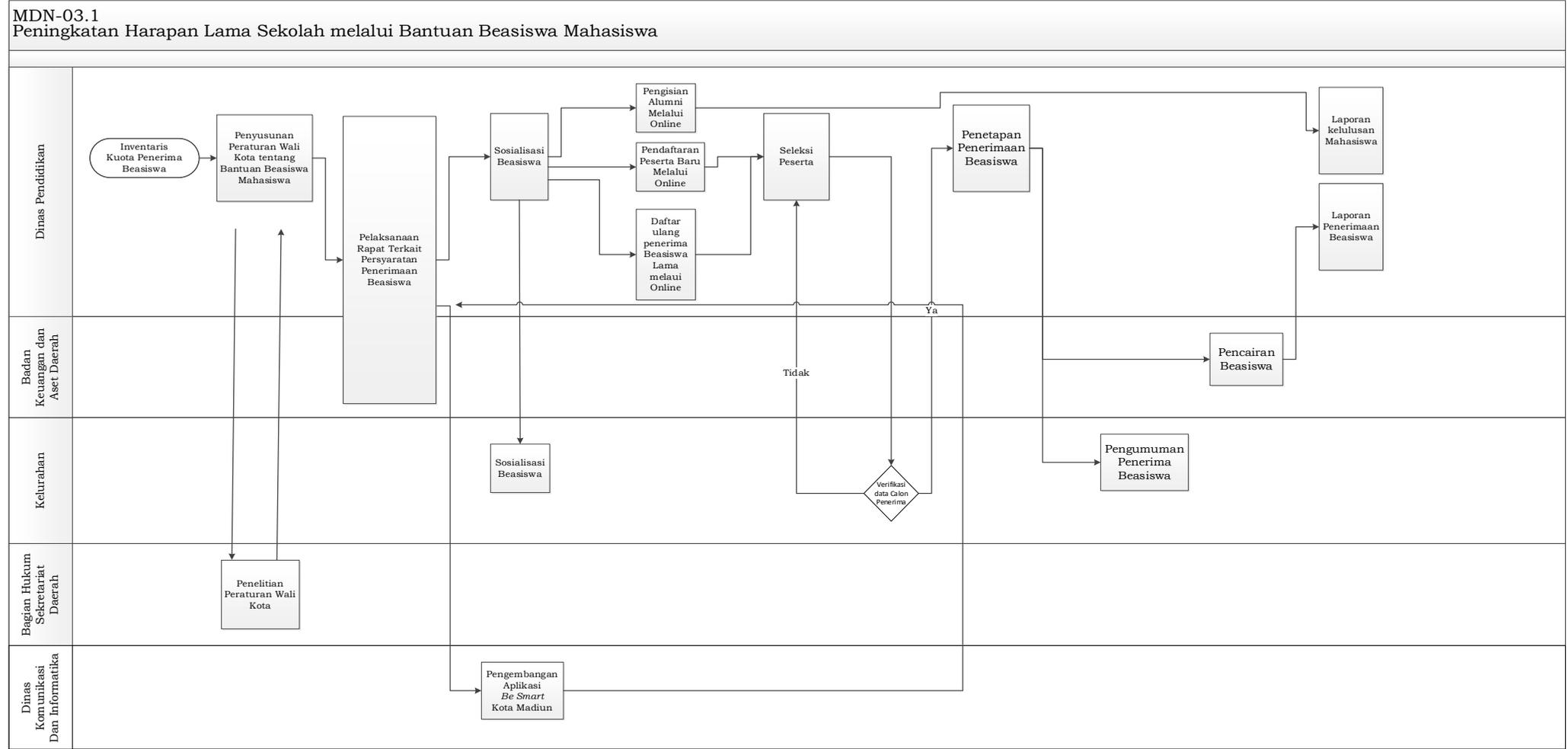


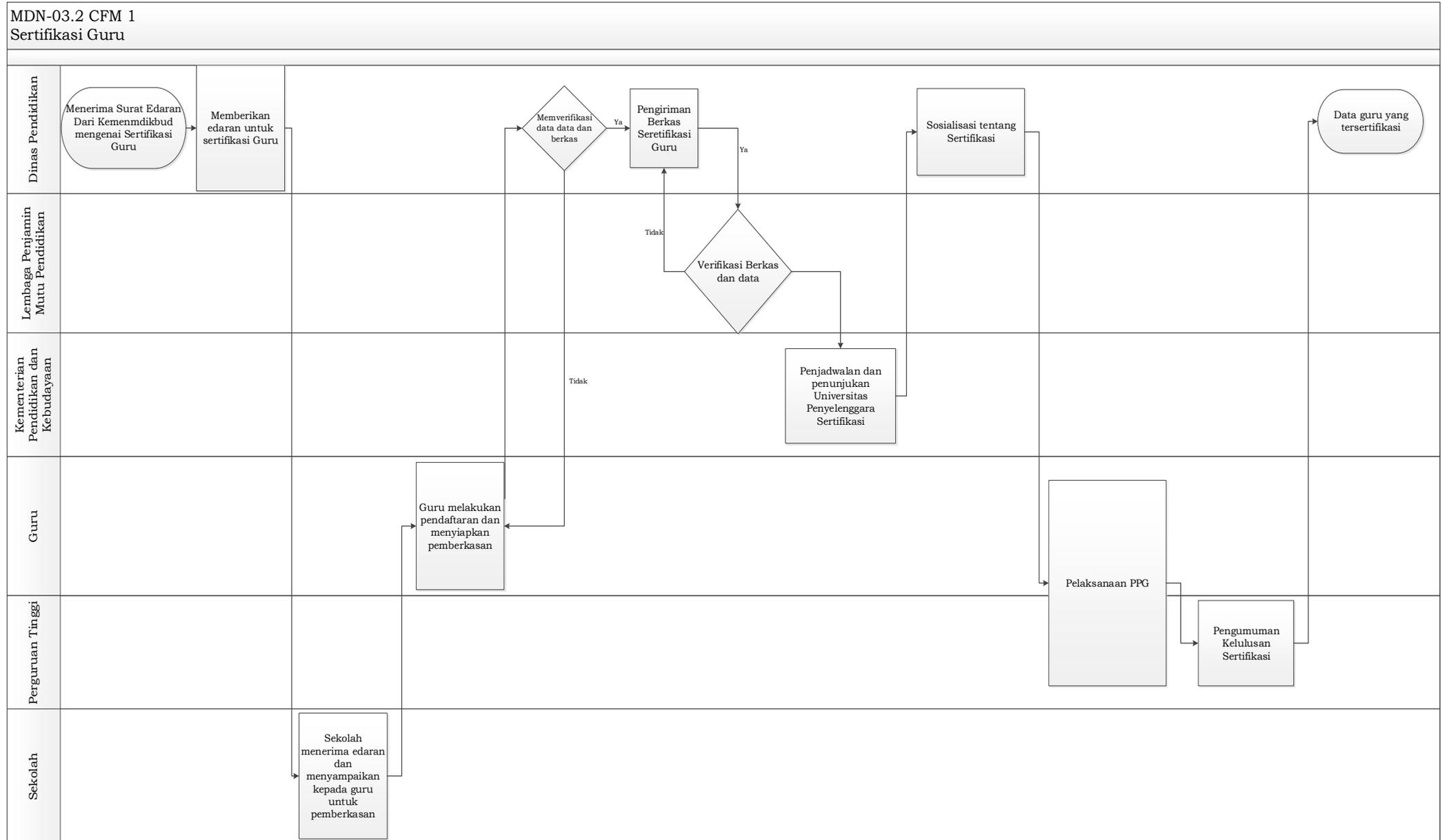


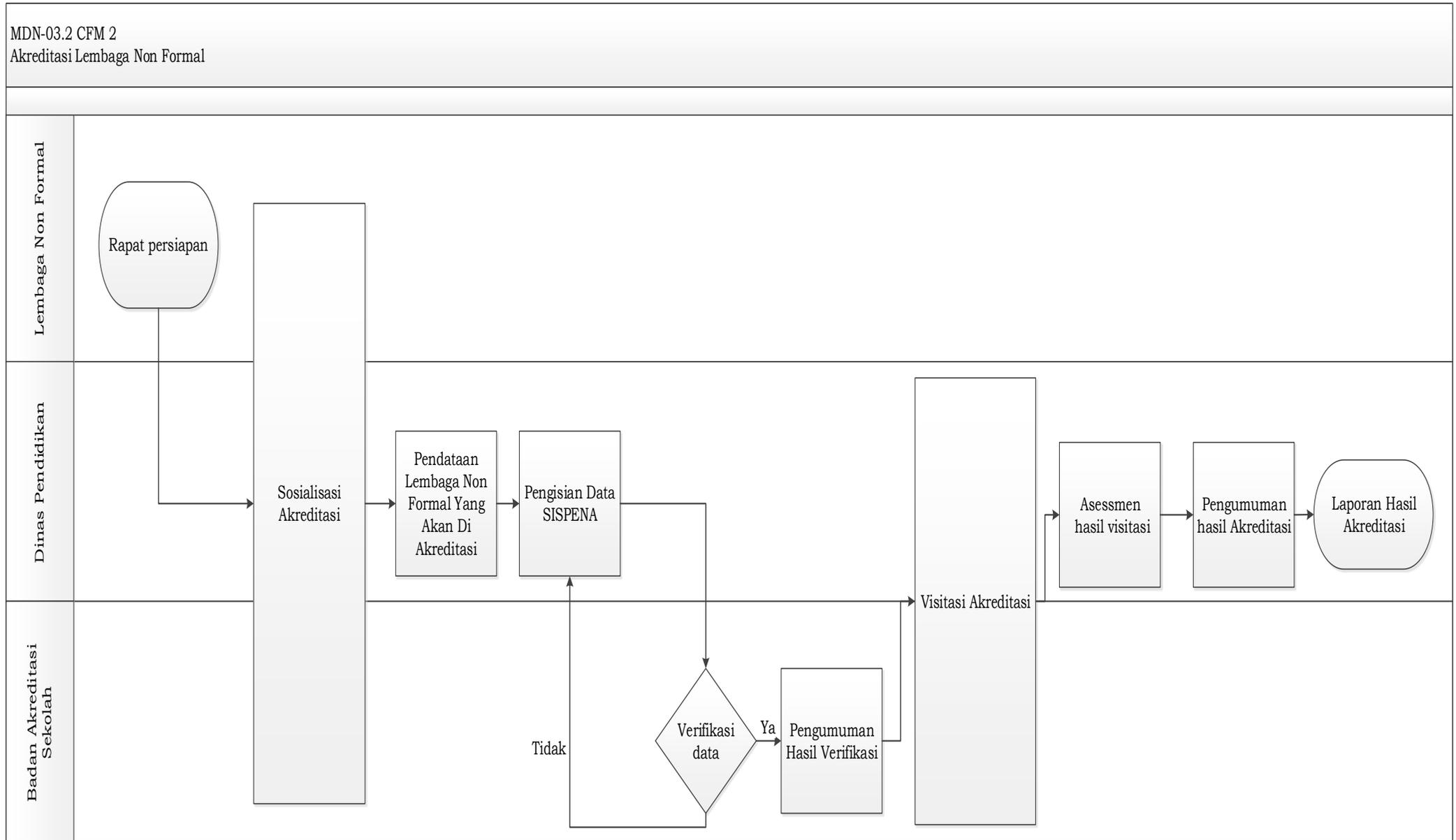


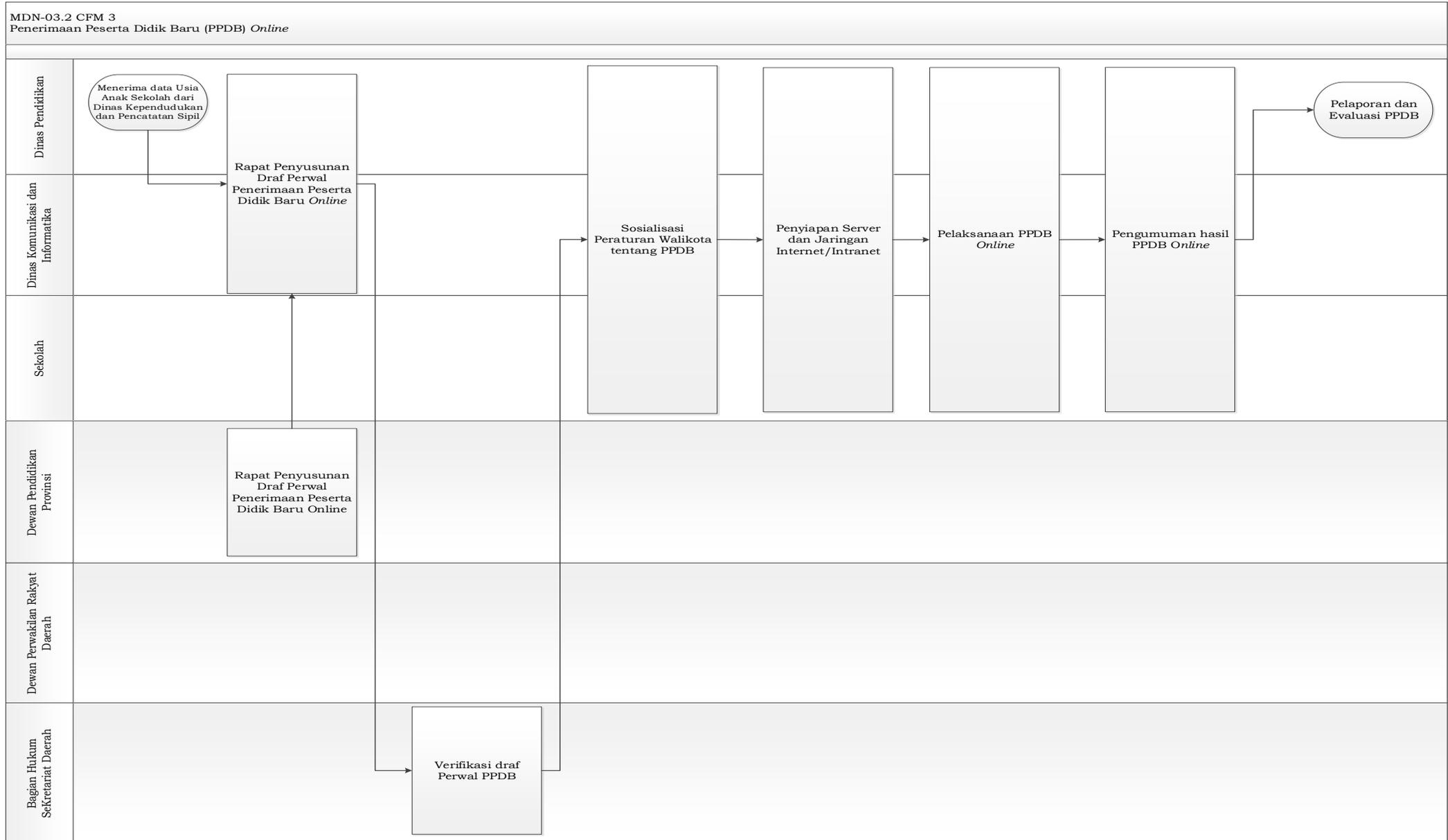


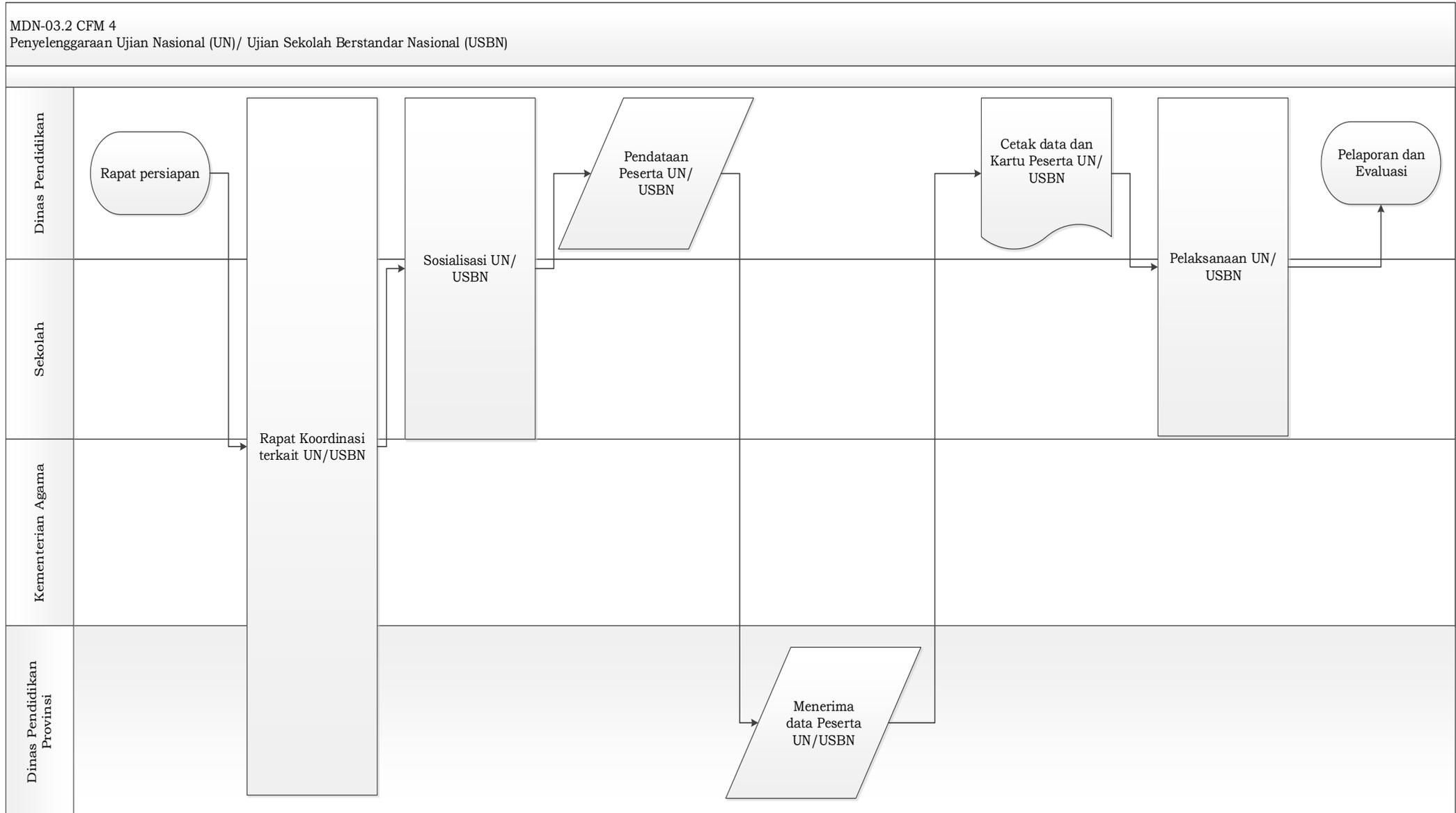


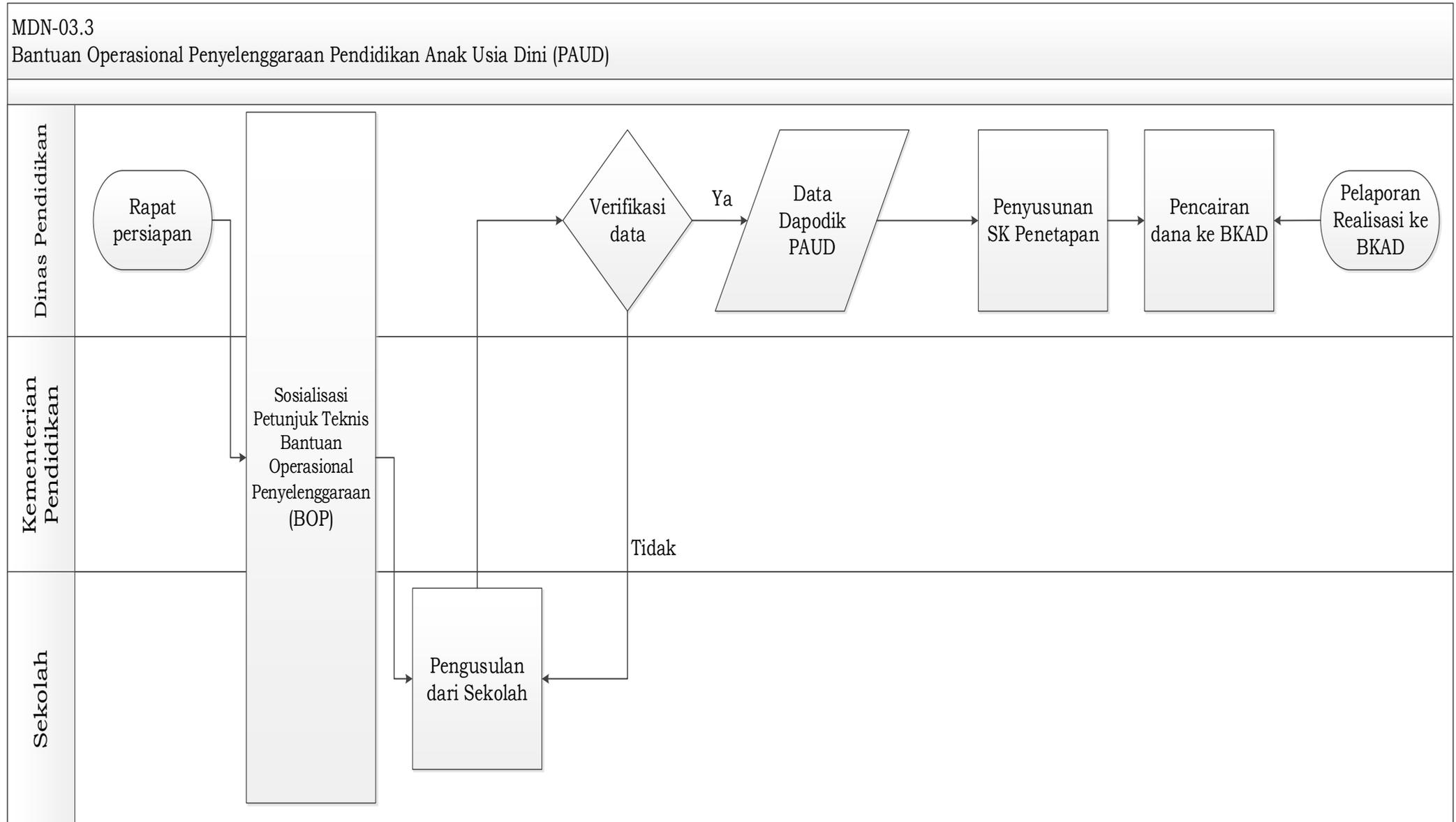


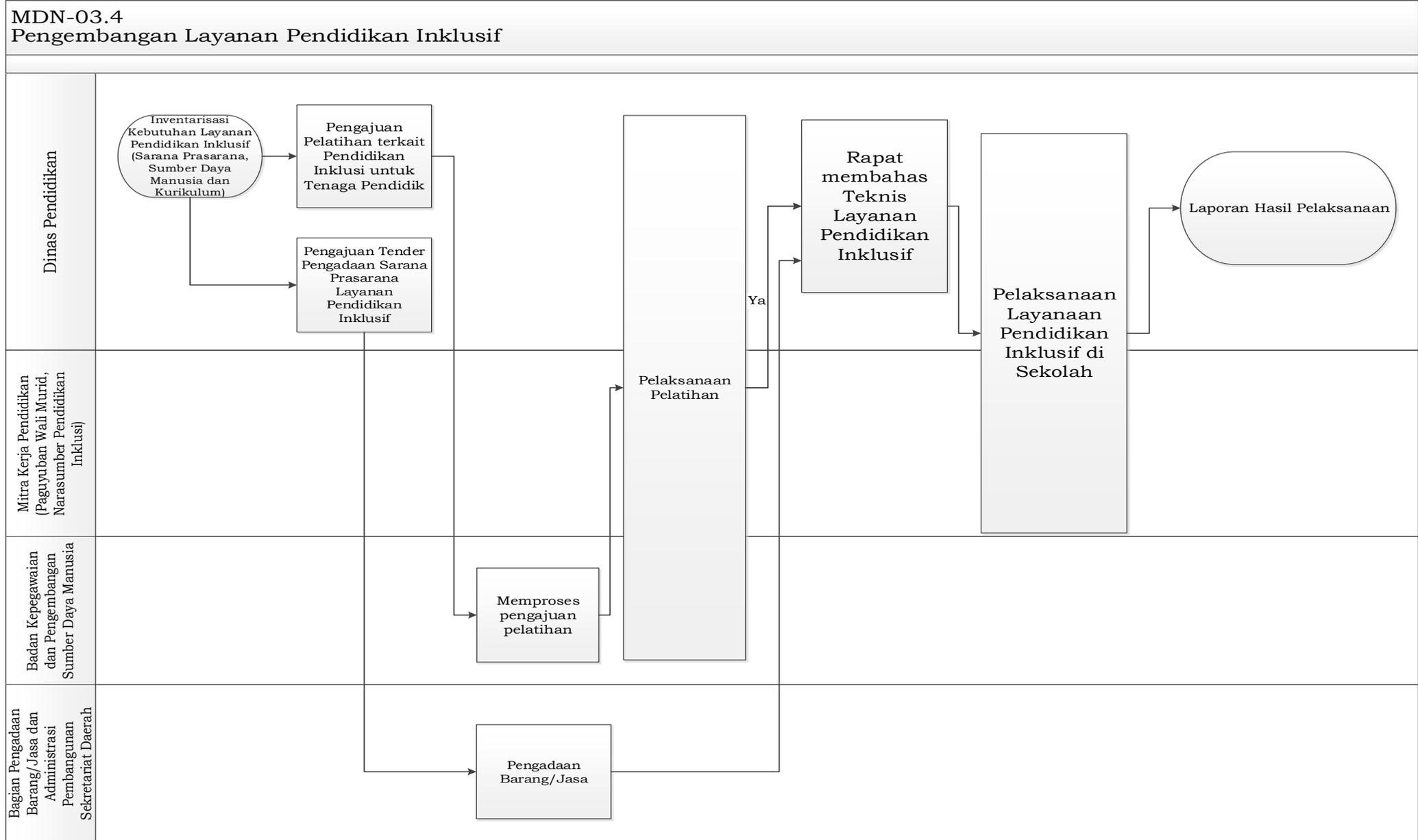


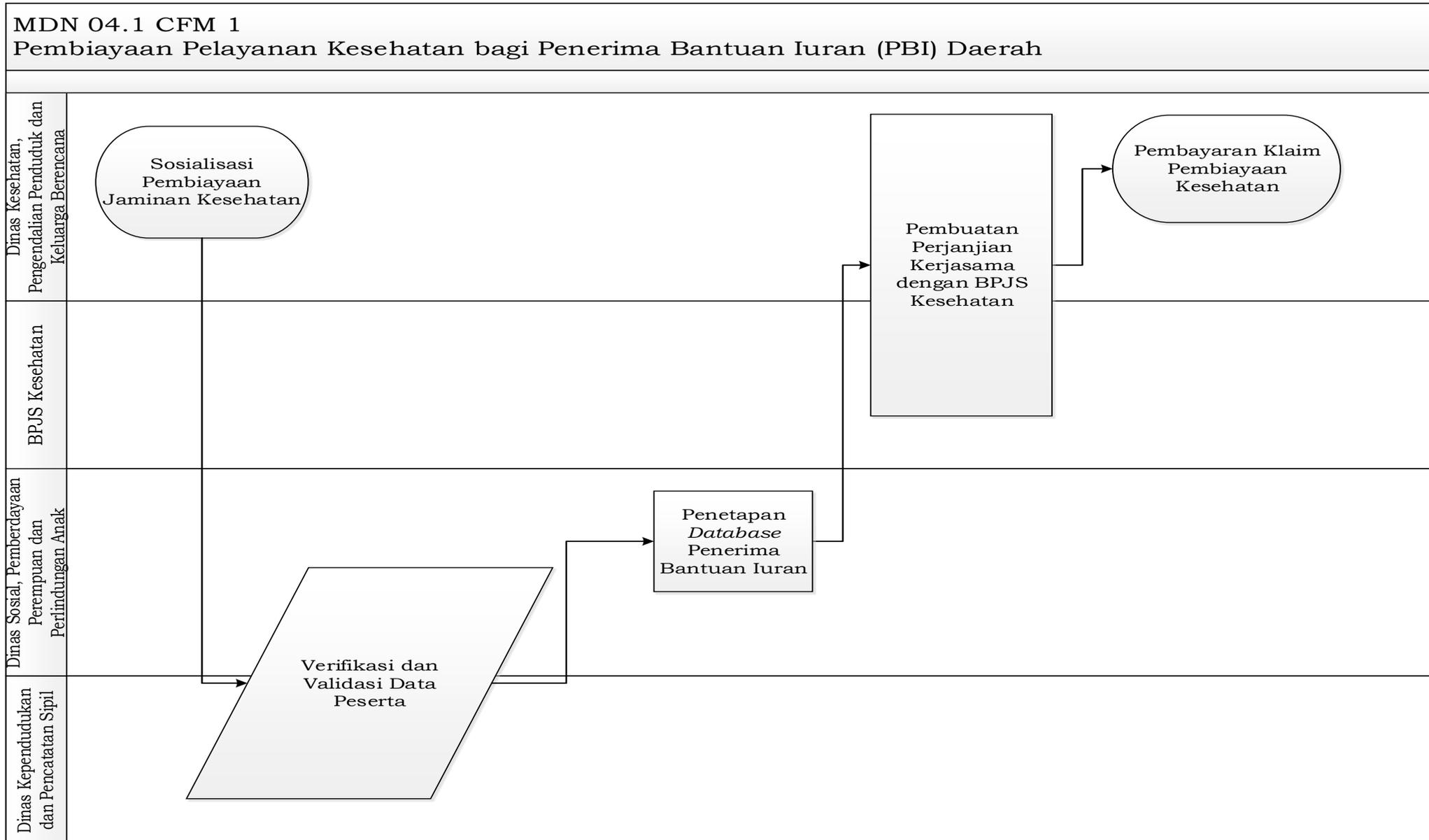


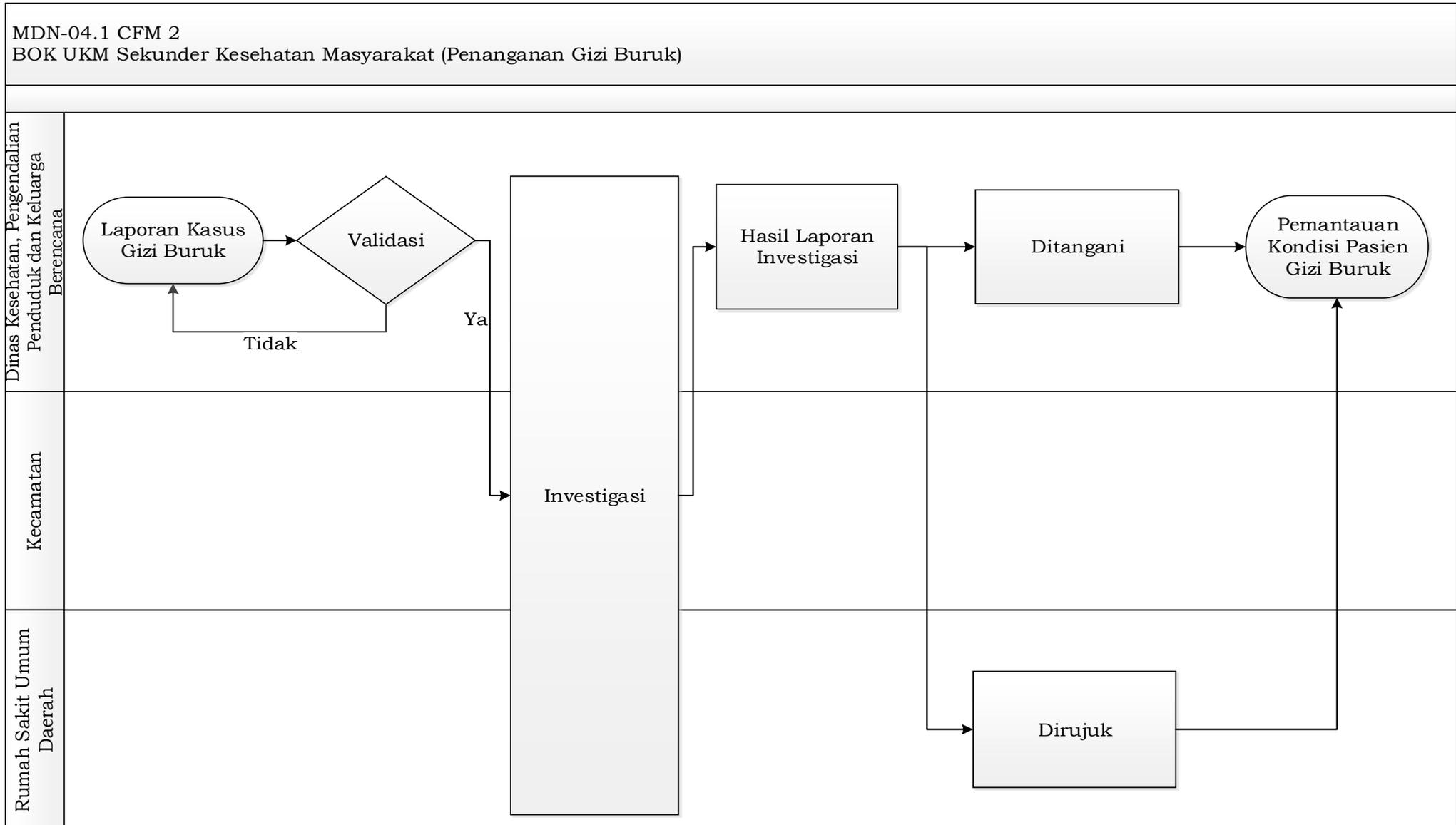


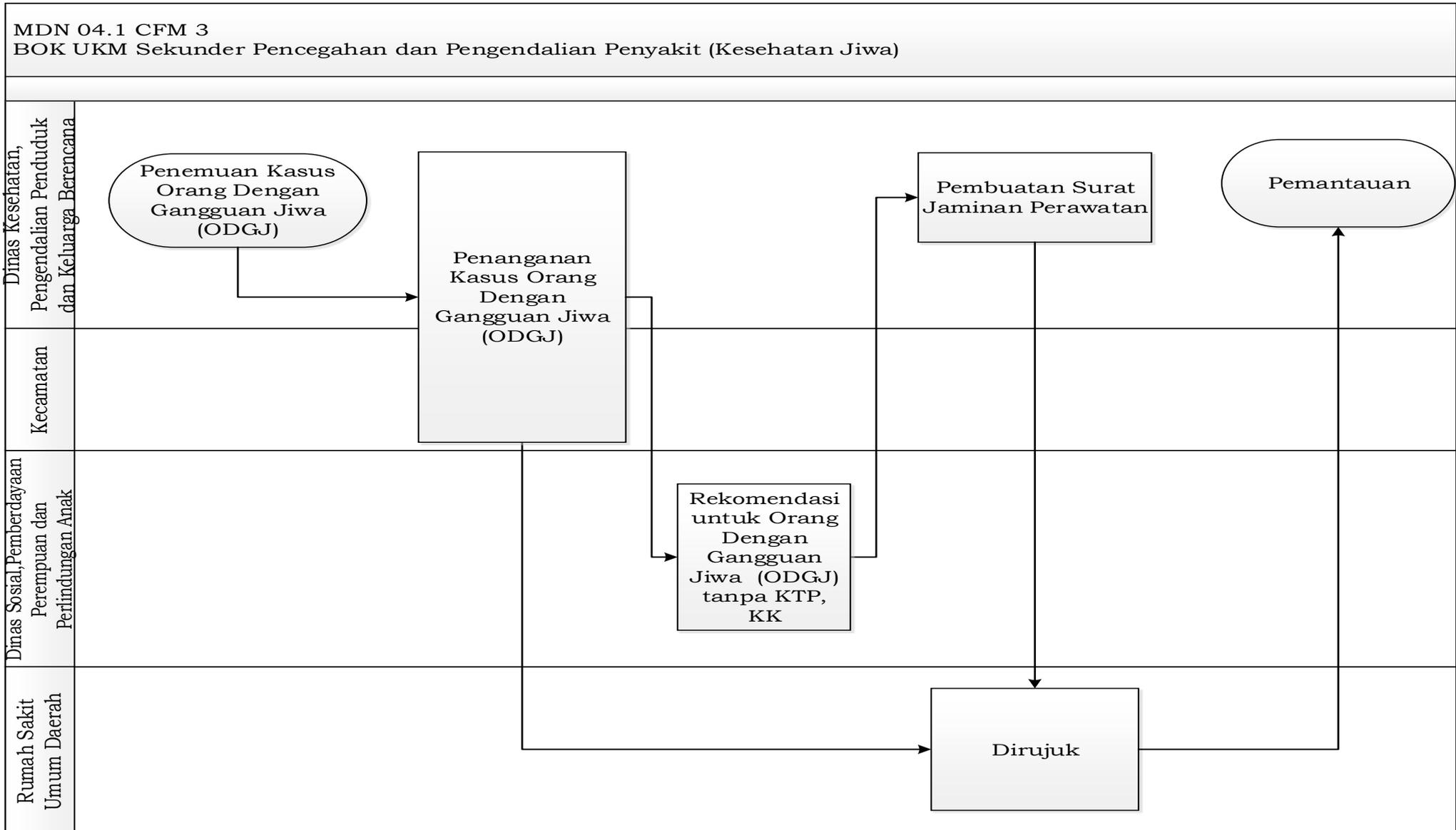


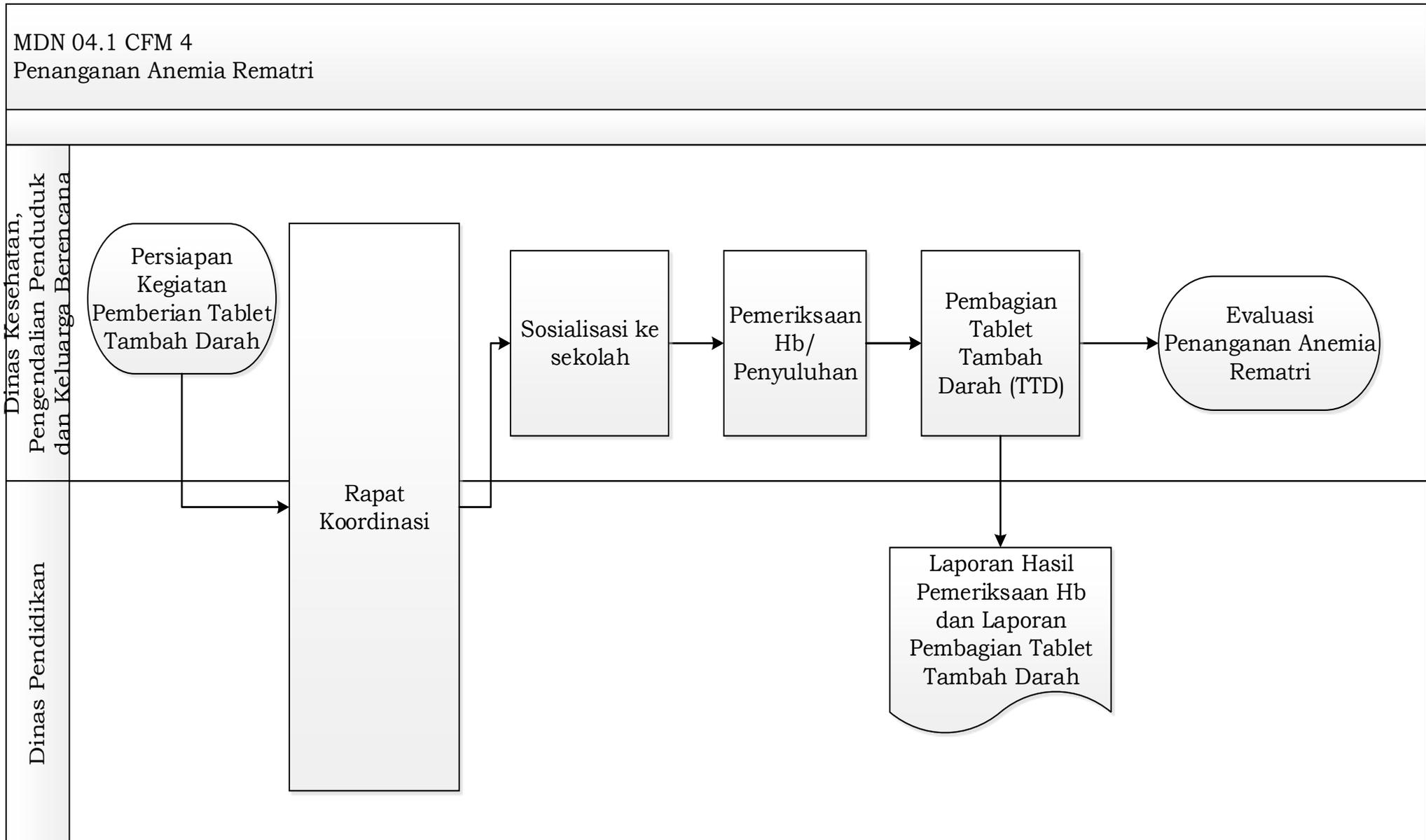


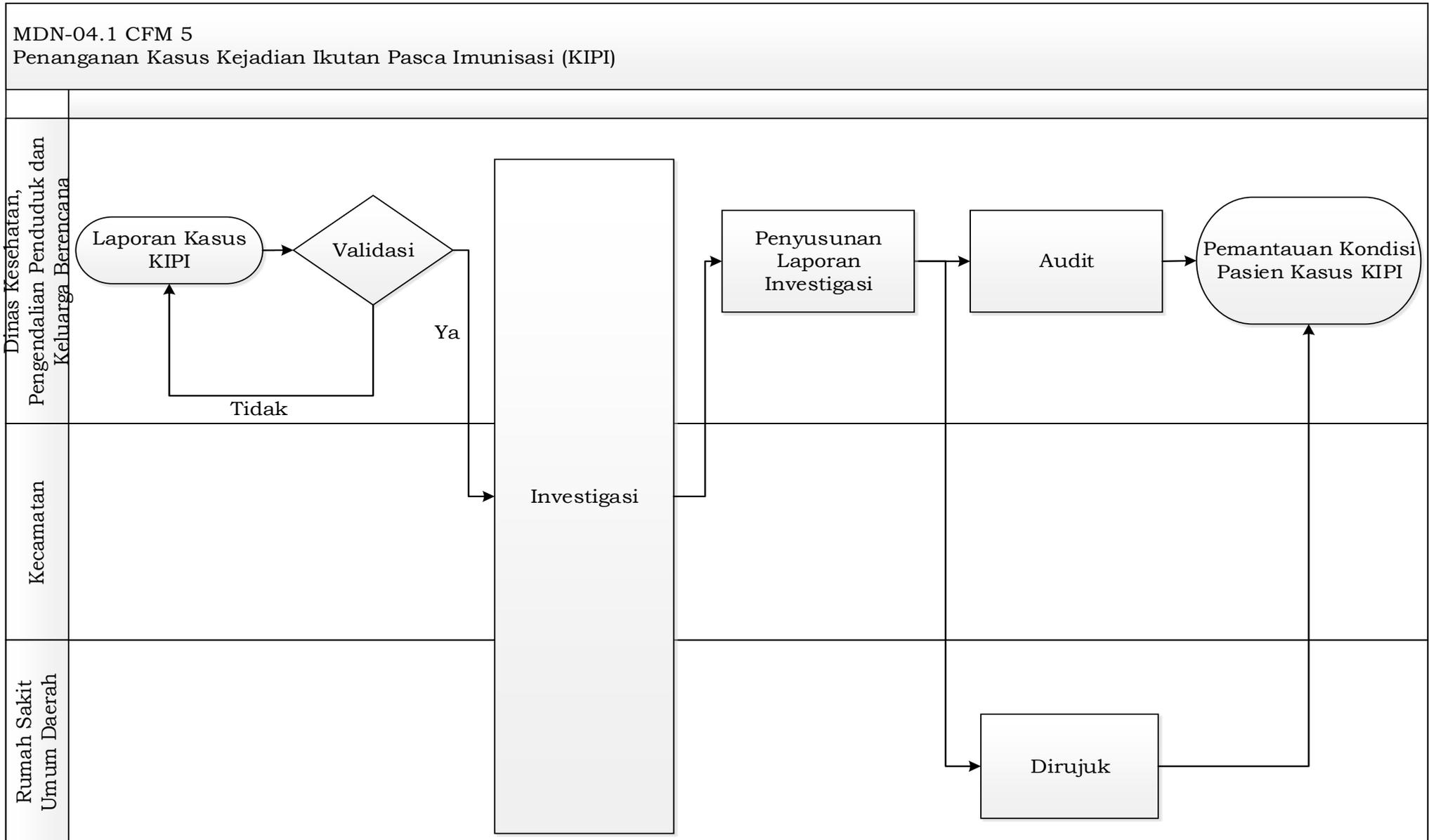






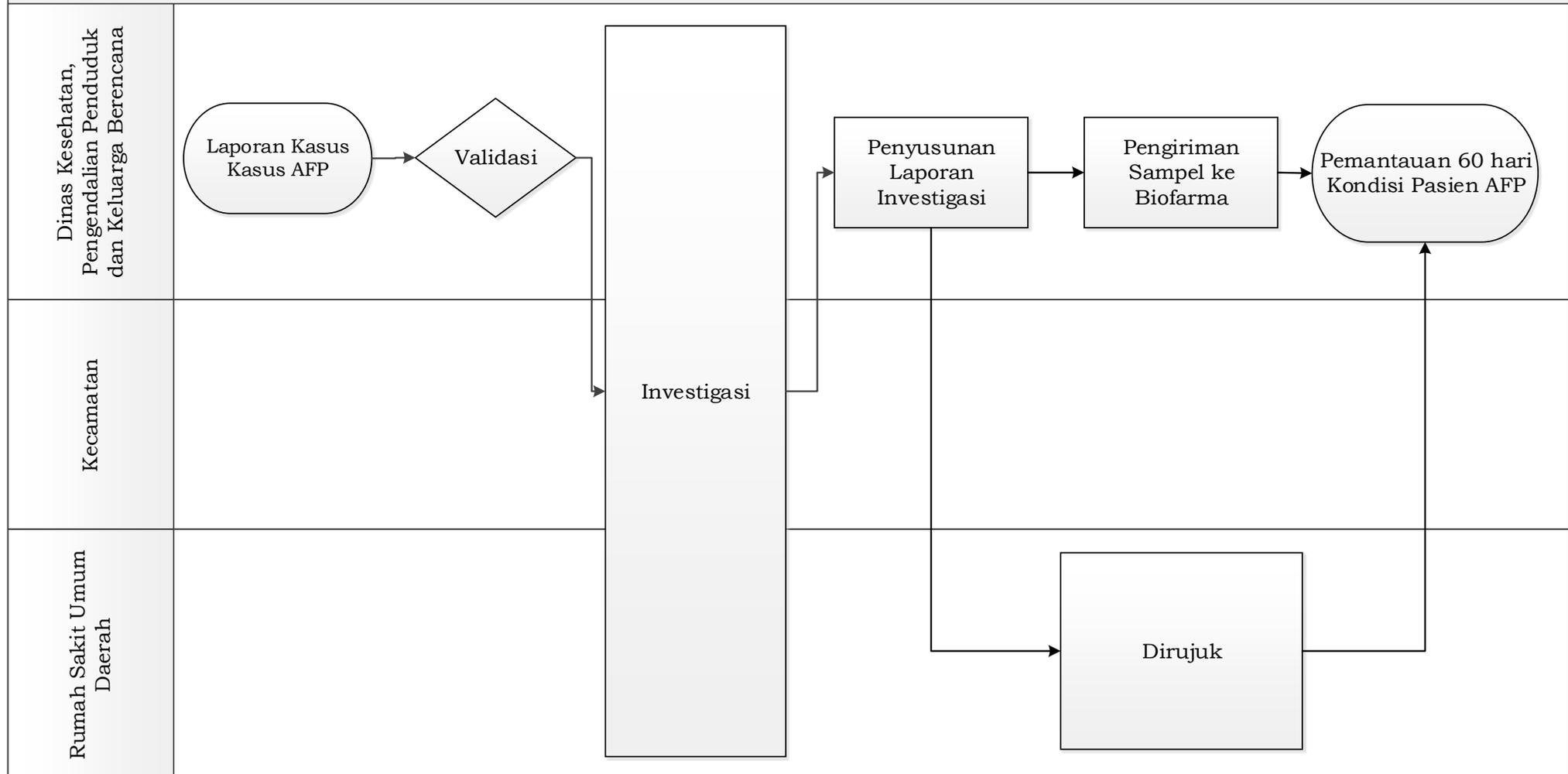




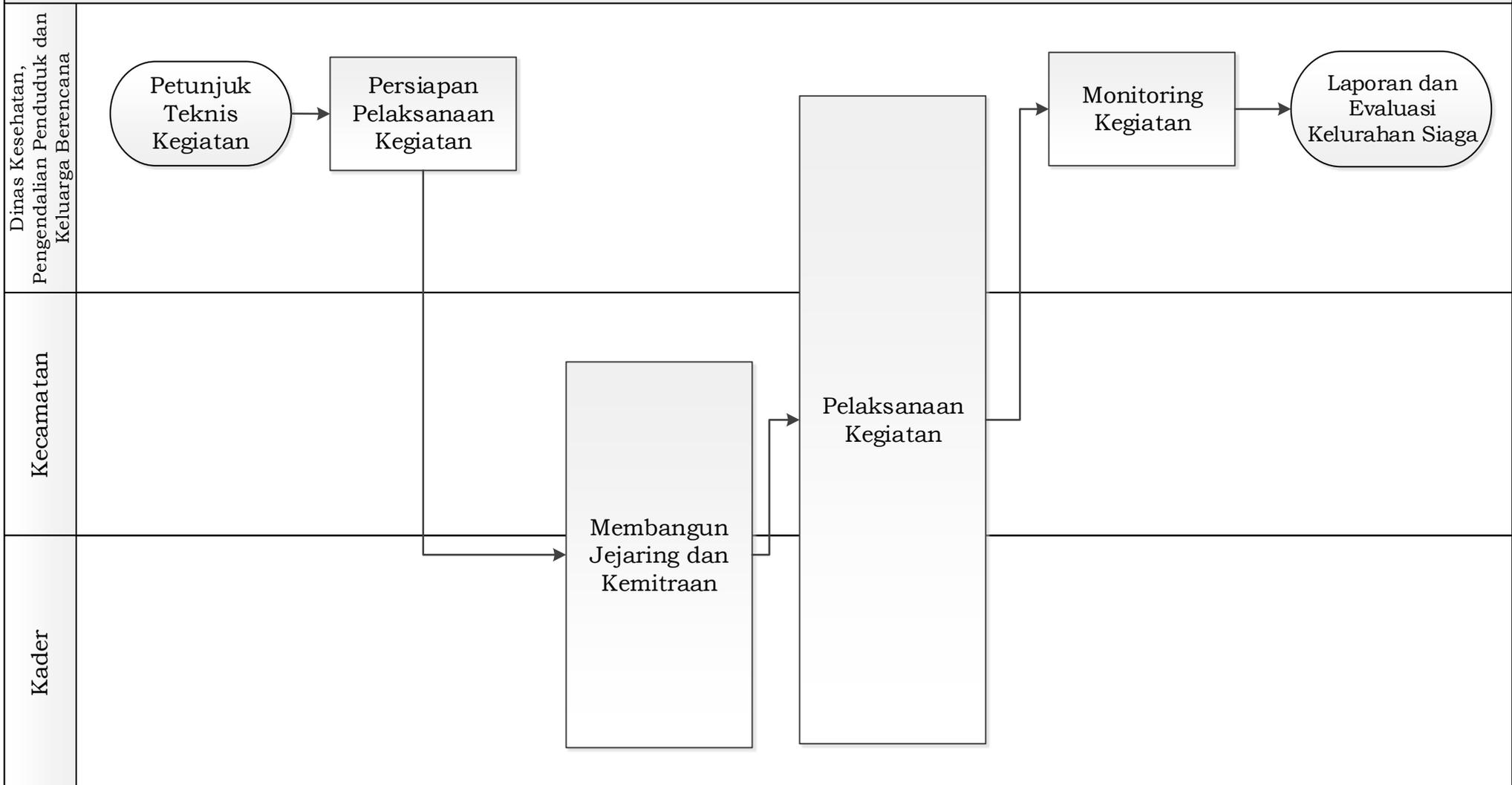


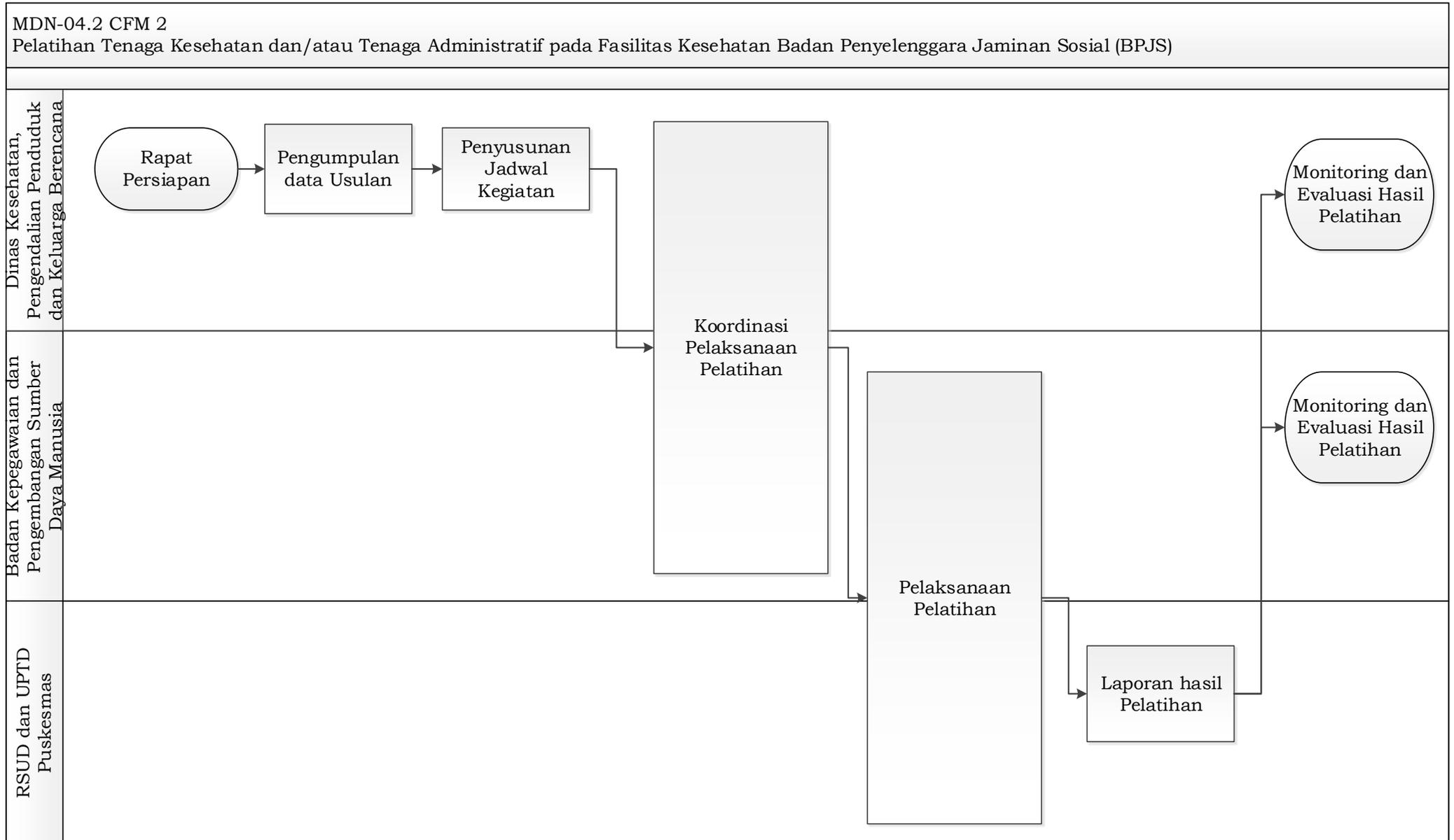
MDN-04.1 CFM 6

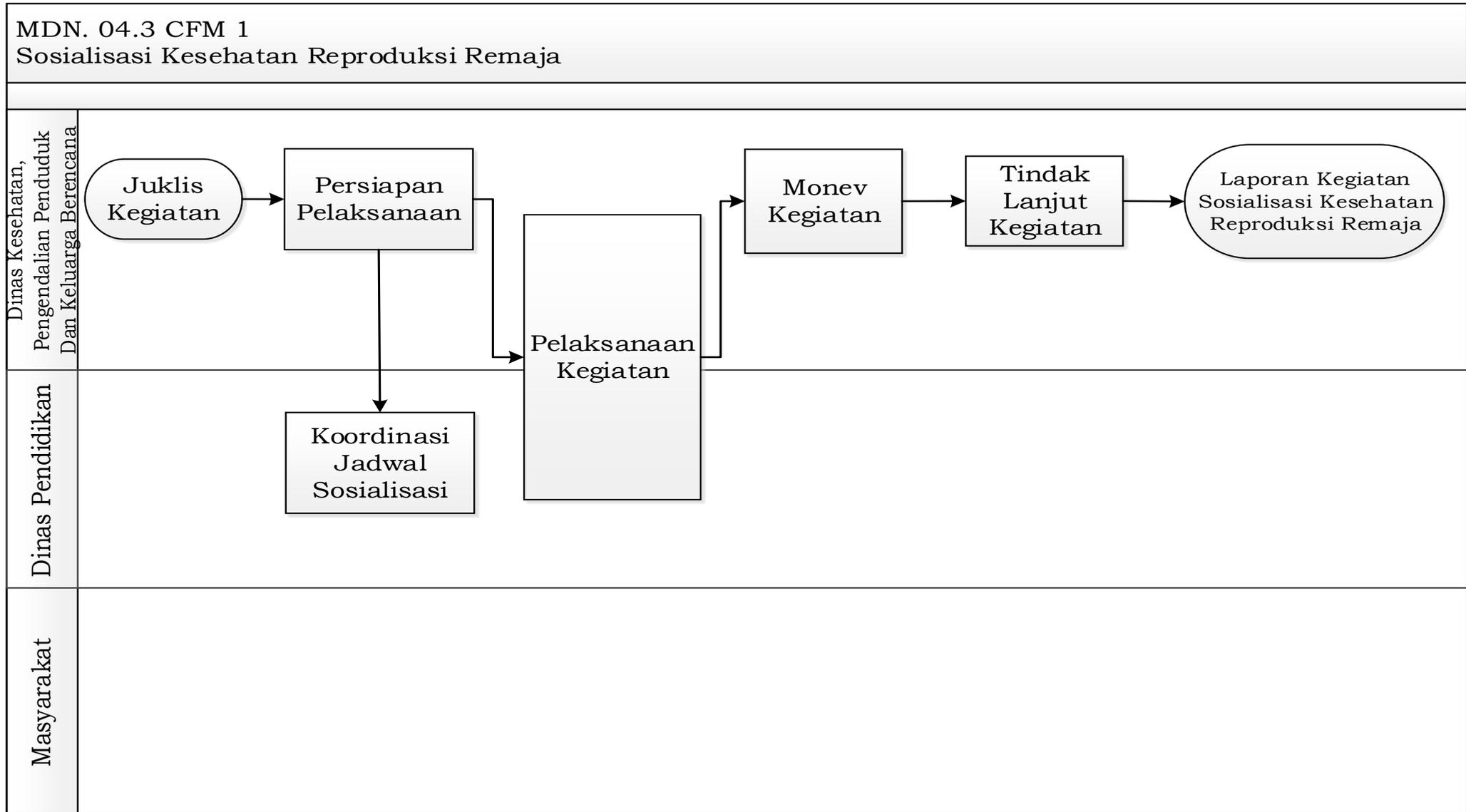
Penanganan Kasus *Acute Flacid Paralysis* (AFP)



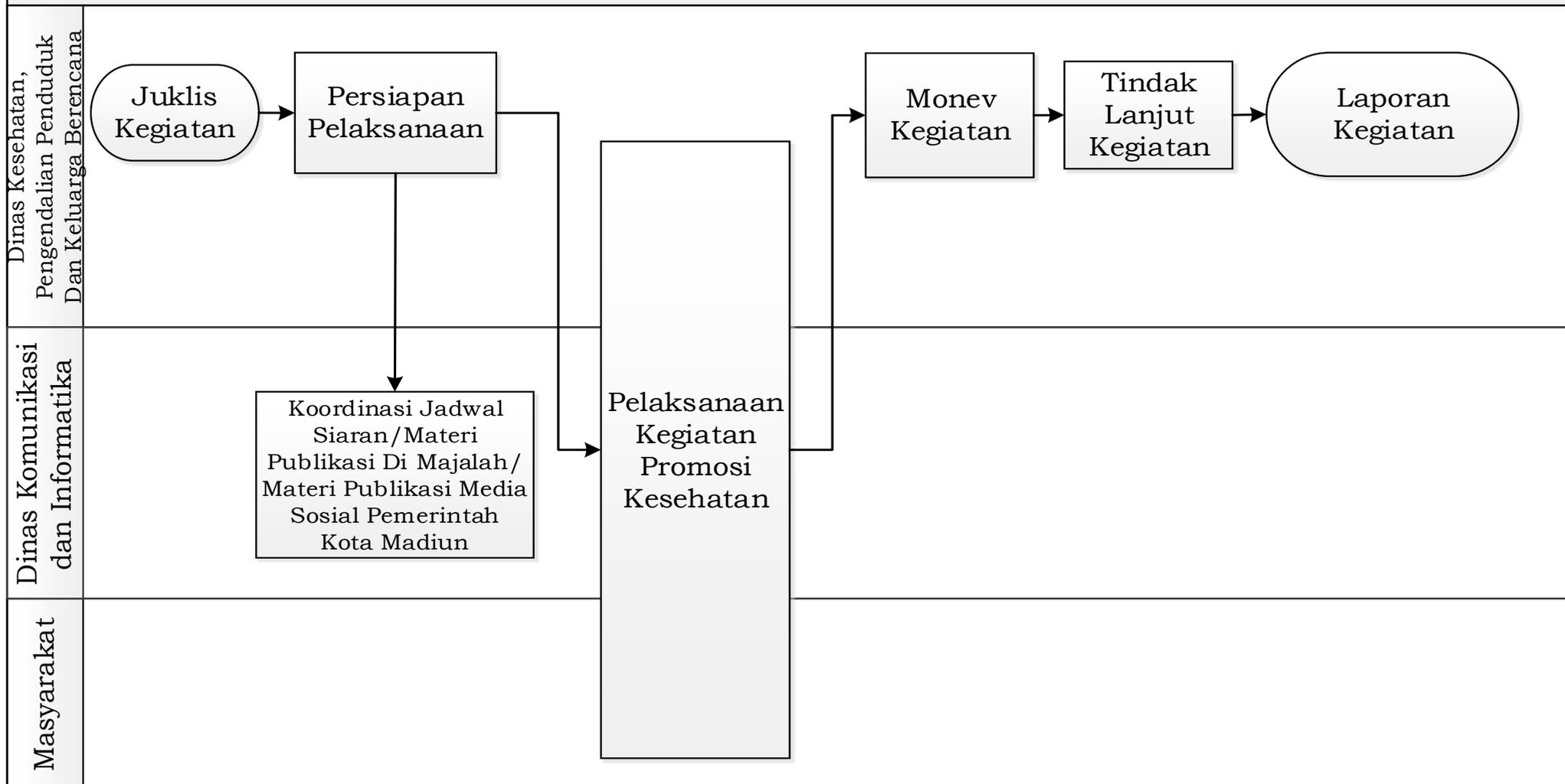
MDN. 04.2 CFM 1
Pembinaan Kelurahan Siaga





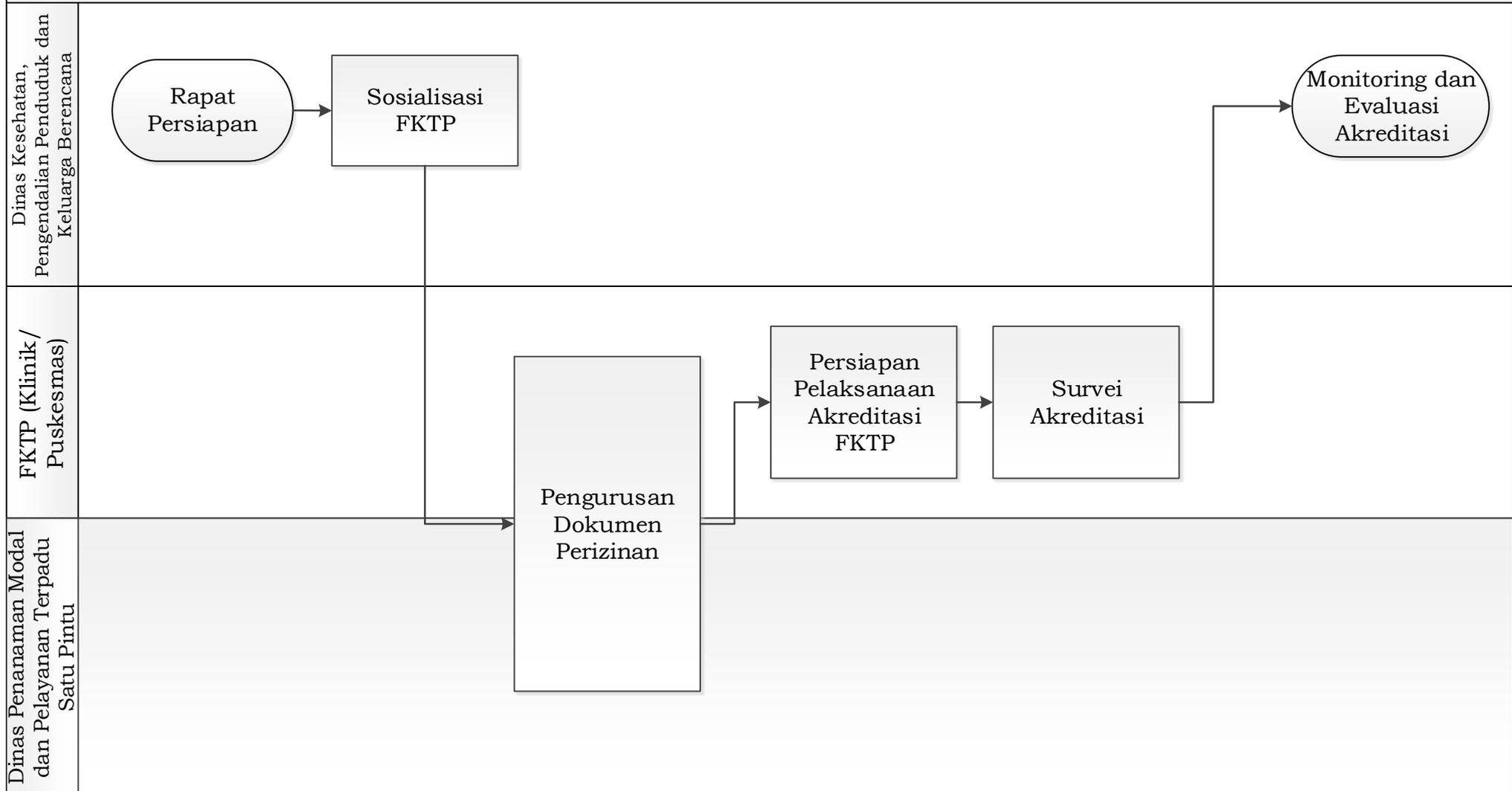


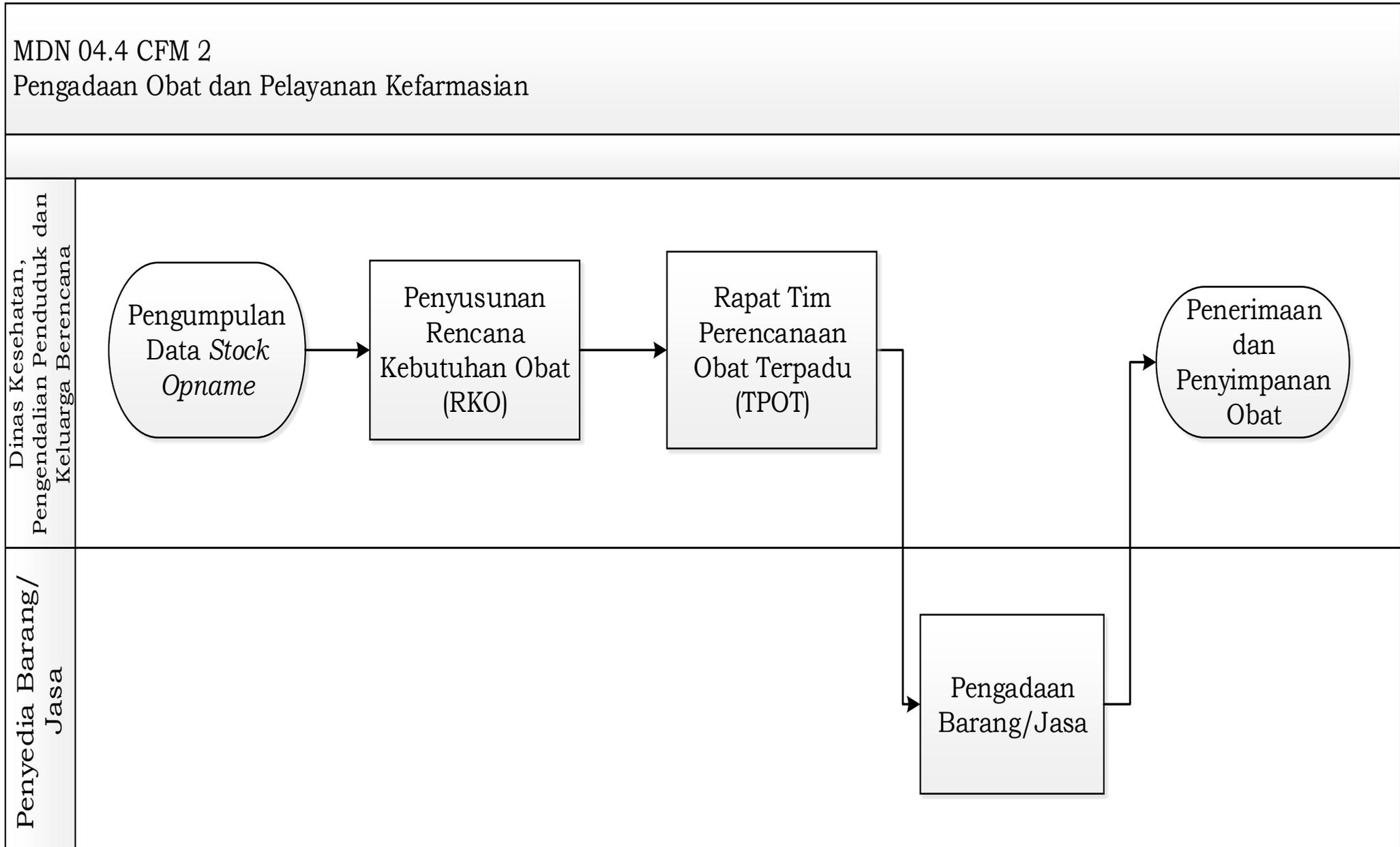
MDN. 04.3 CFM 2
Promosi Kesehatan Melalui Media Pemerintah Kota Madiun

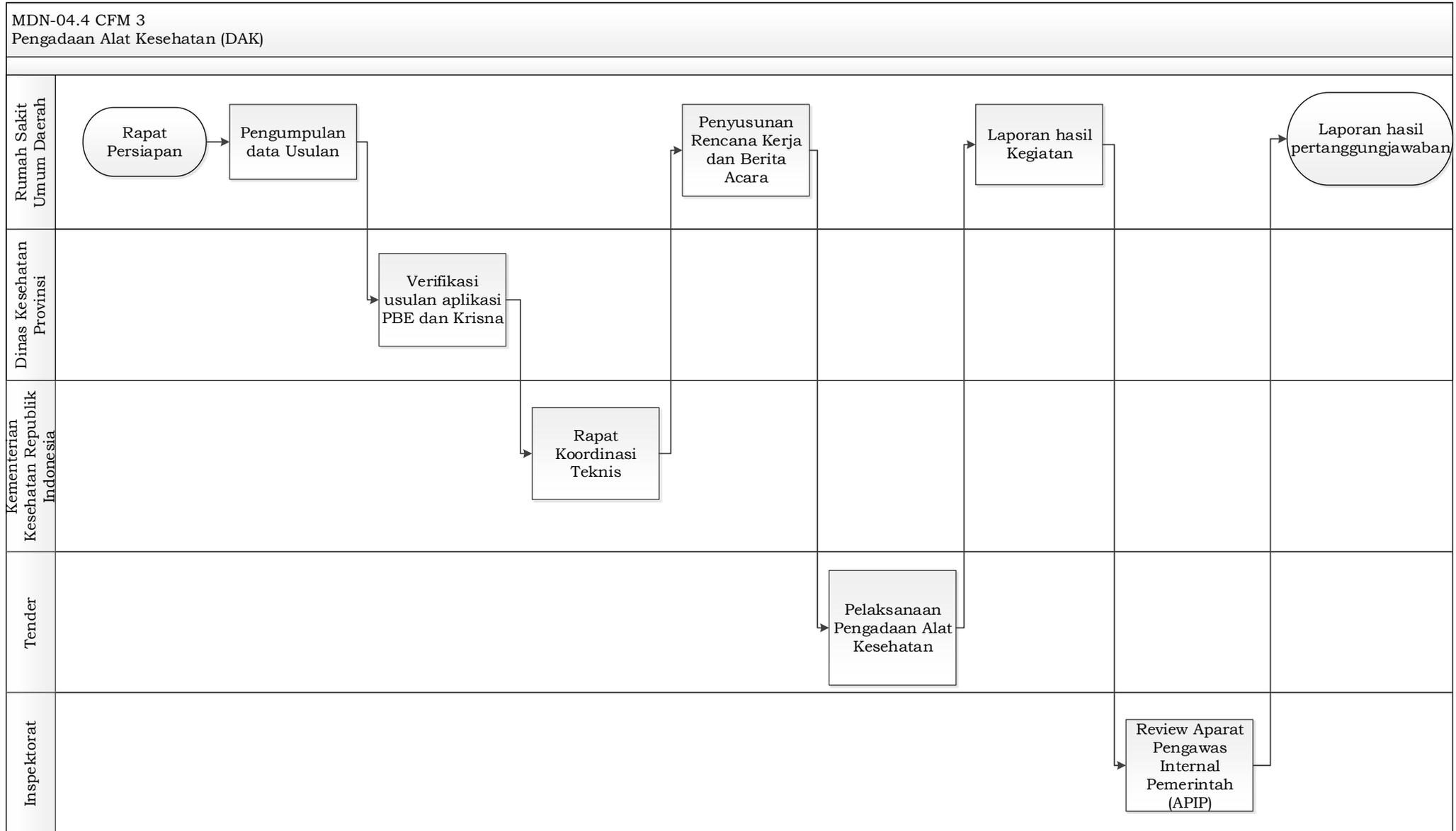


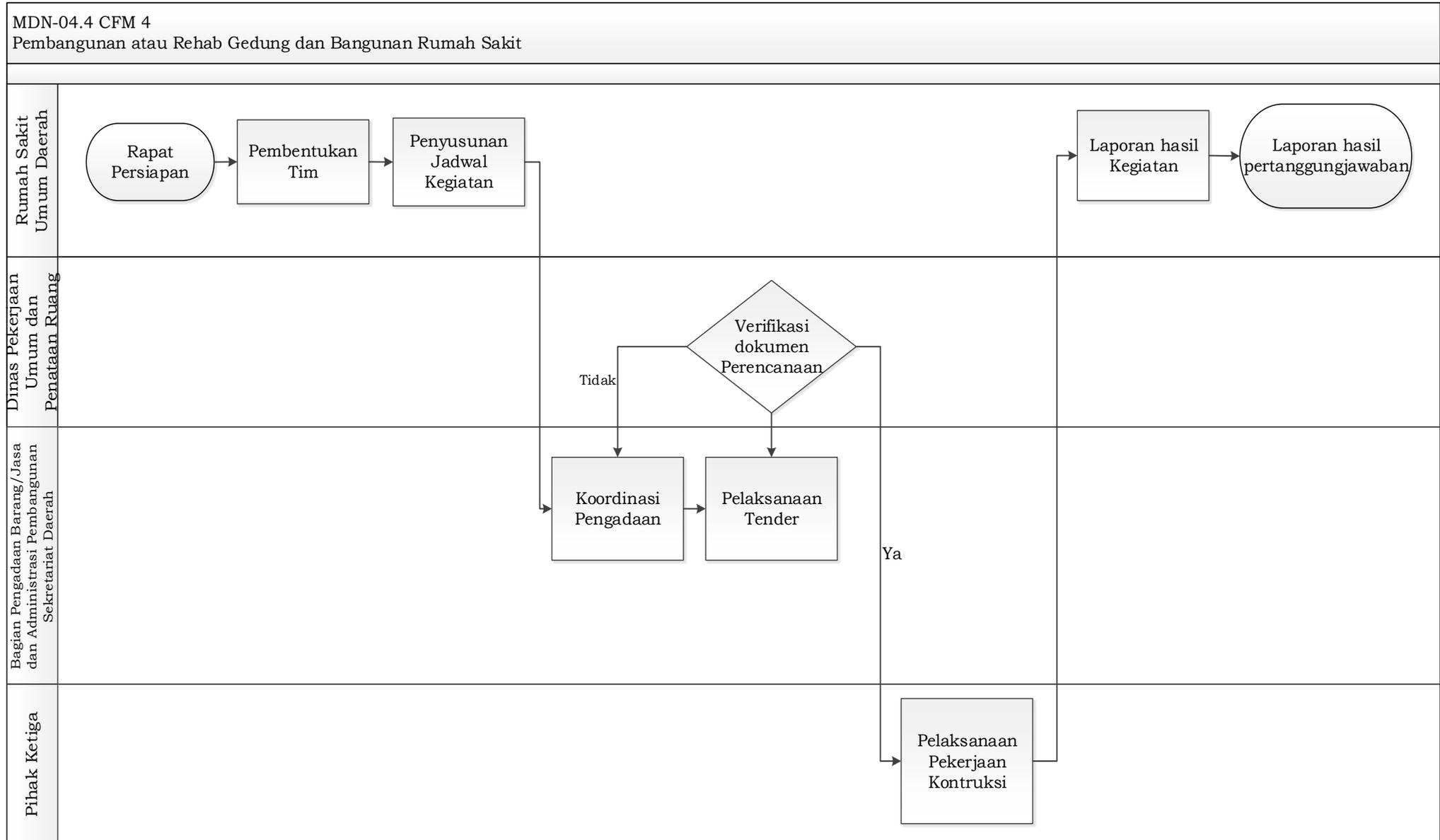
MDN. 04.4 CFM 1

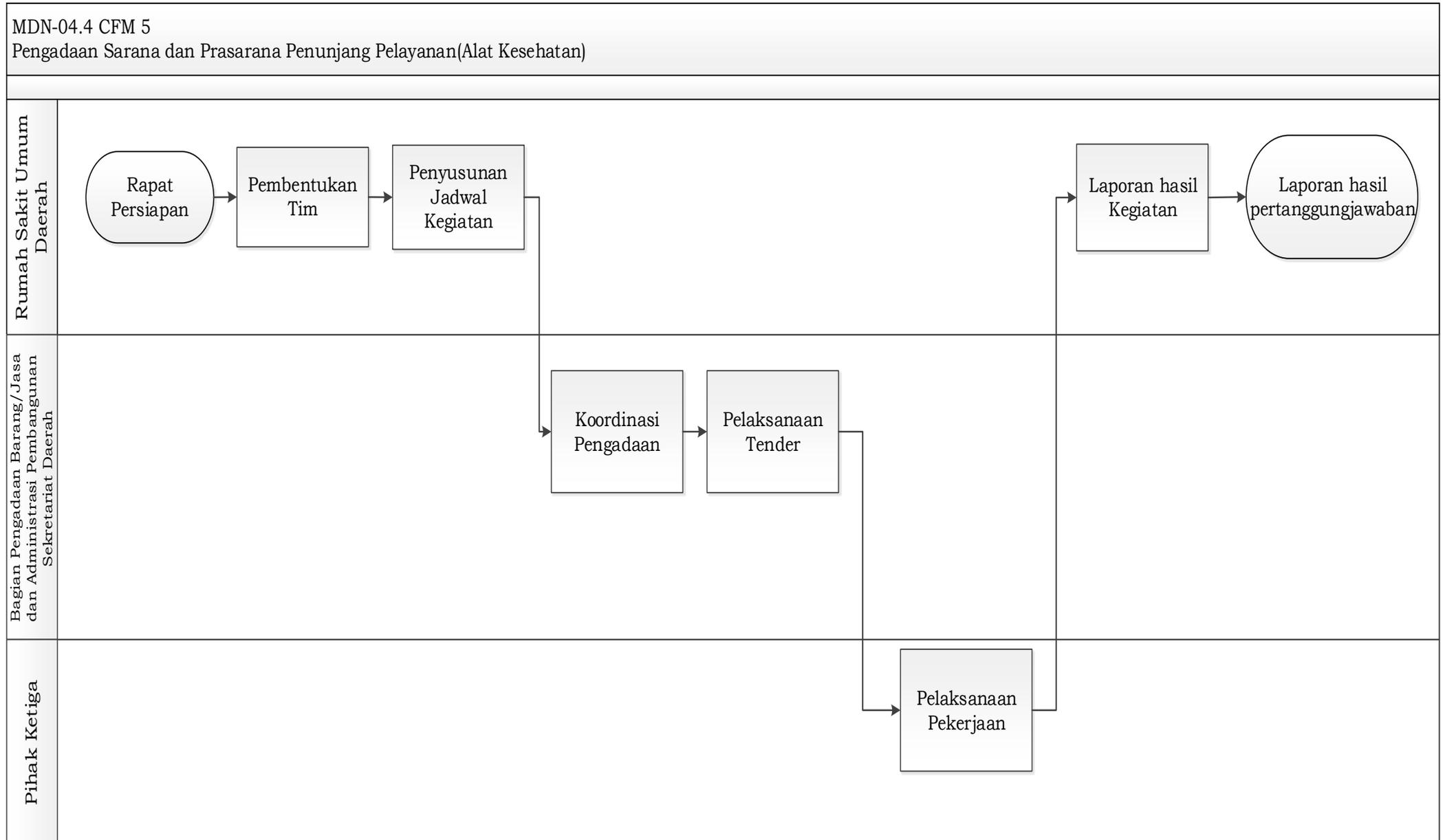
Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertaman (FKTP) Klinik/Puskesmas

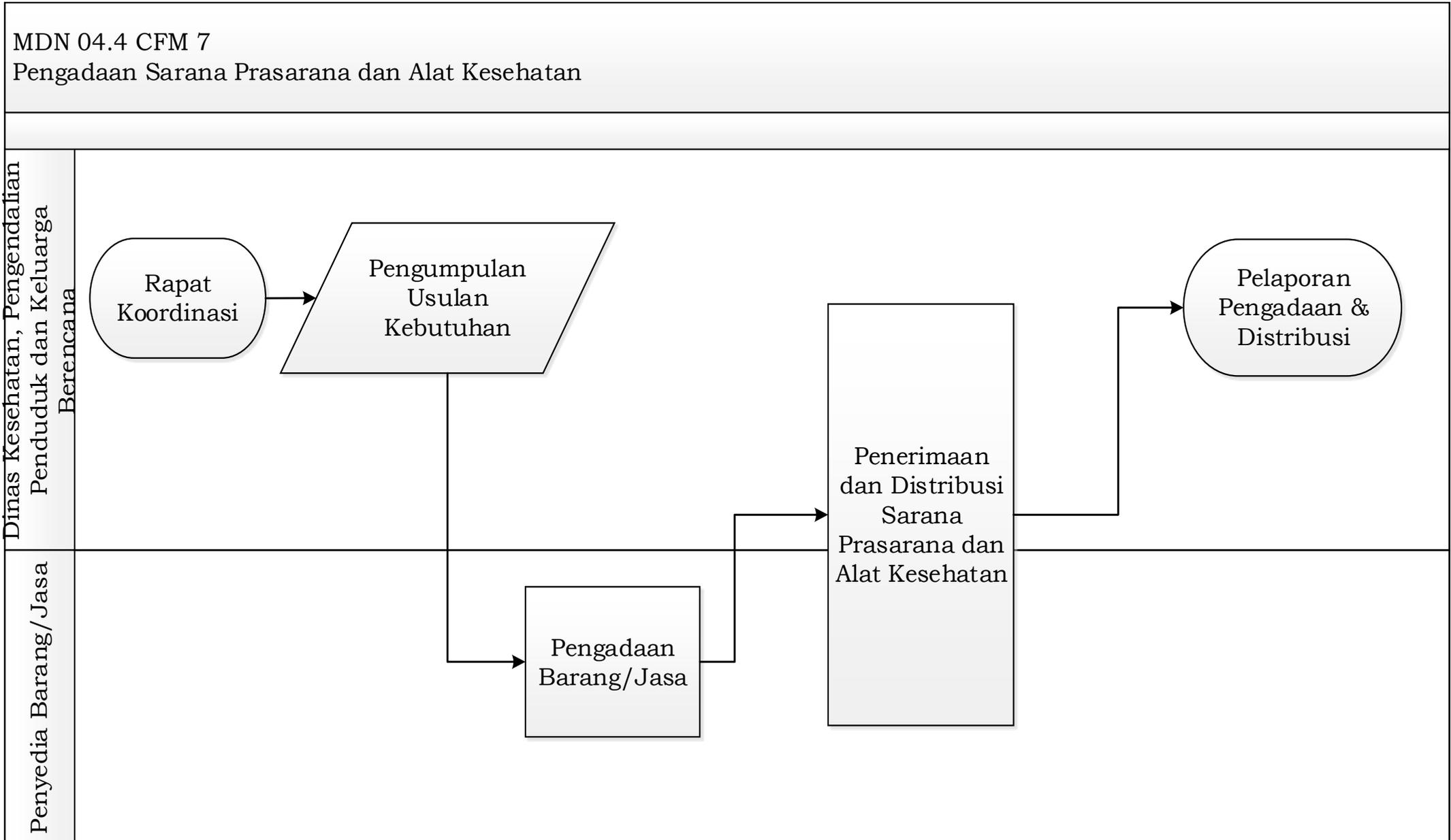


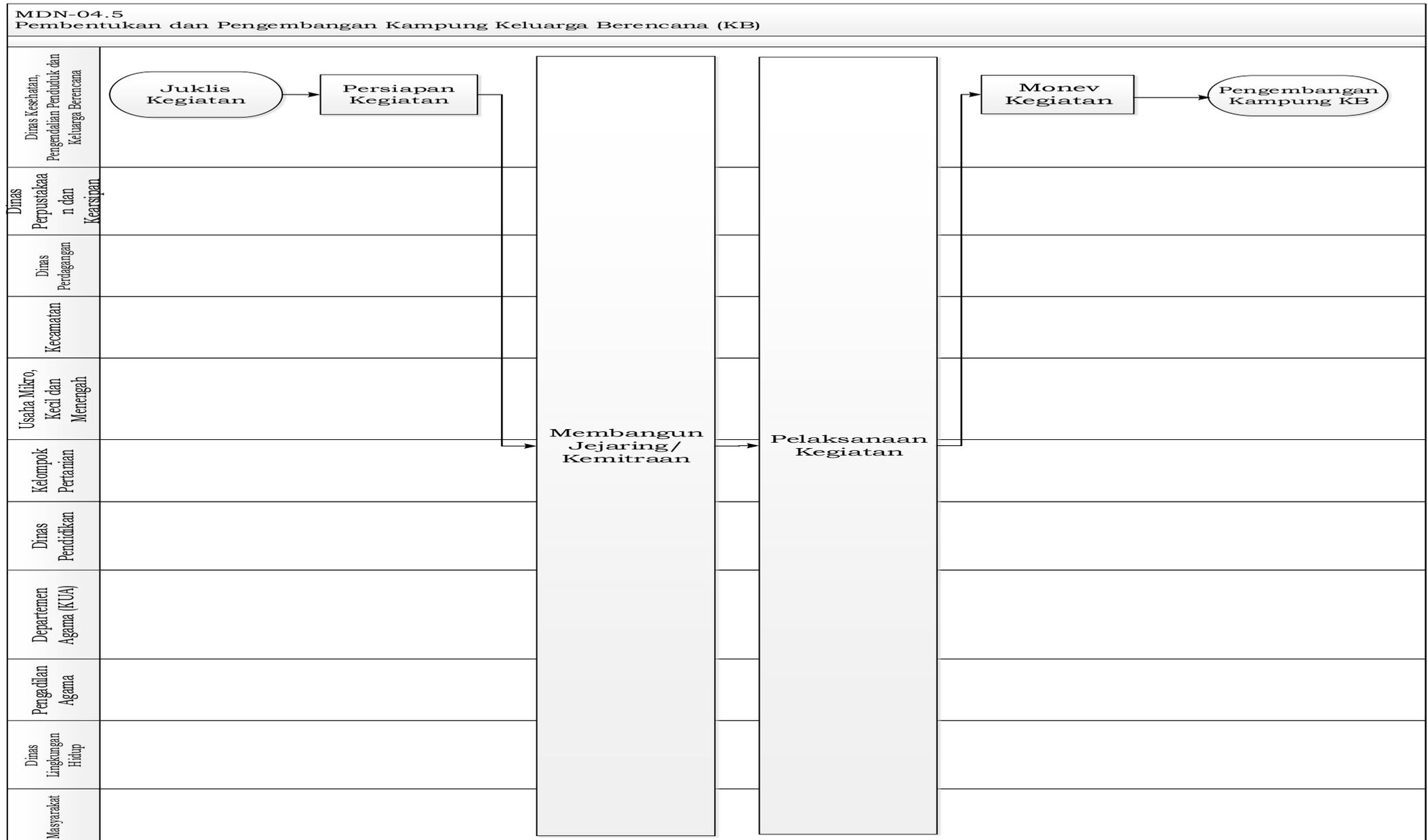


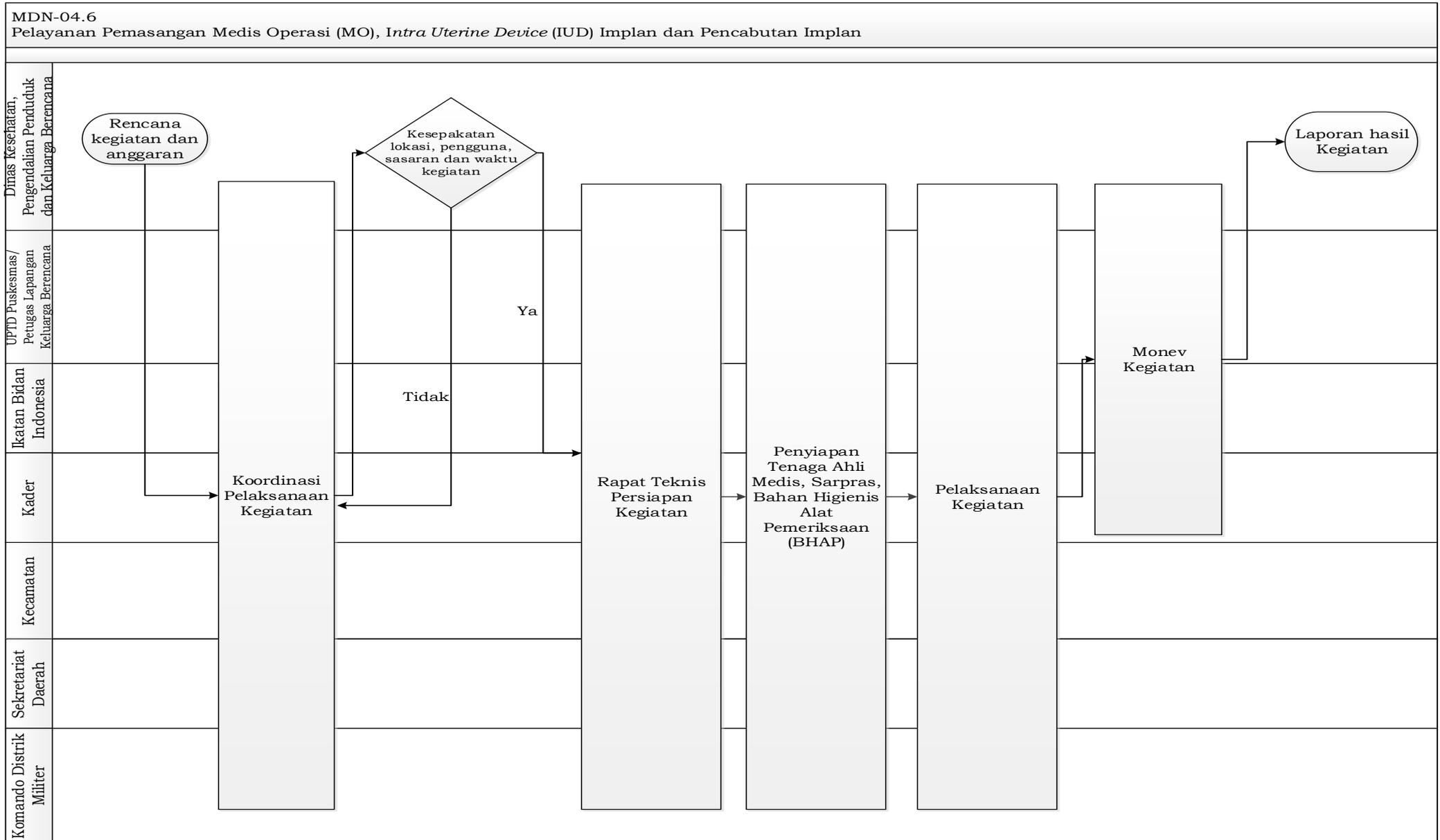


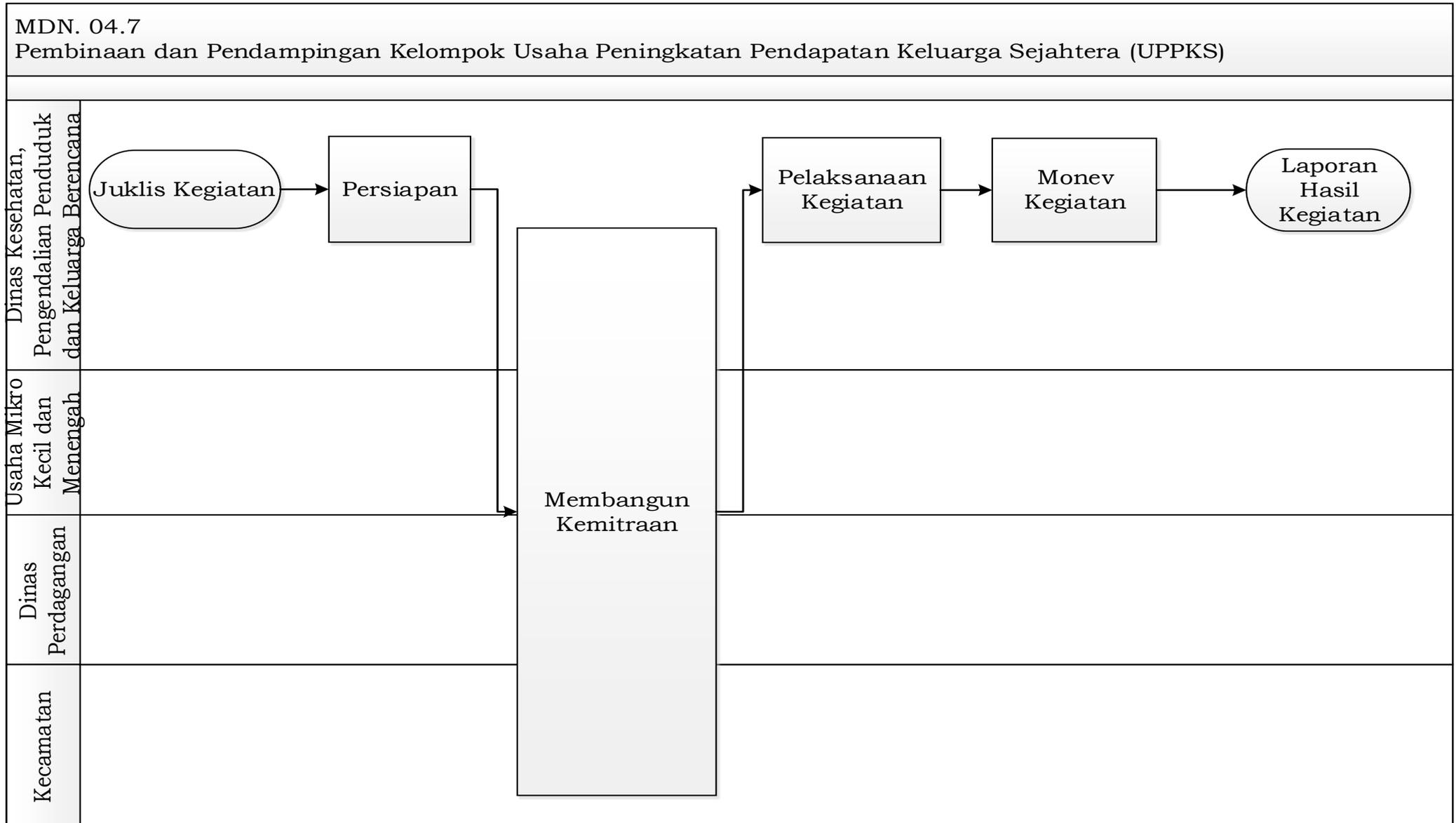


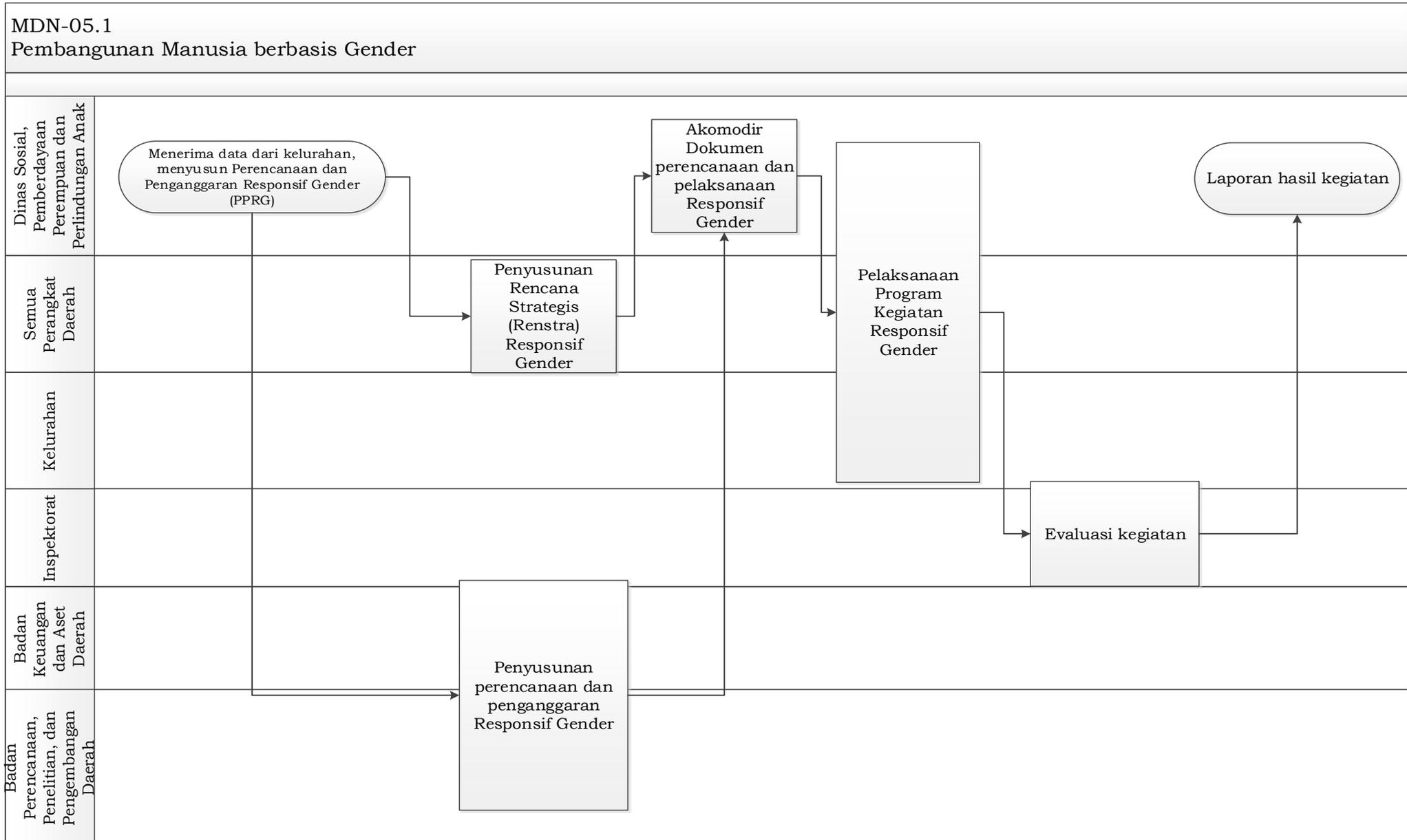


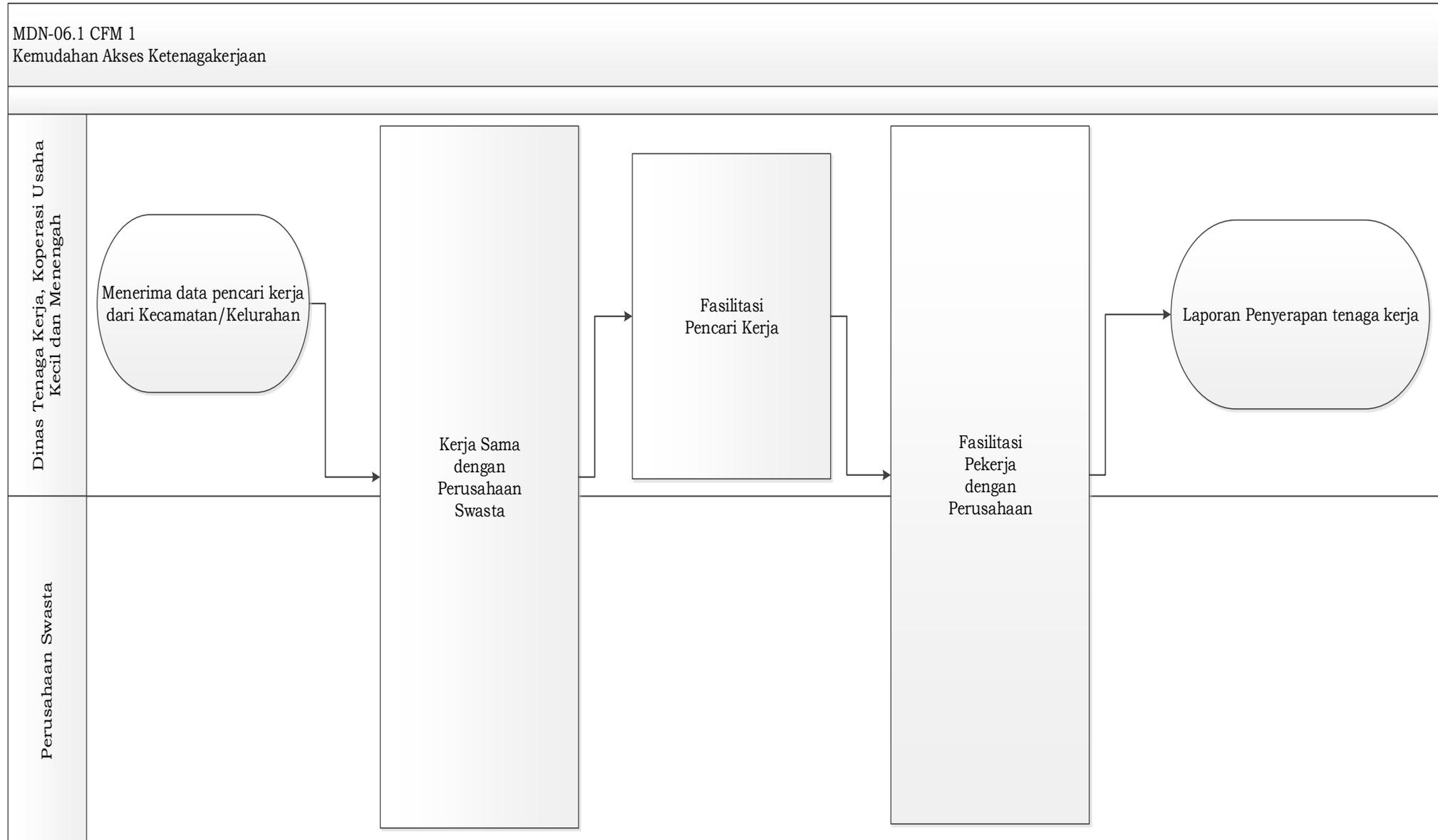


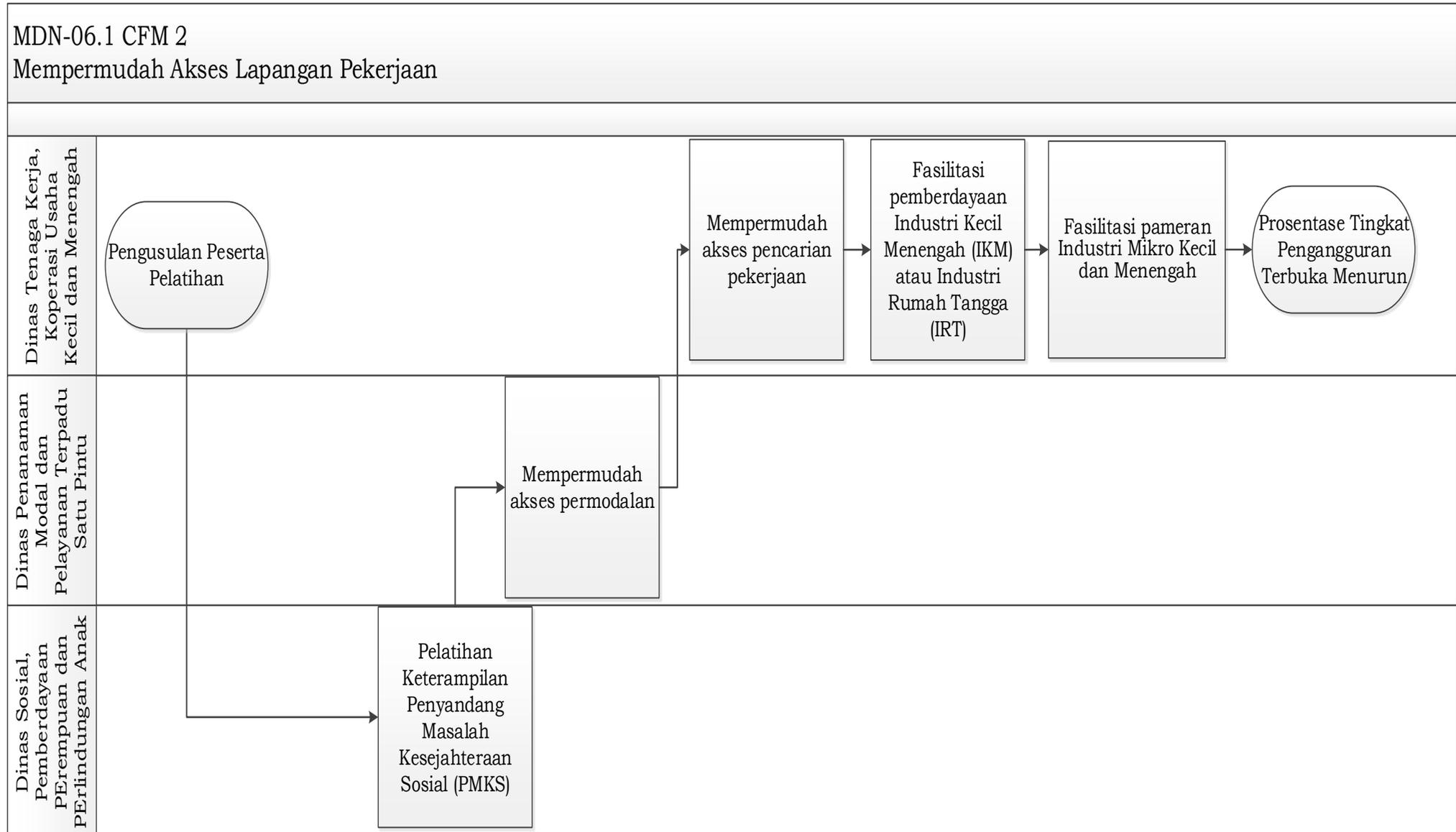


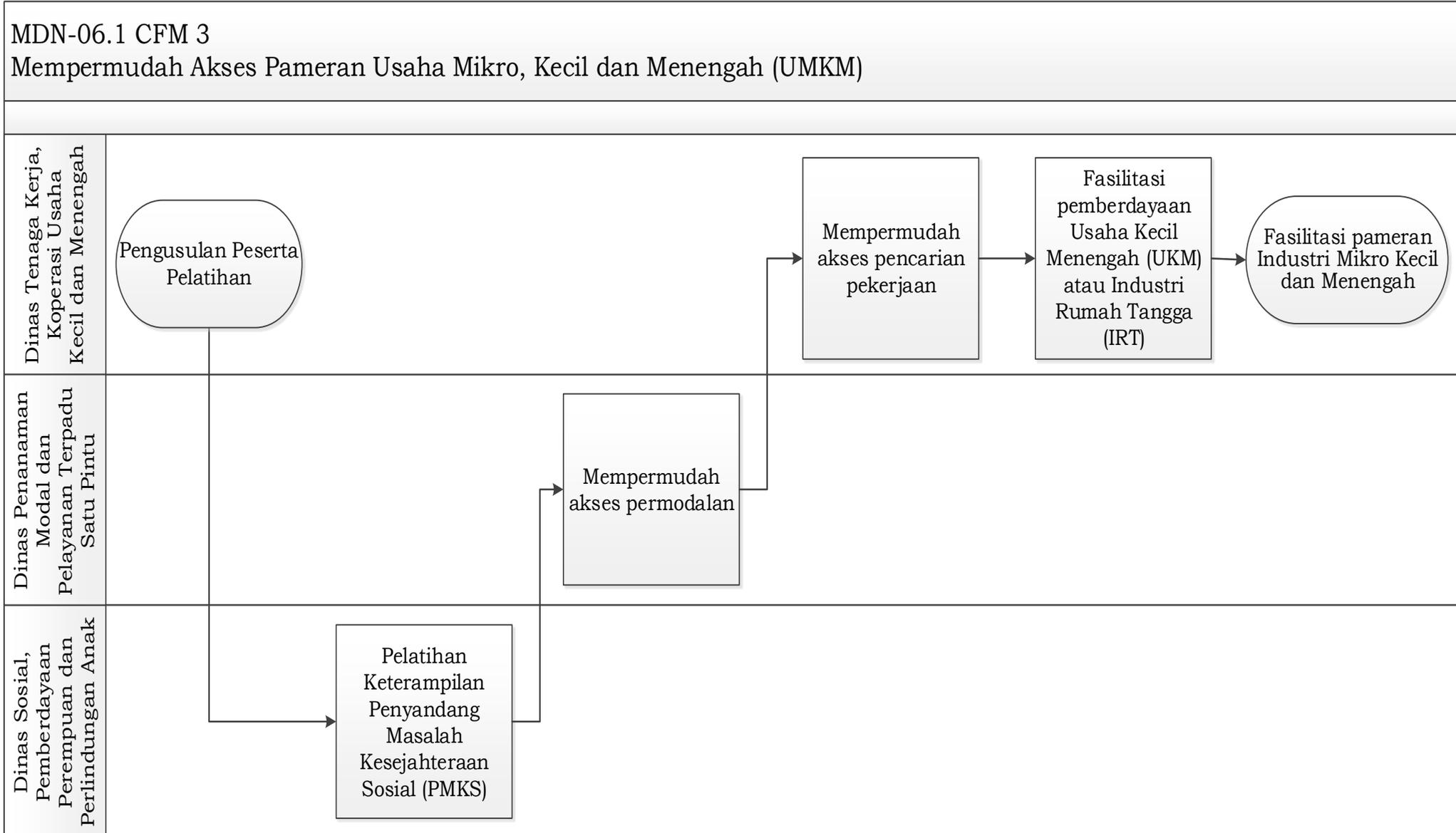


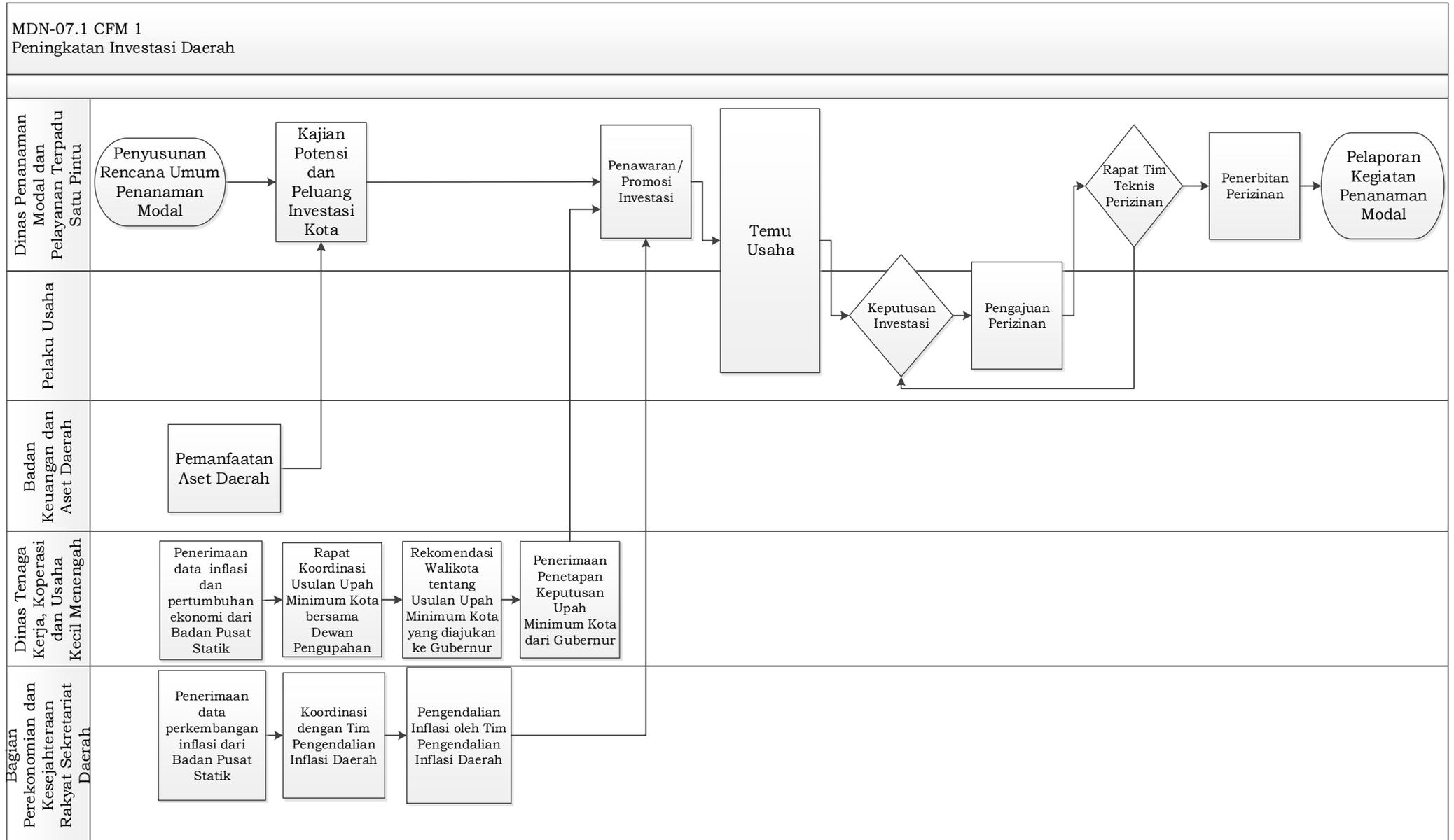


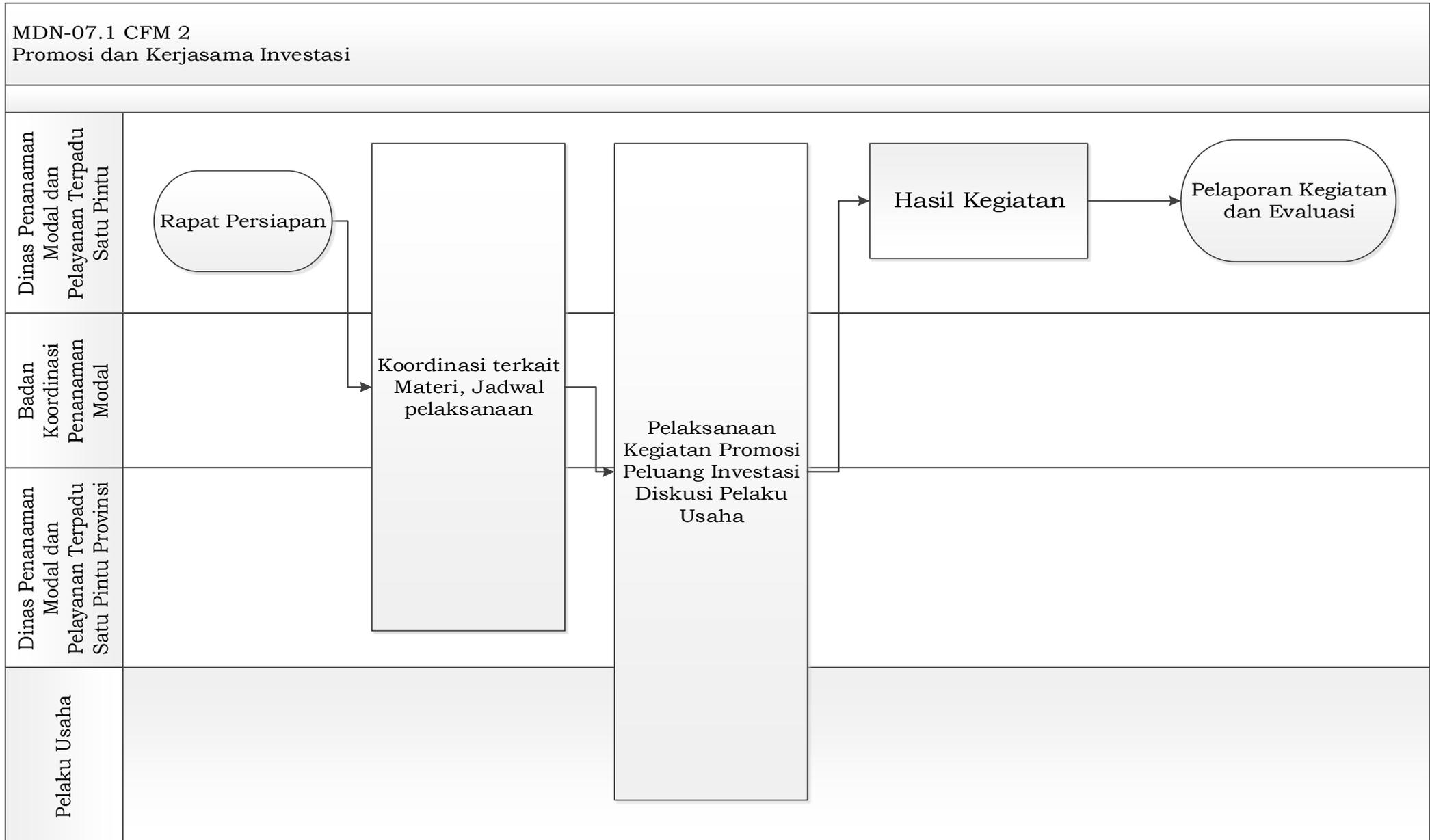


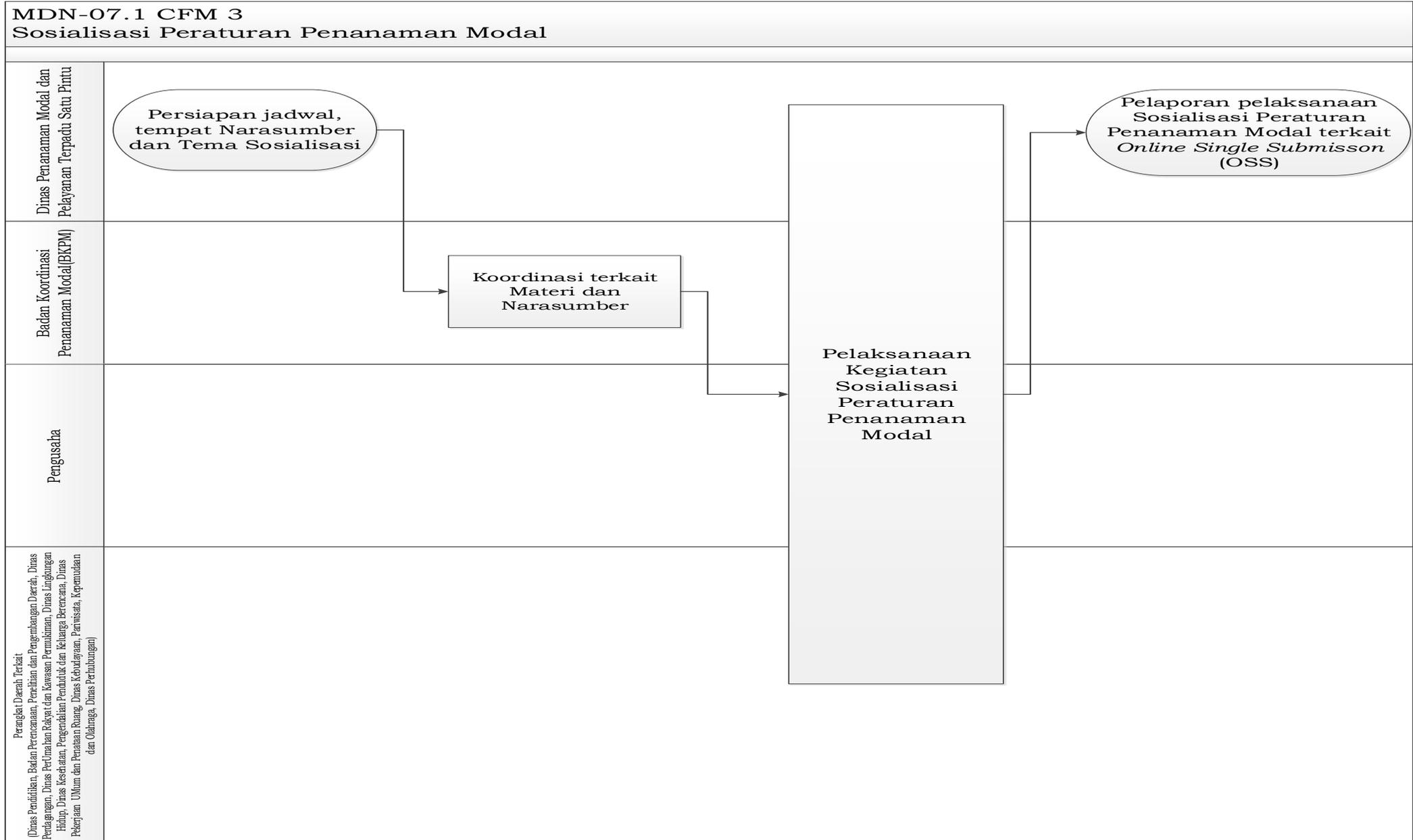






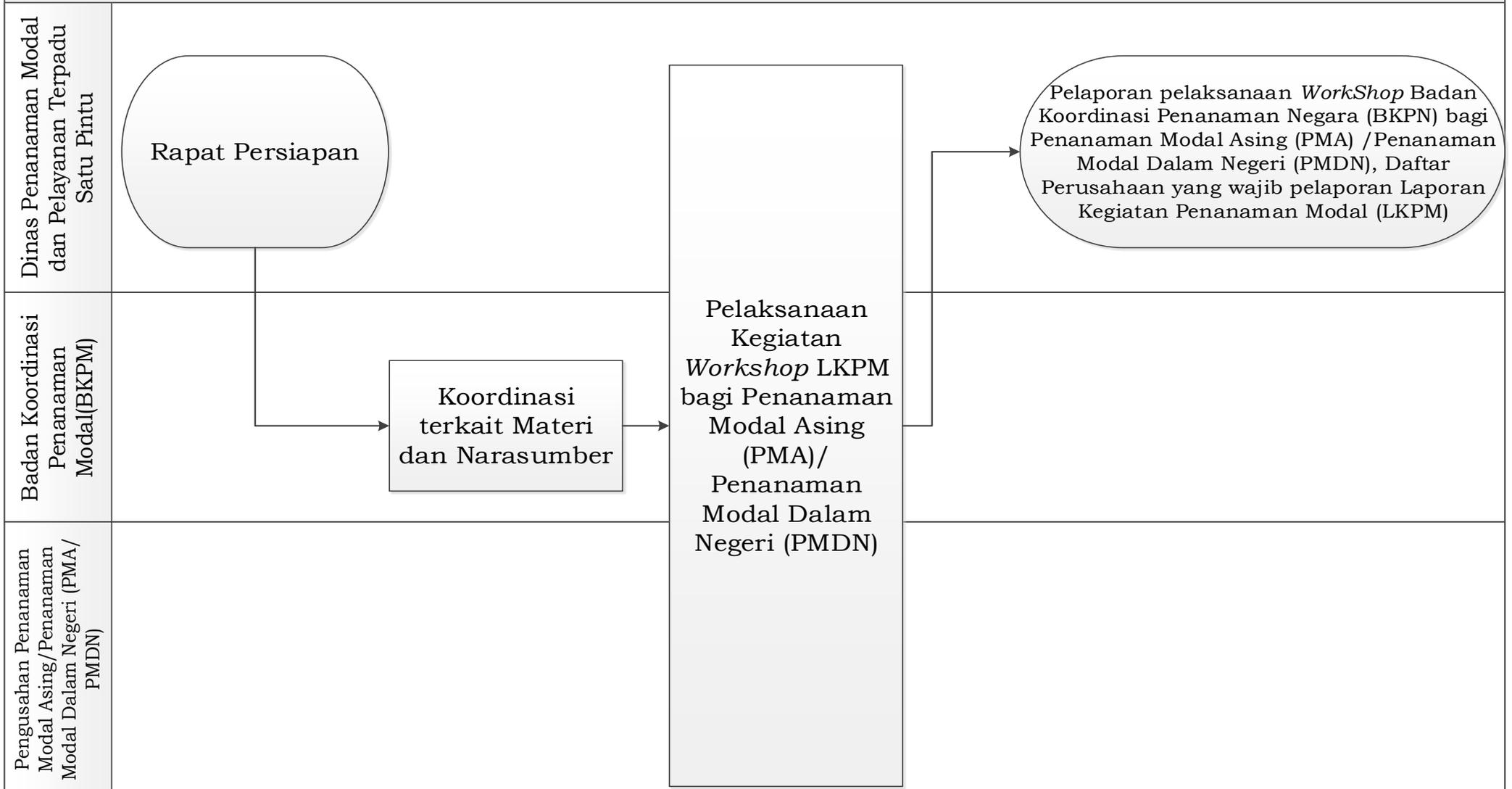


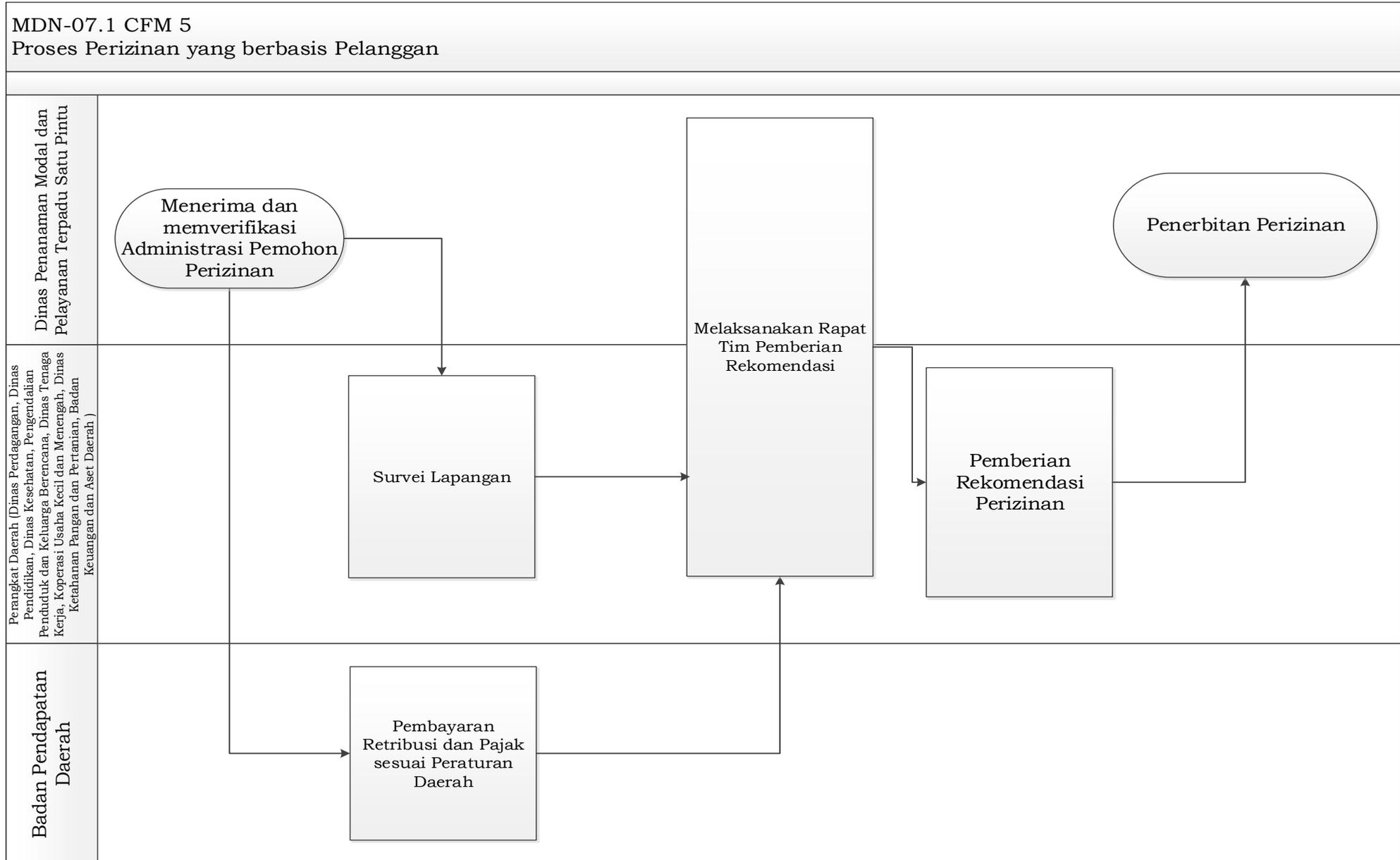


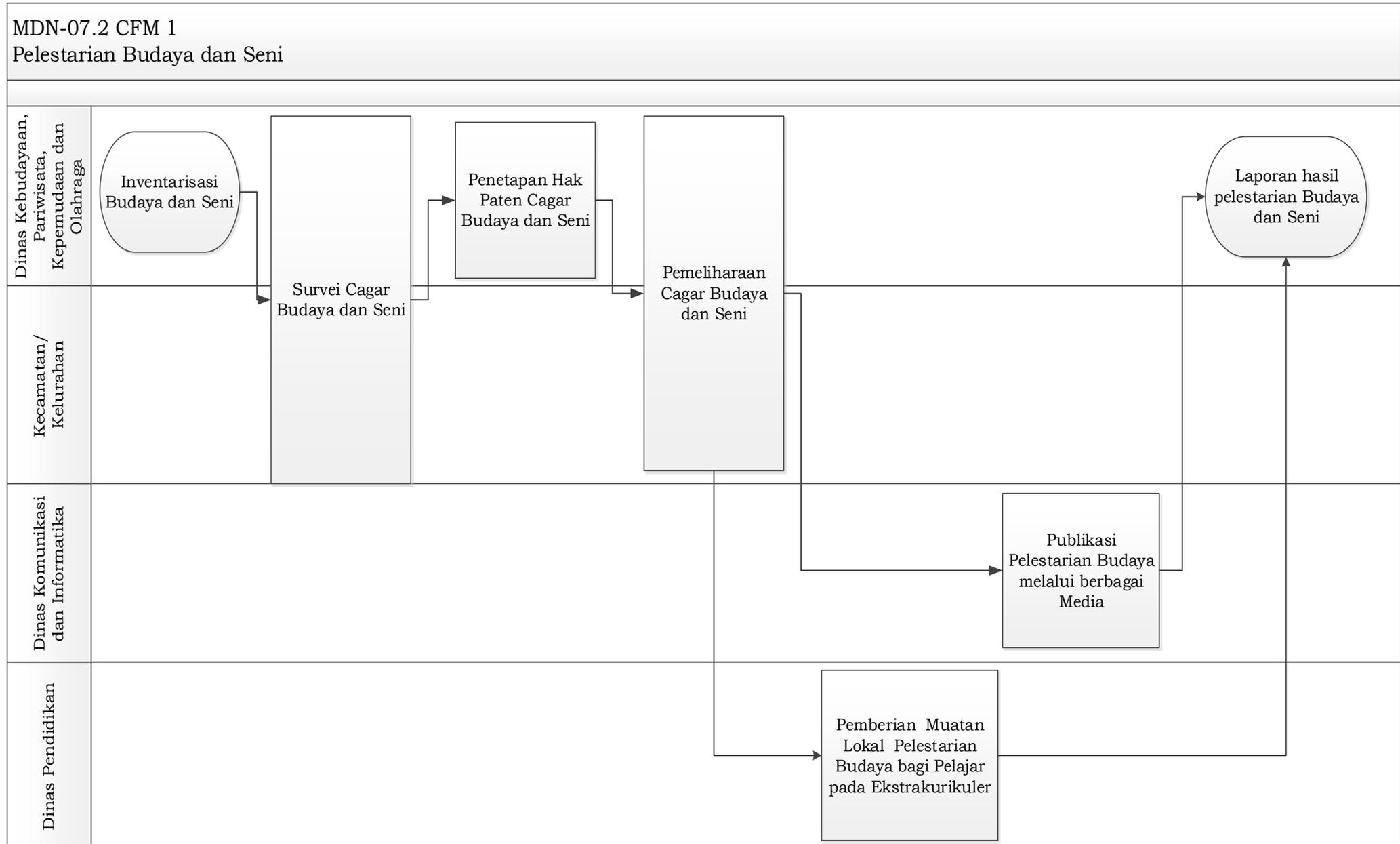


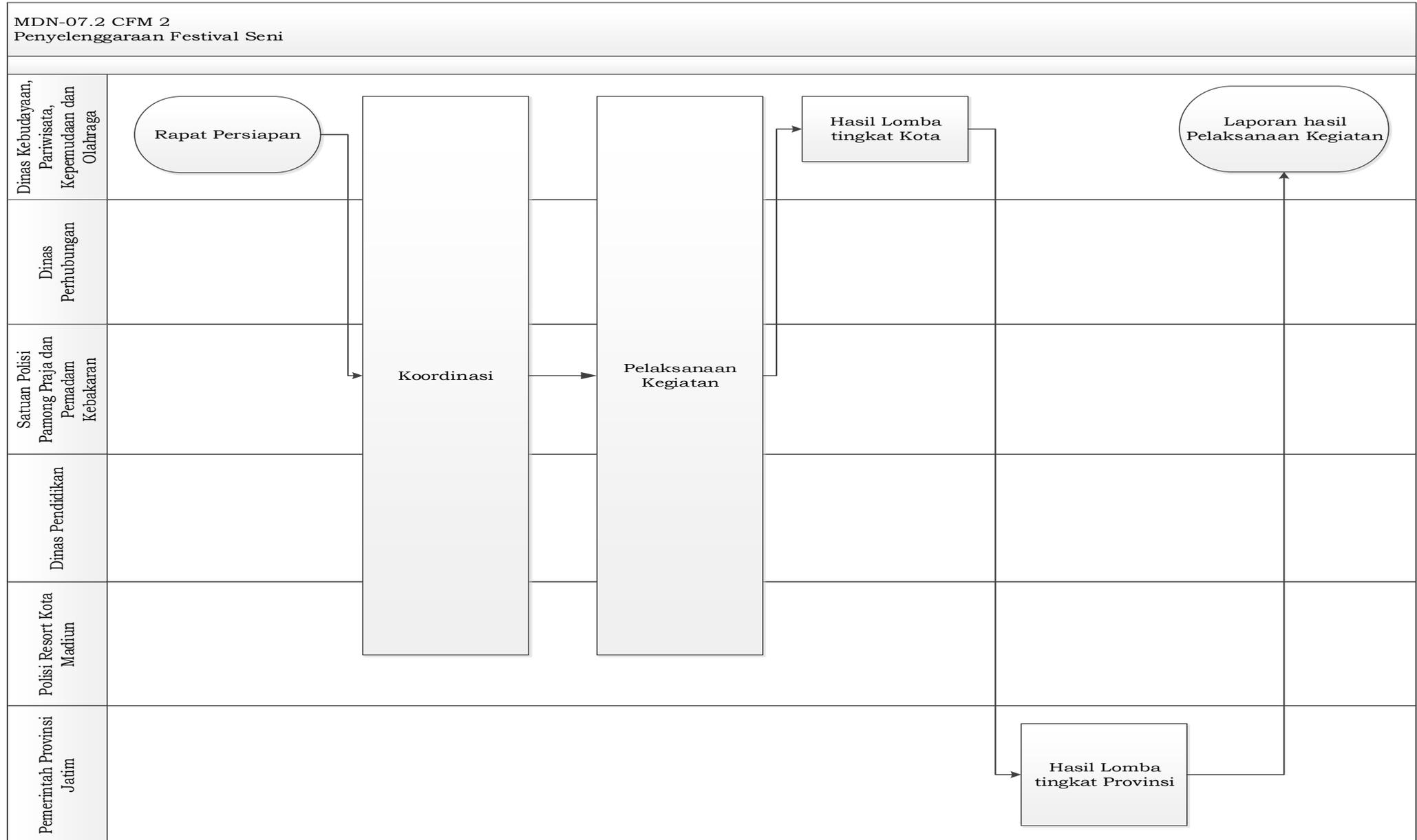
MDN-07.1 CFM 4

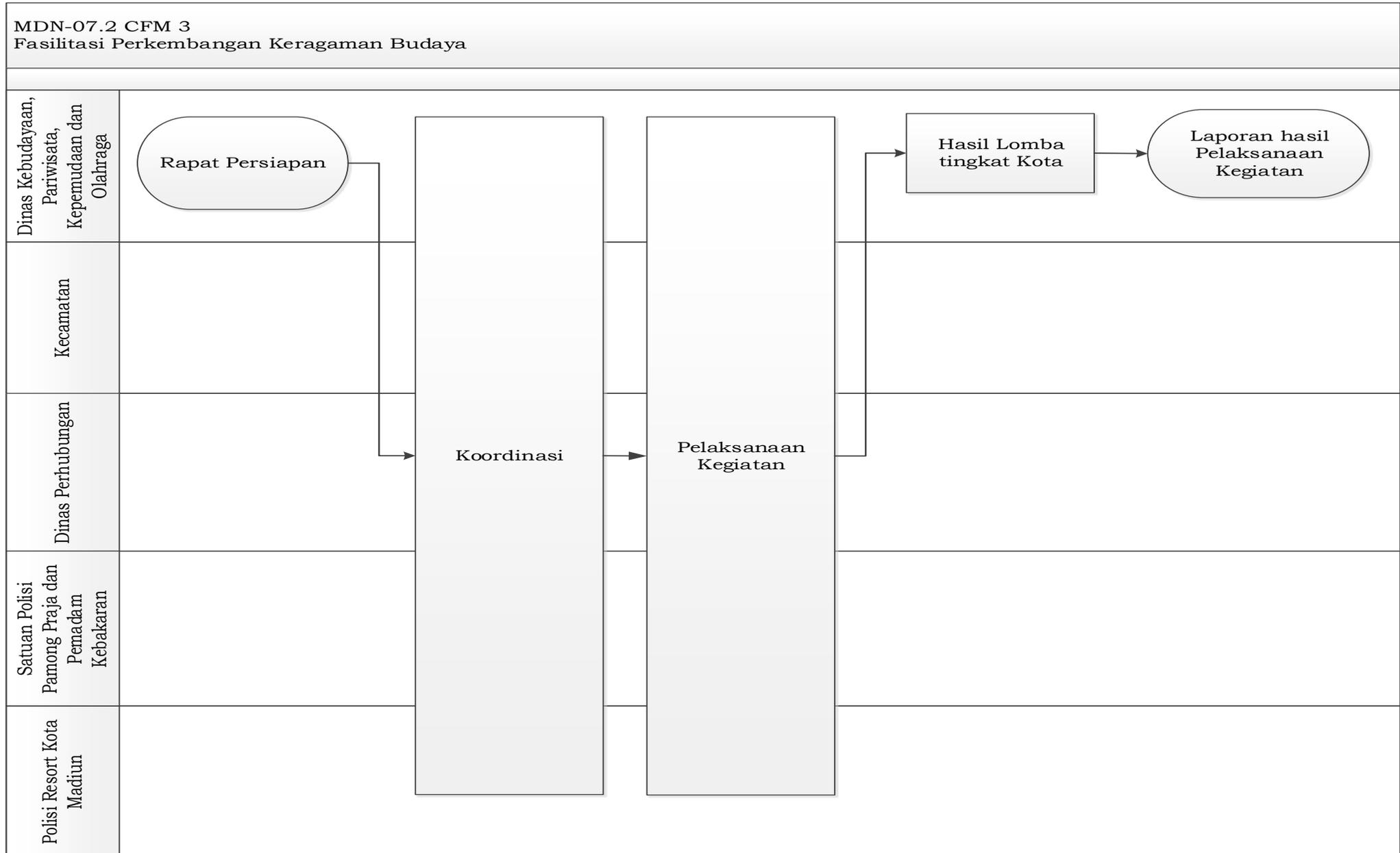
Workshop Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

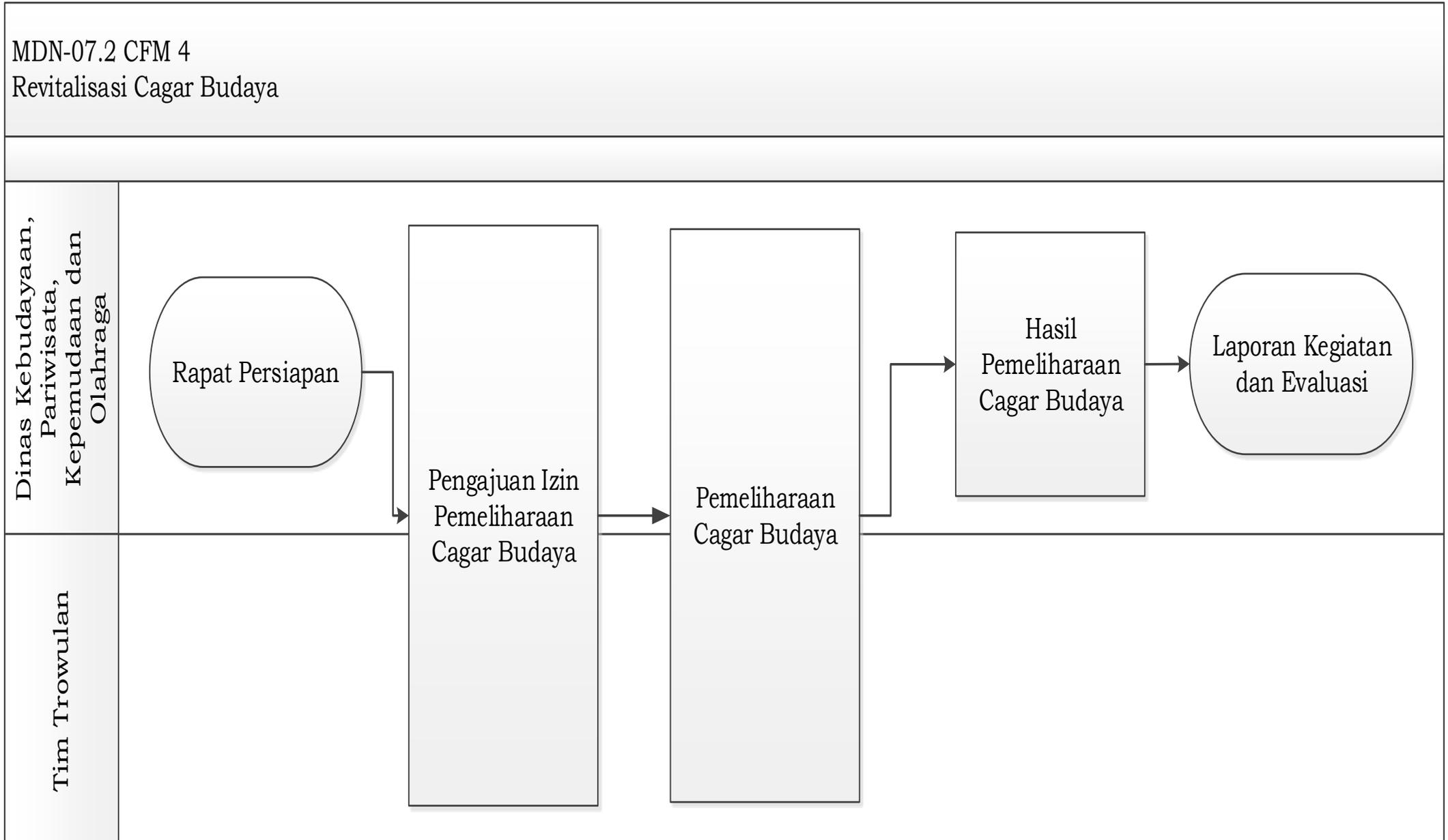


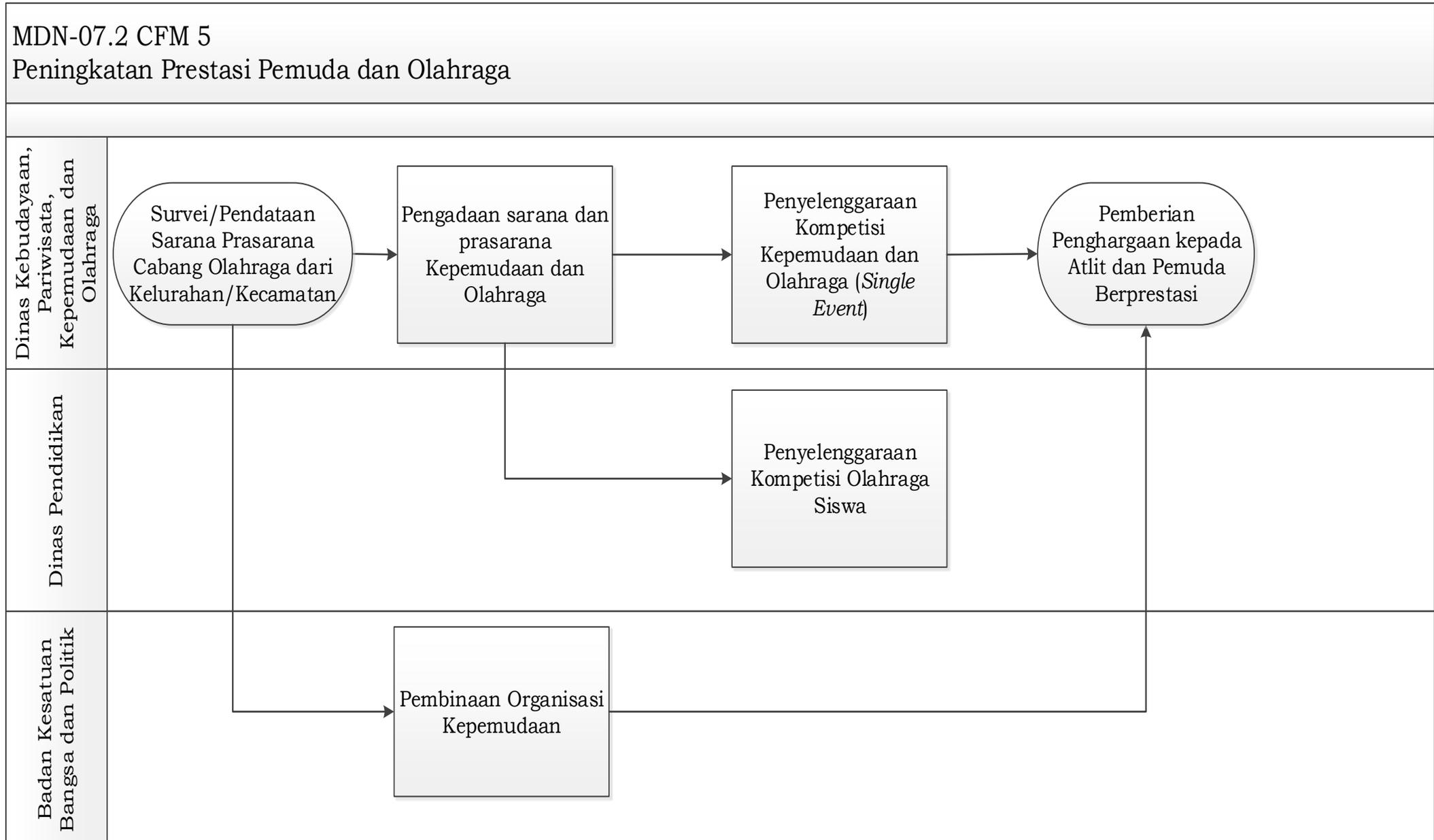


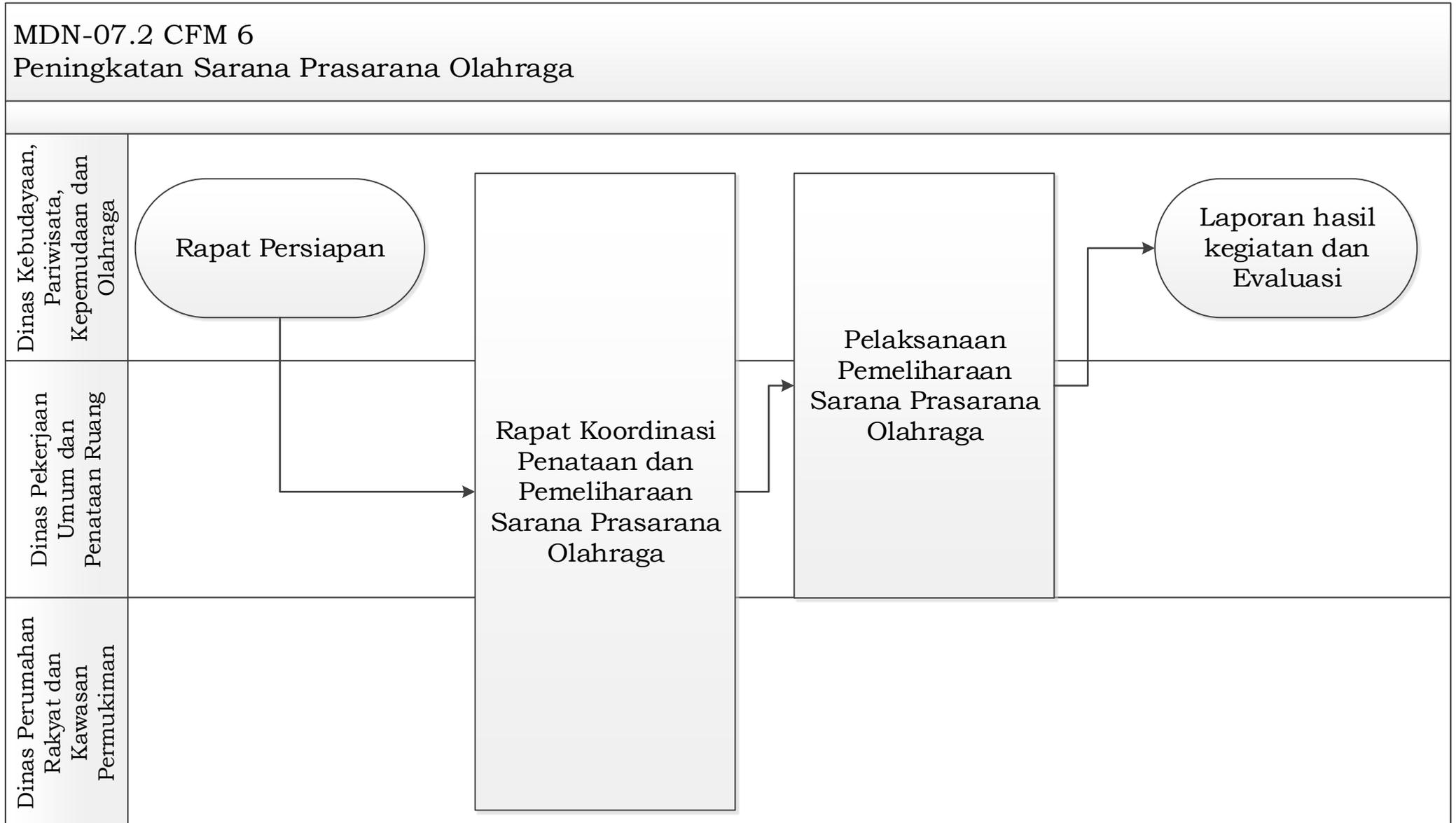


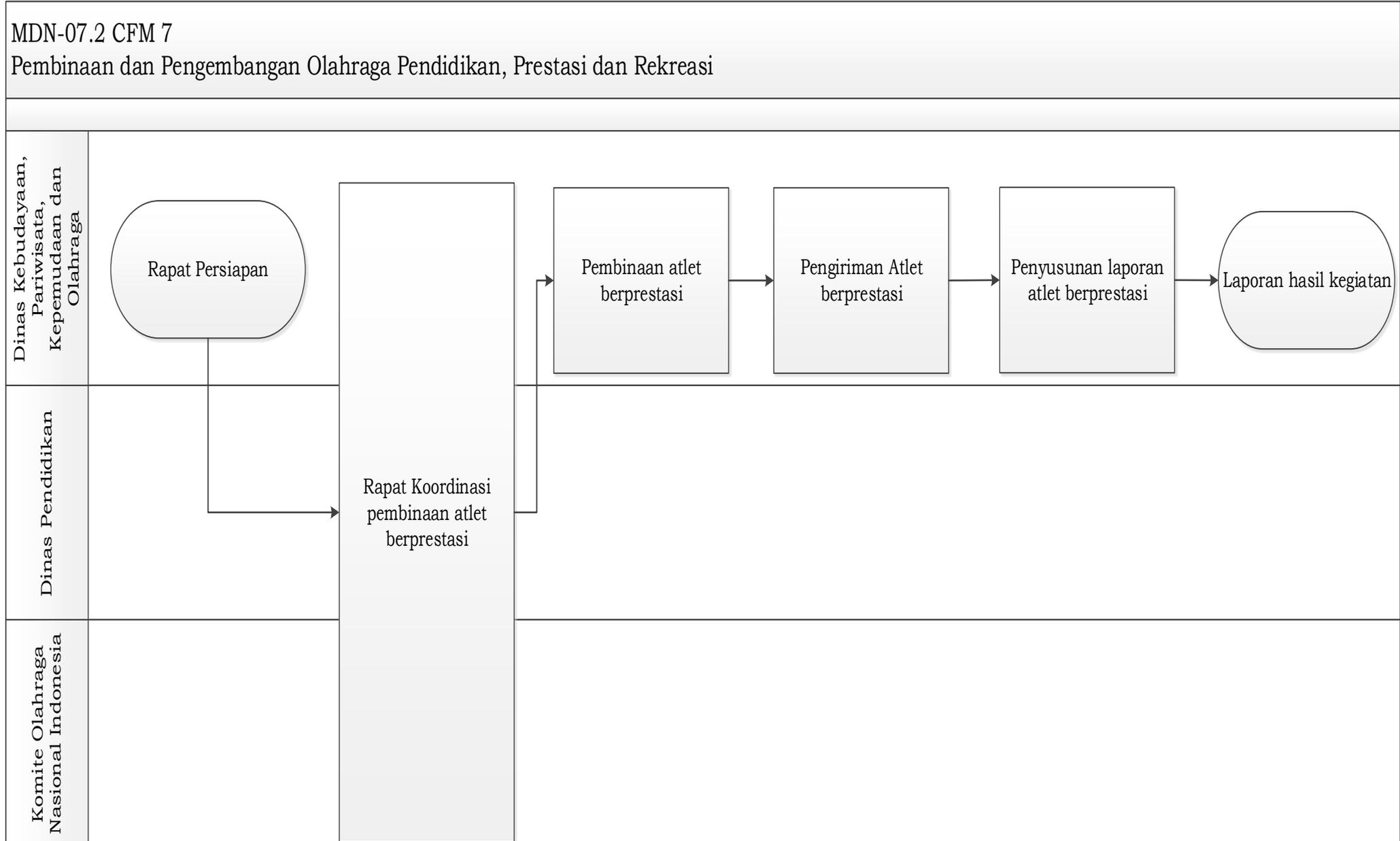


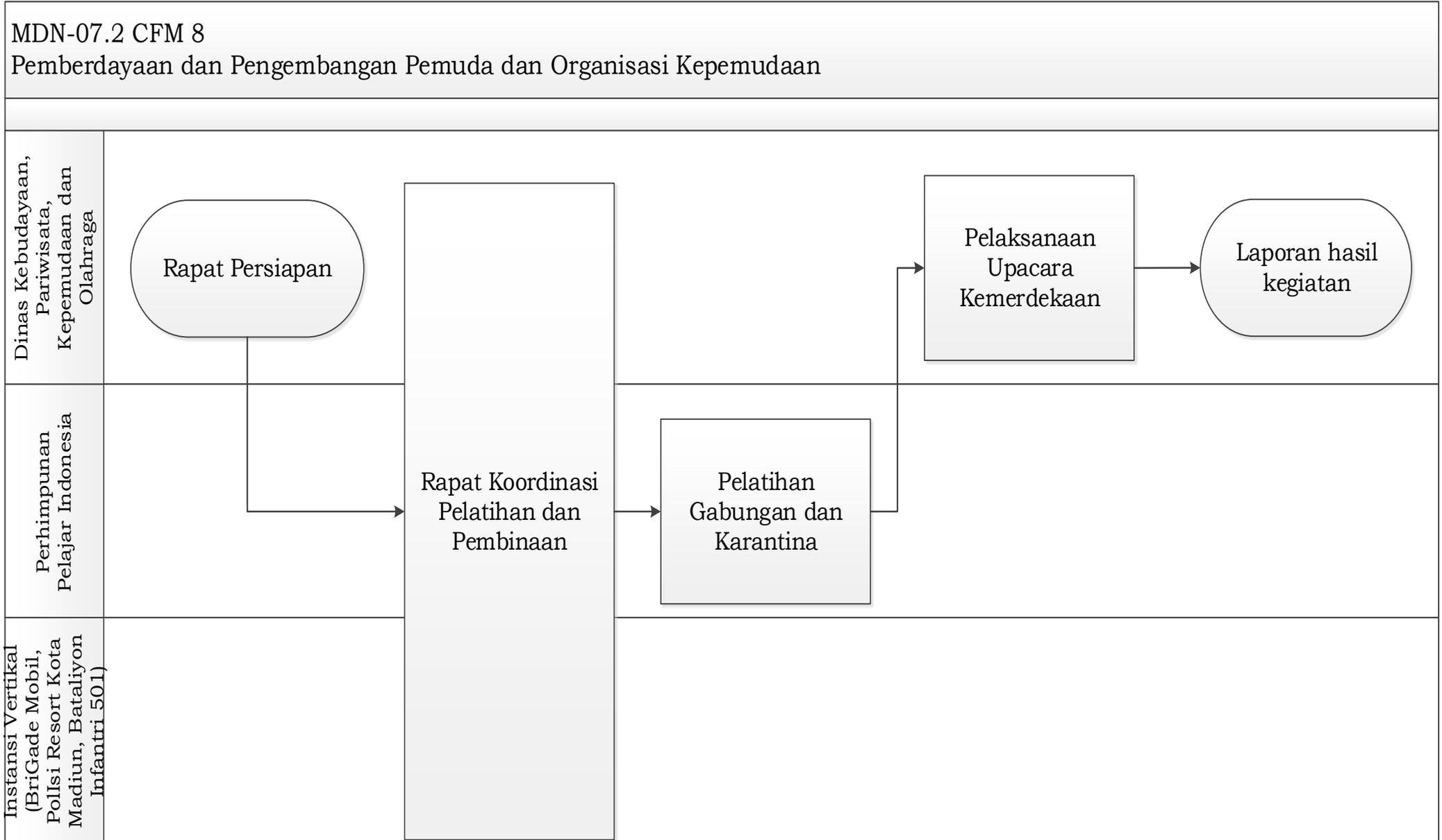


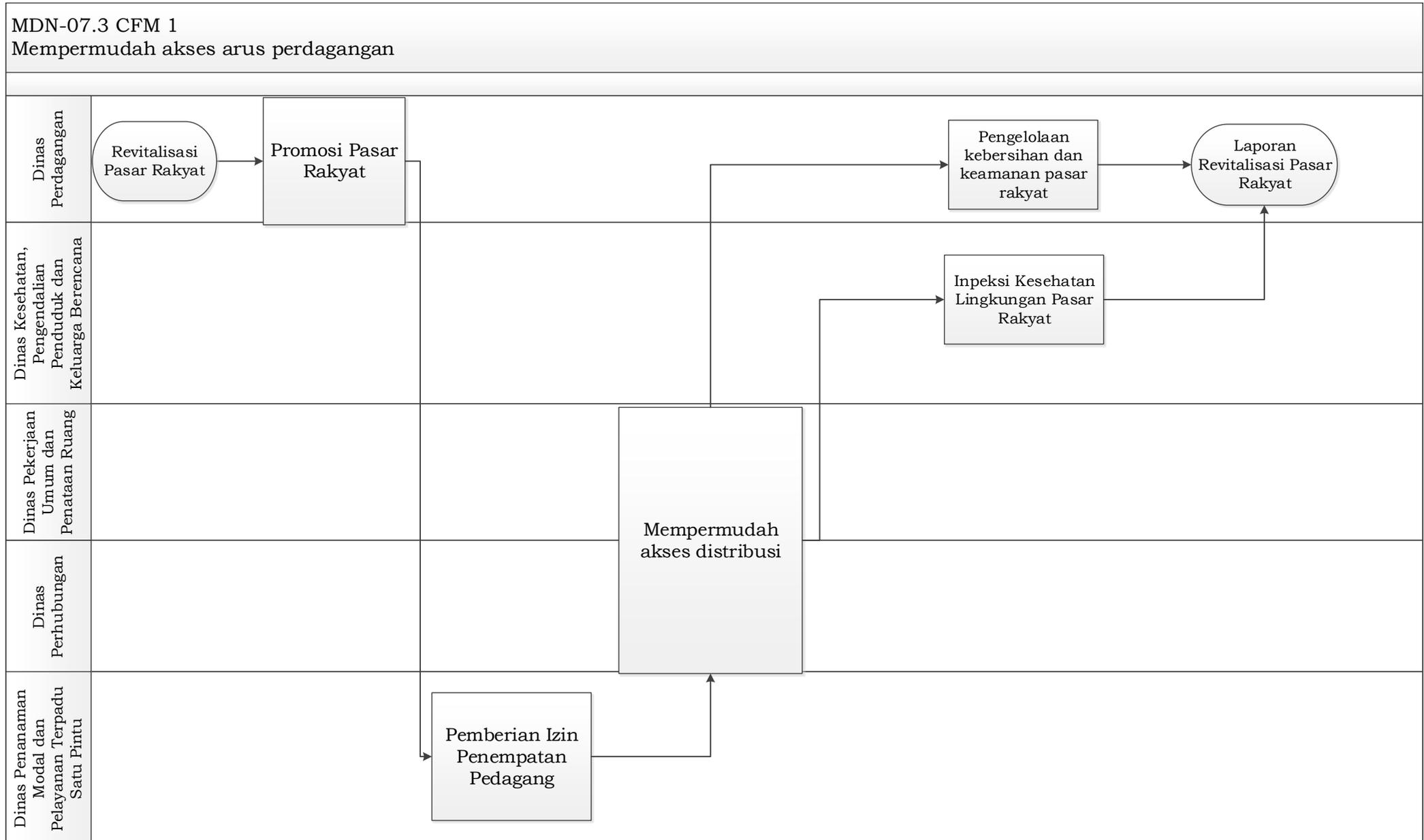


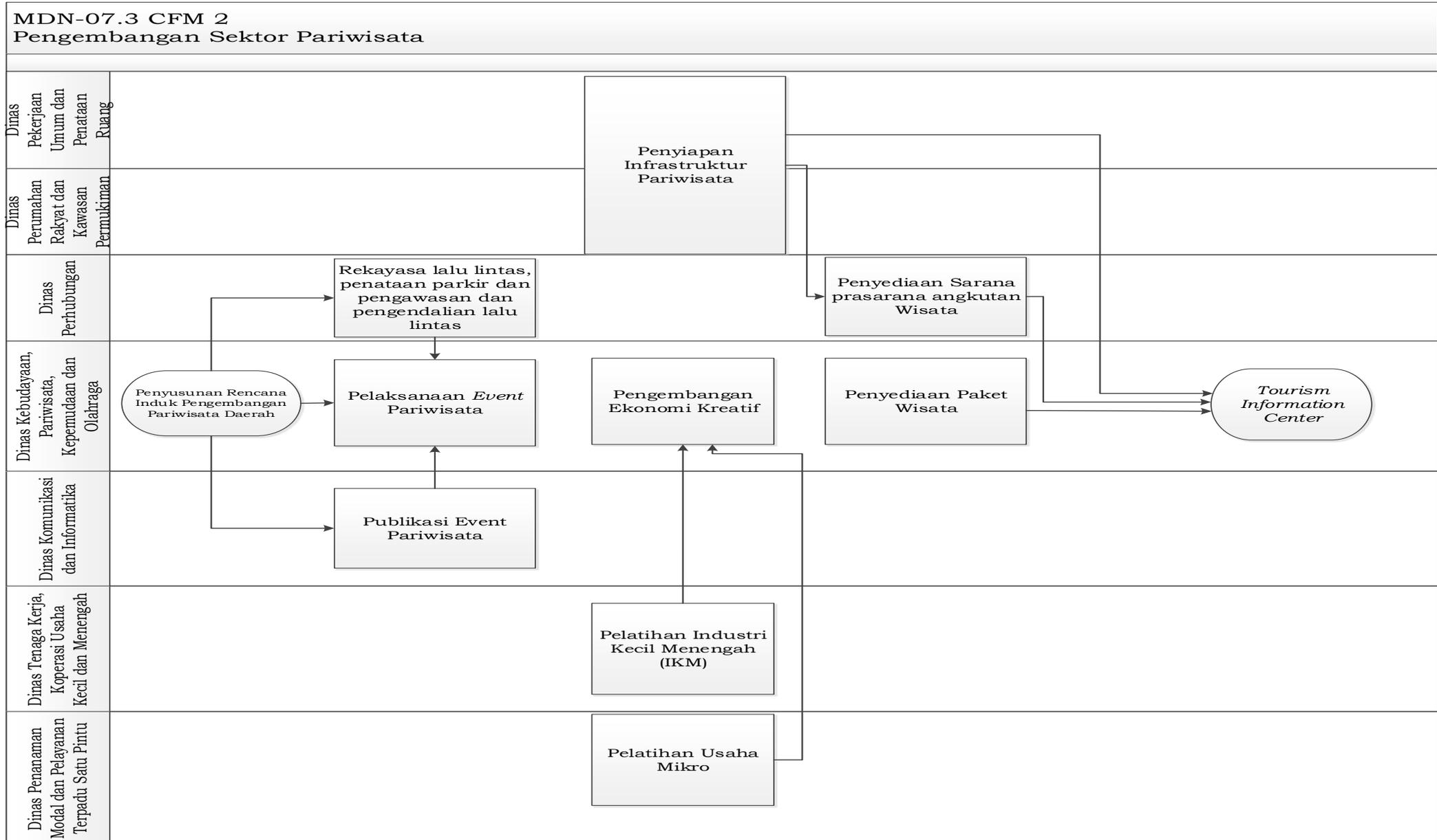


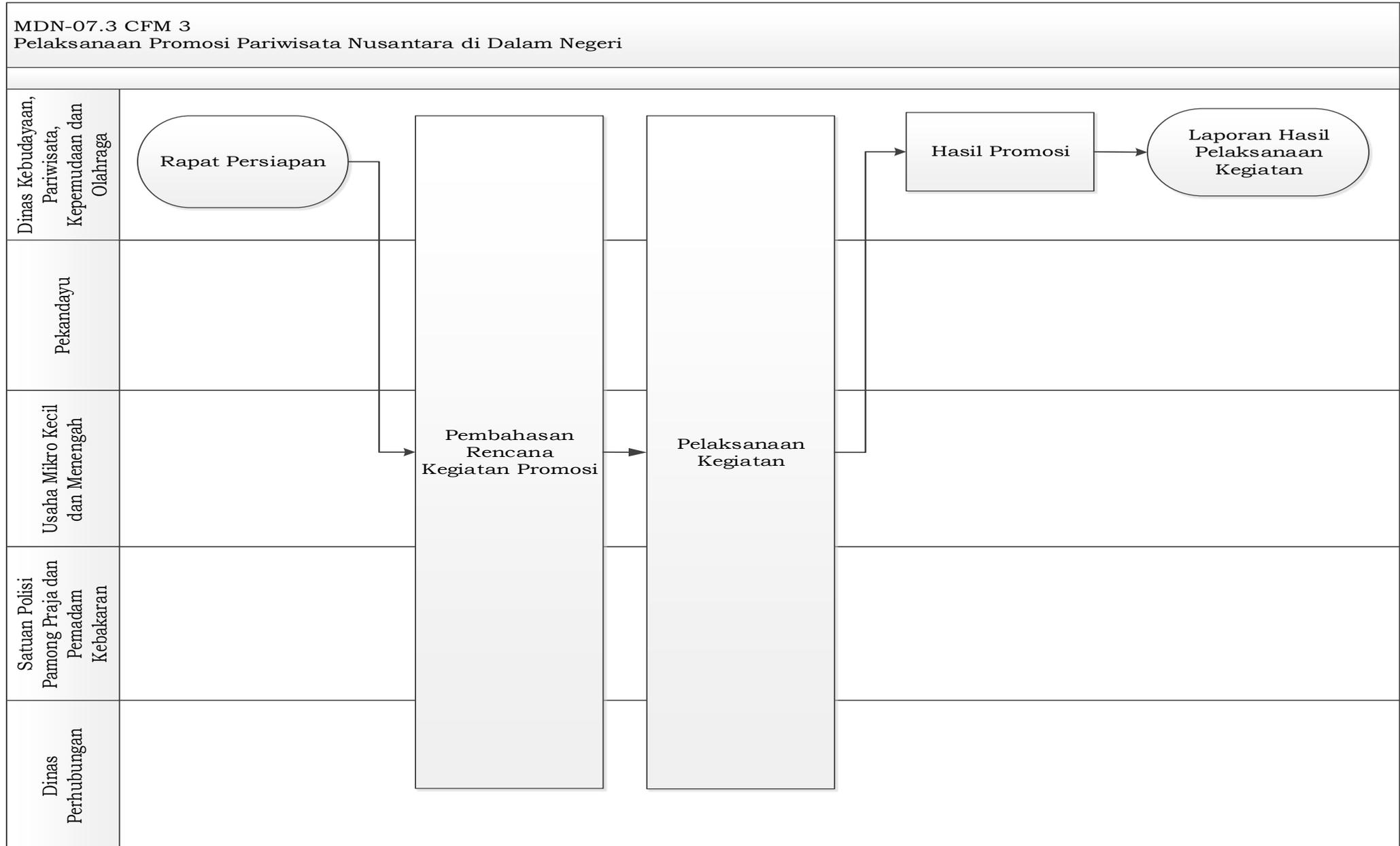


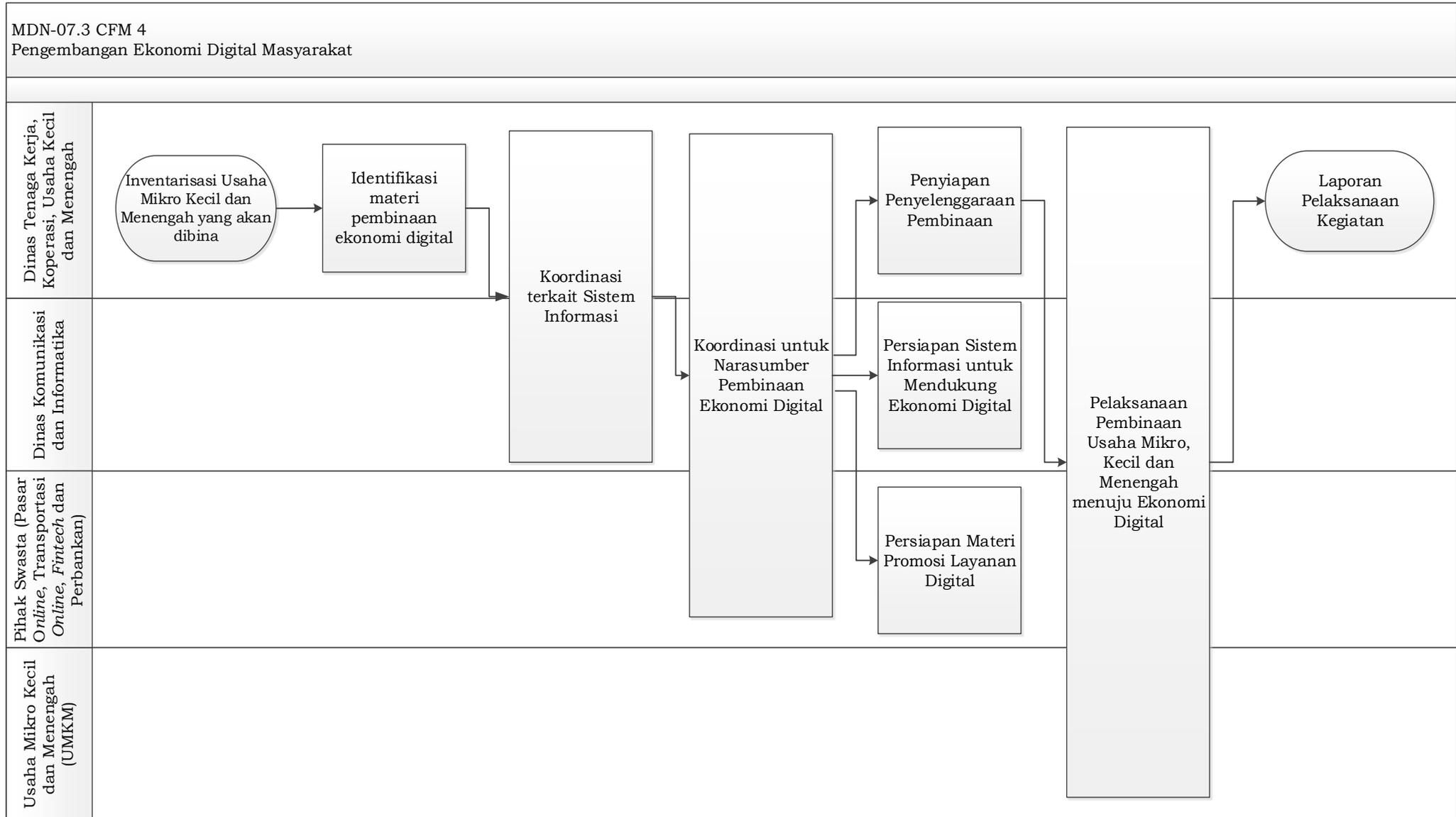






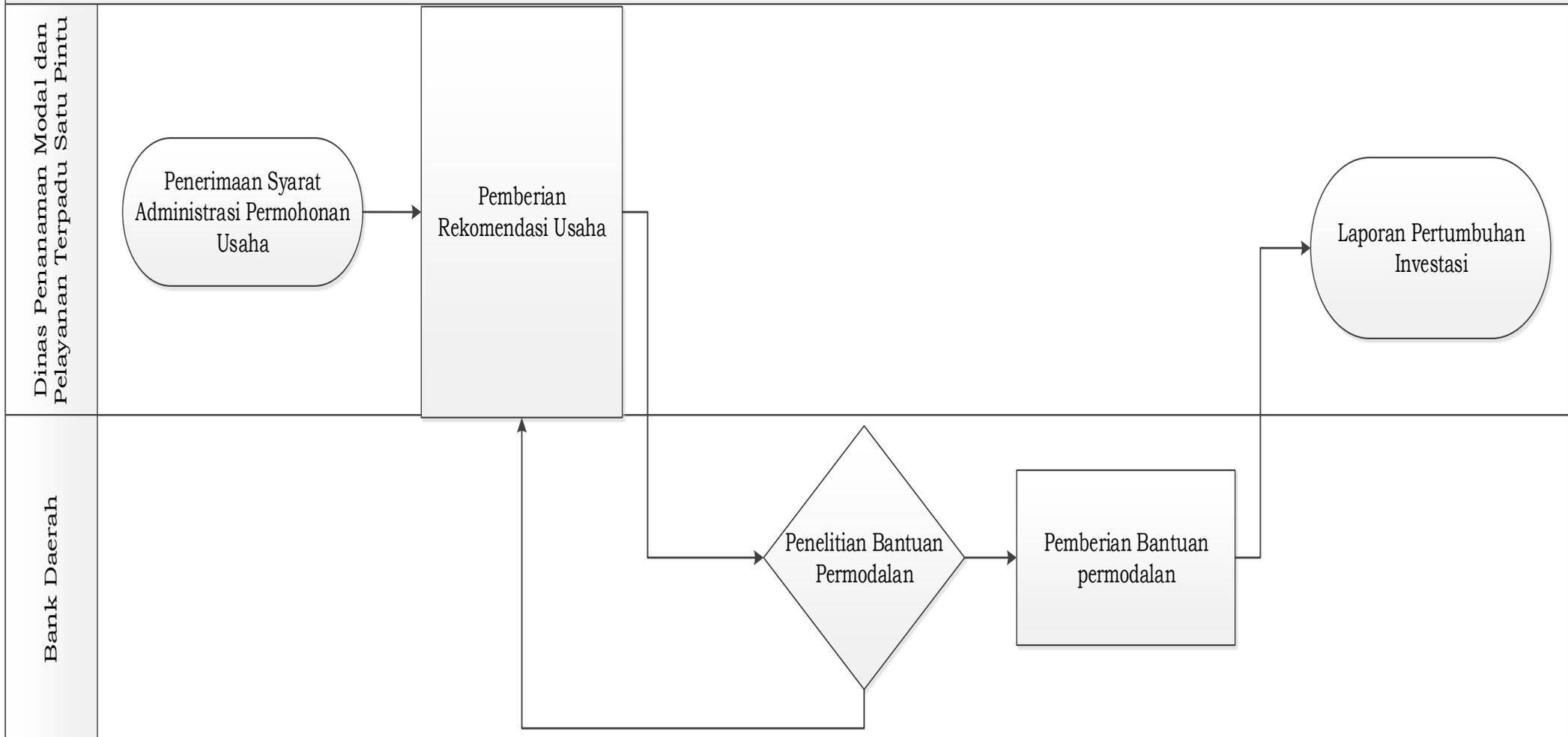


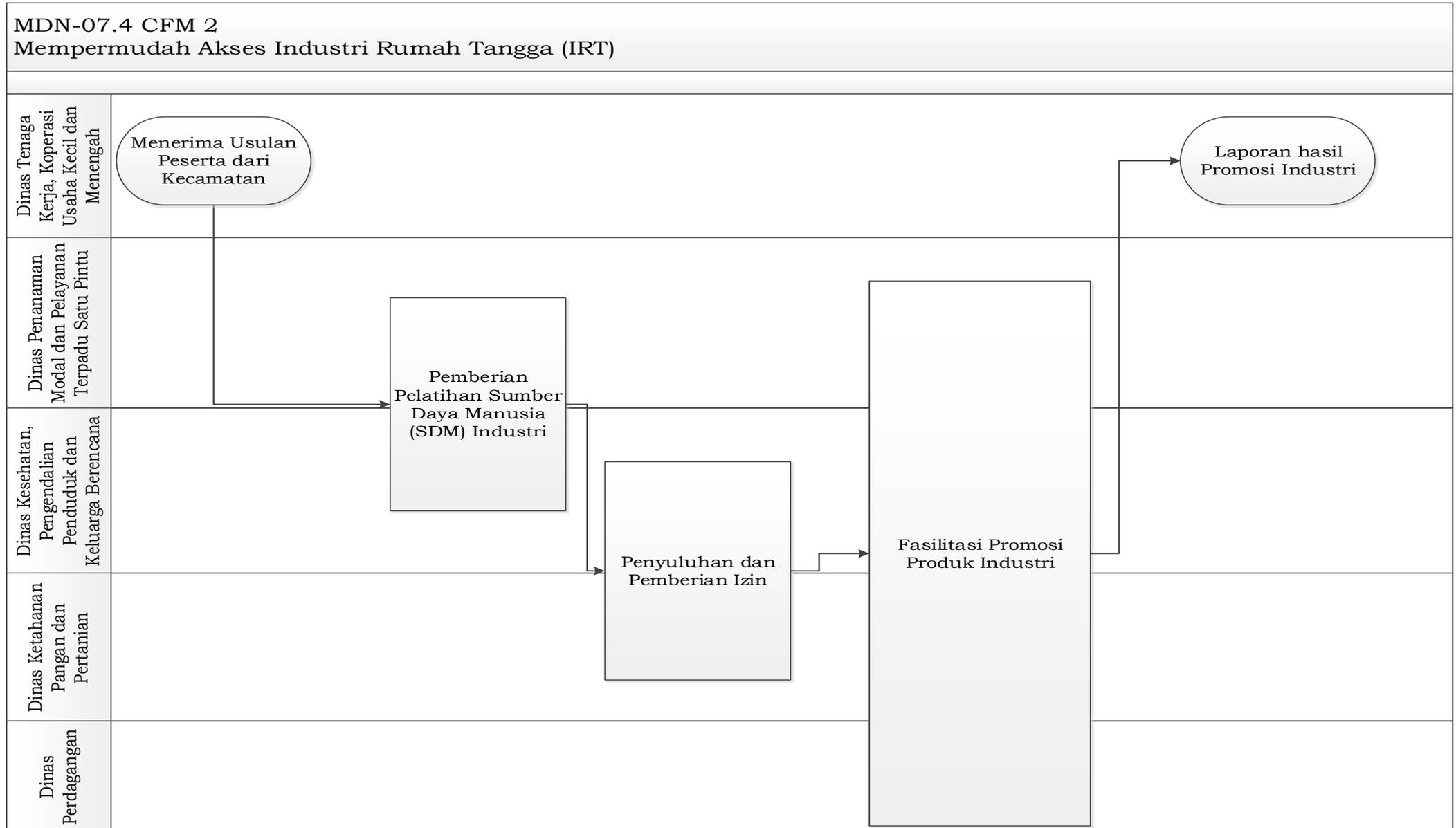


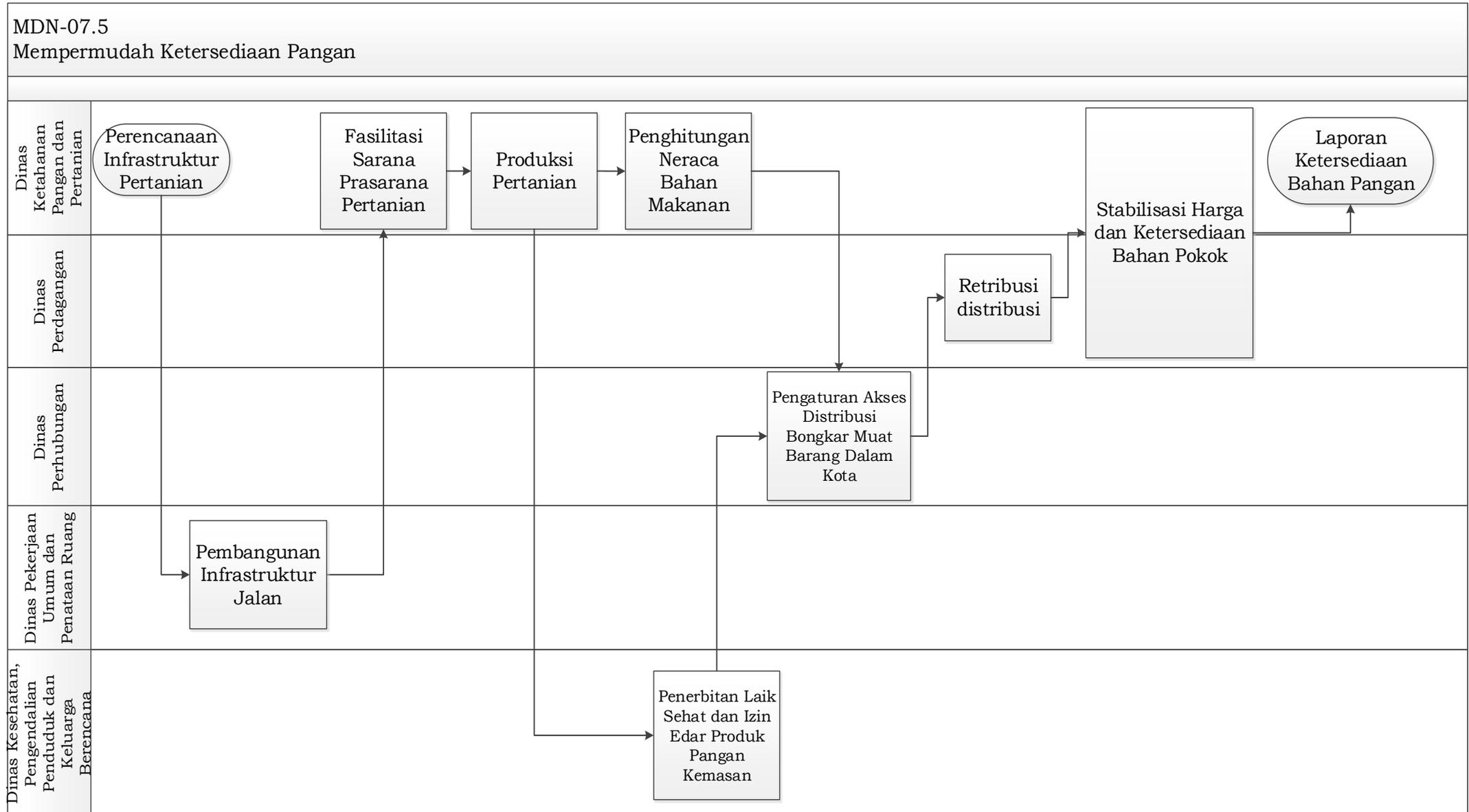


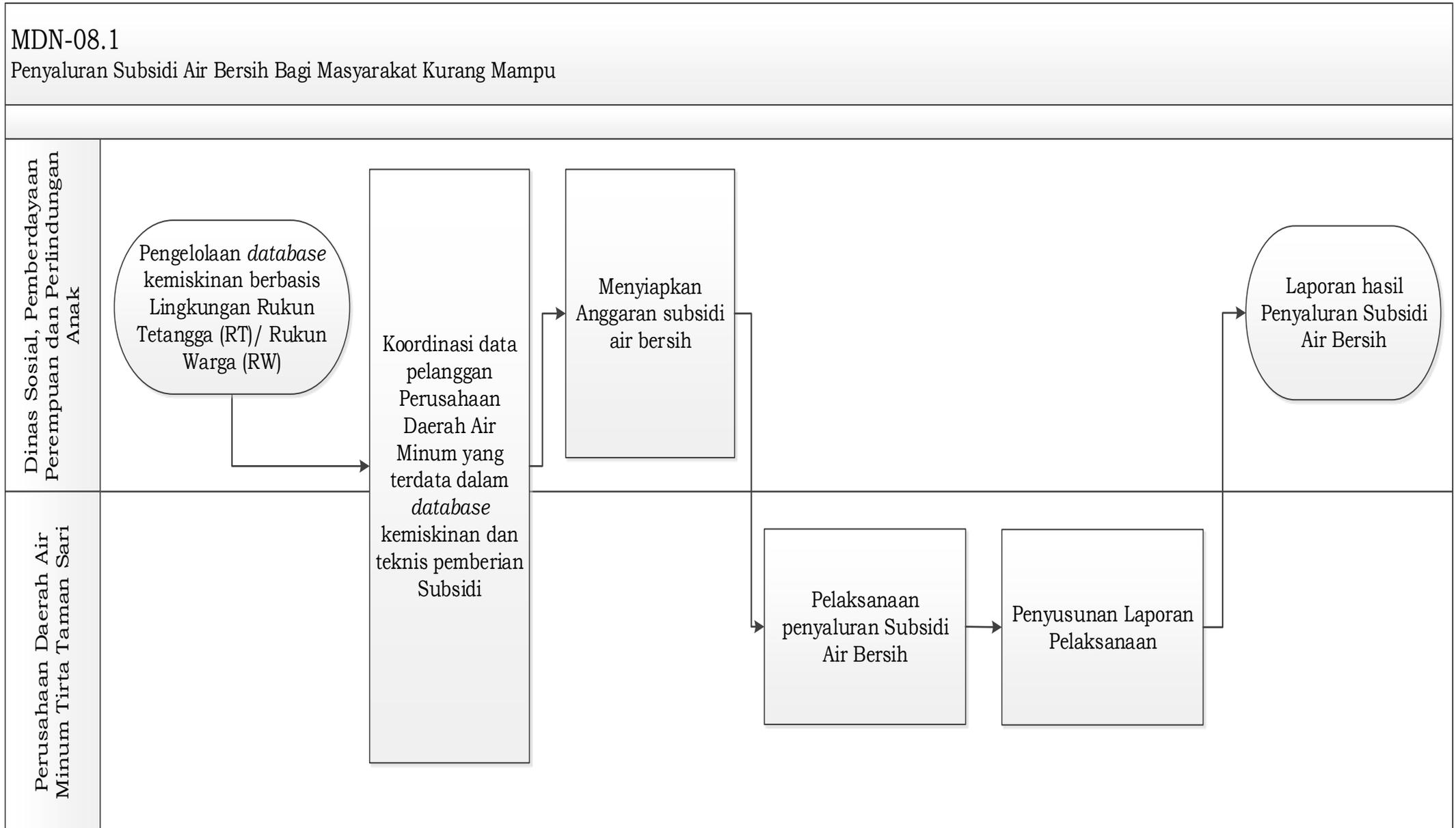
MDN-07.4 CFM 1

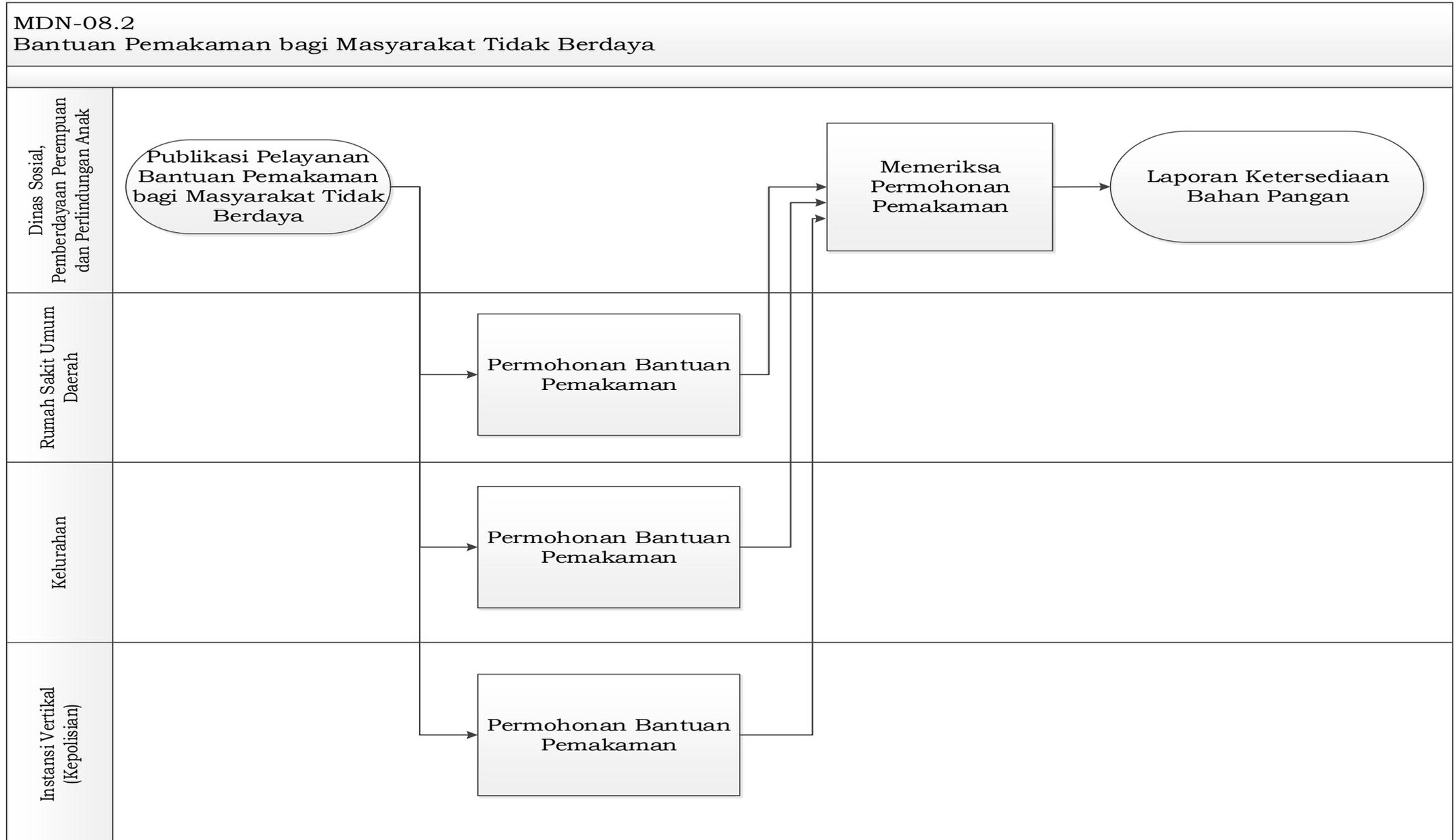
Mempermudah Akses Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM)

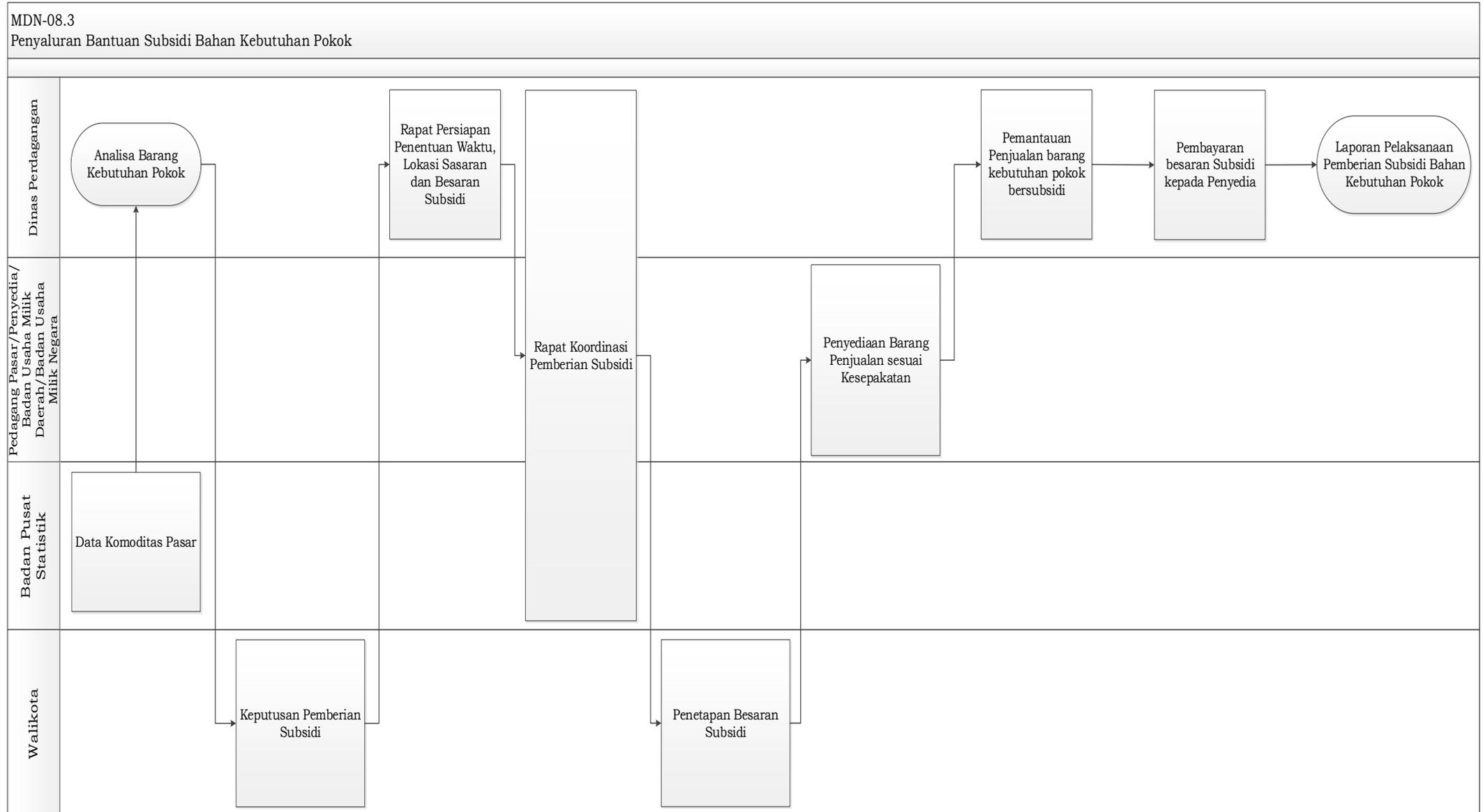


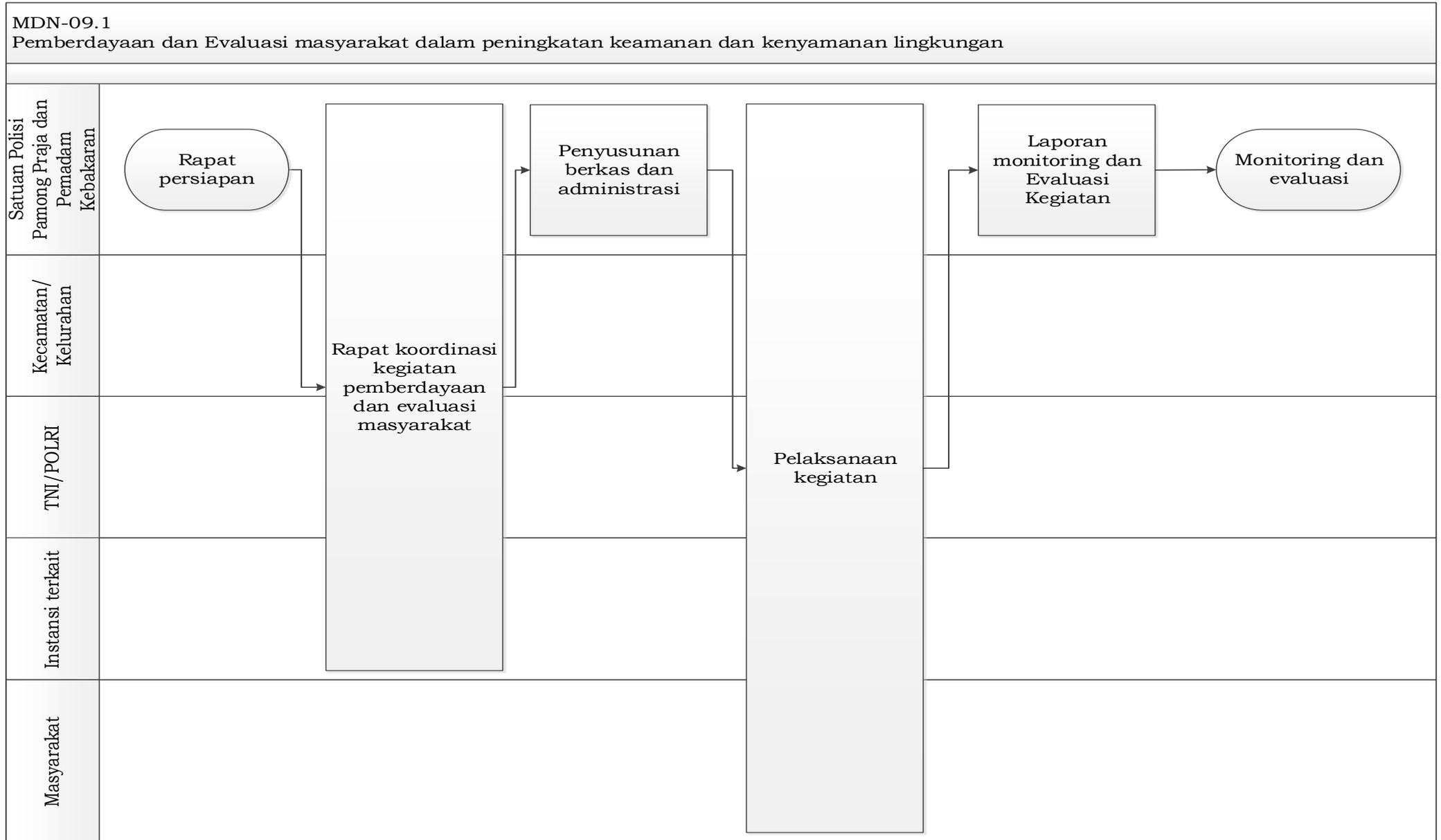


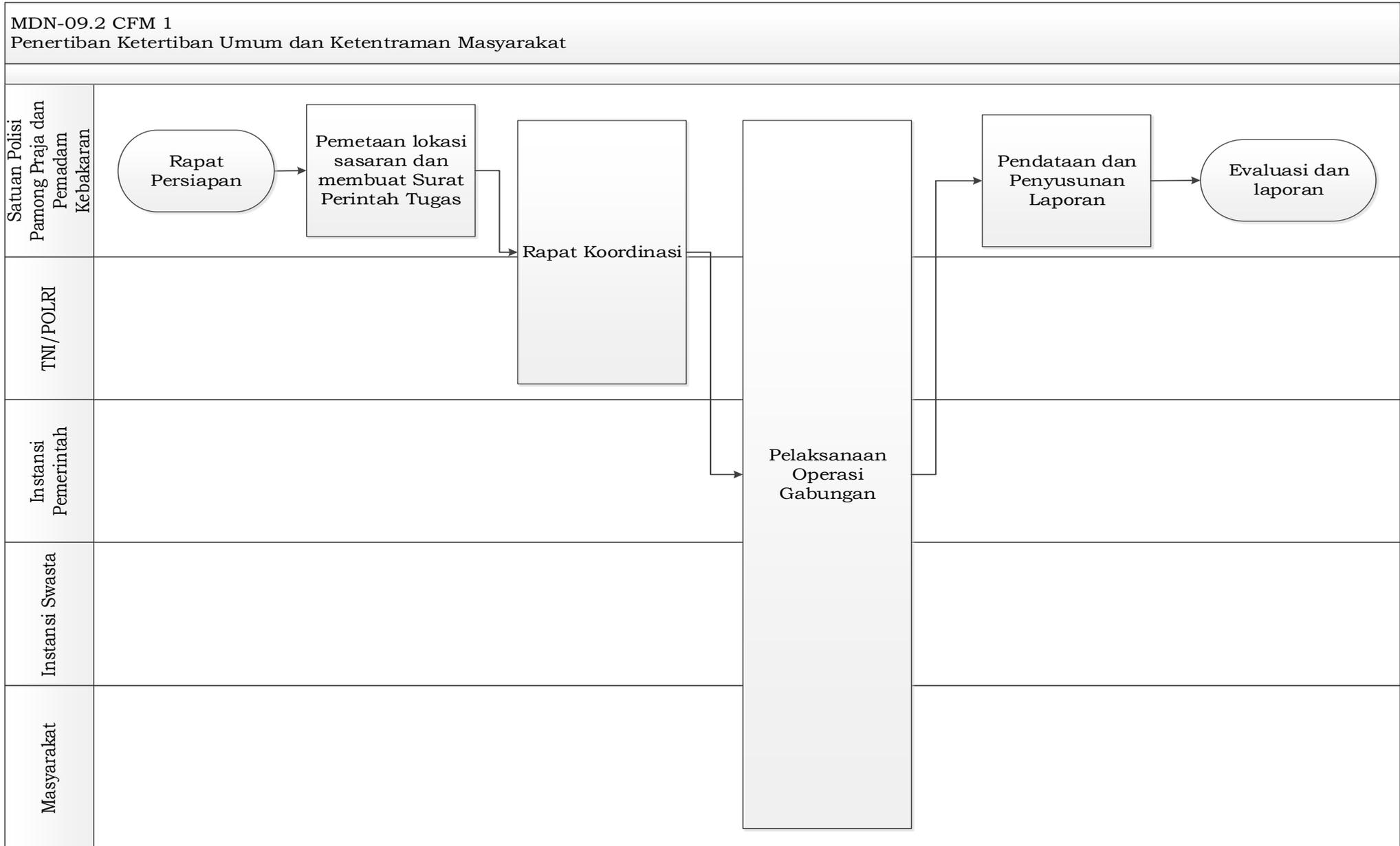


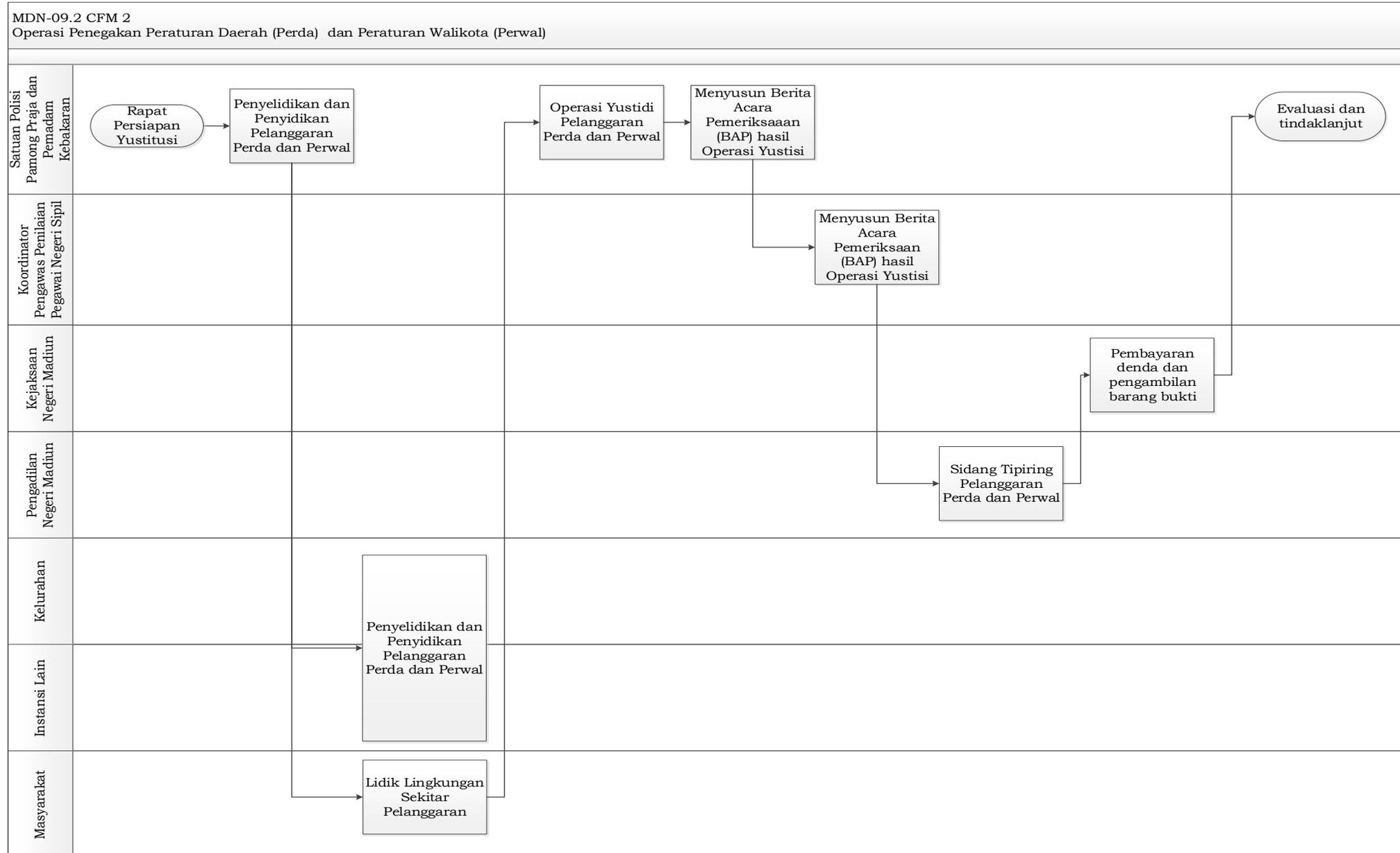


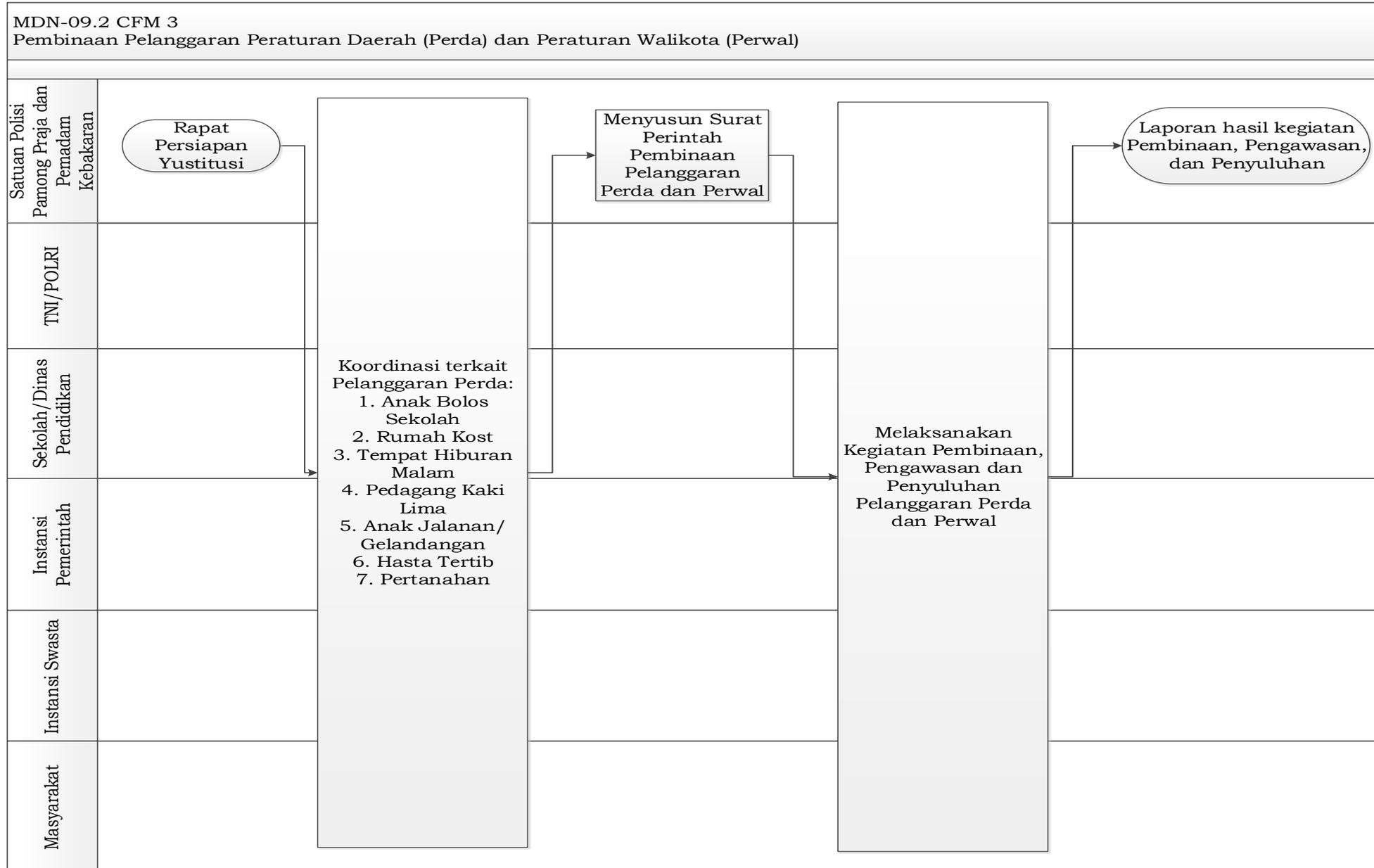


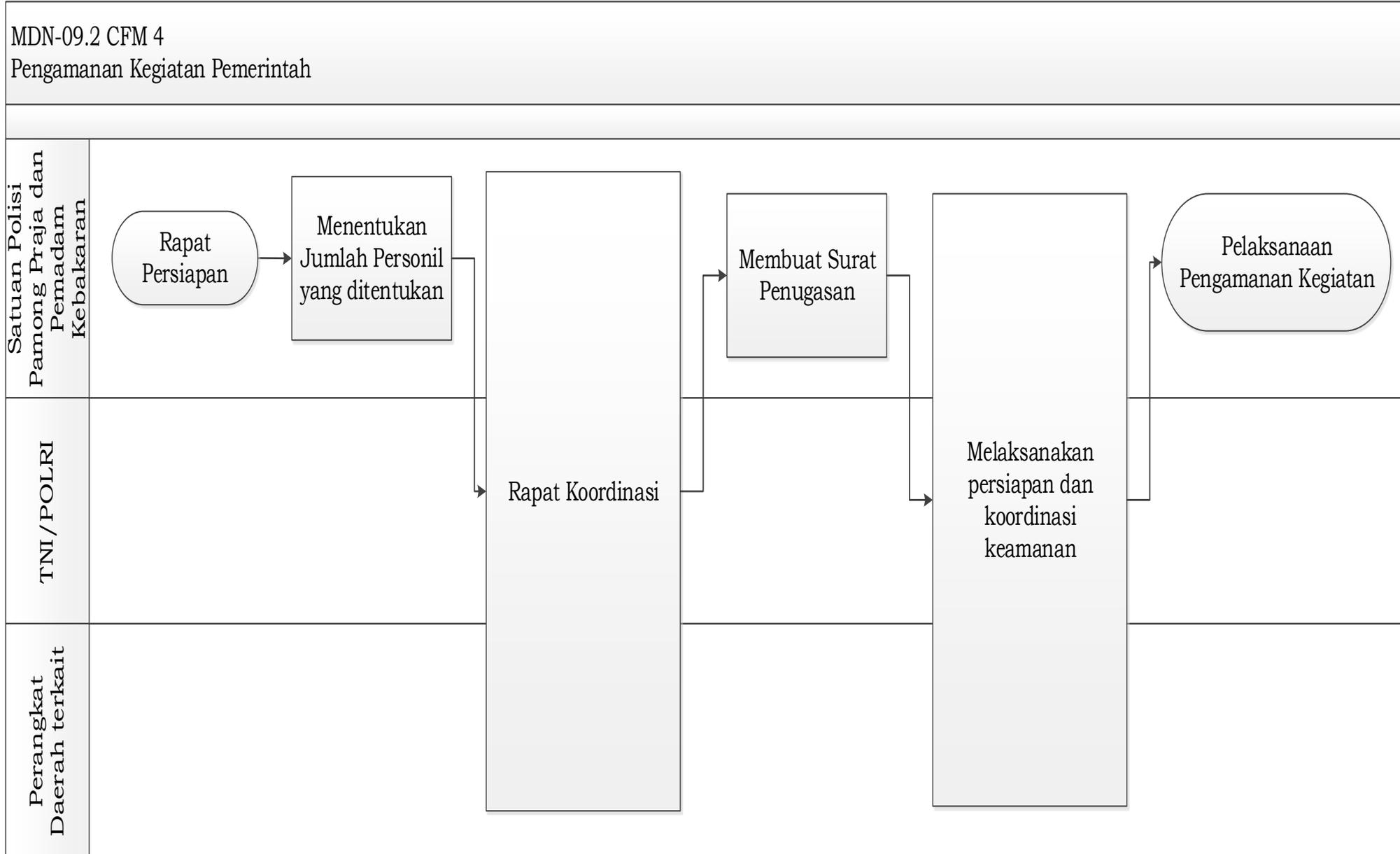


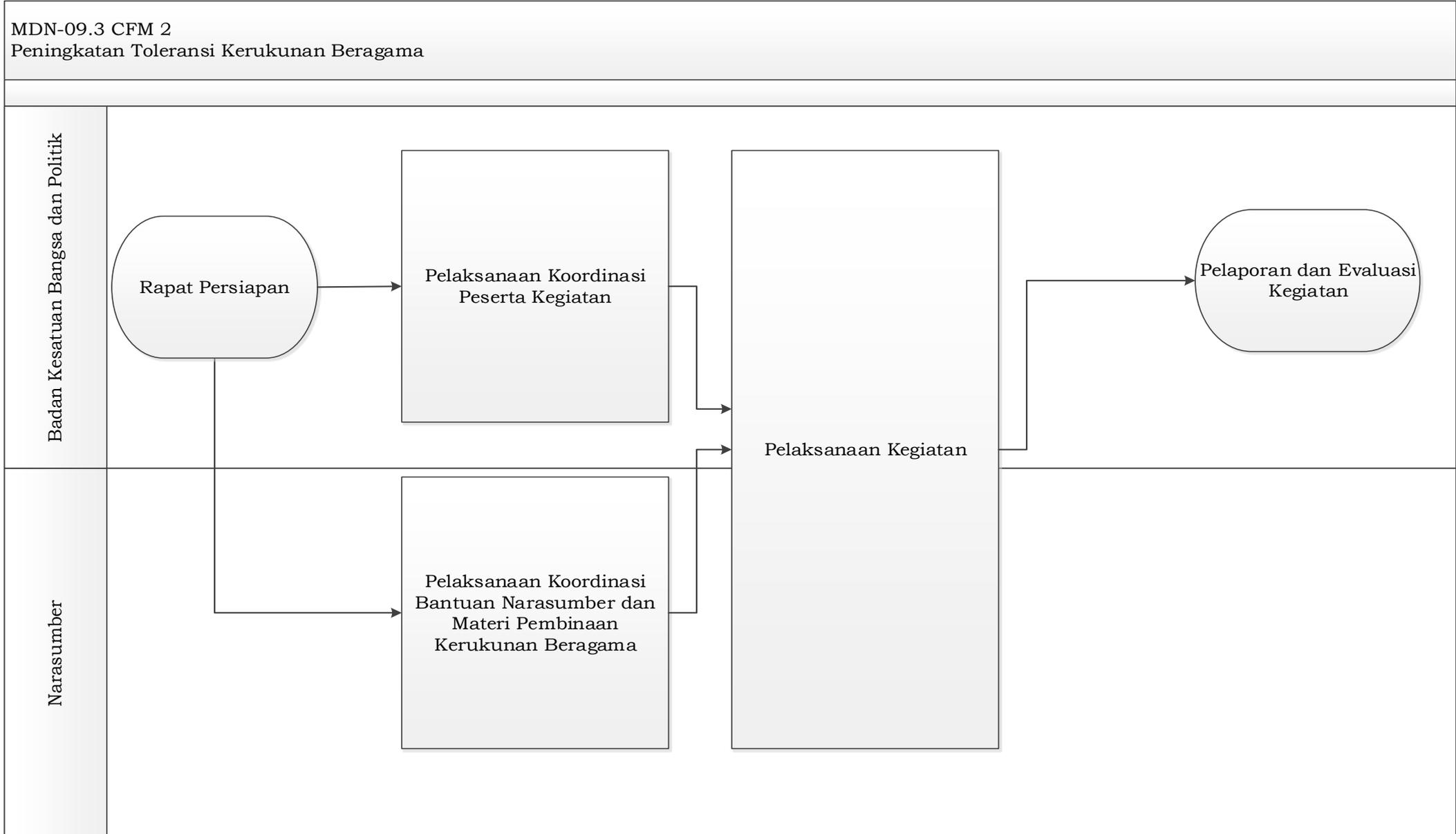


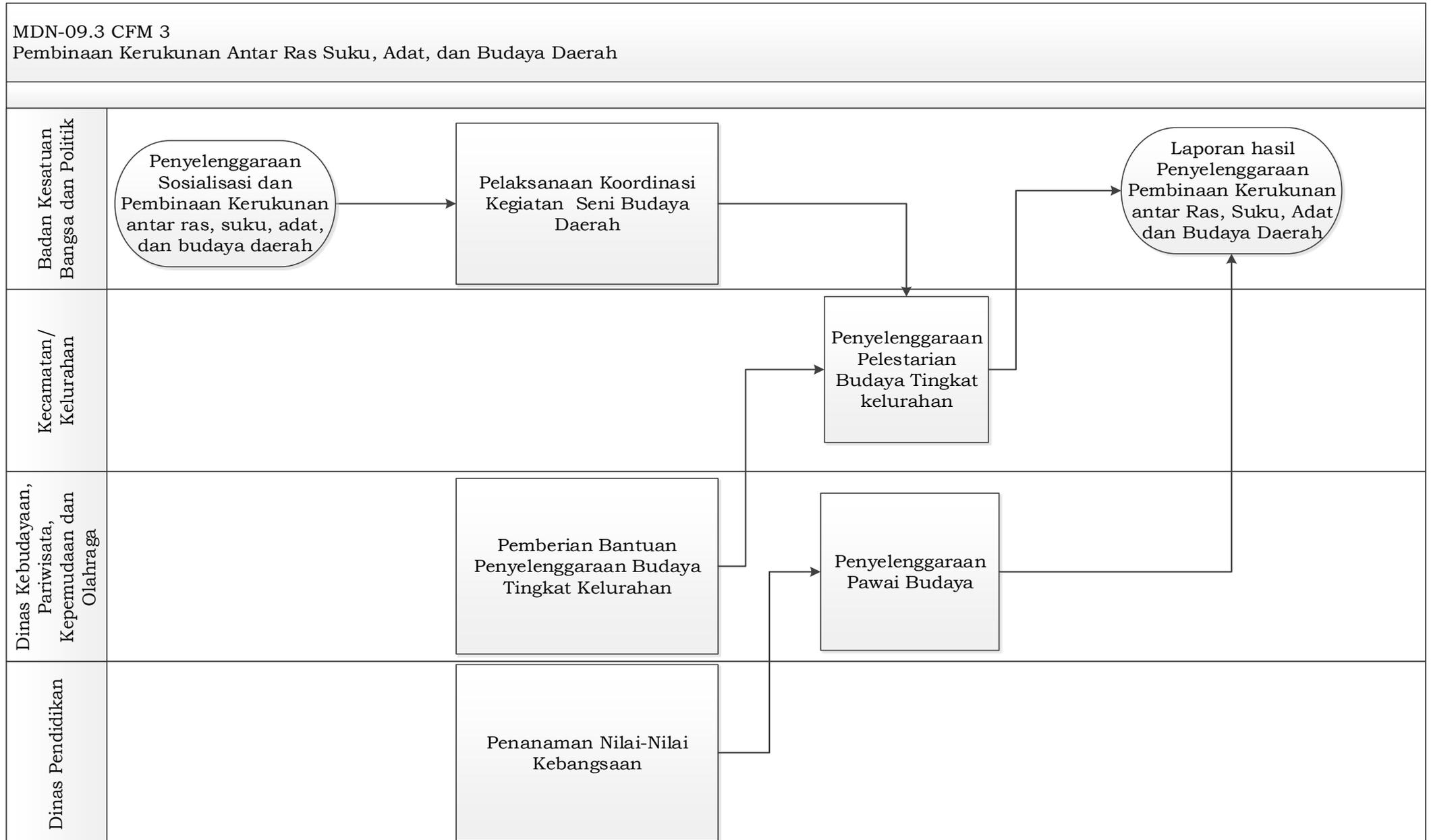


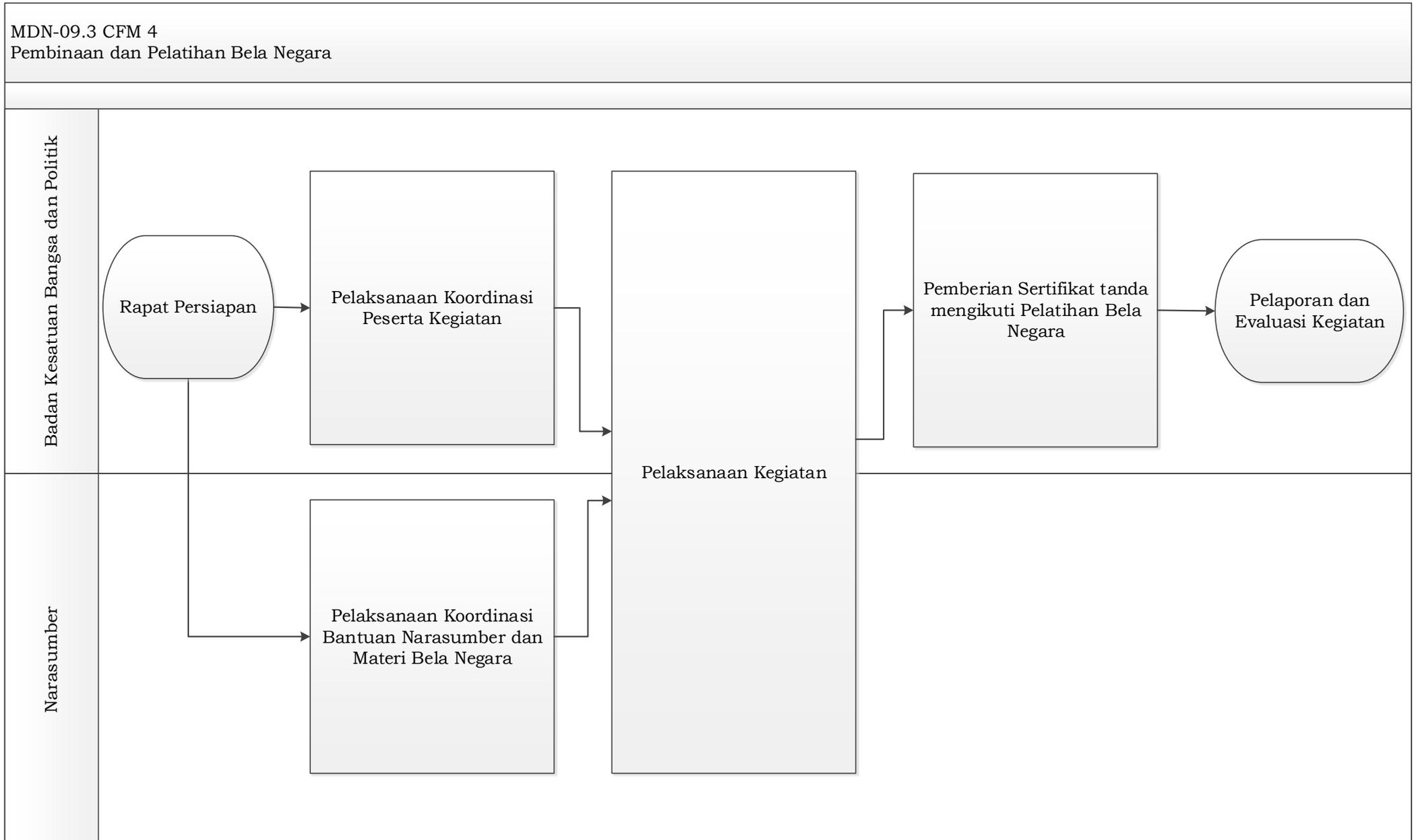


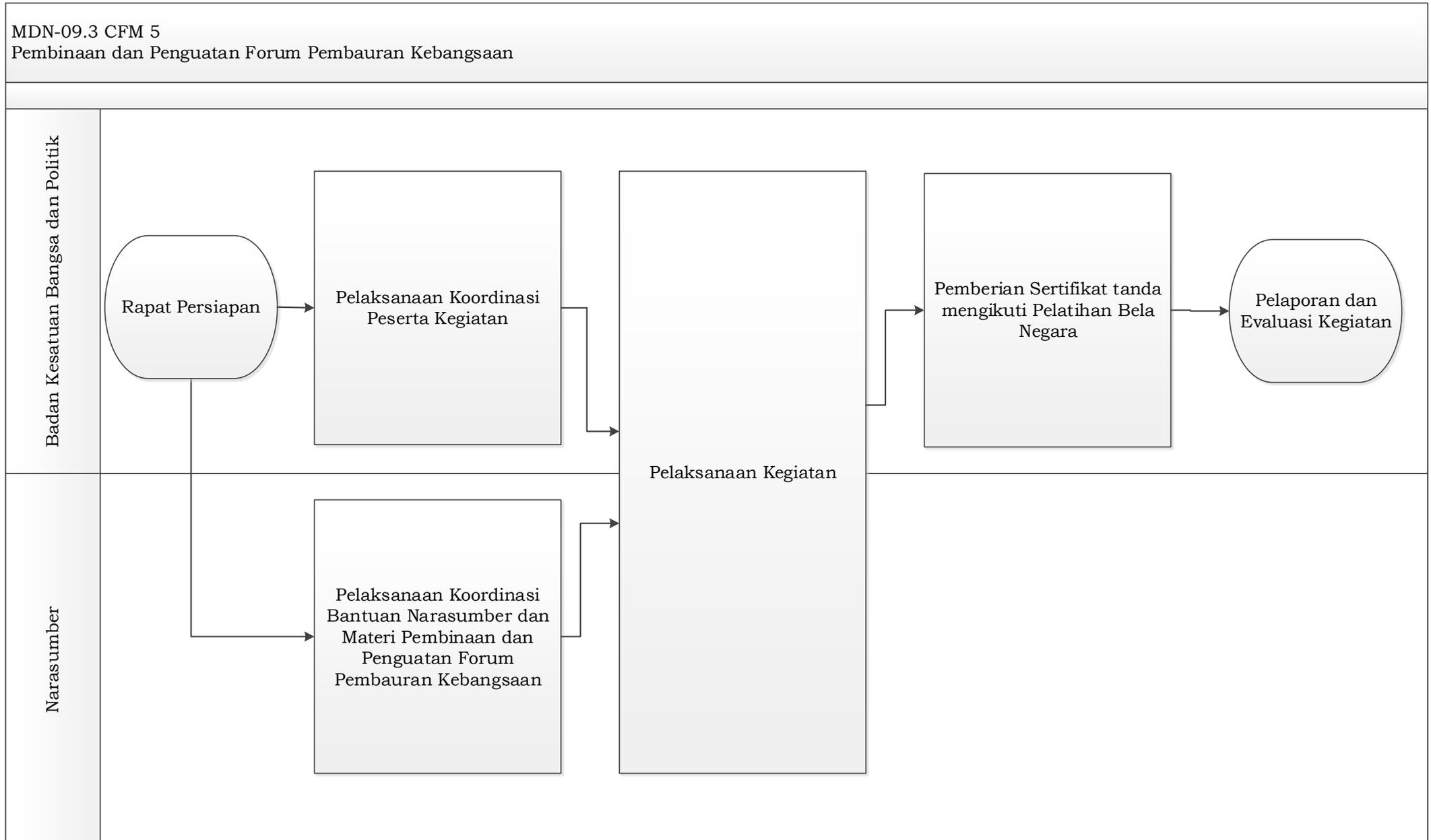


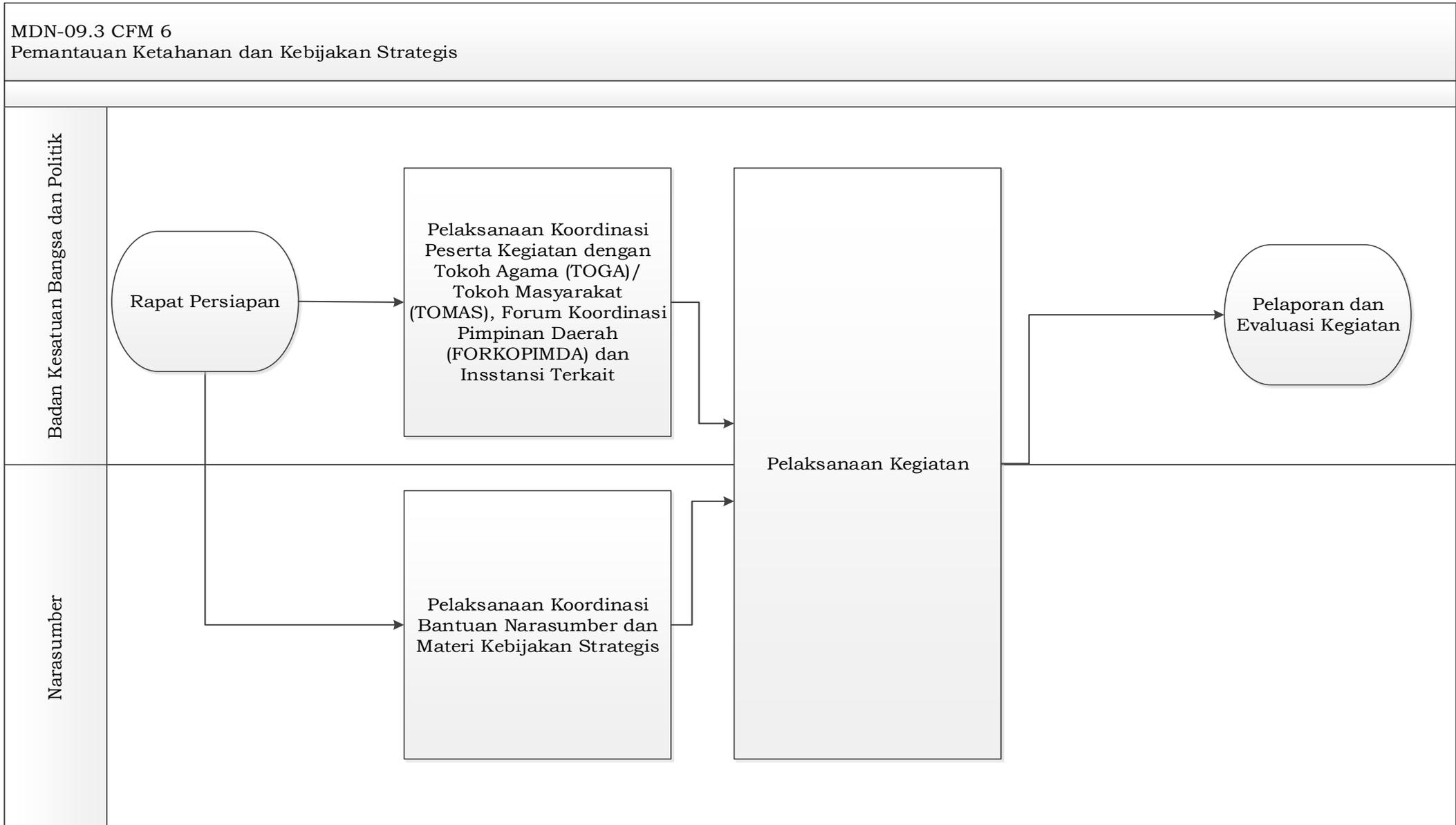


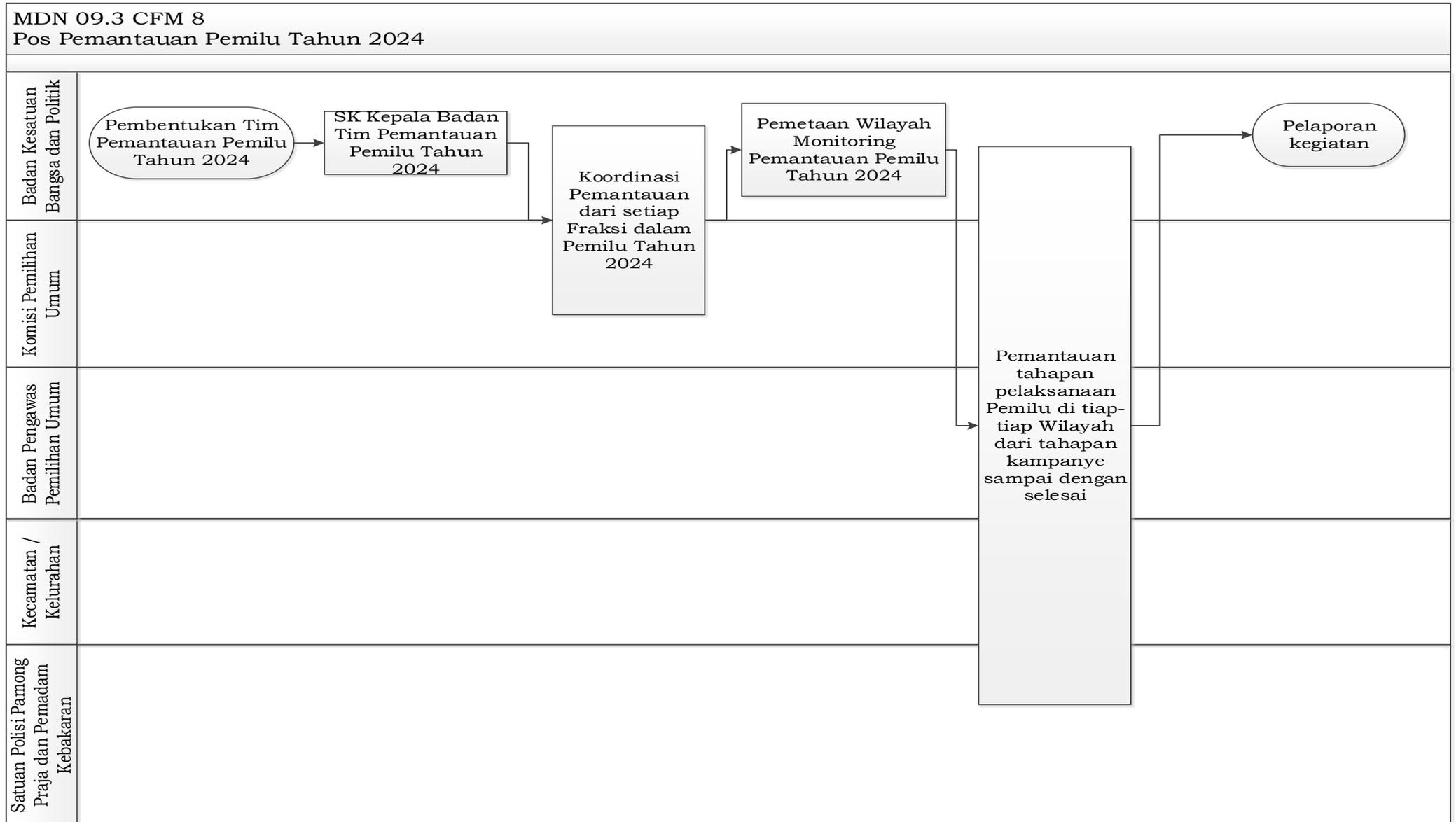


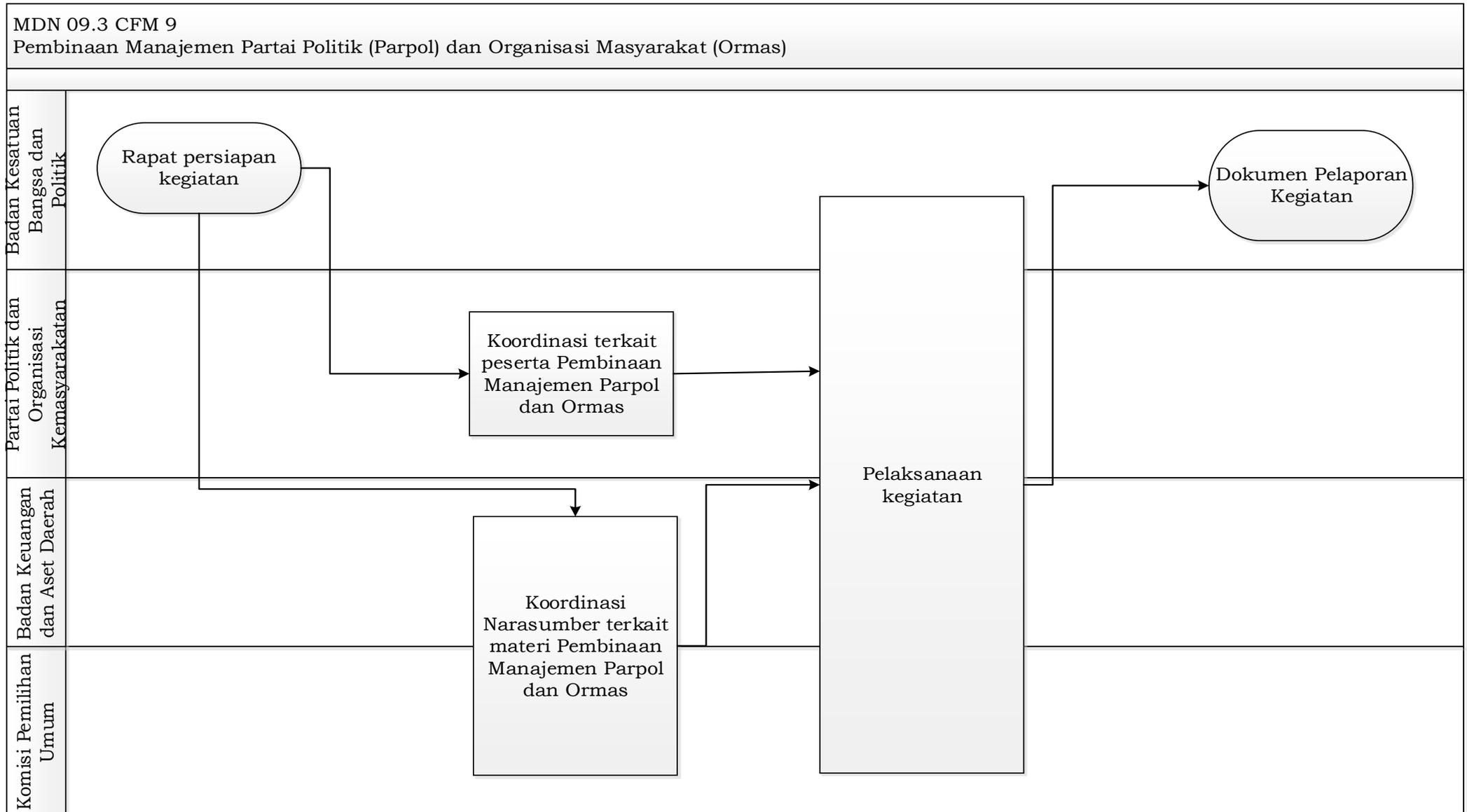


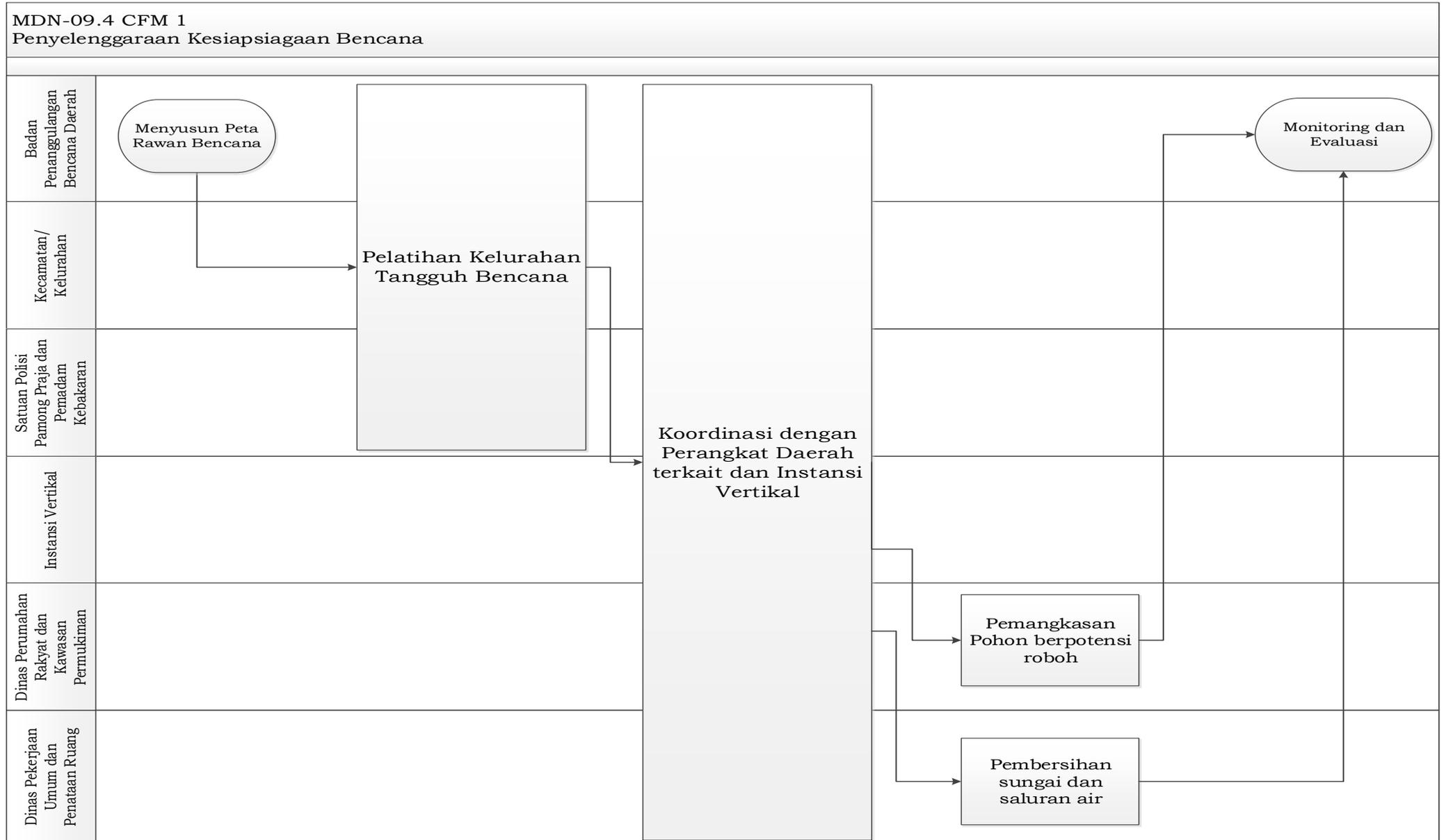


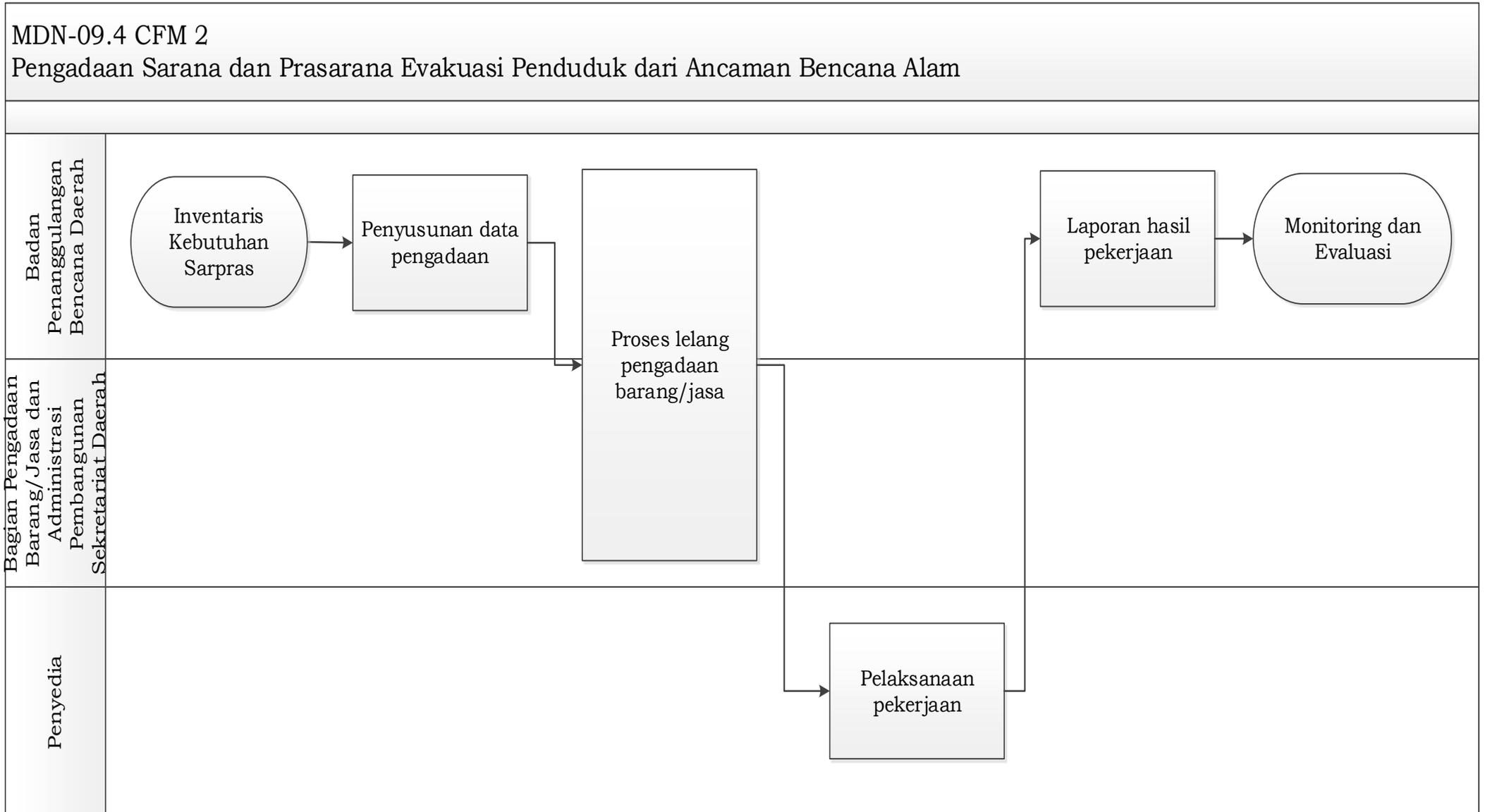


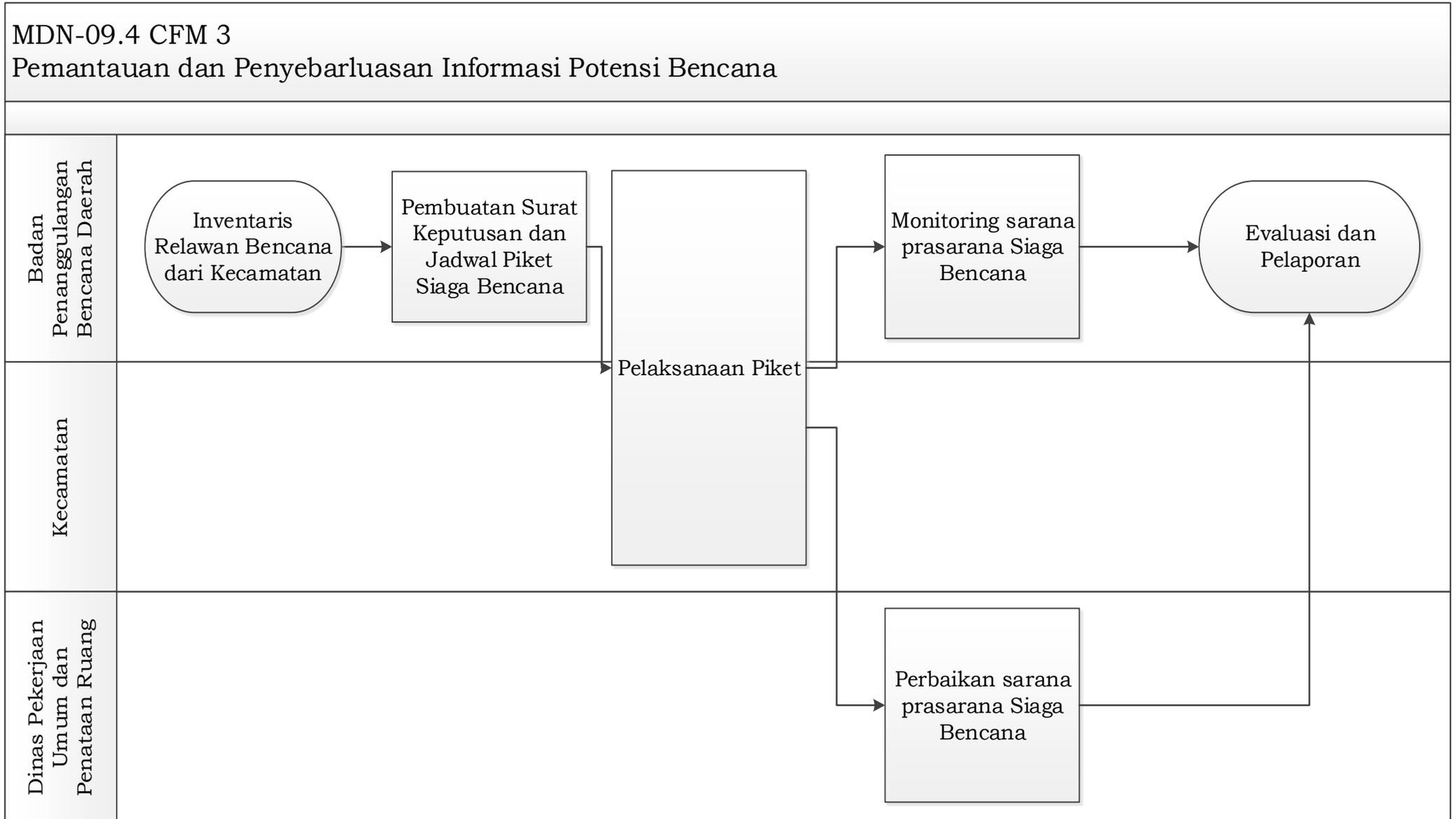






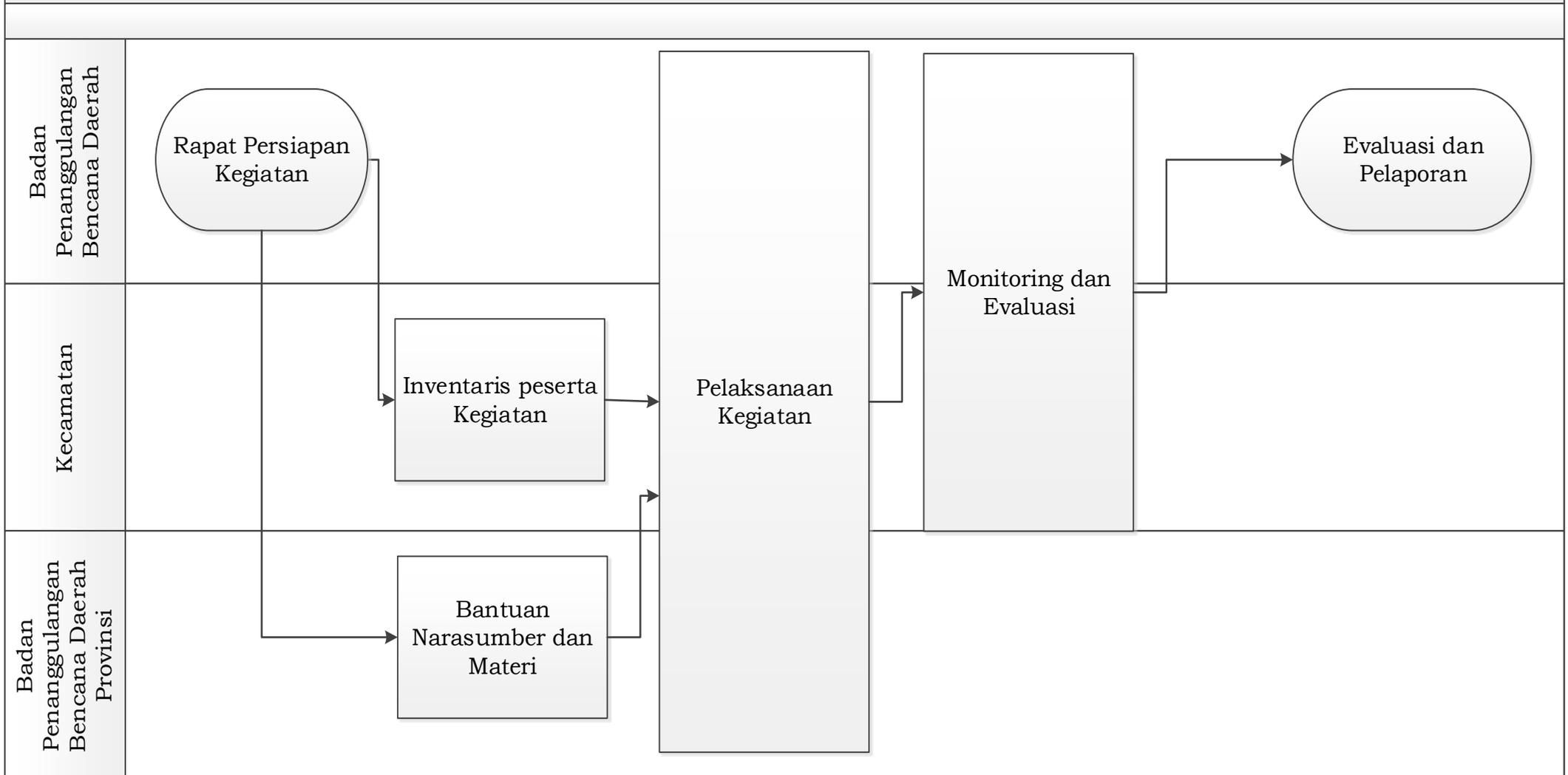


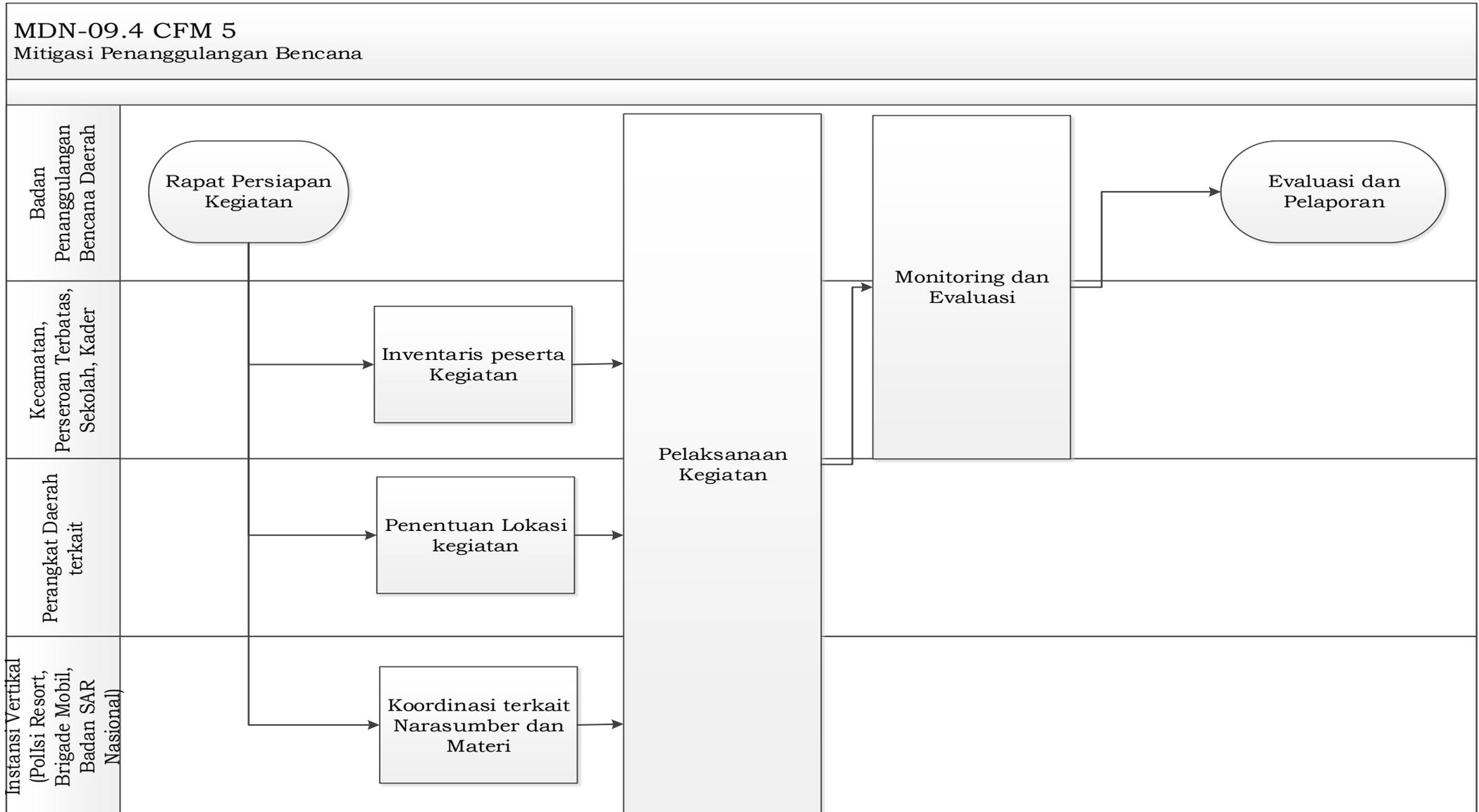


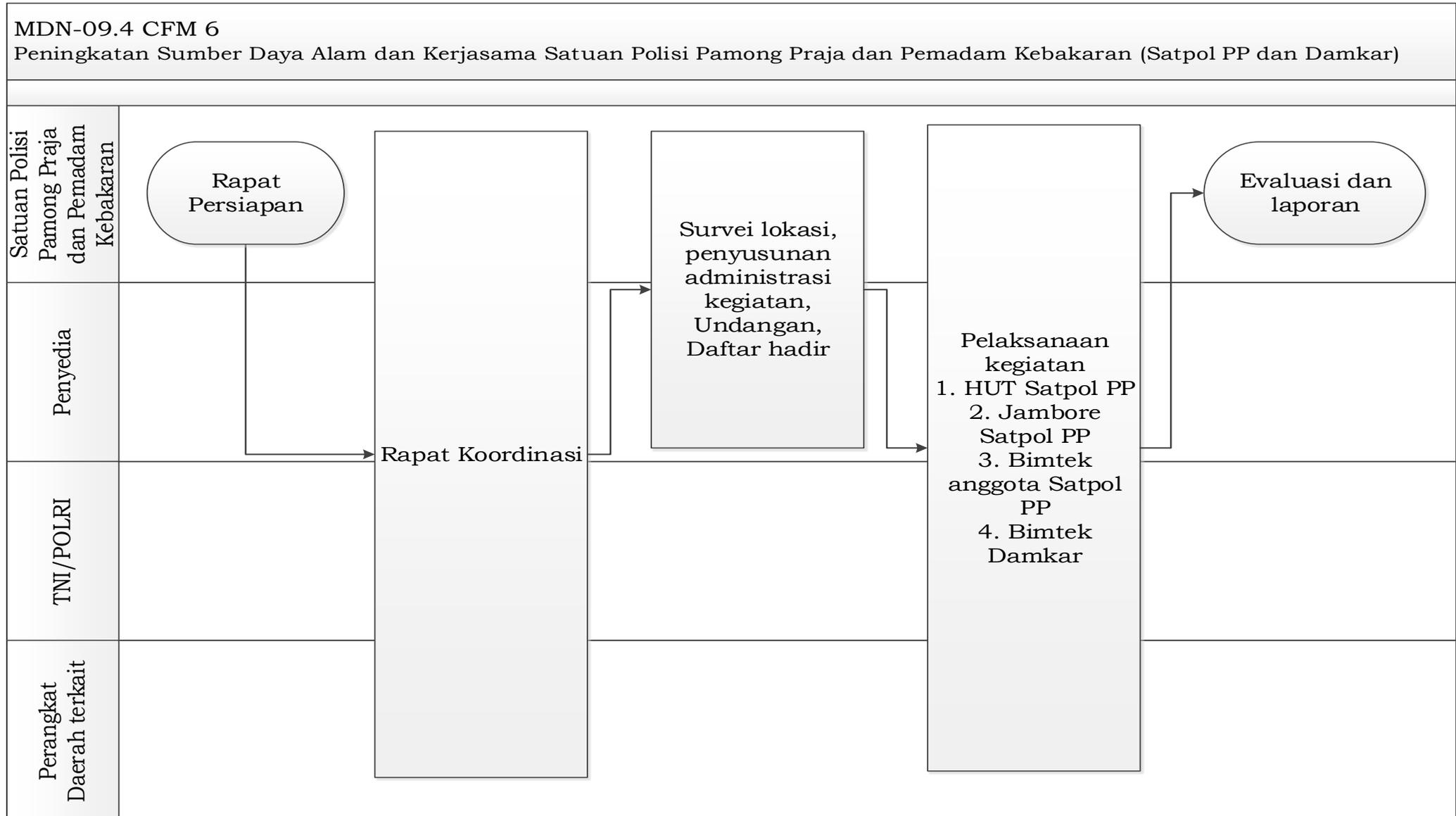


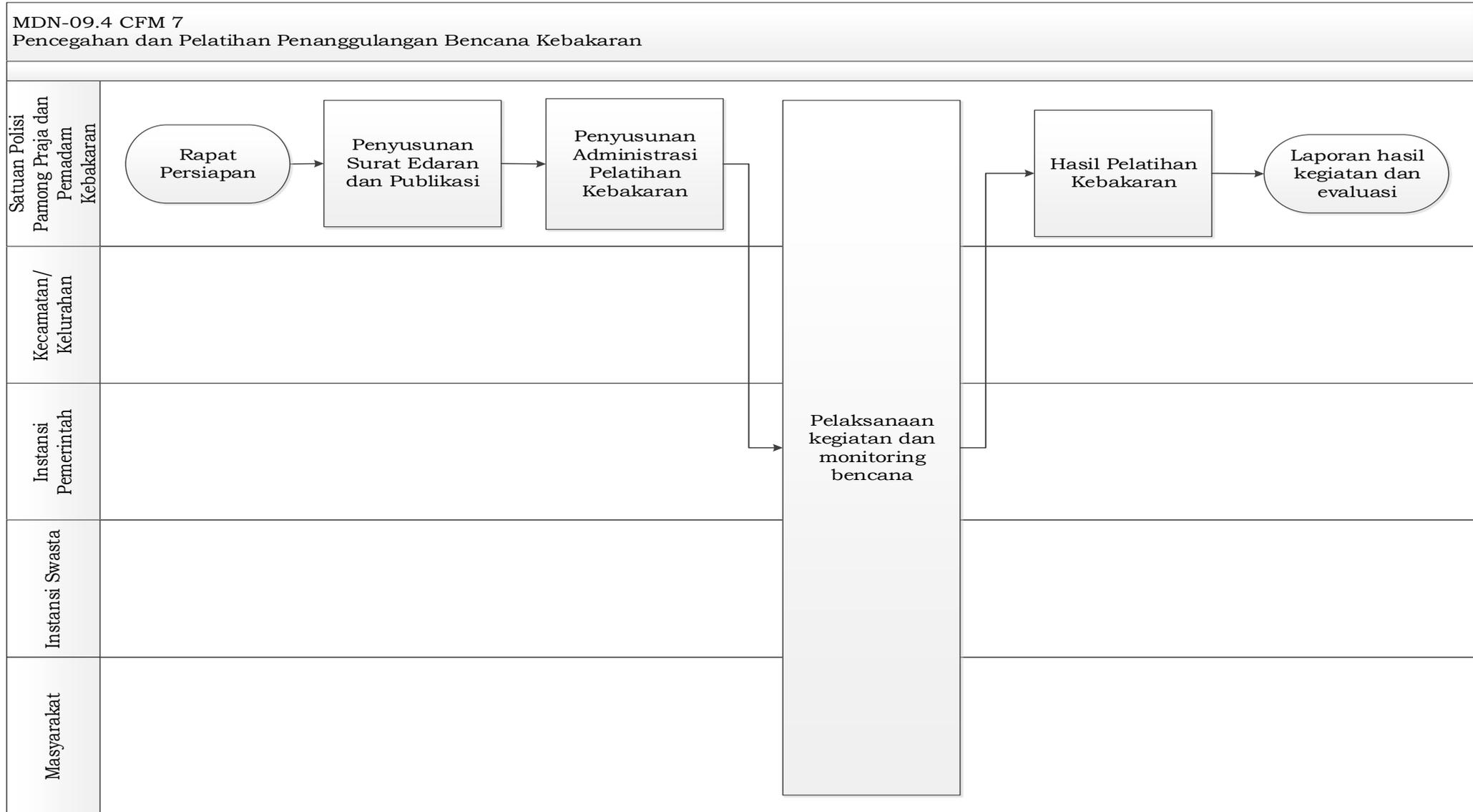
MDN-09.4 CFM 4

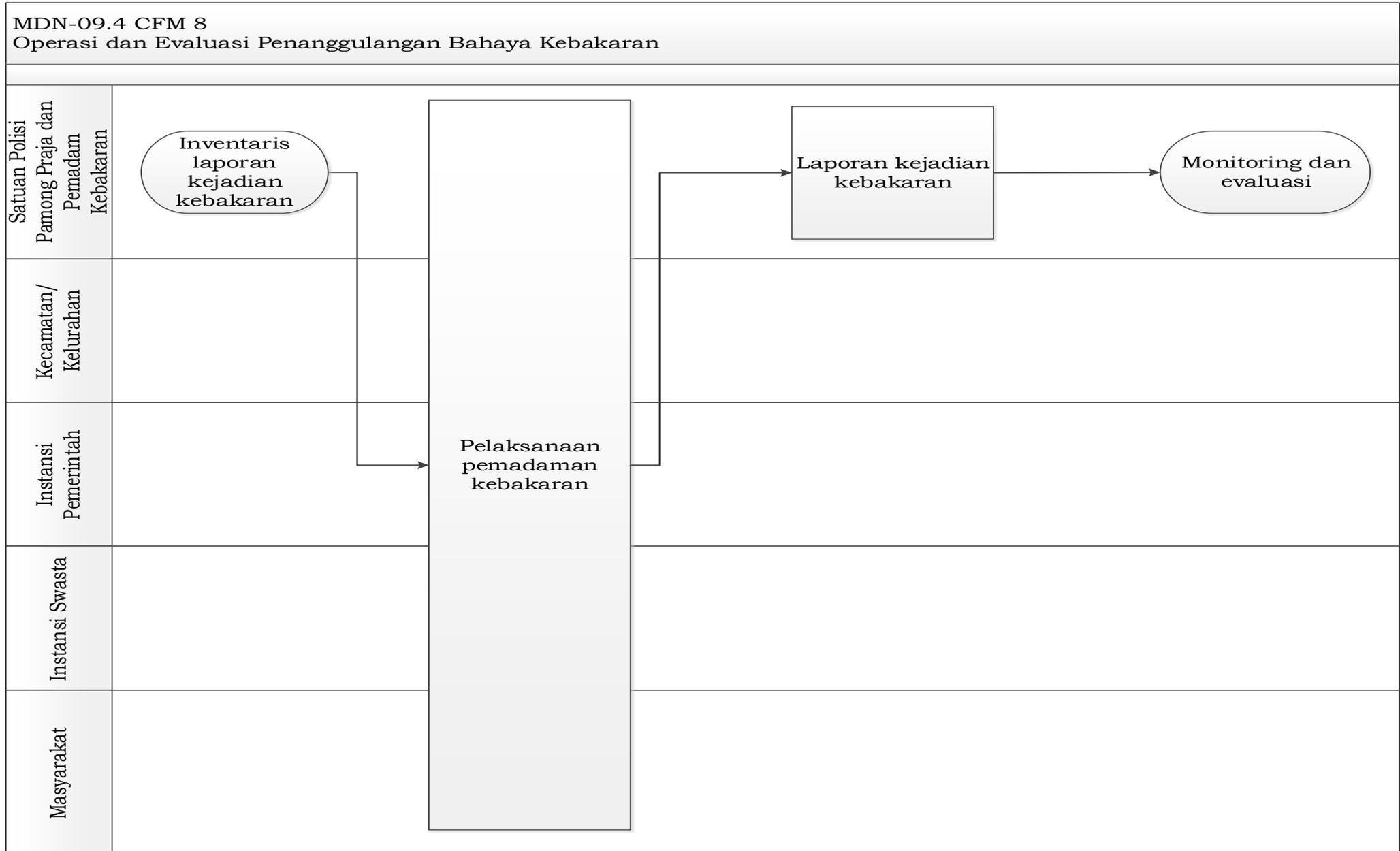
Penyuluhan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam

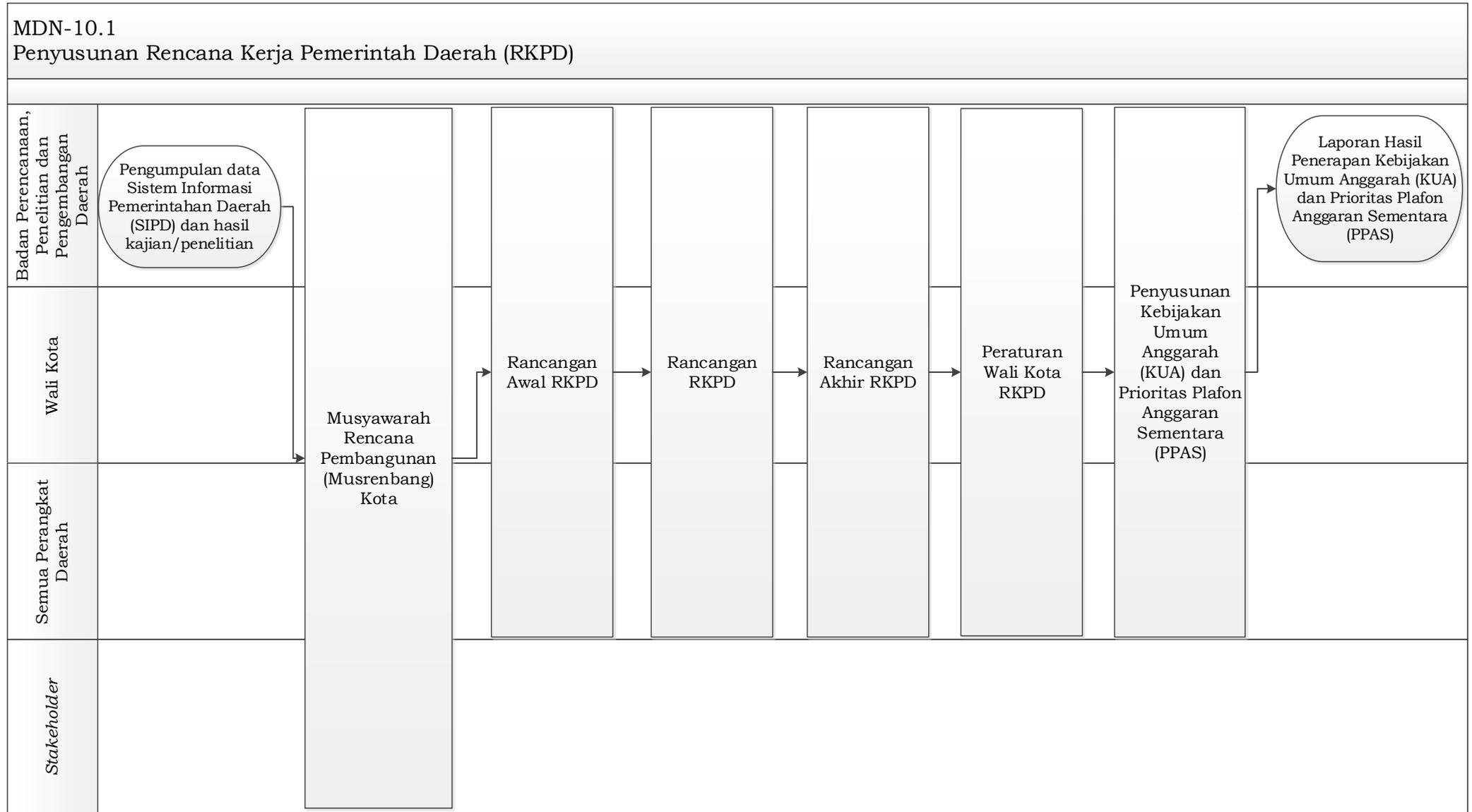


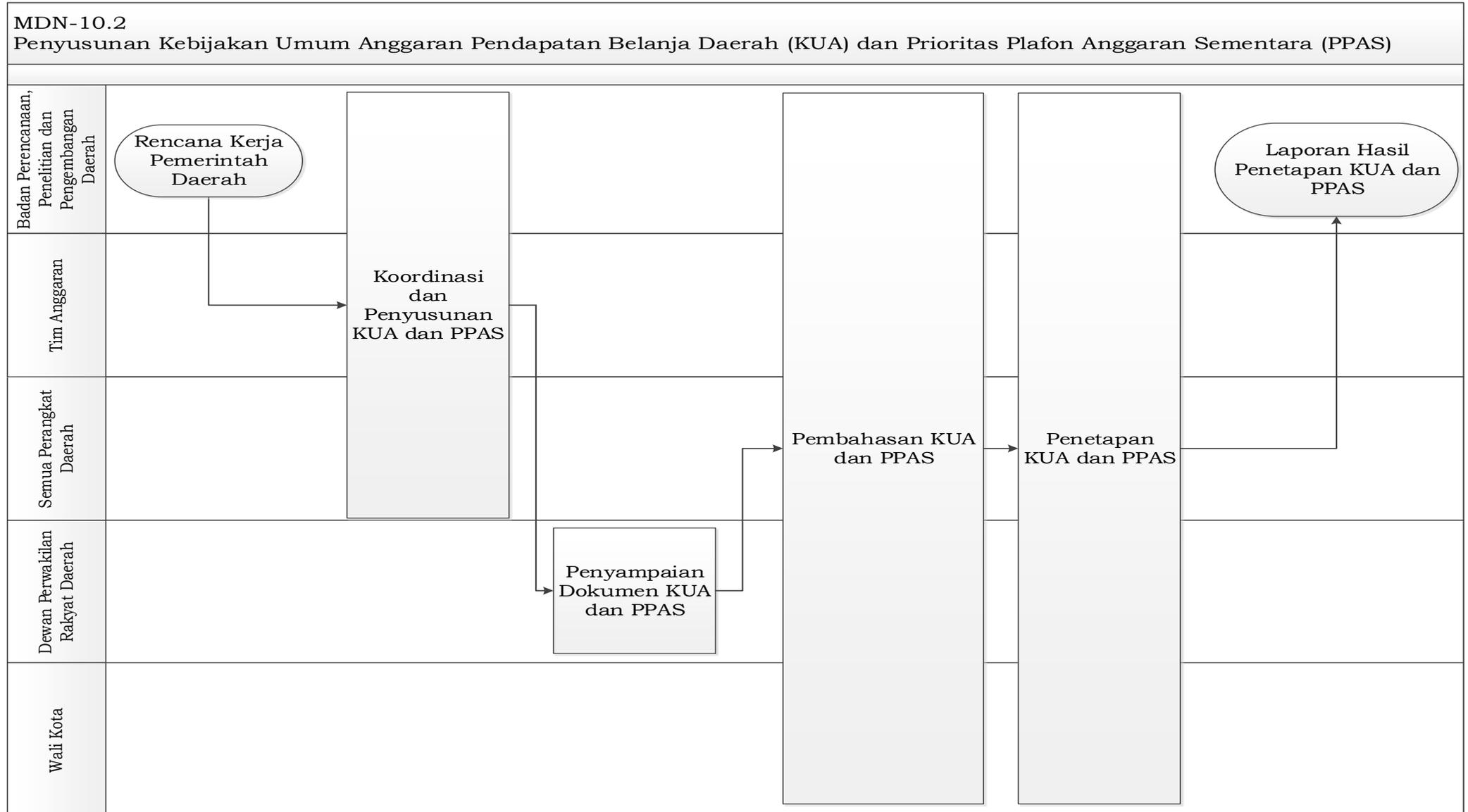


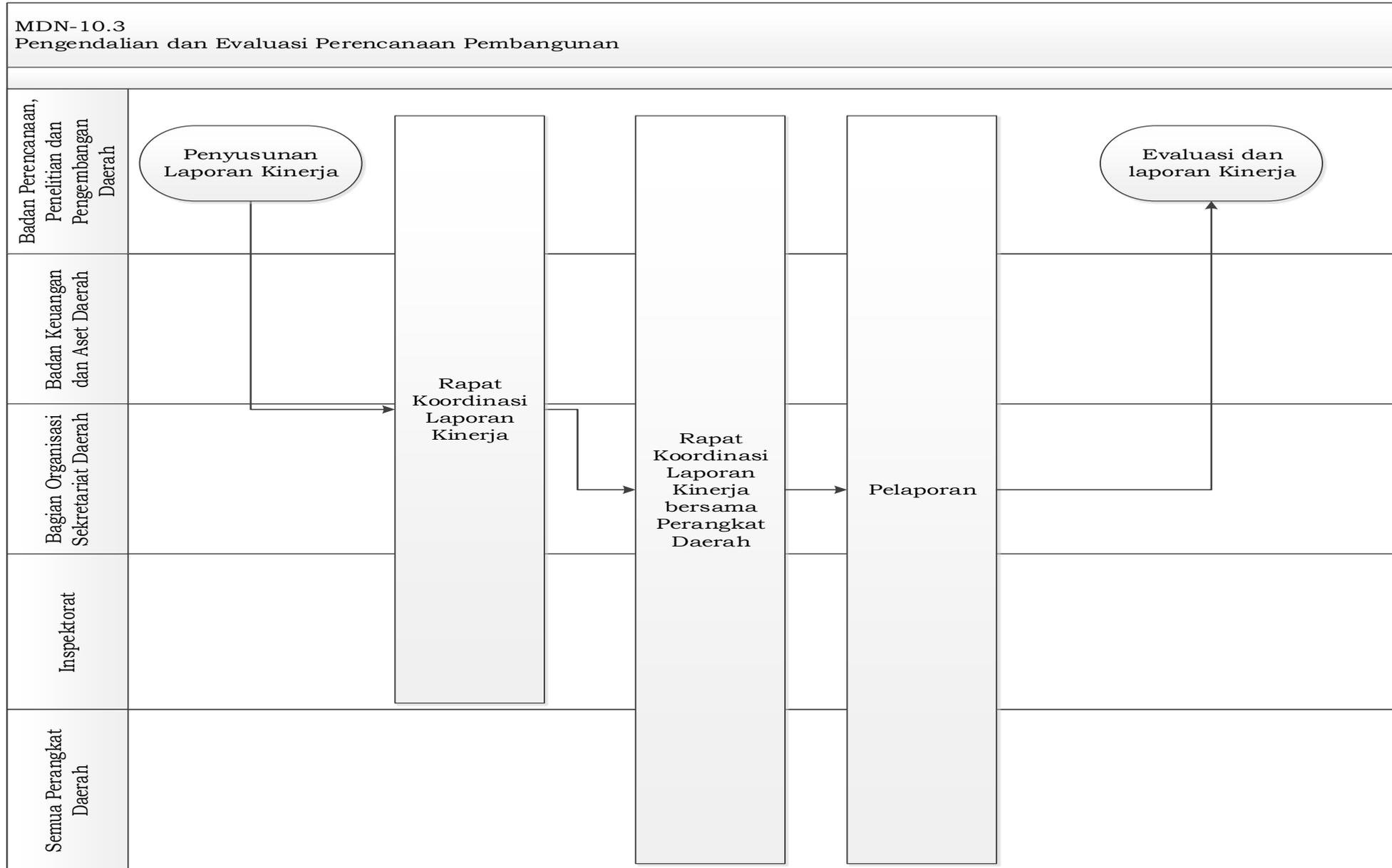


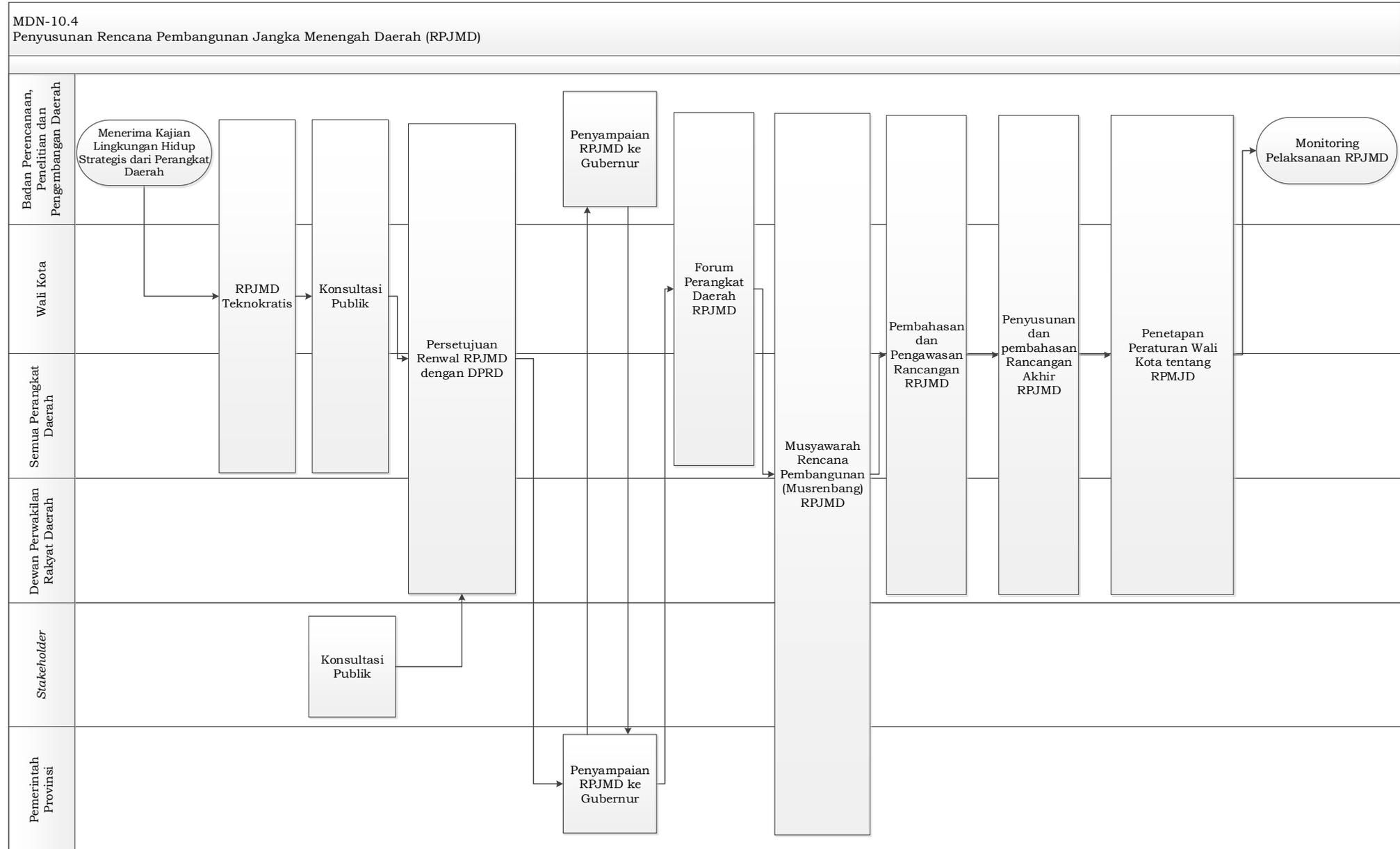


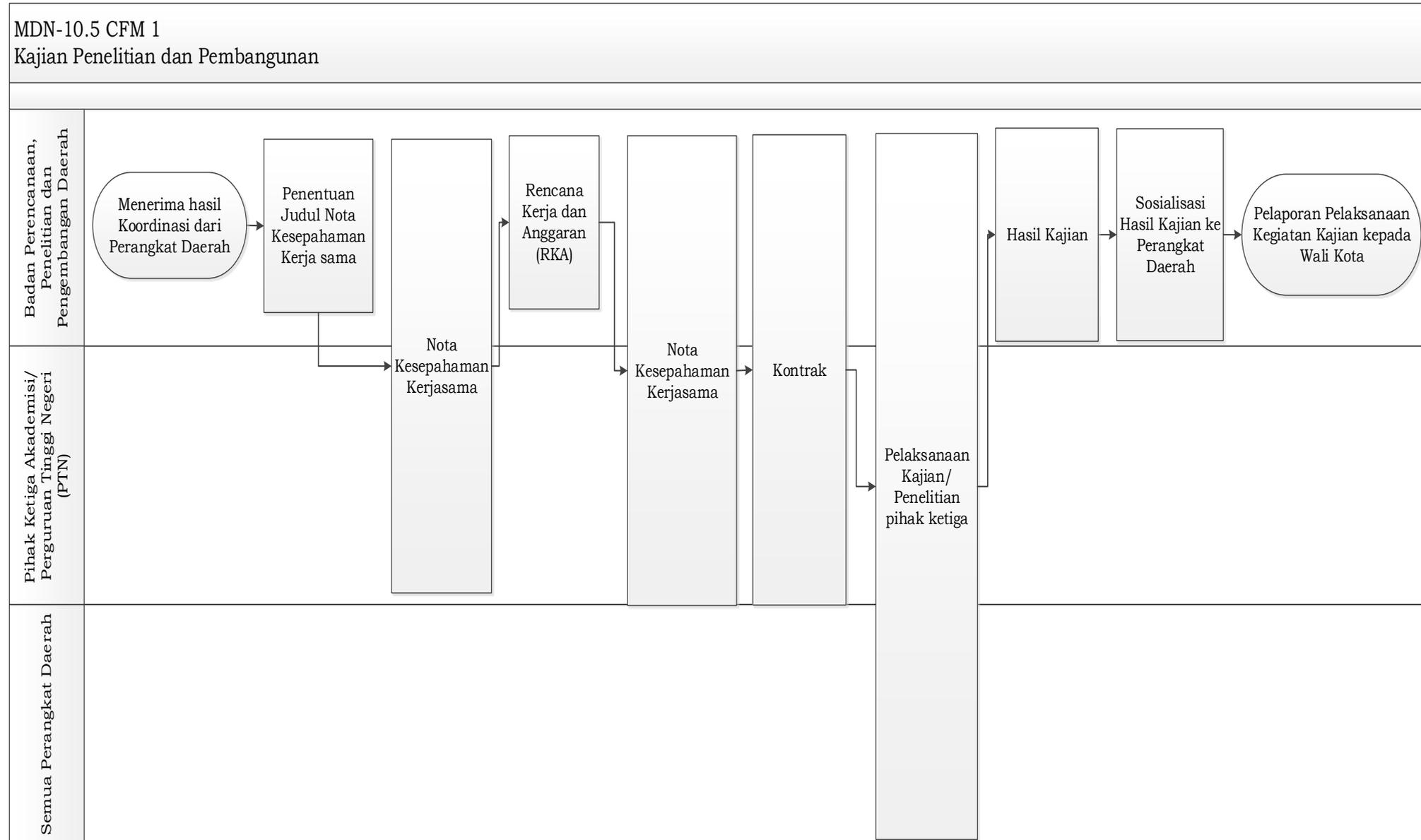






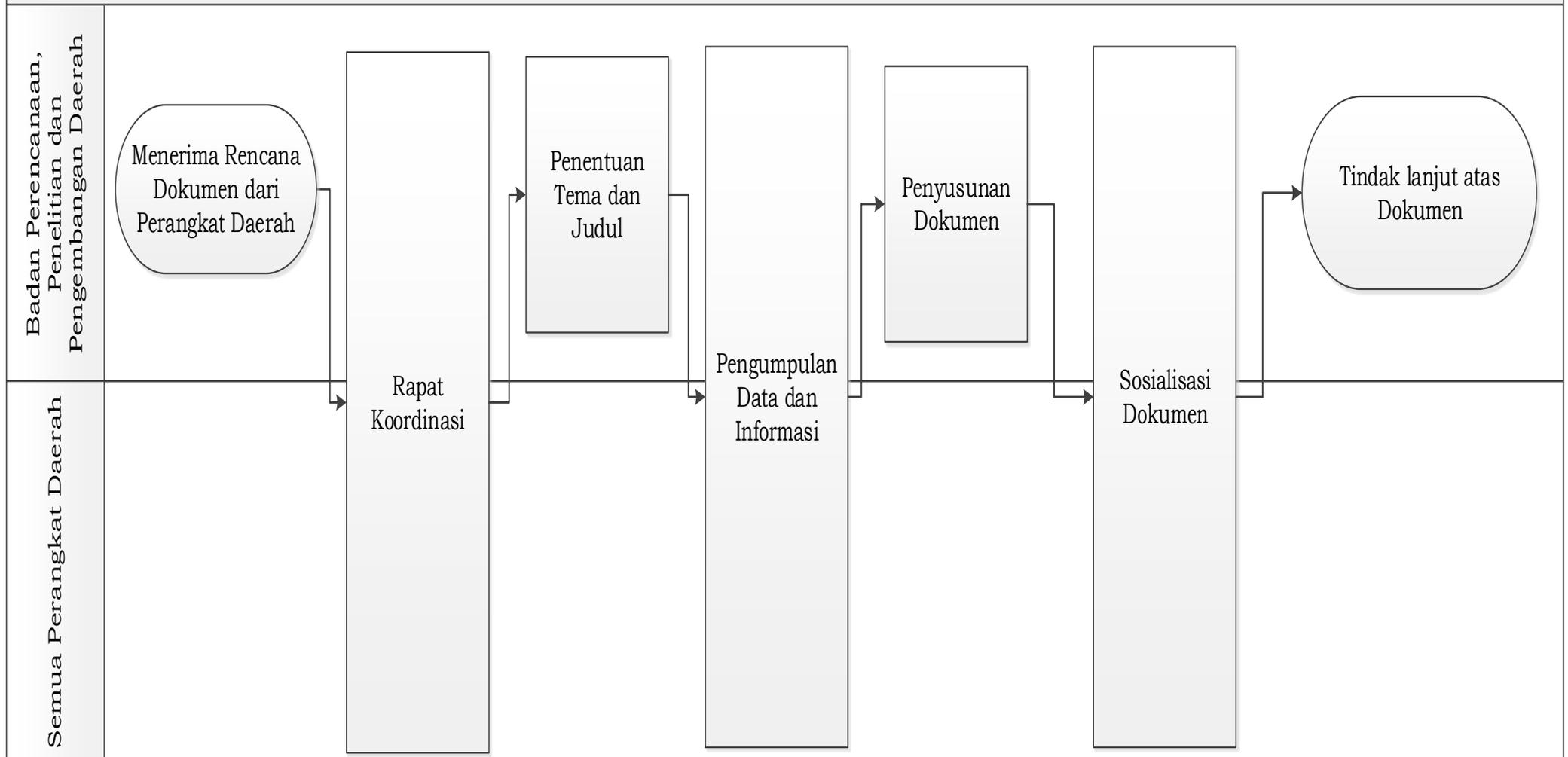


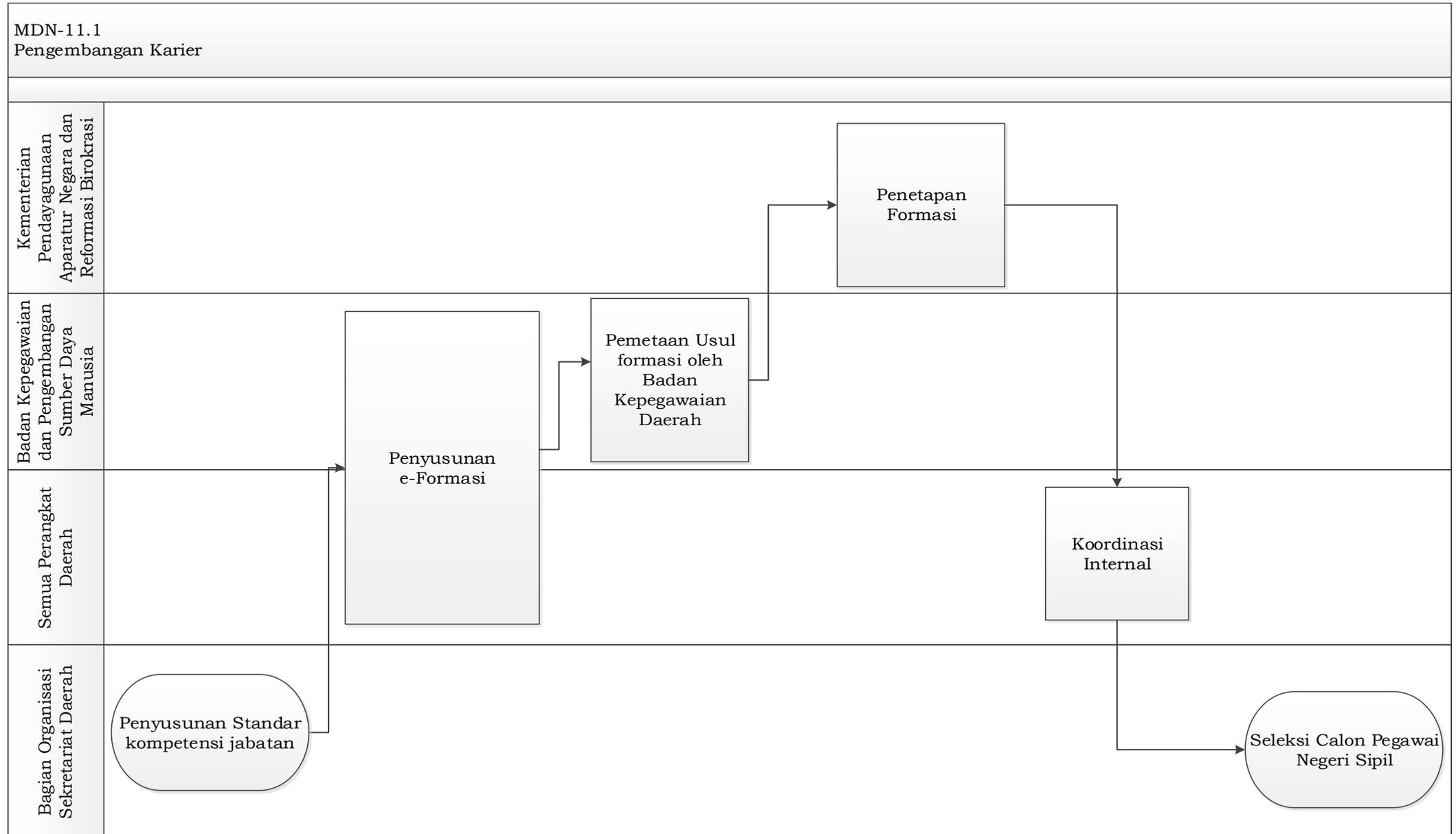


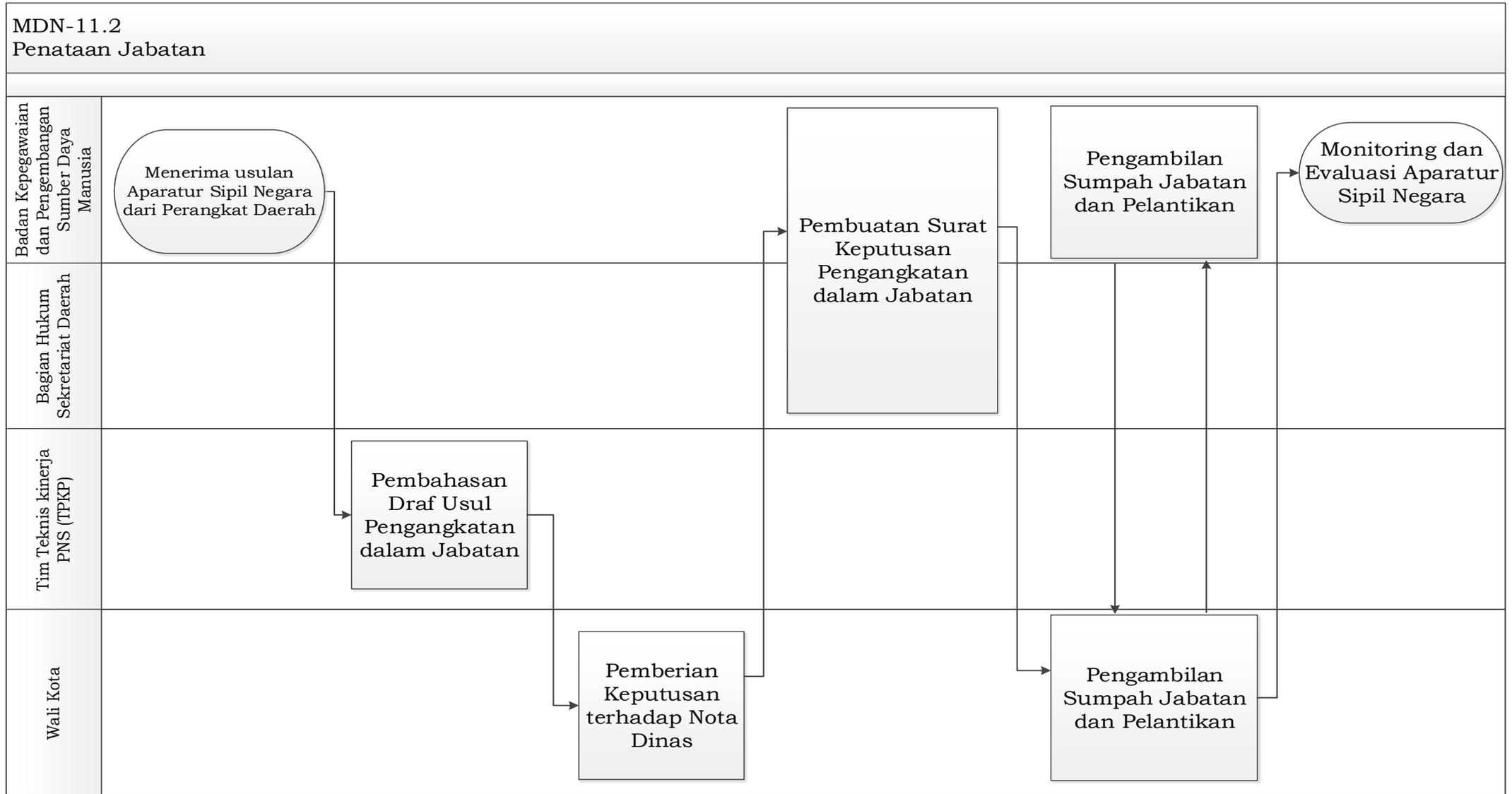


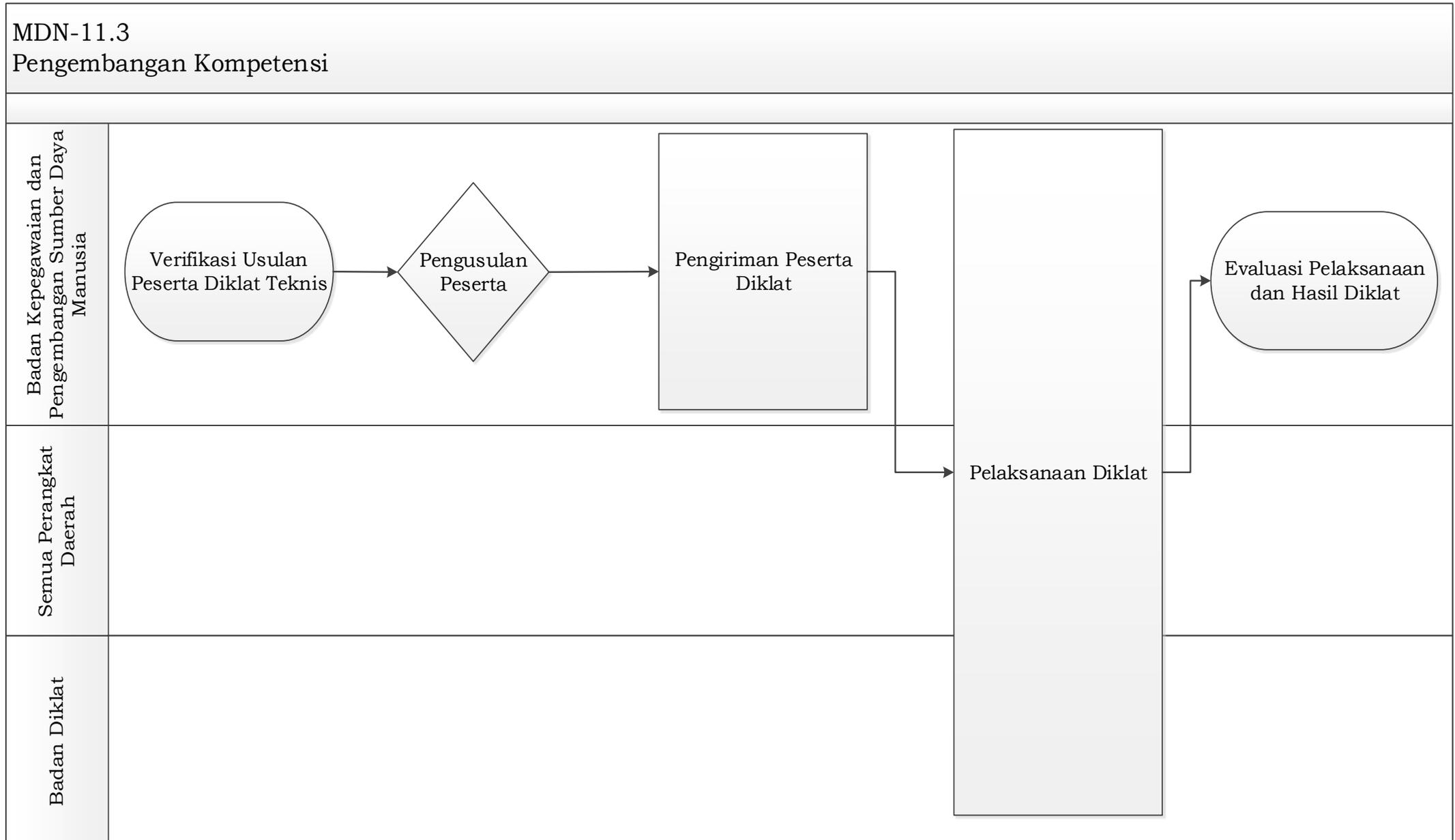
MDN-10.5 CFM 2

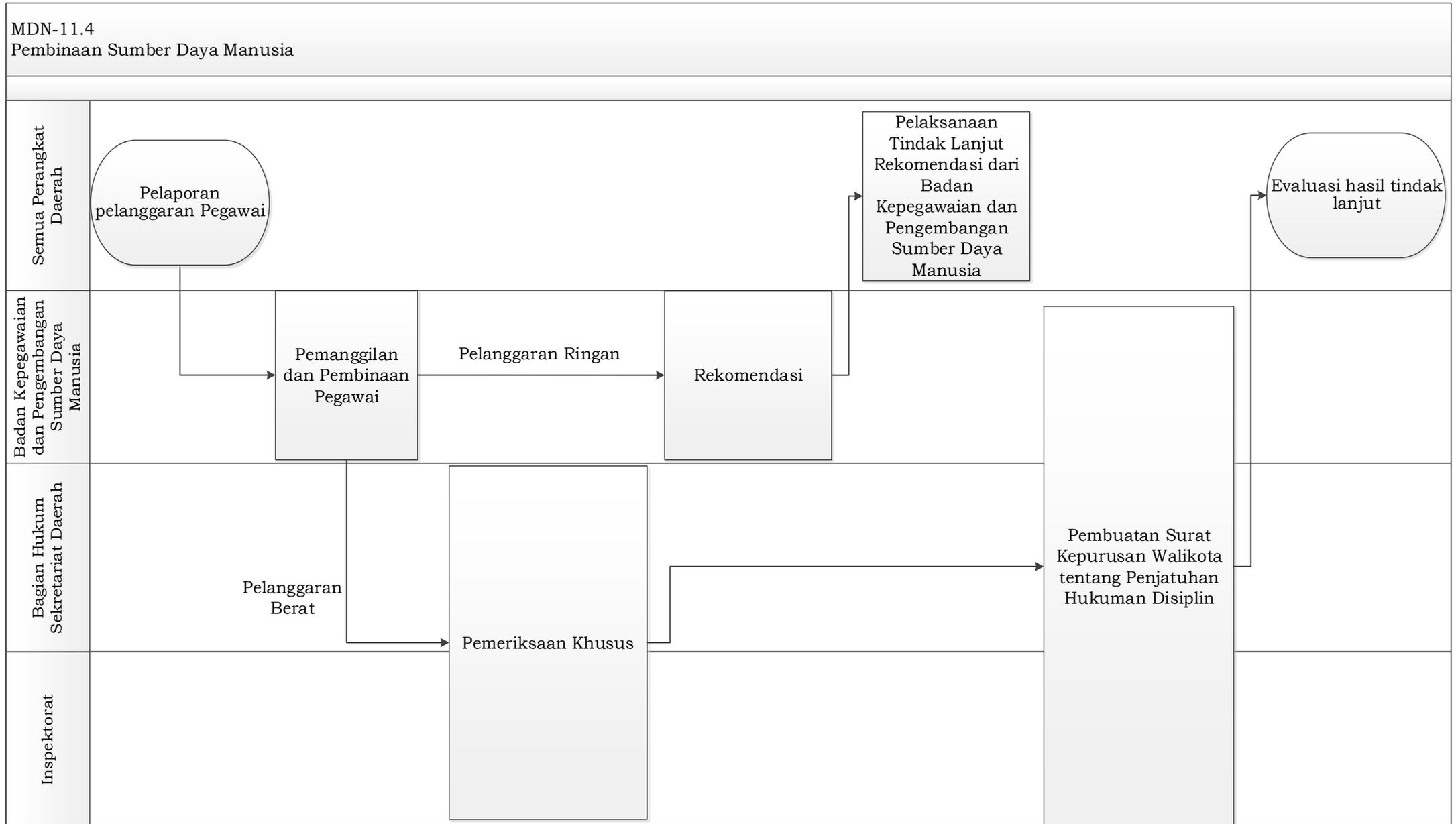
Penyusunan Dokumen Bidang Ekonomi, Sosial, Fisik dan Prasarana

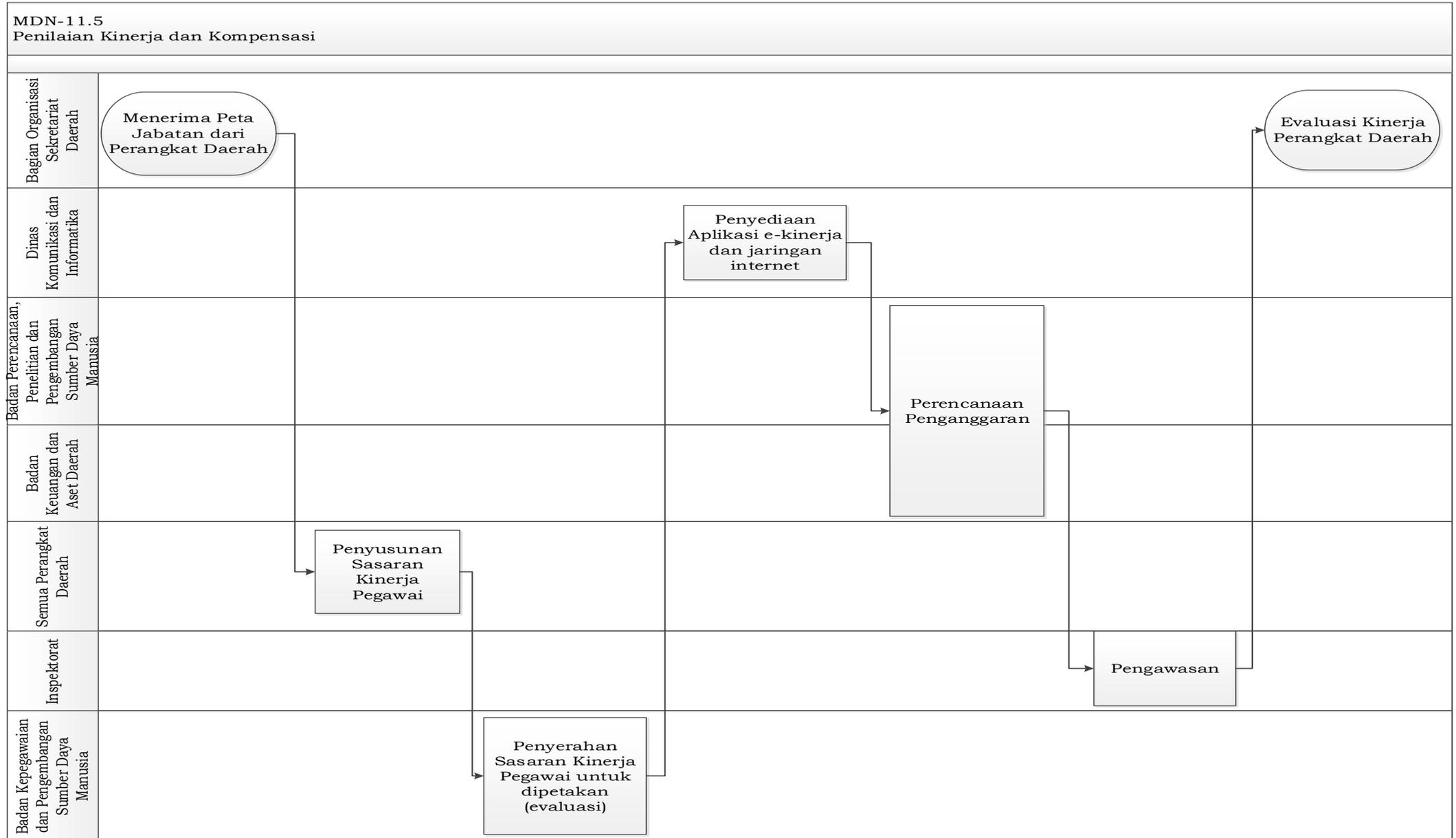






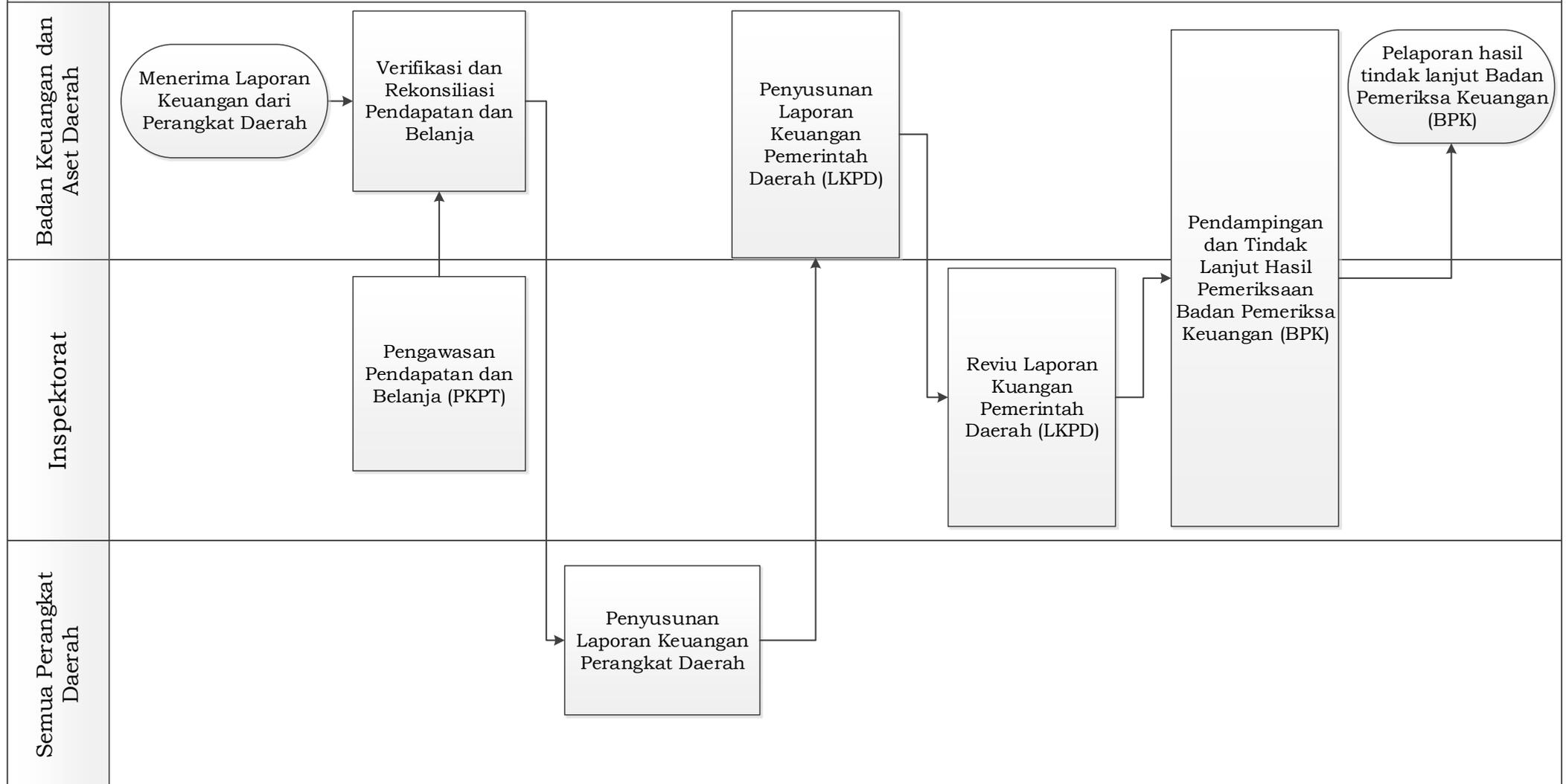


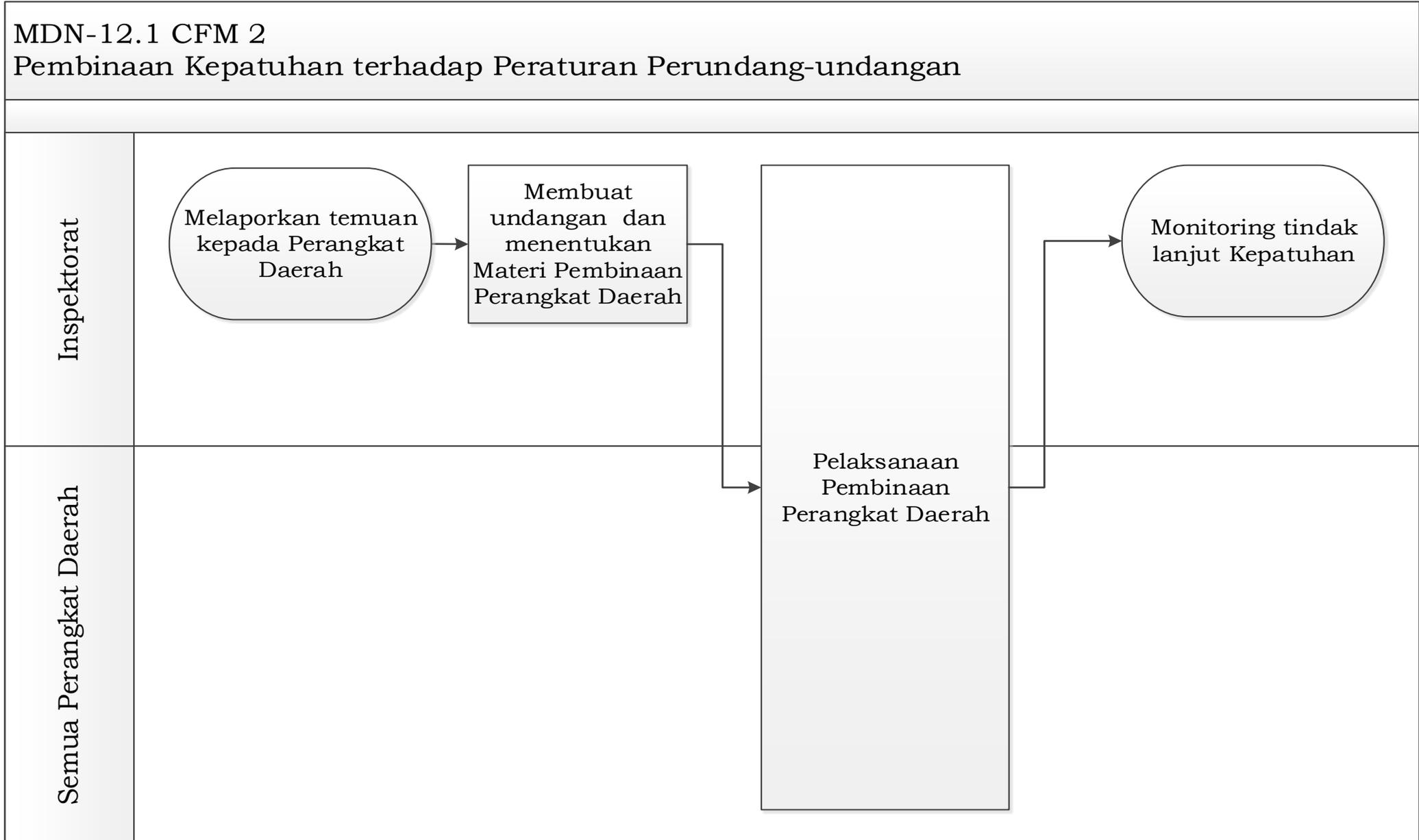


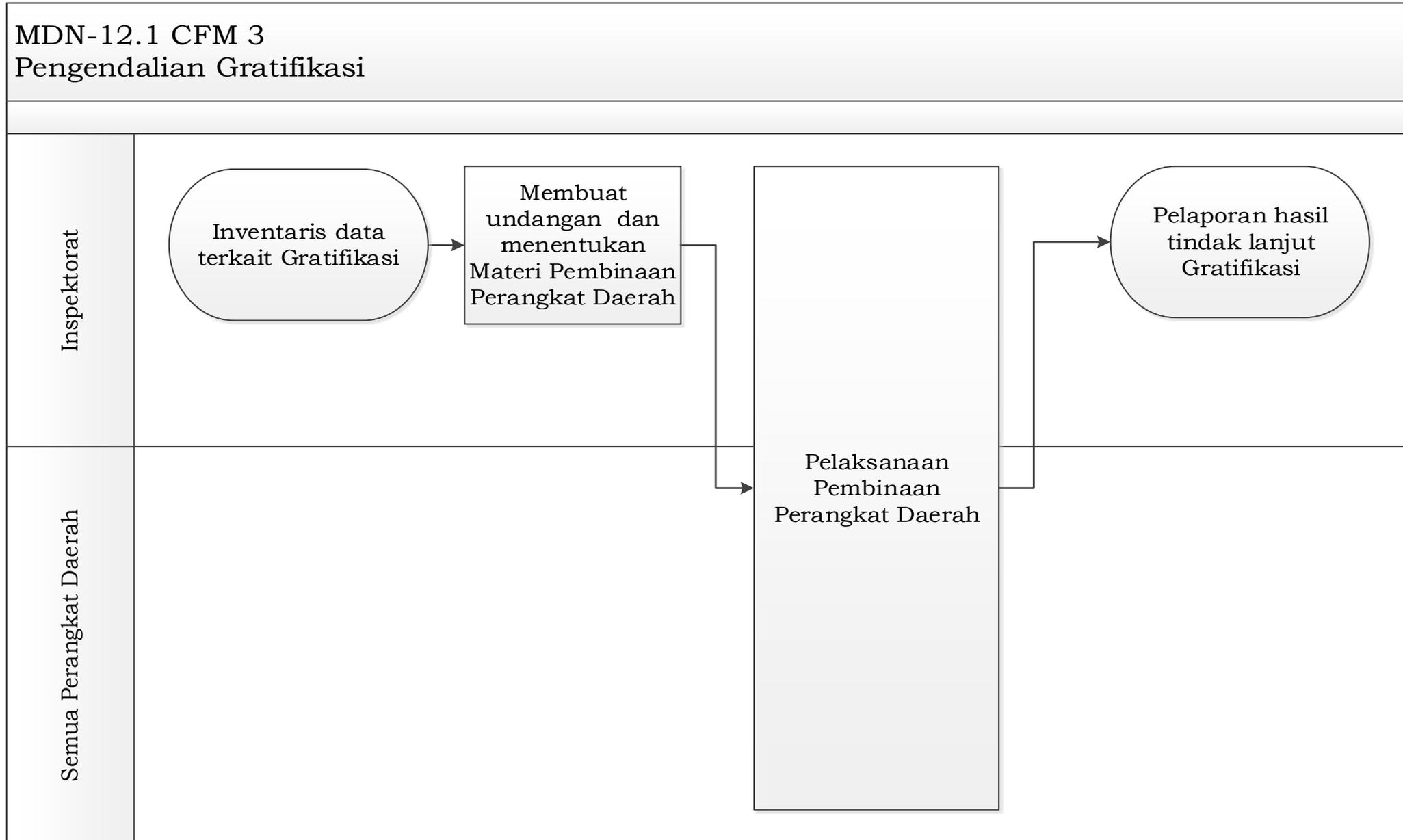


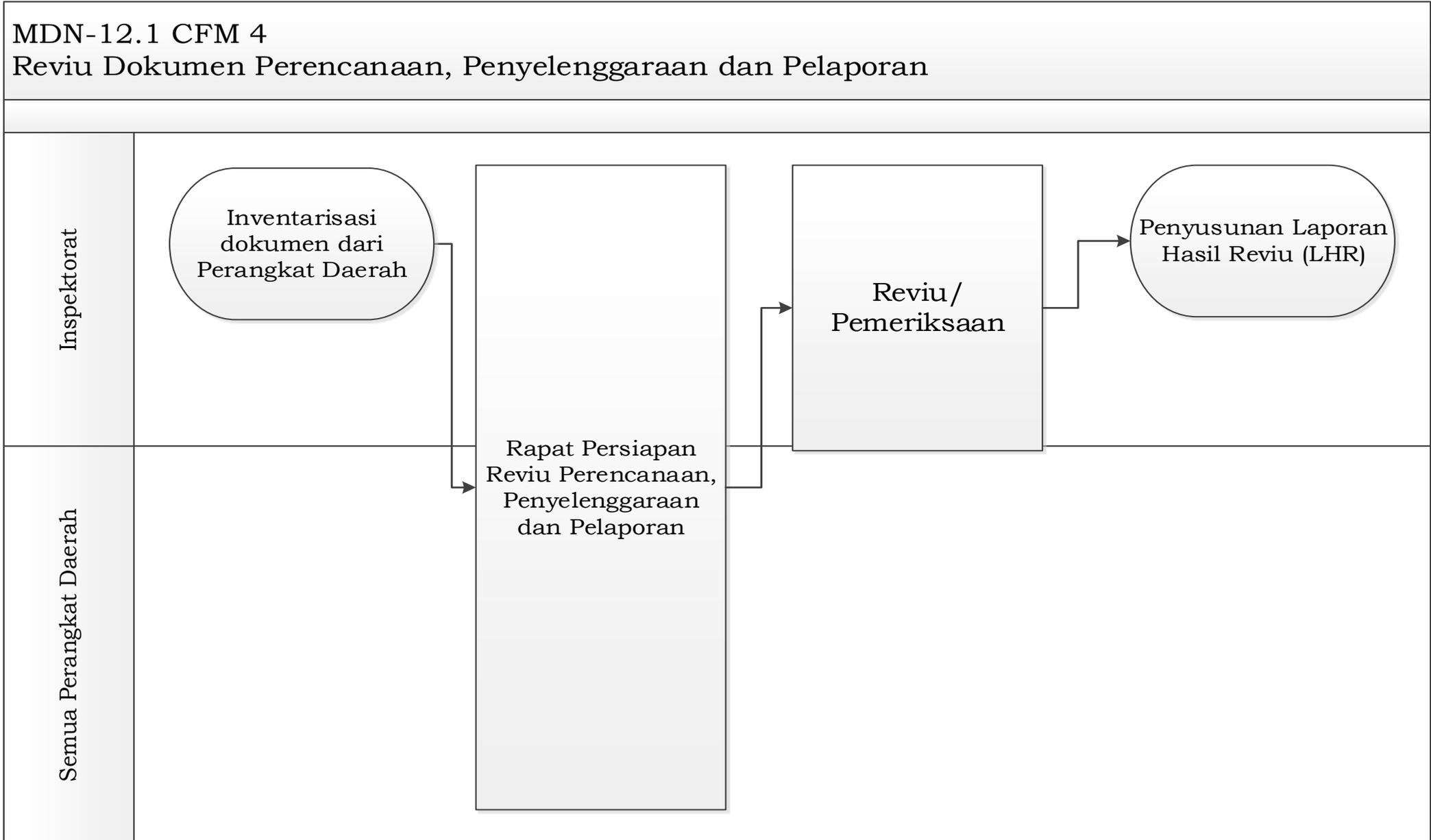
MDN-12.1 CFM 1

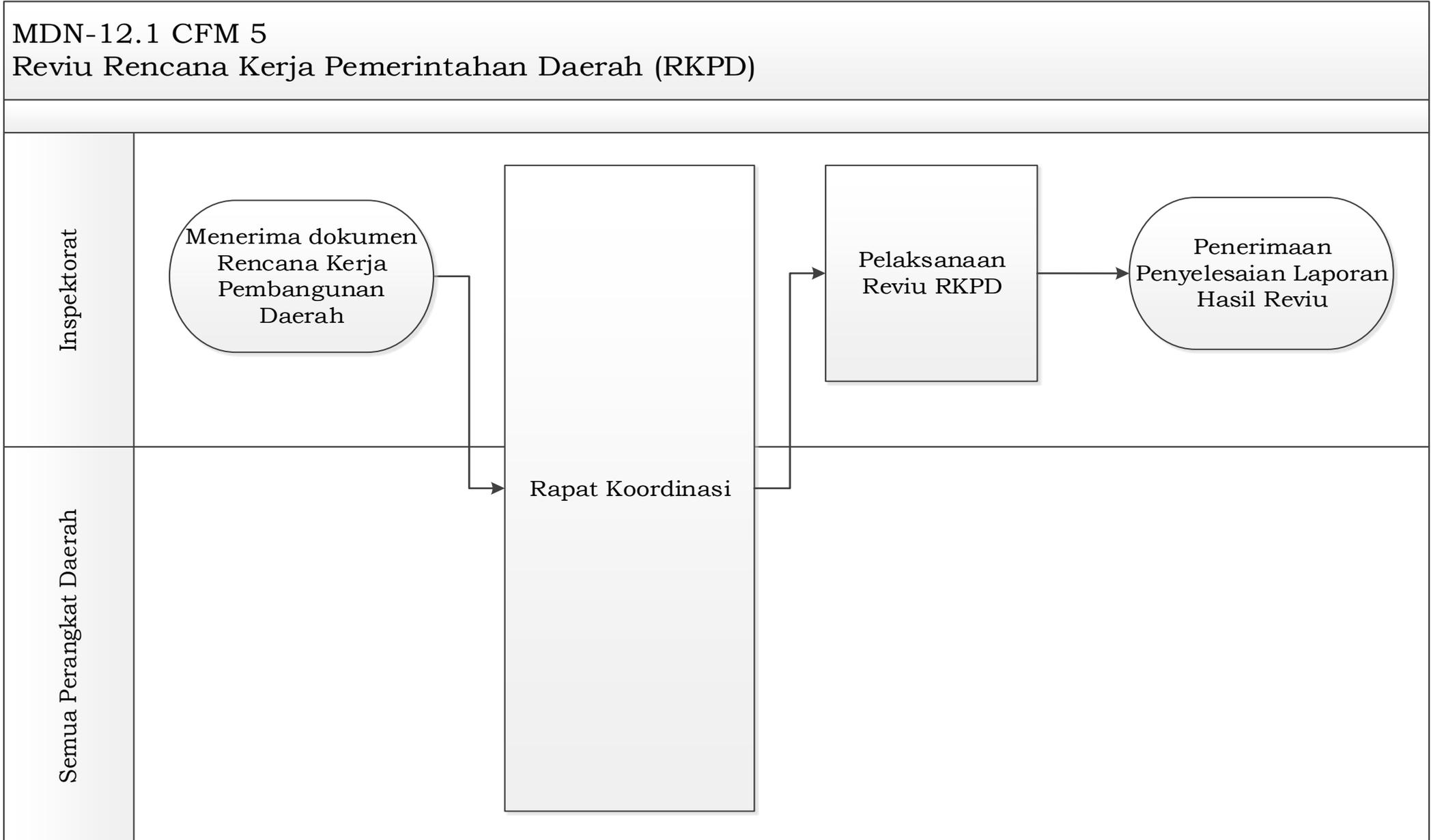
Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan





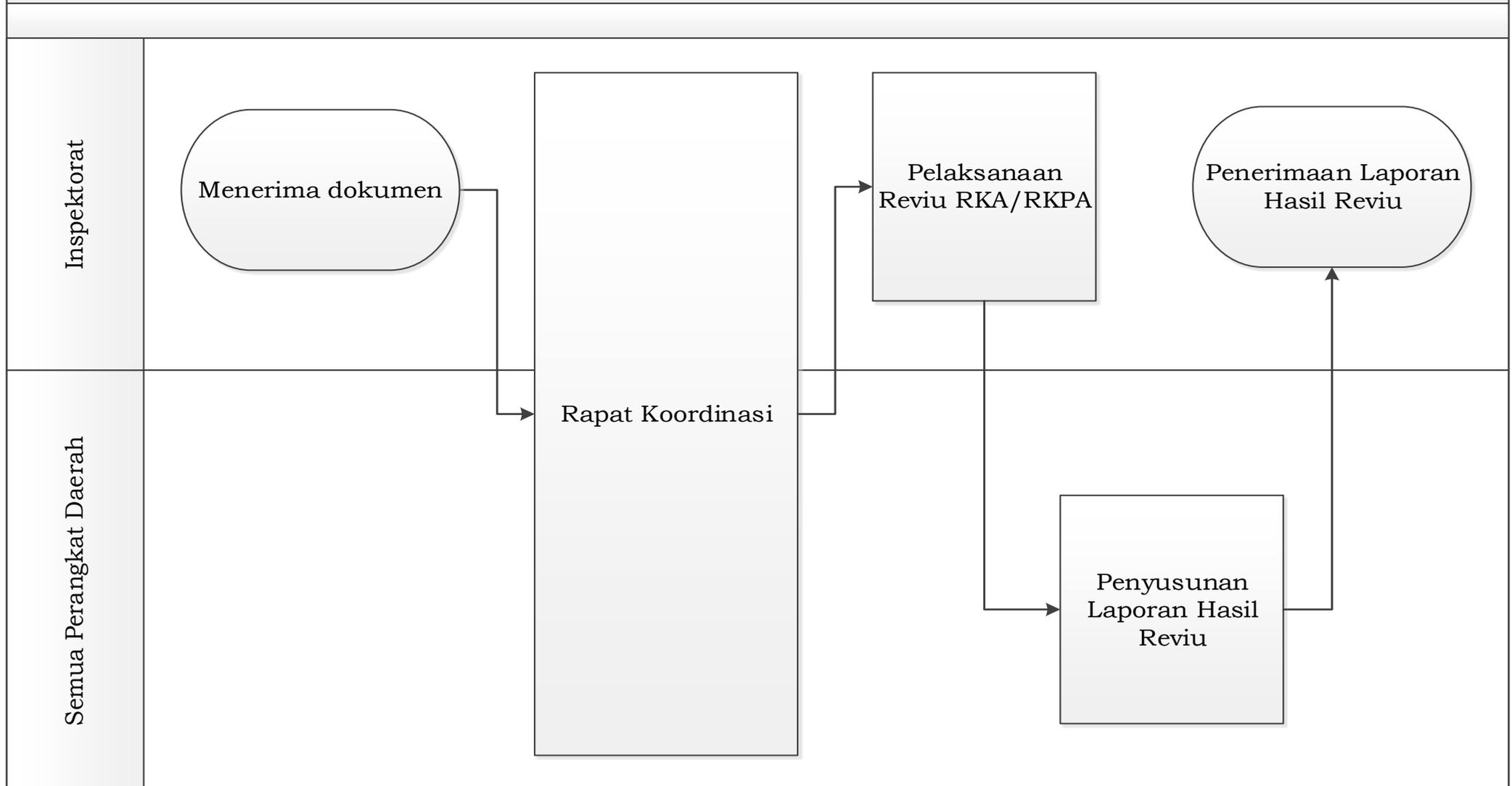


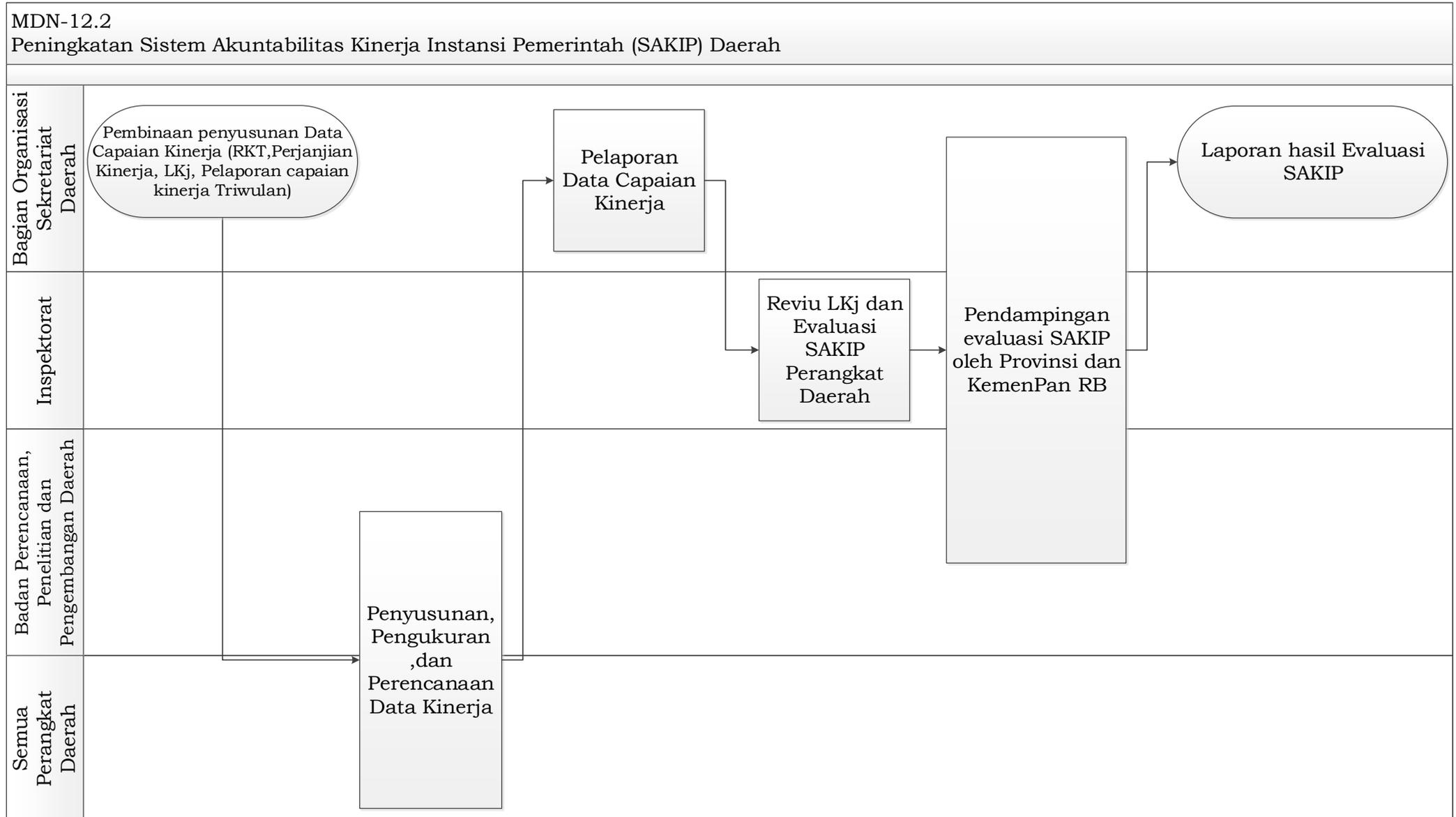


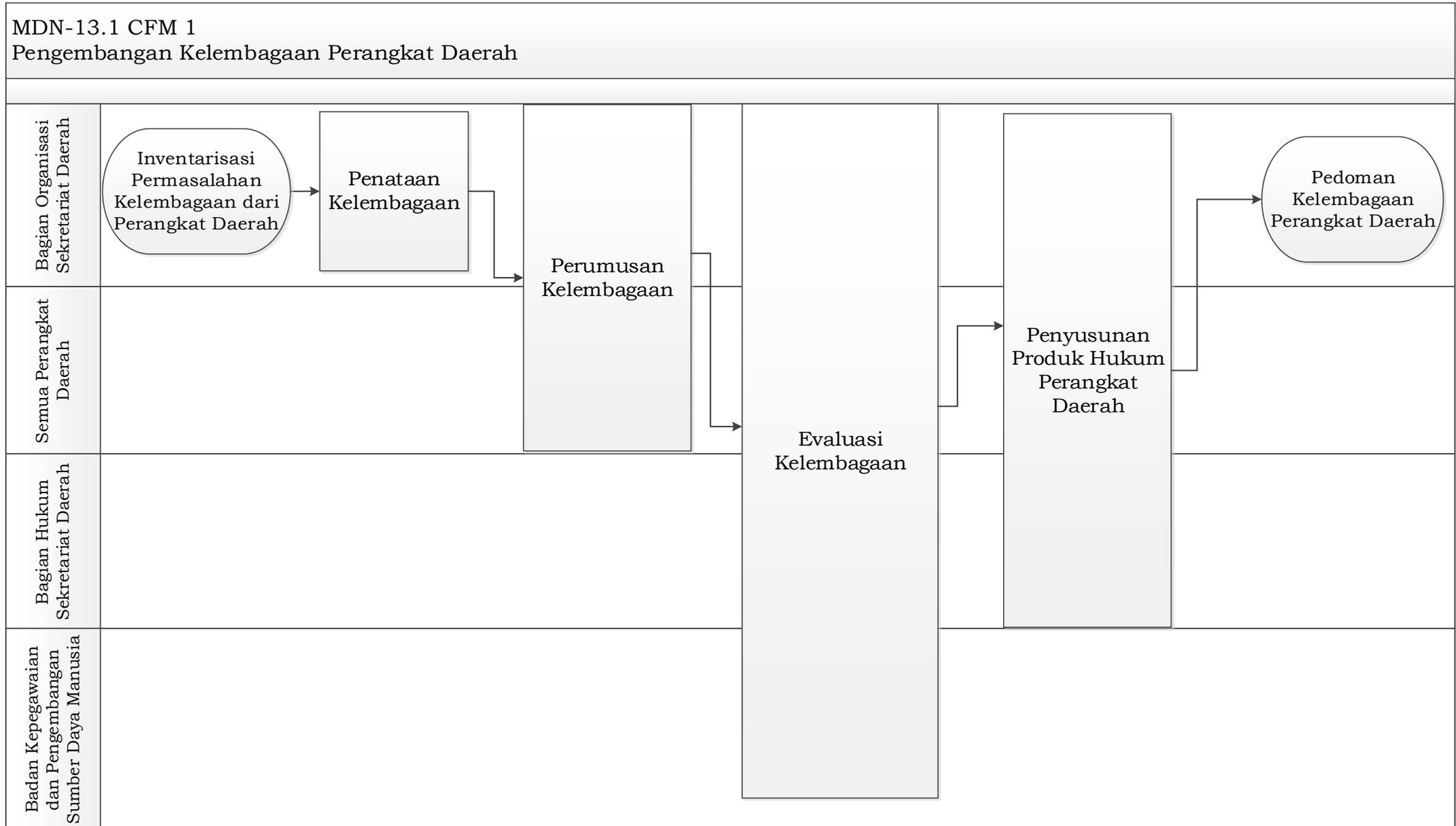


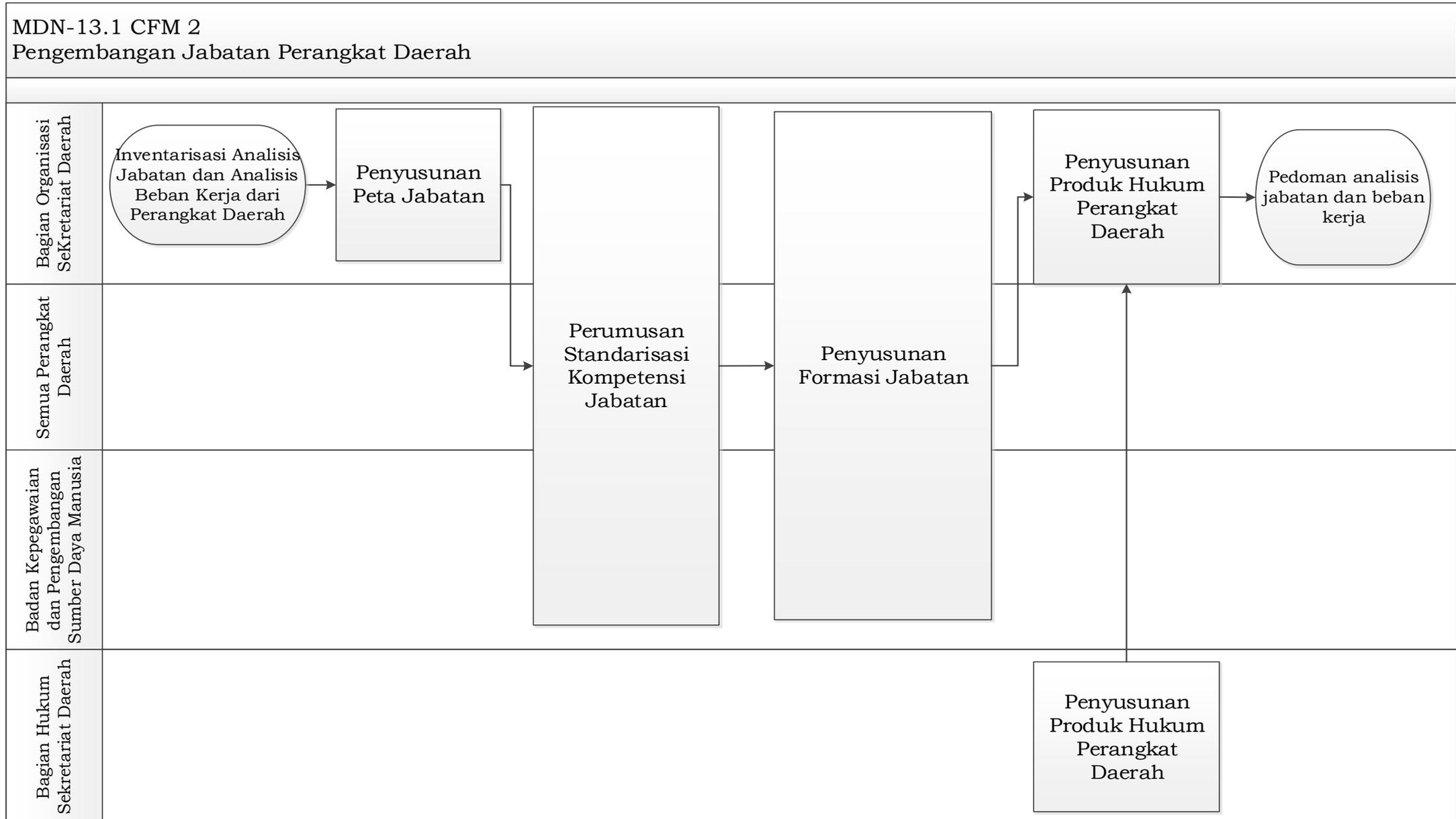
MDN-12.1 CFM 6

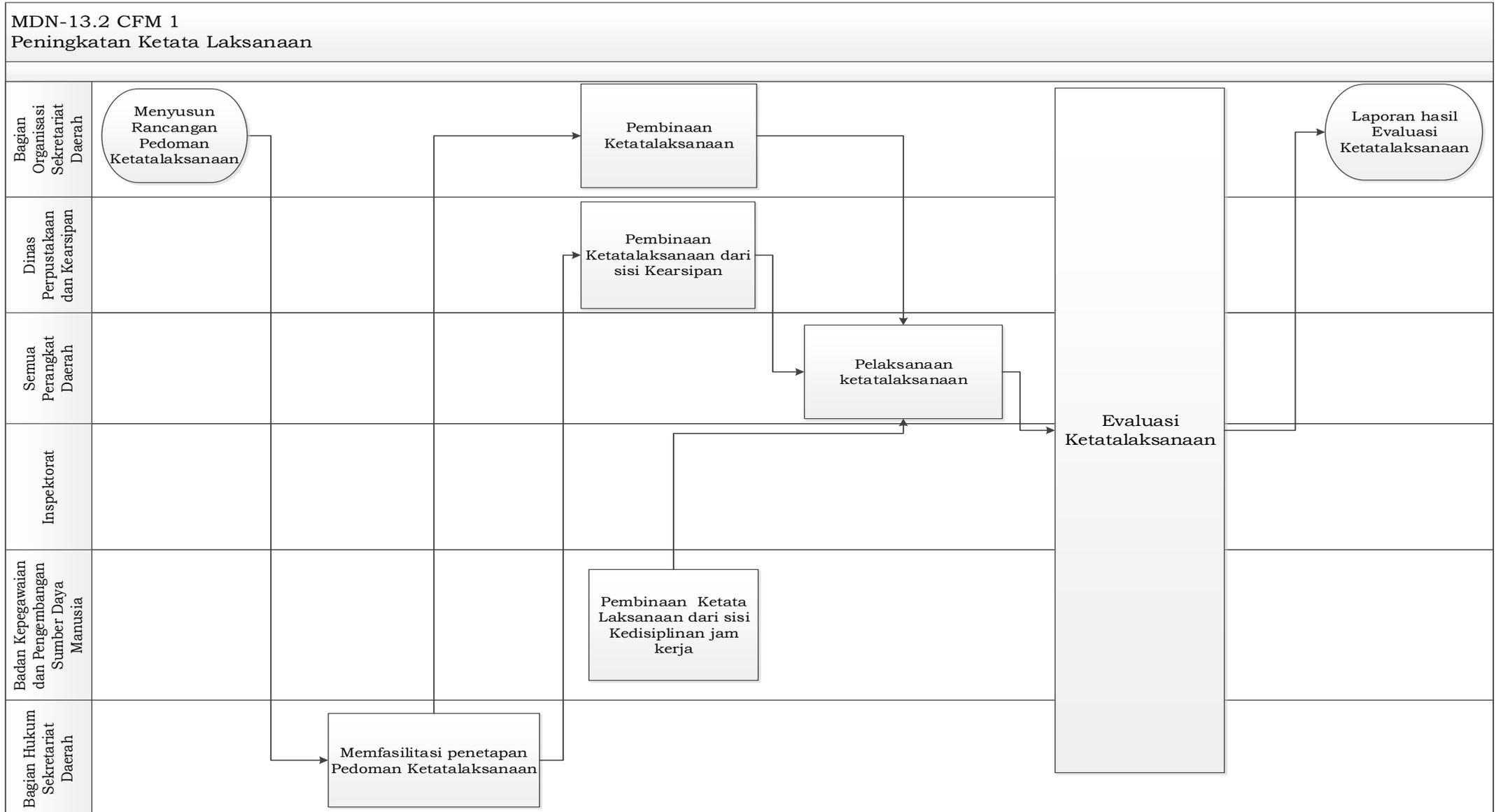
Reviu Rencana Kerja Anggaran/Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKA/RKPA)

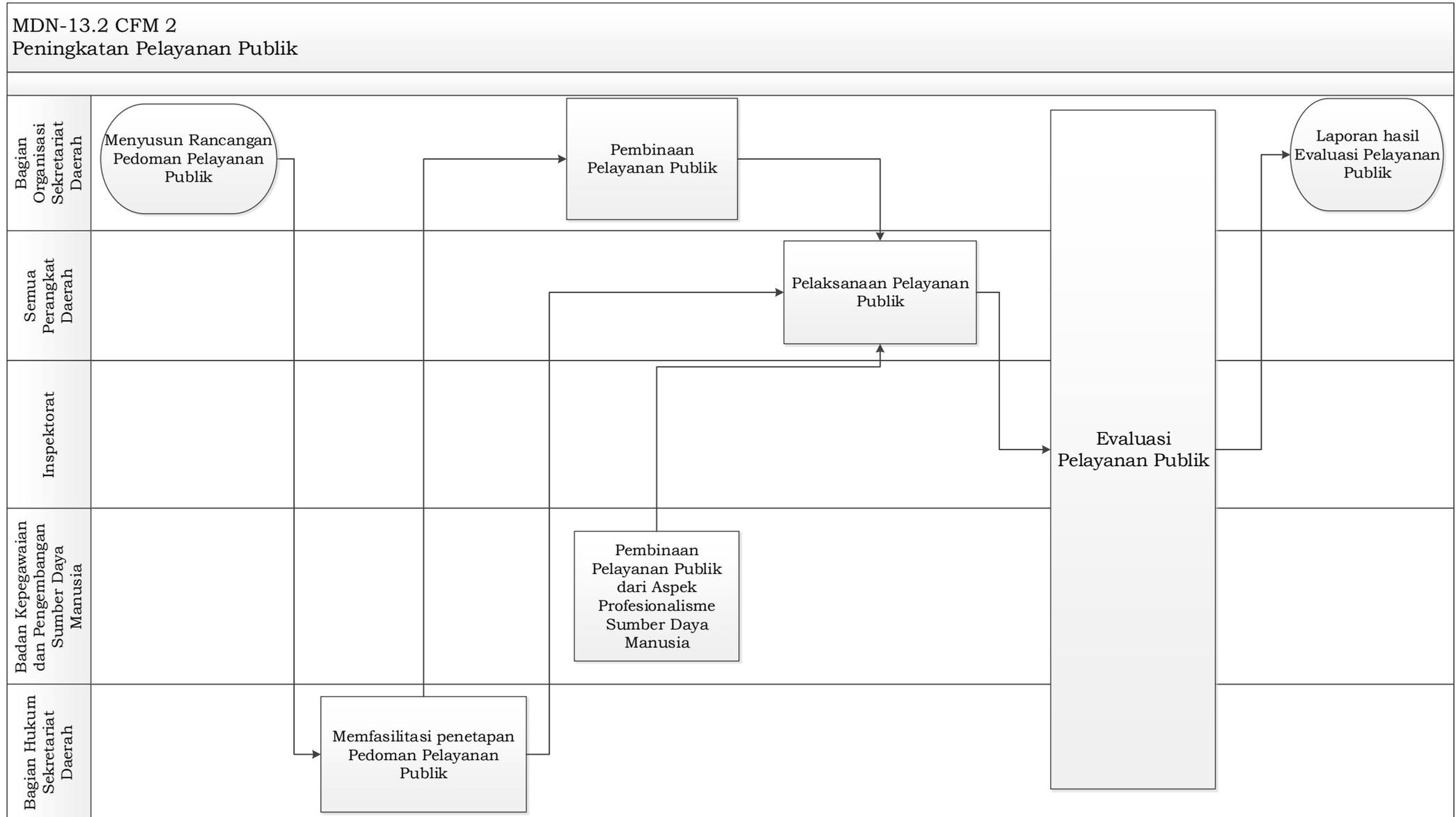


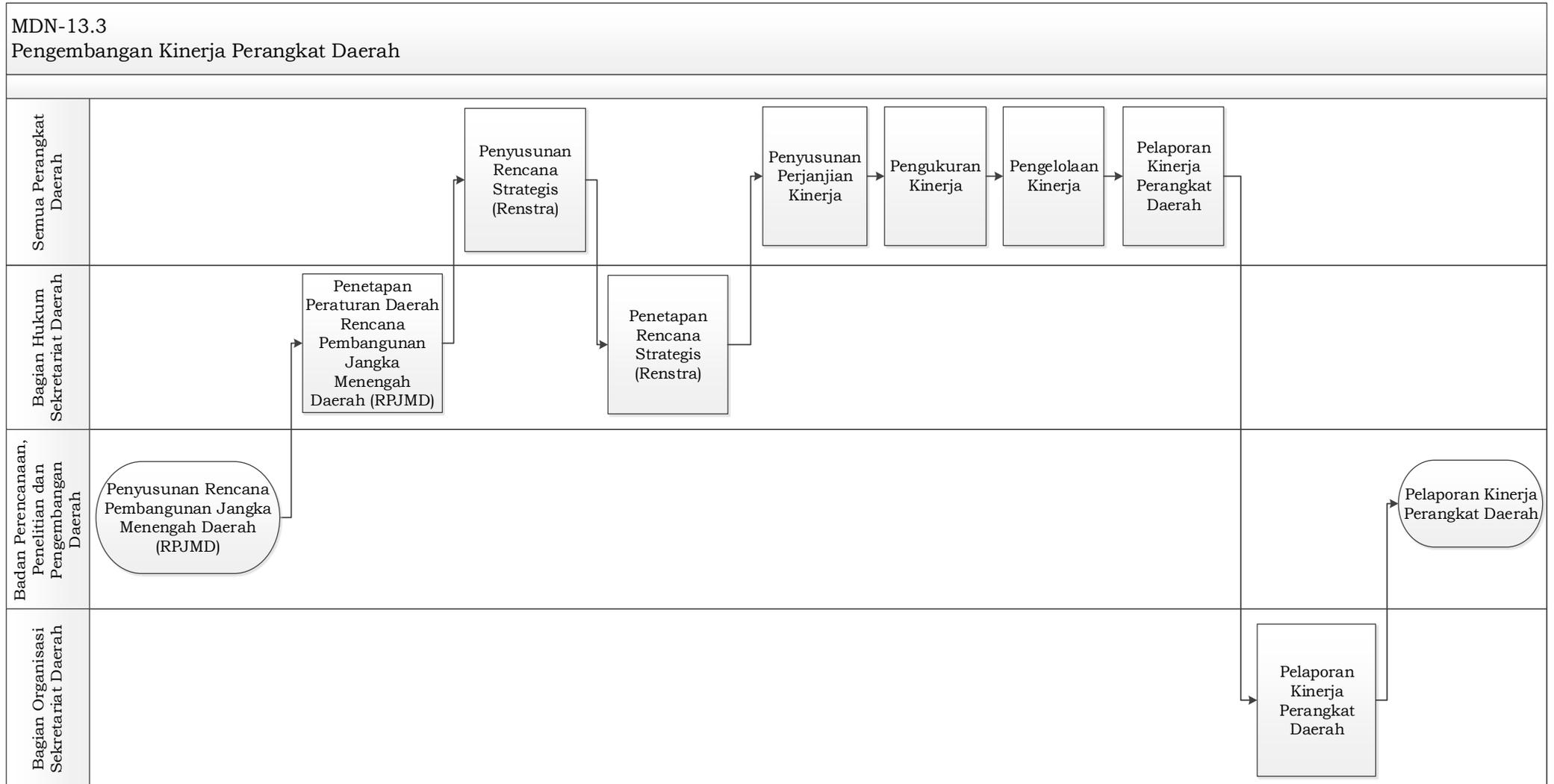


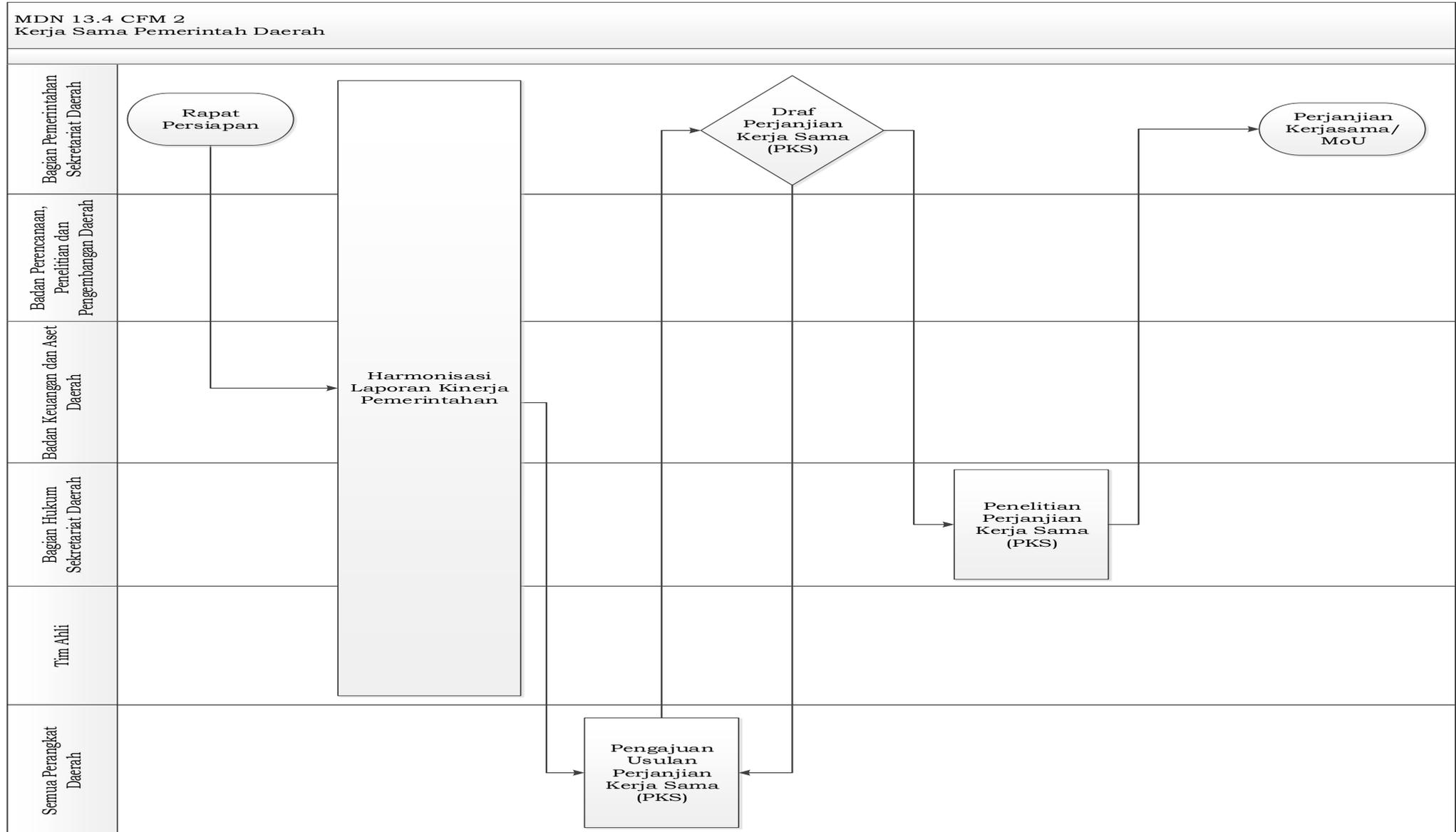


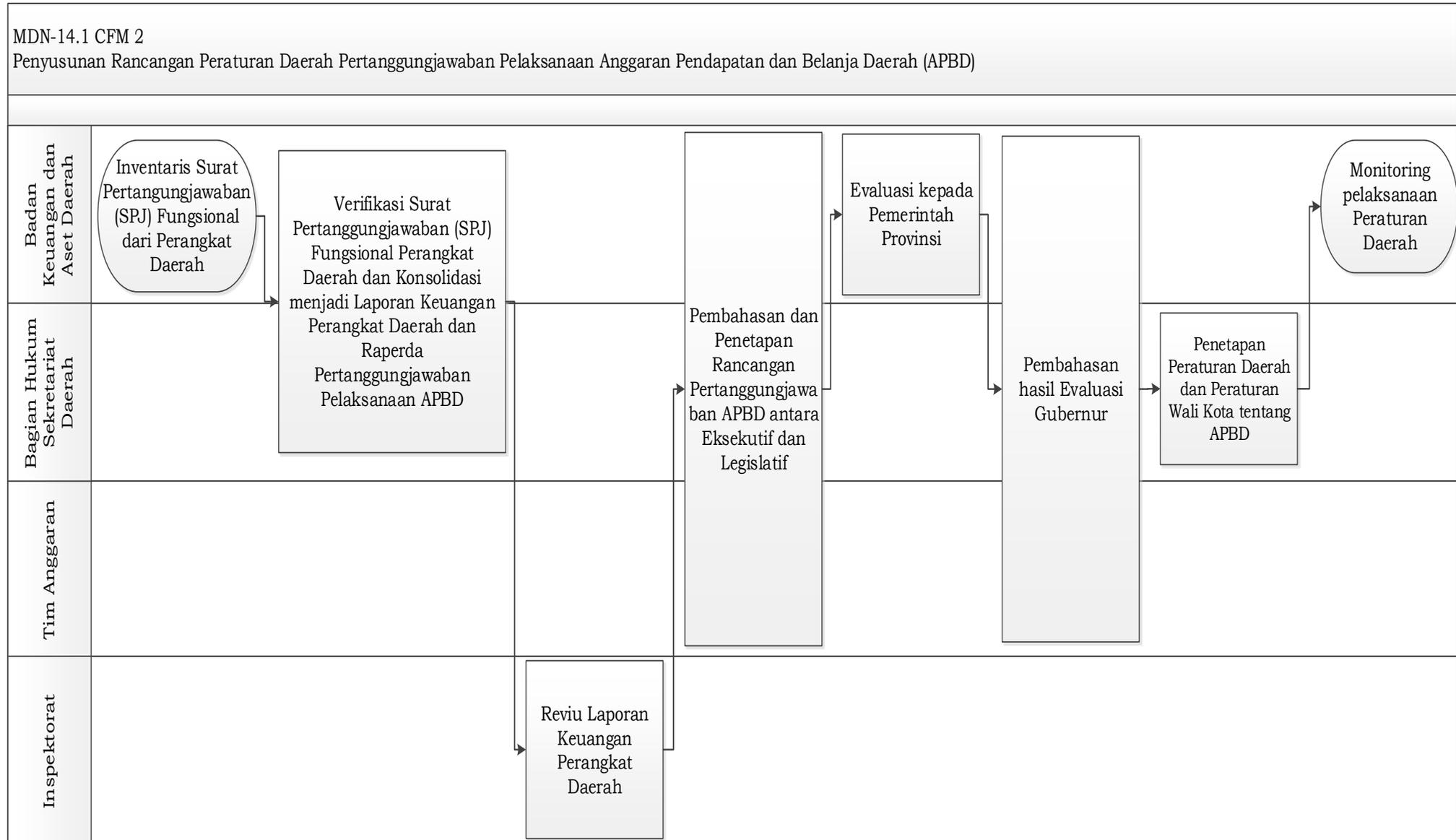


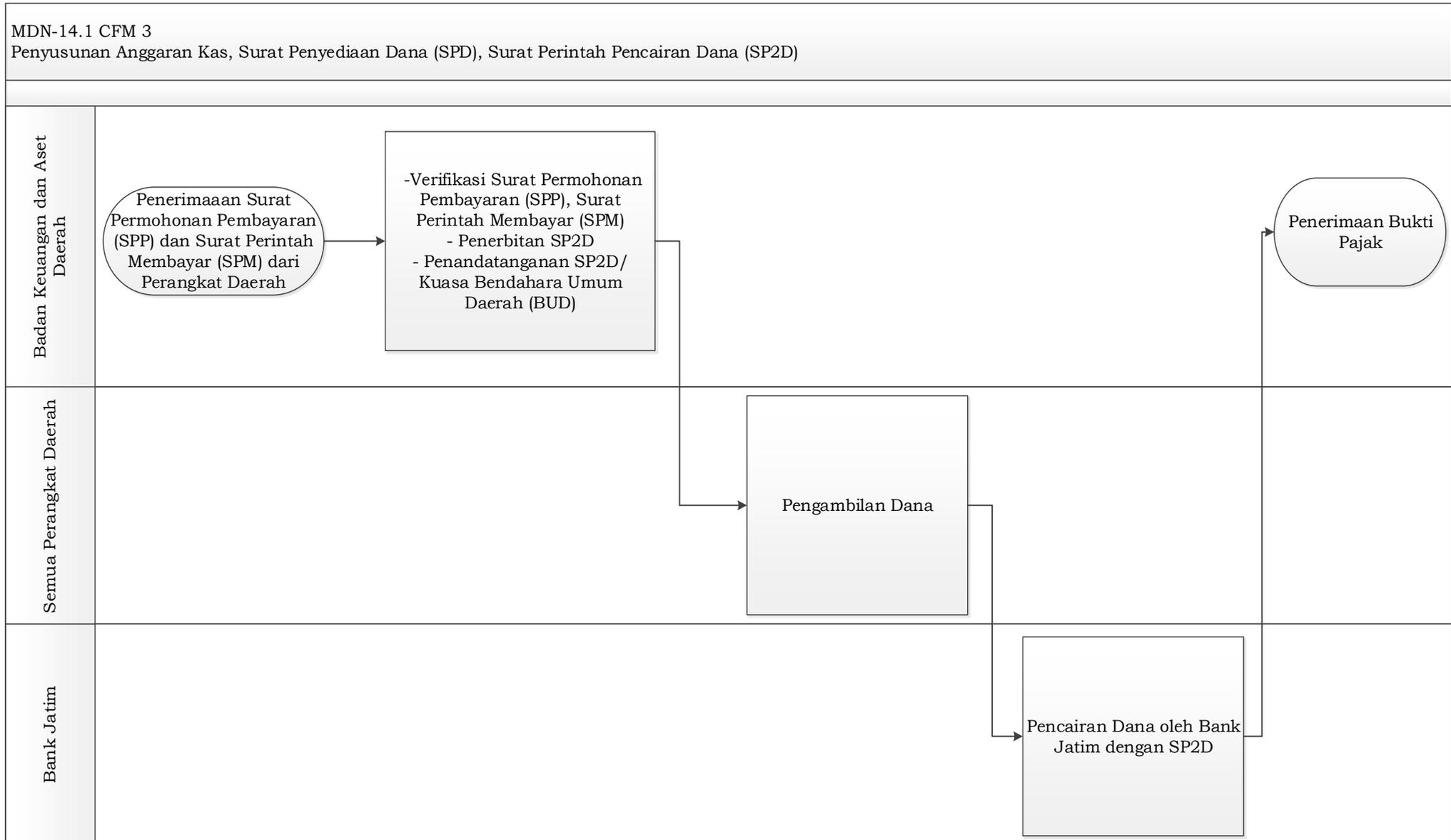


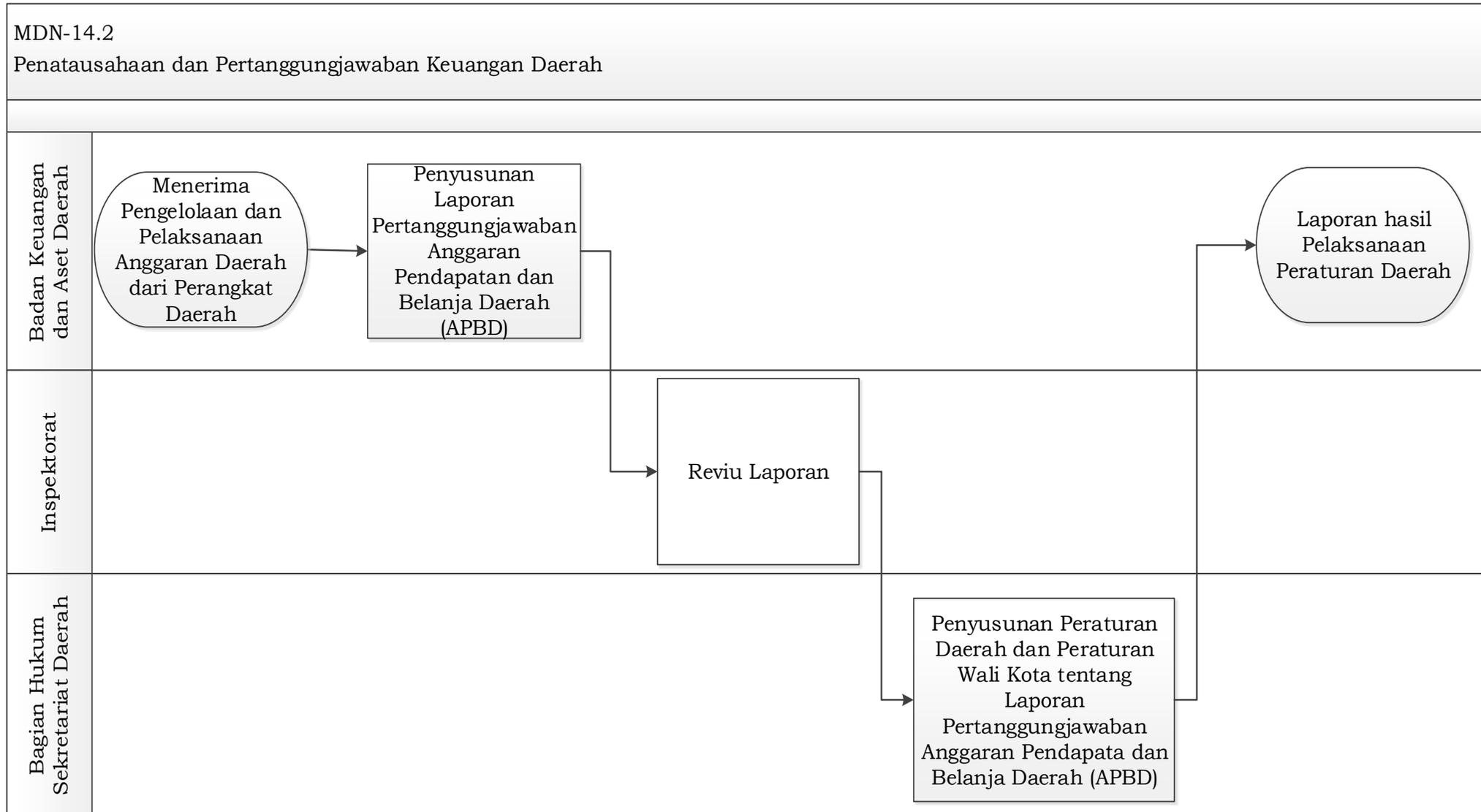


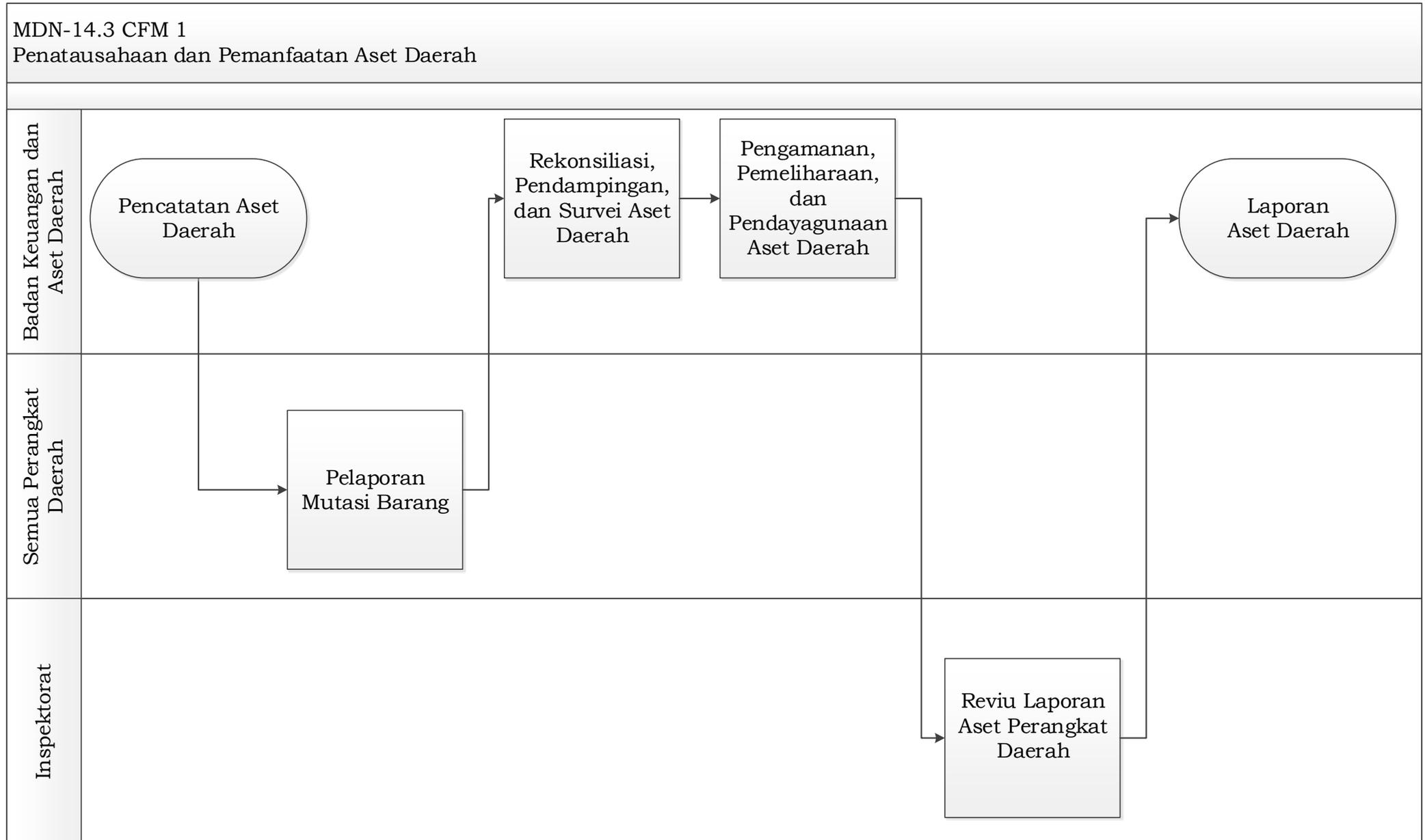


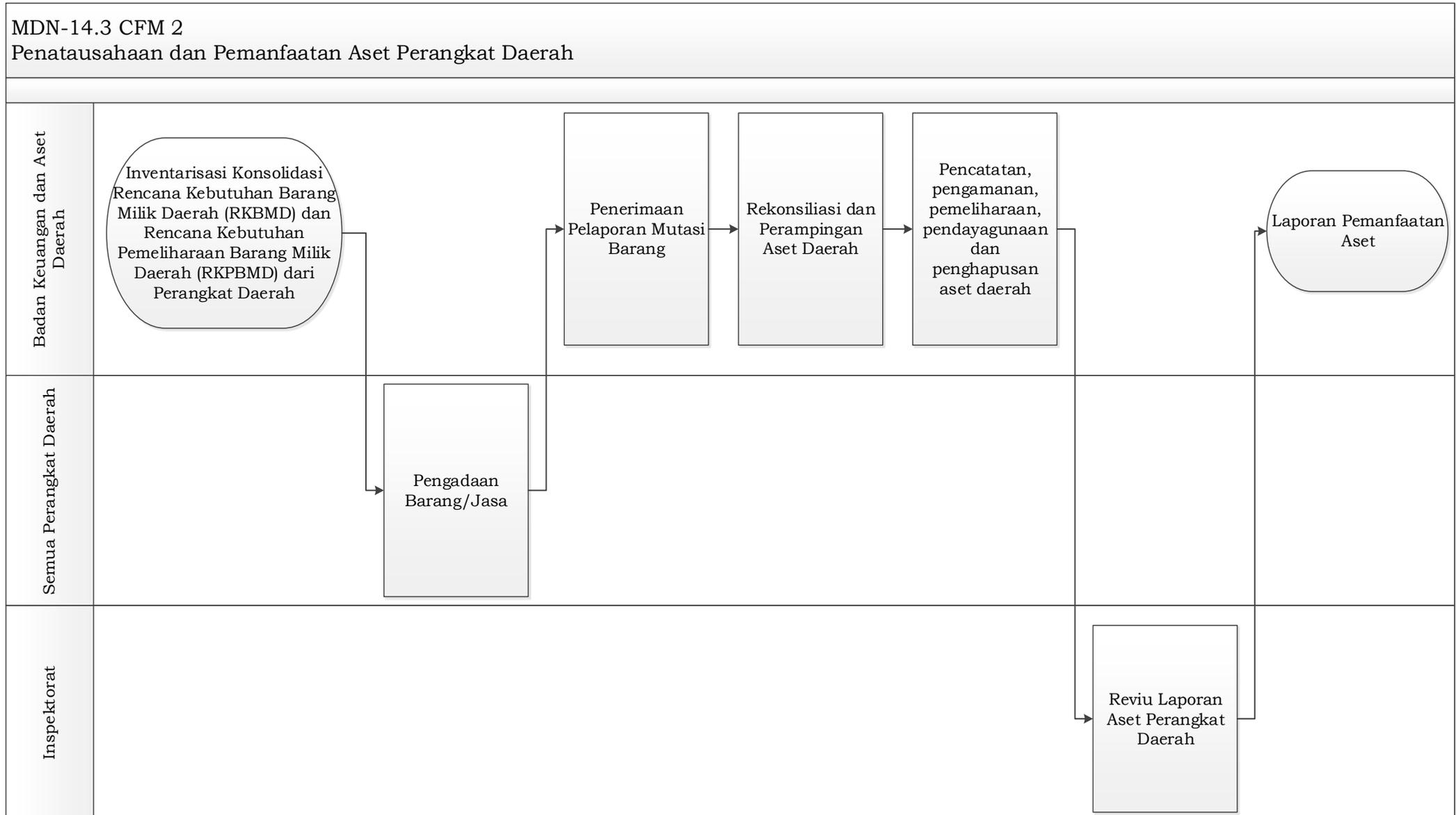


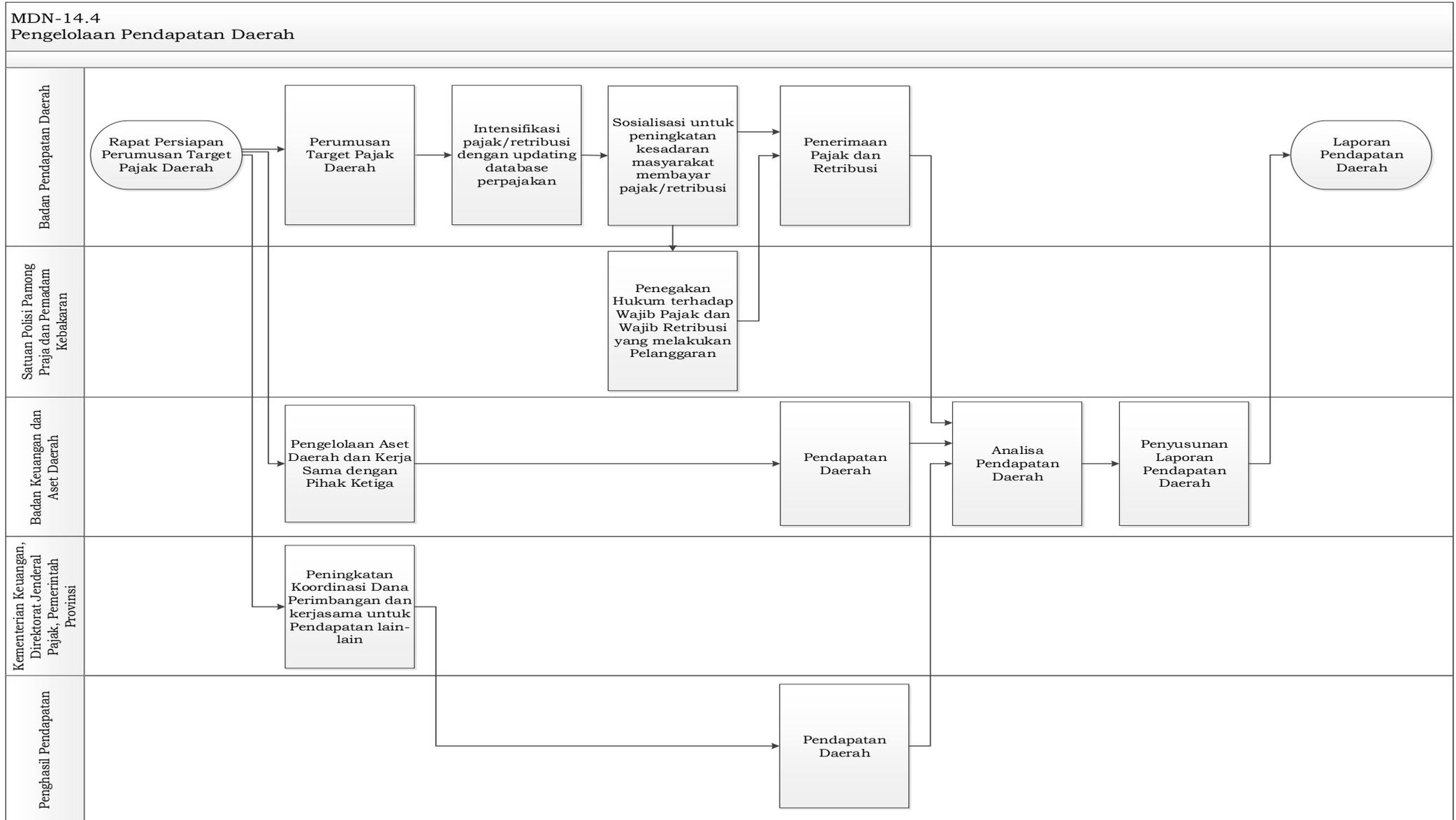


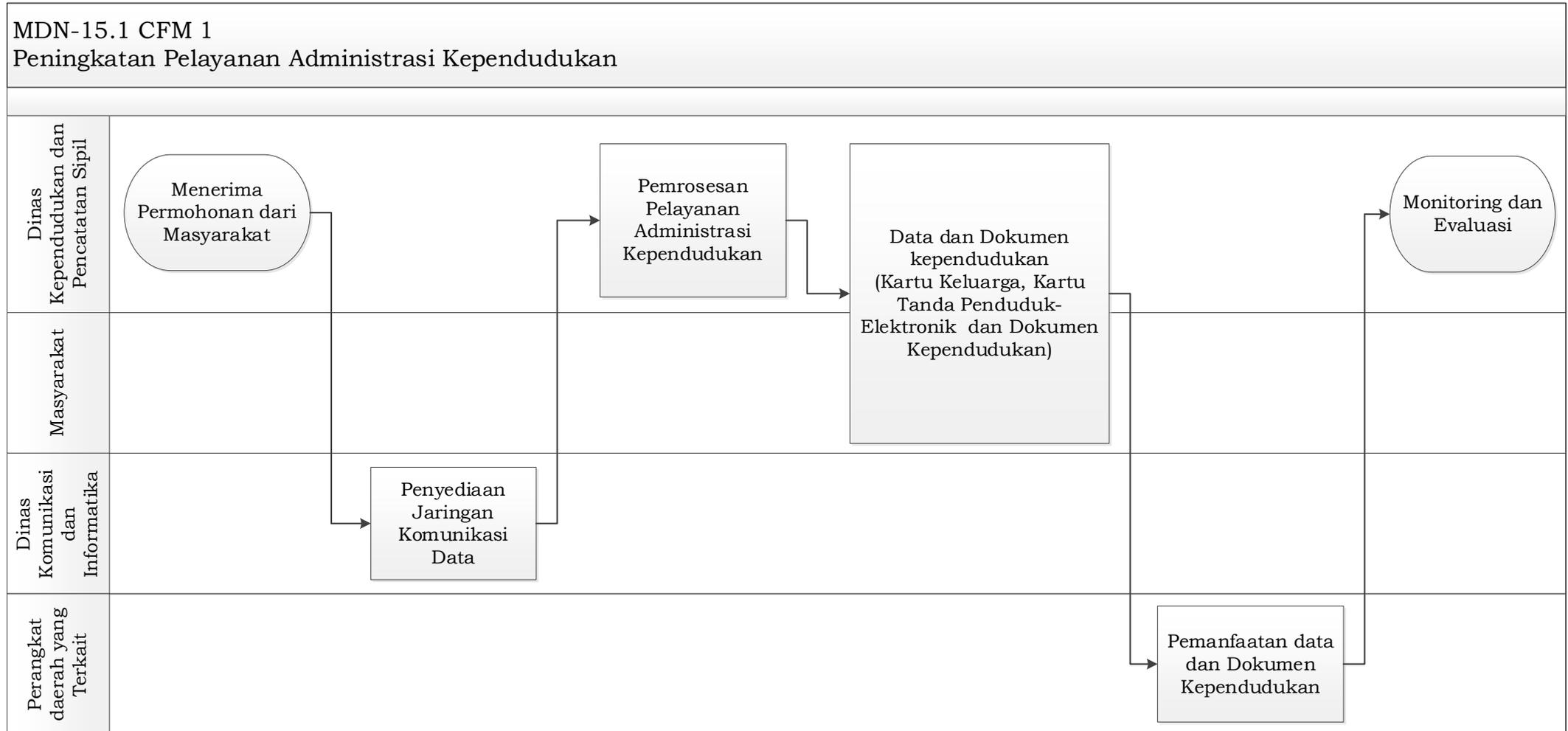


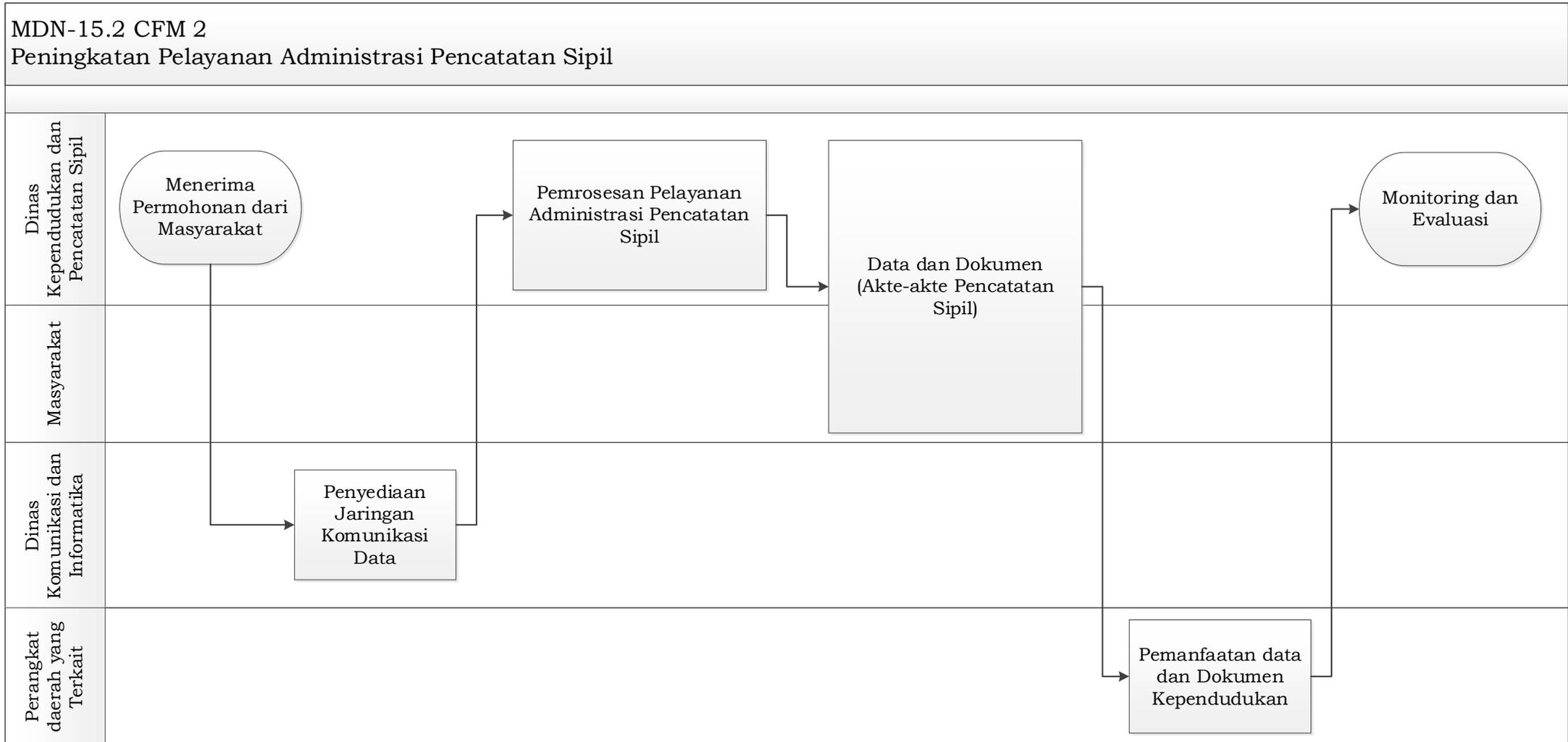


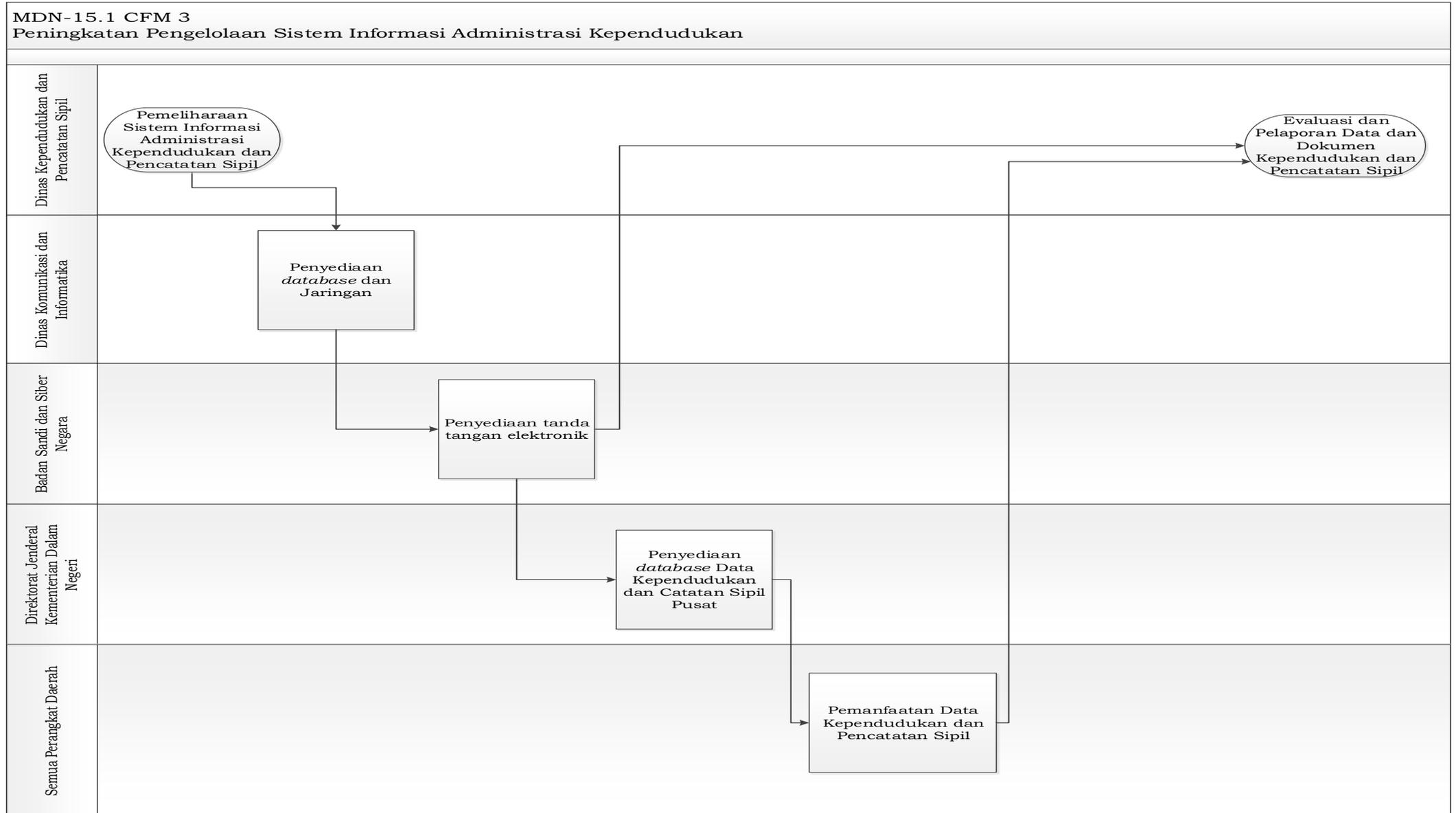


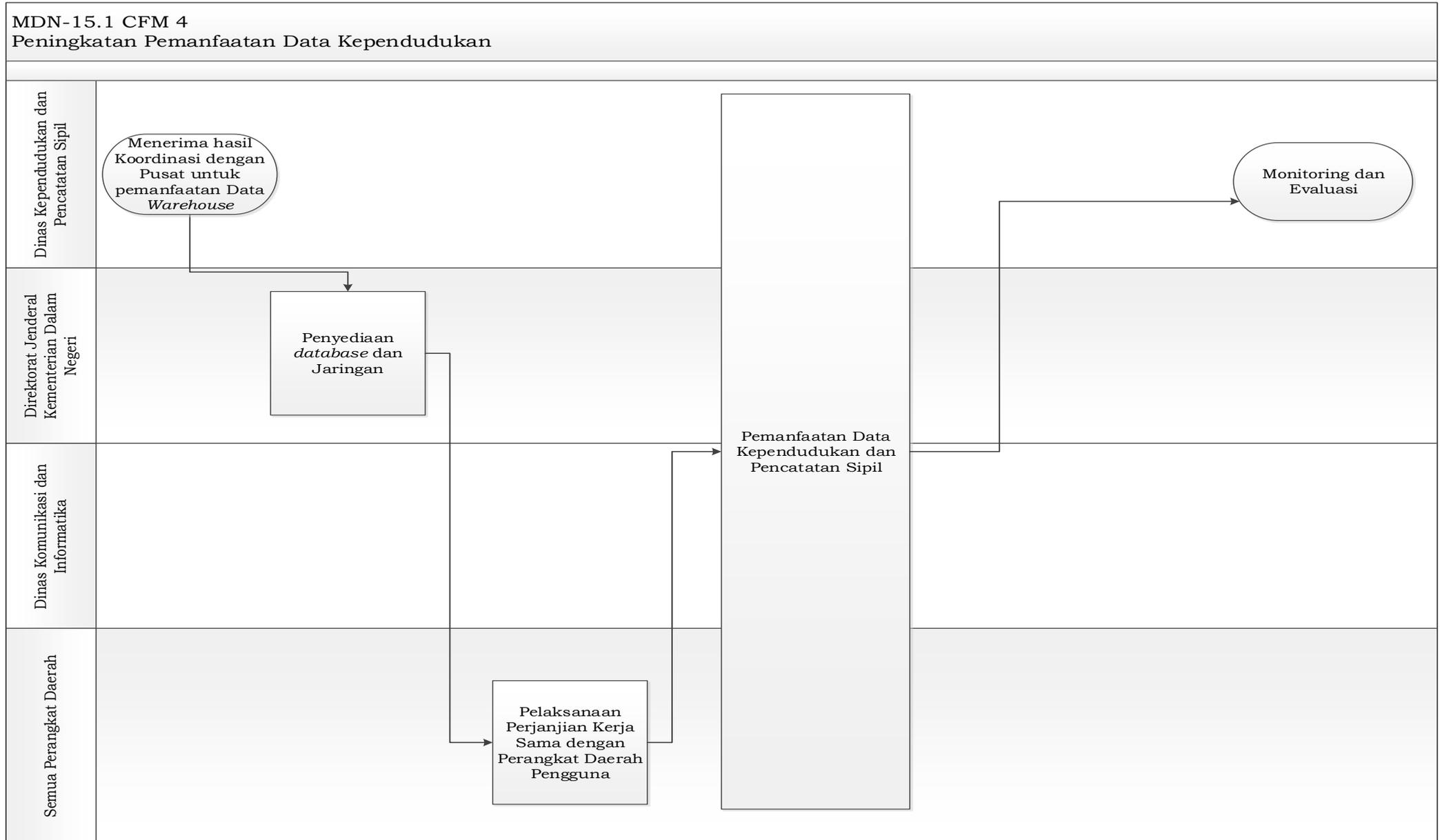


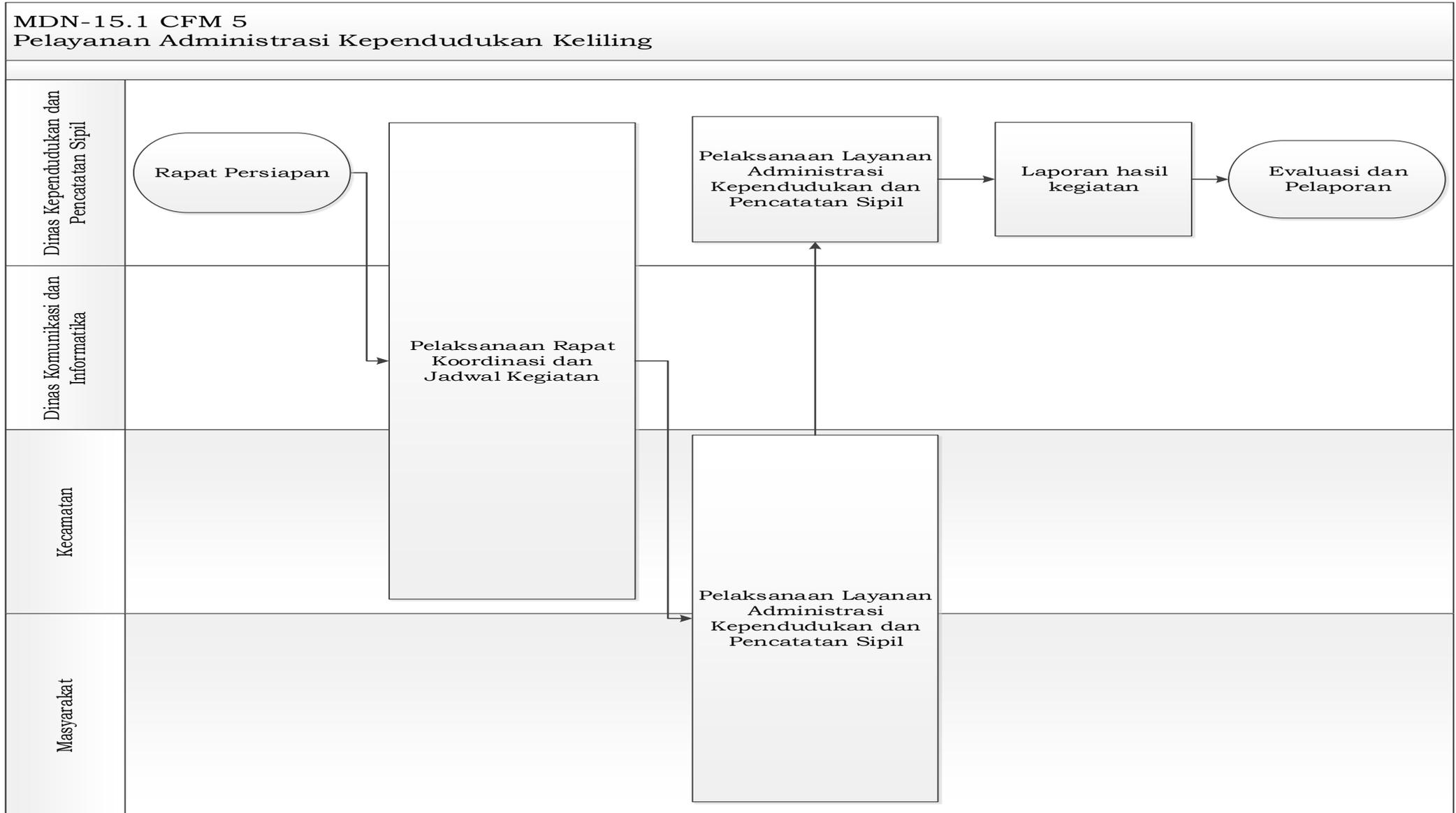


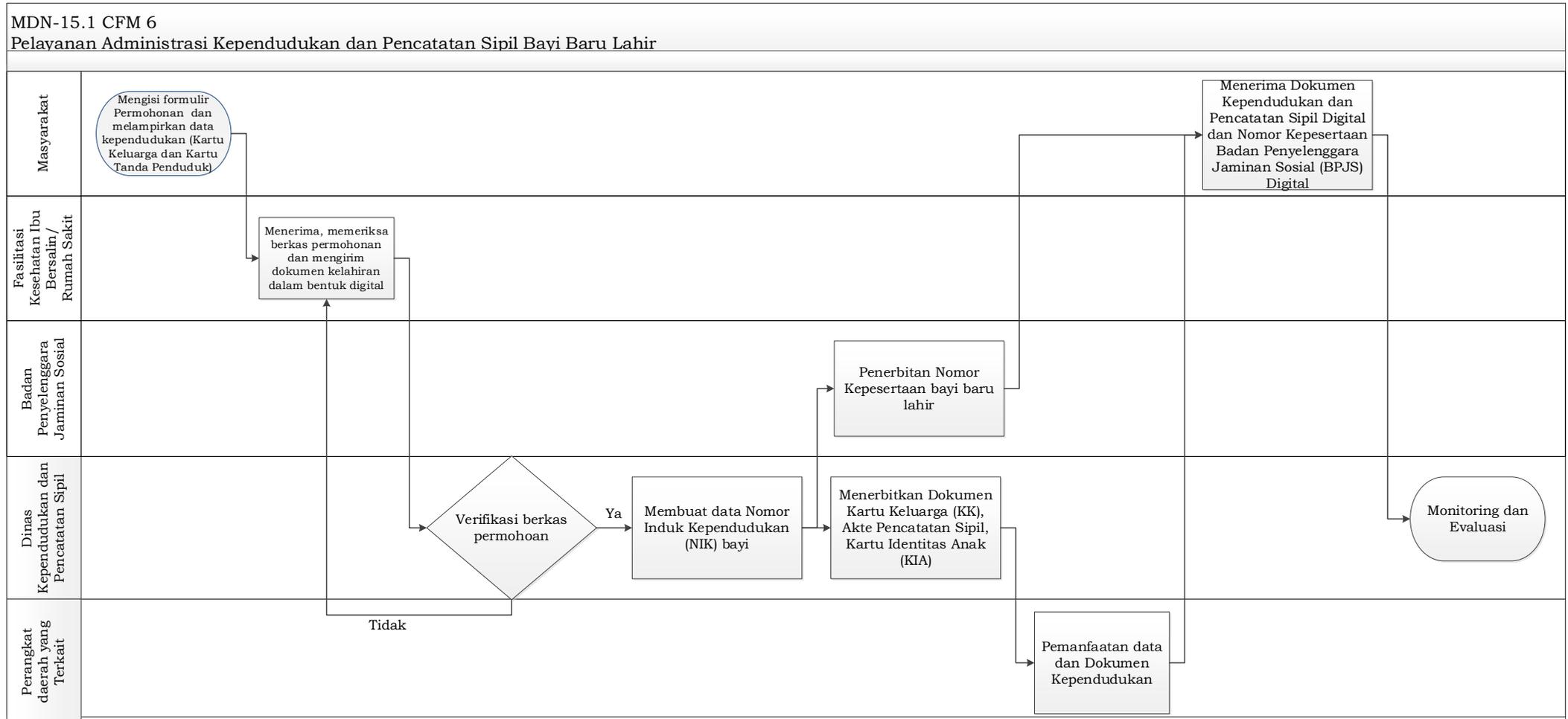






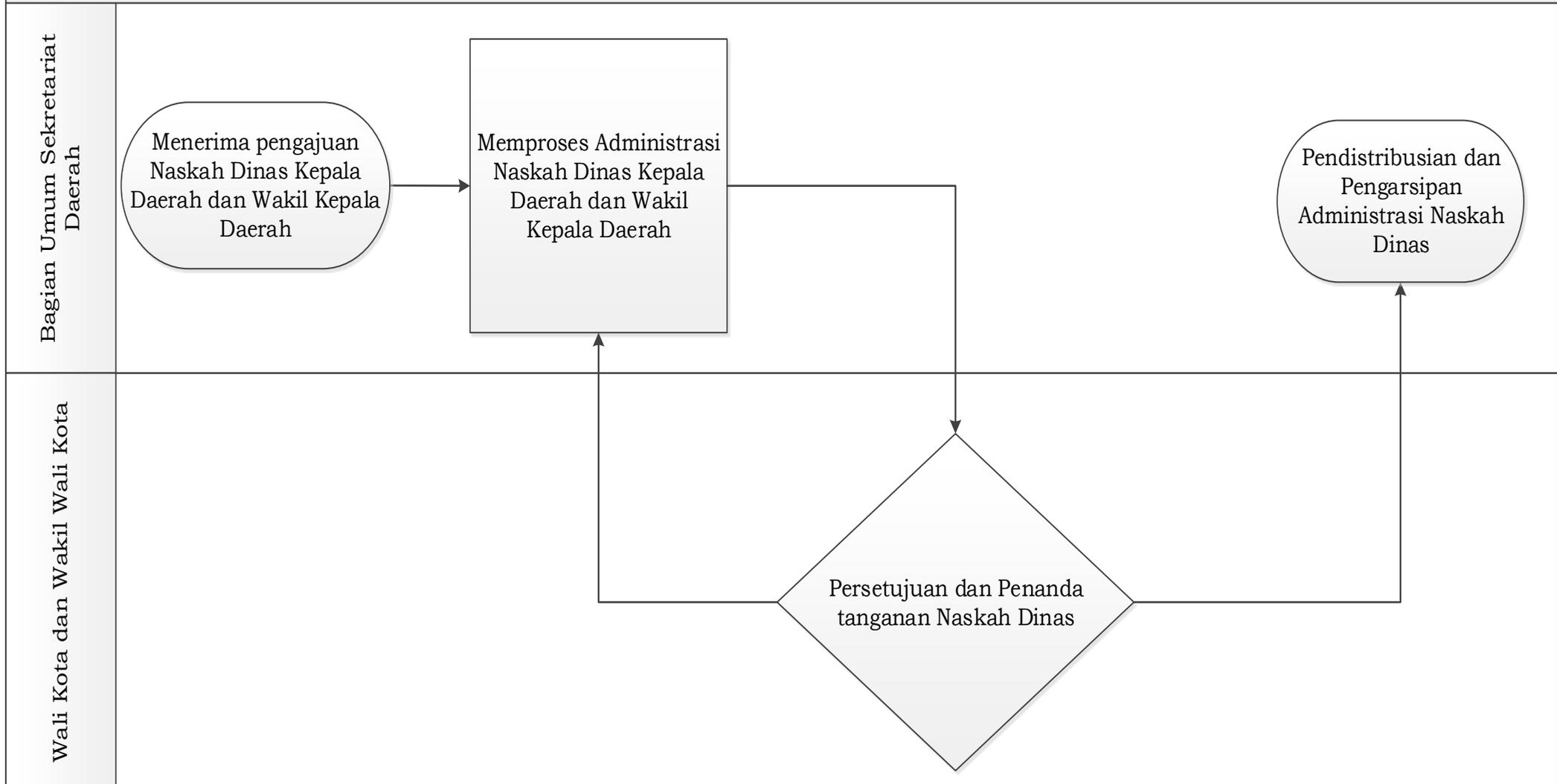






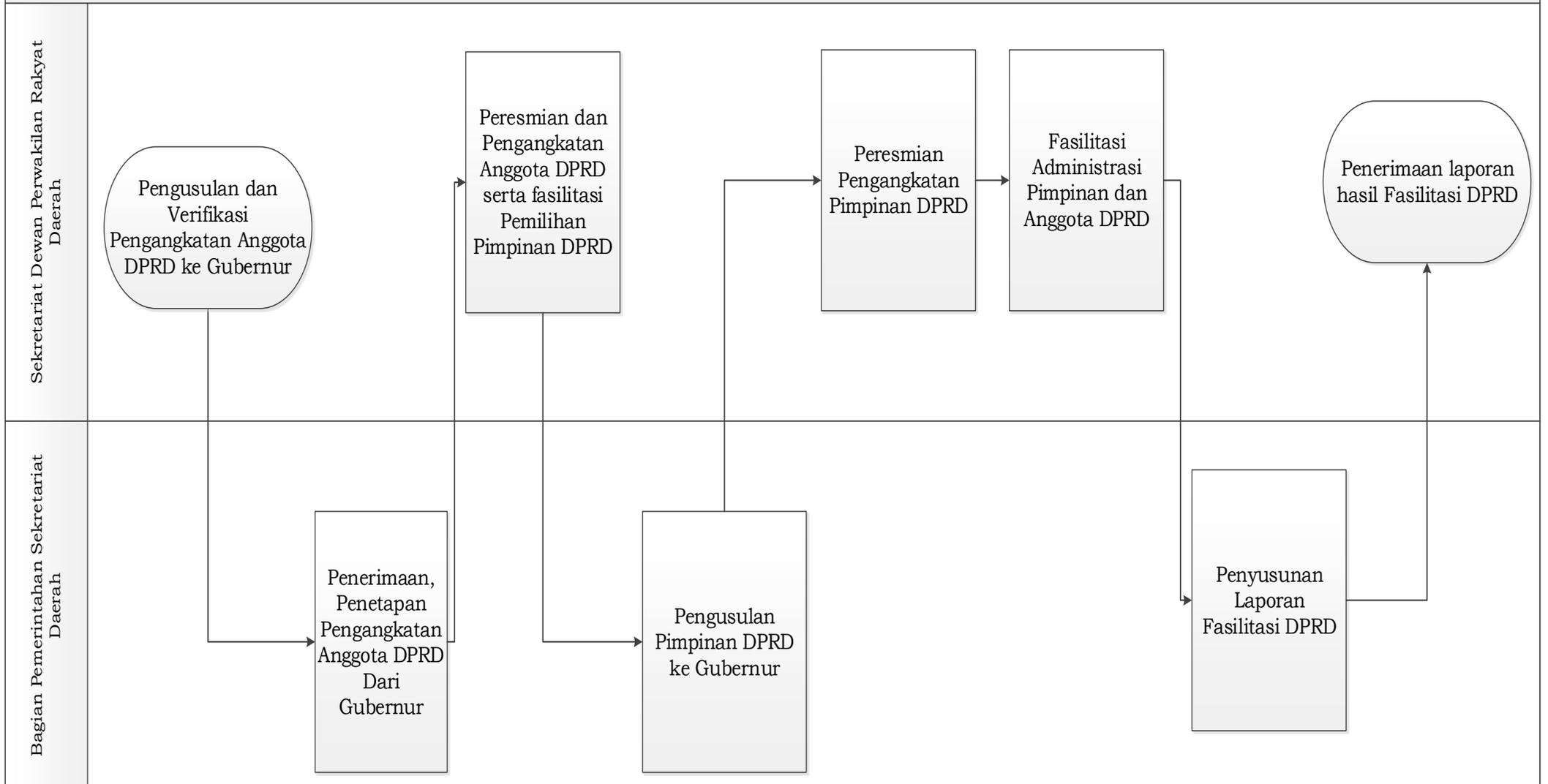
MDN-15.2

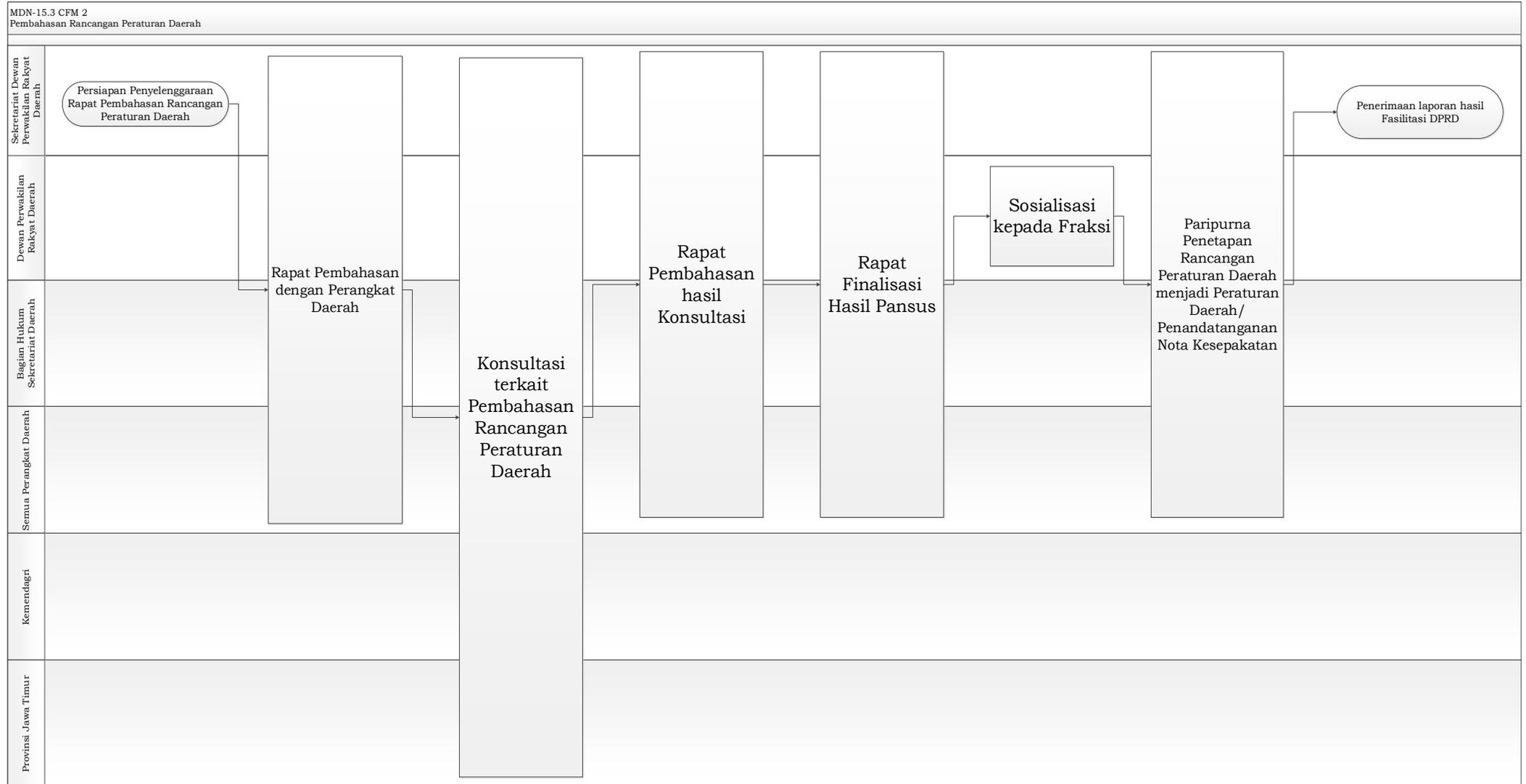
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

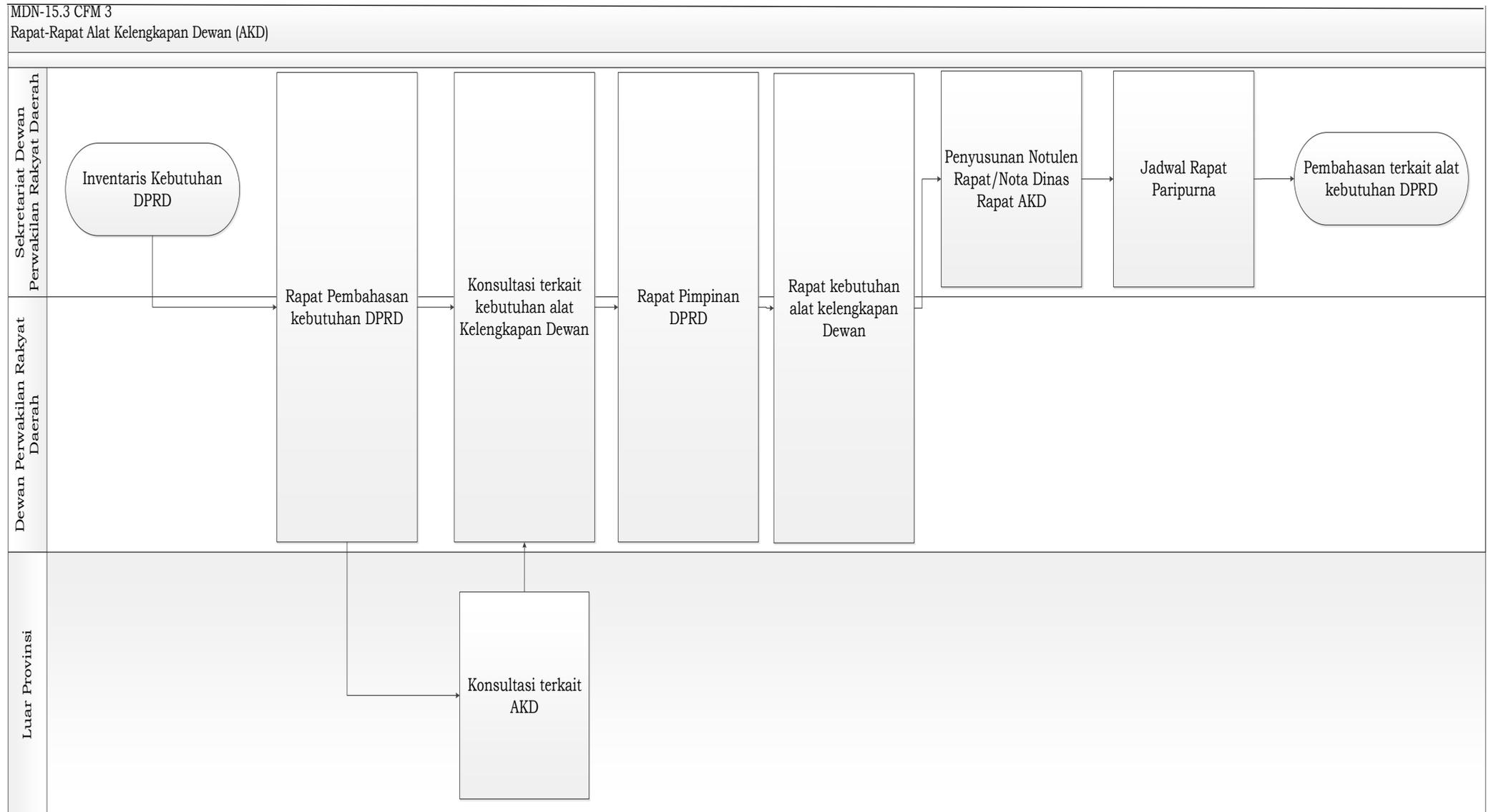


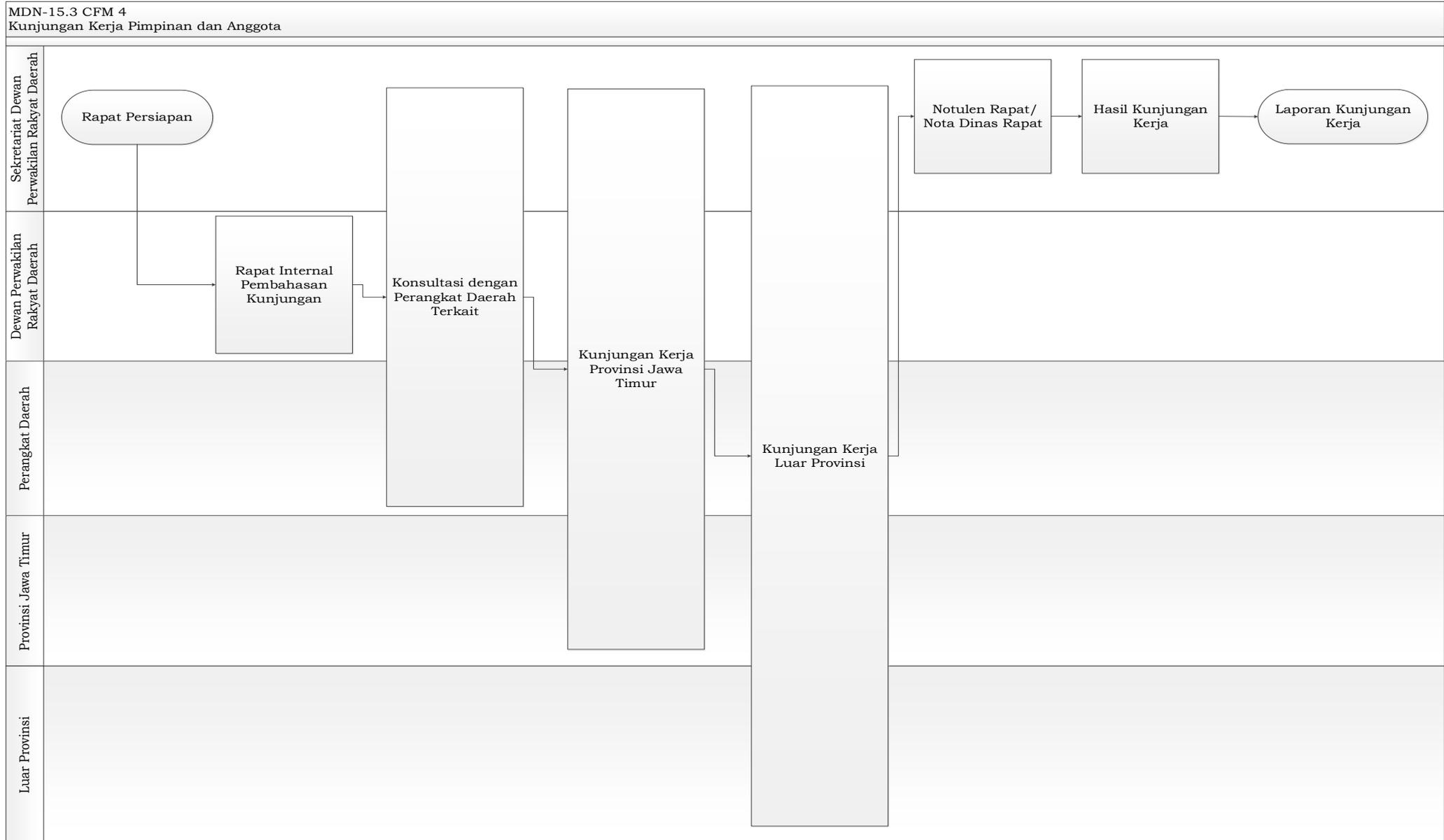
MDN-15.3 CFM 1

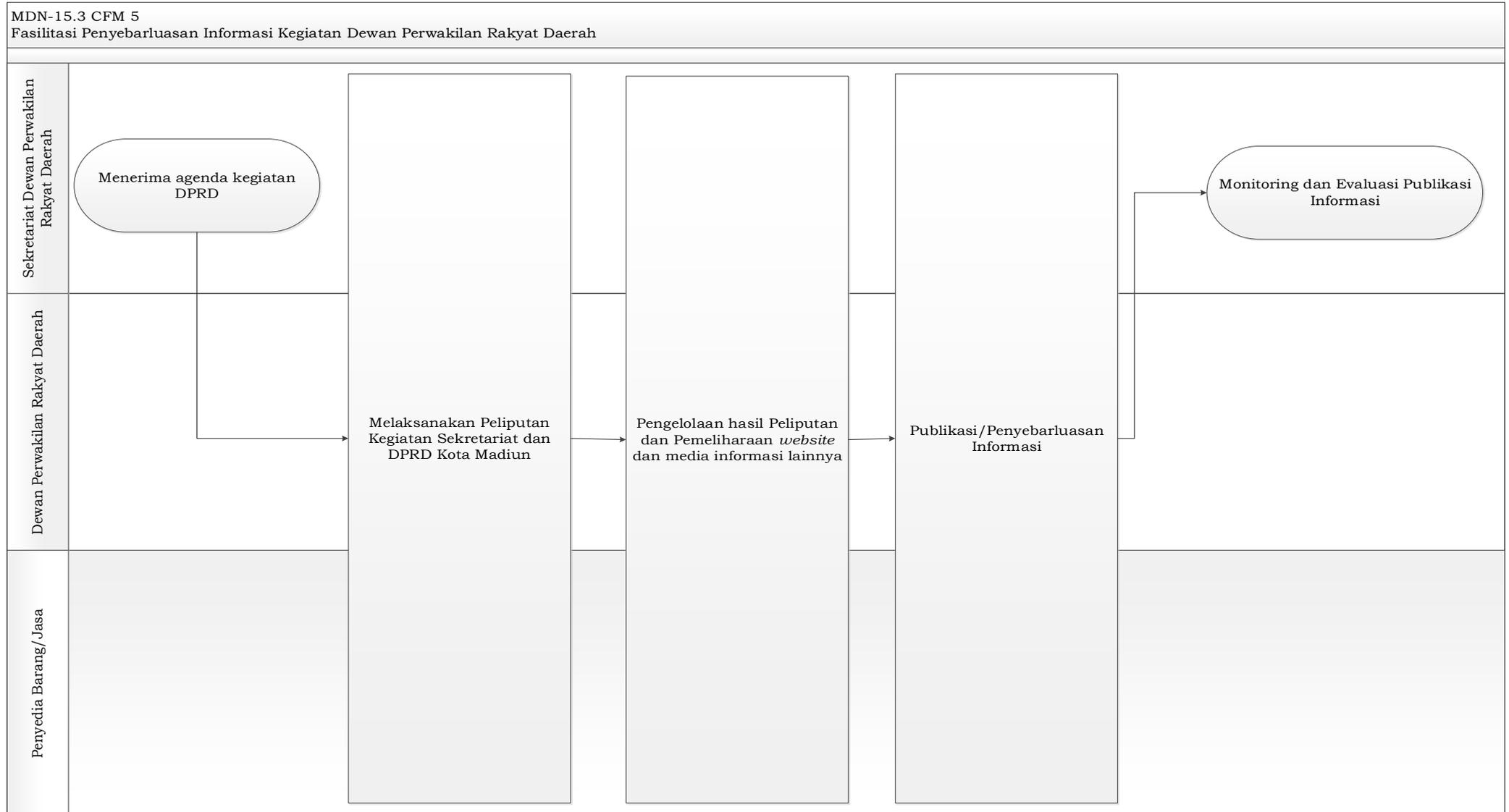
Fasilitasi Pengusulan dan Pengangkatan Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

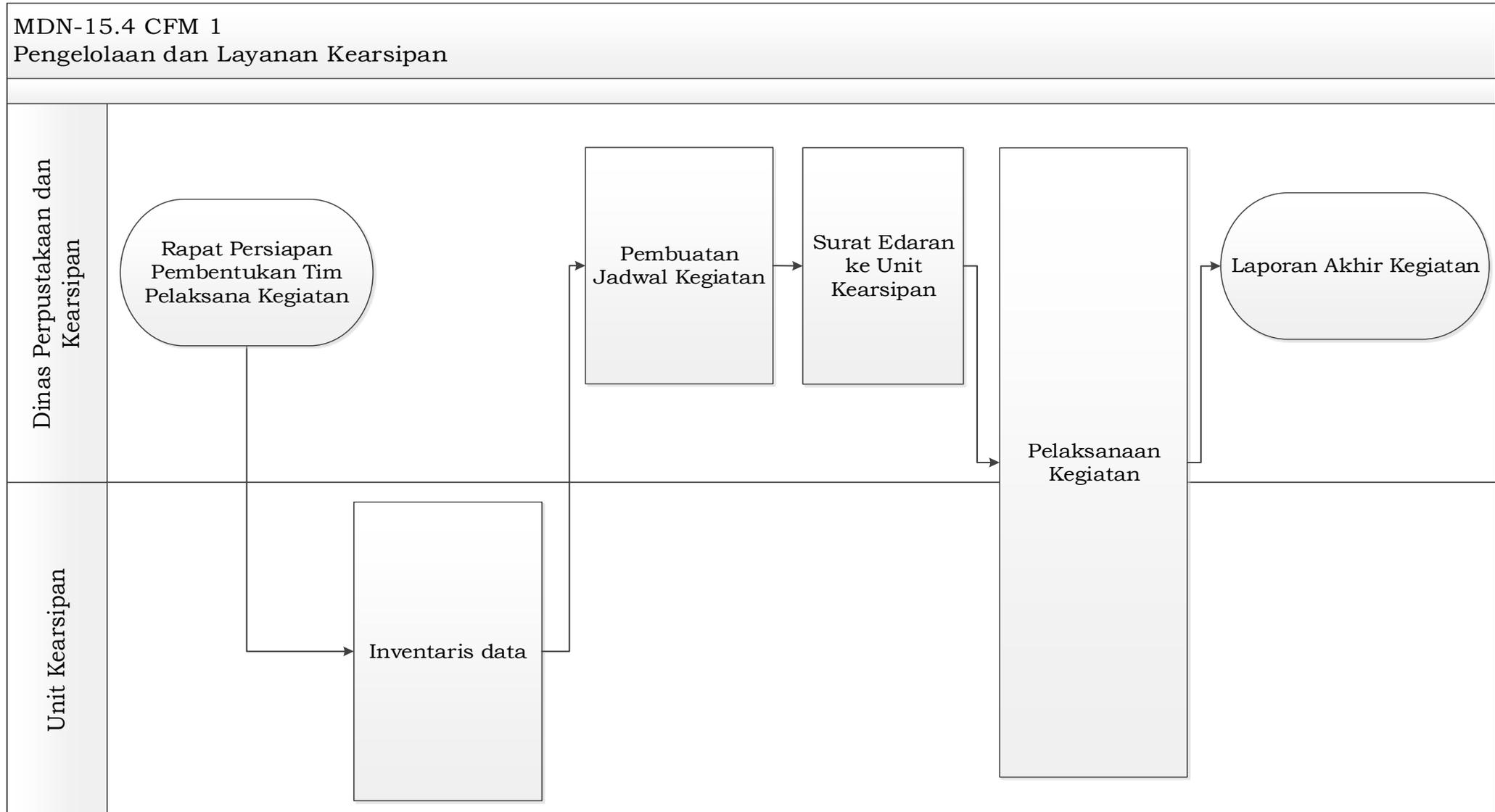


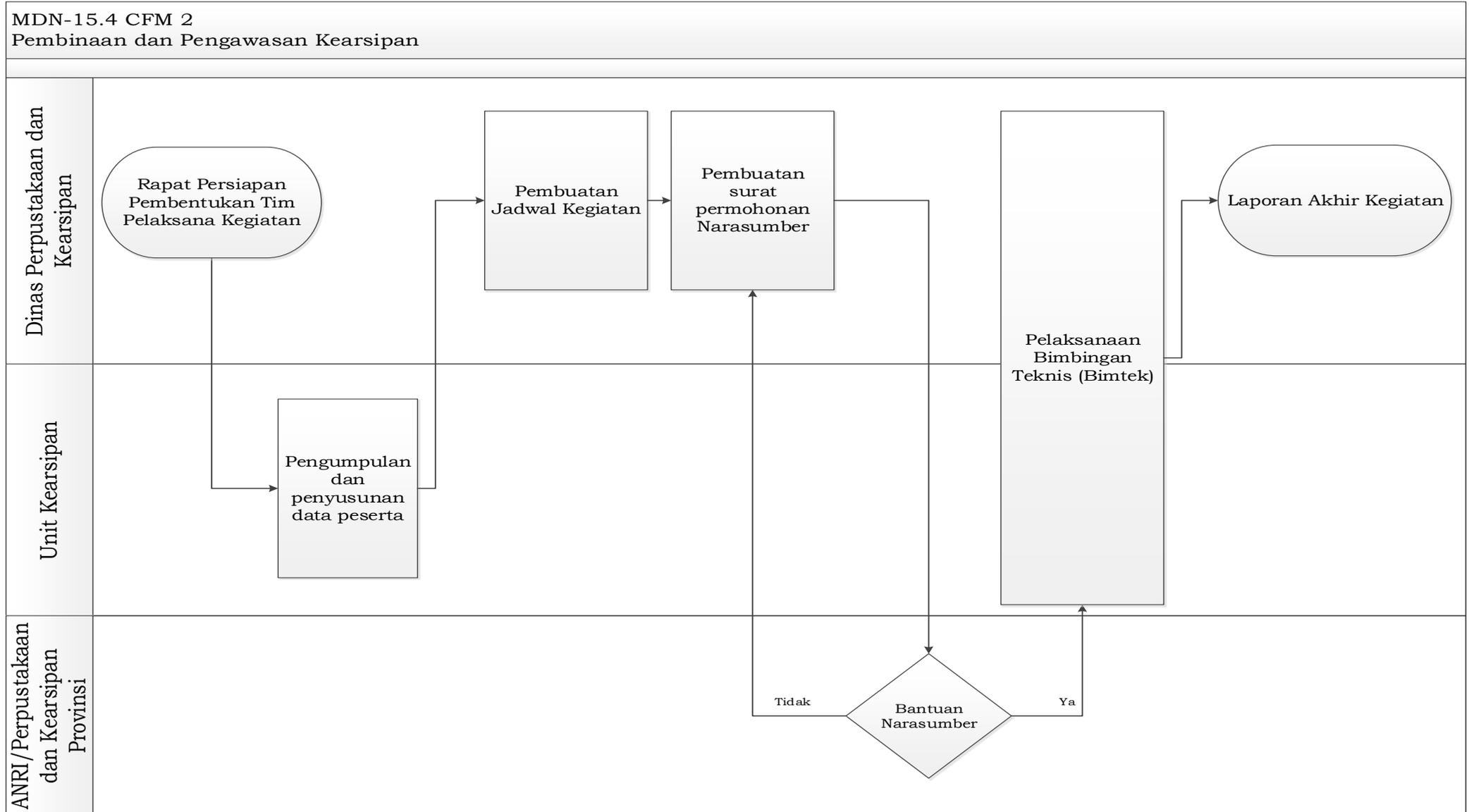


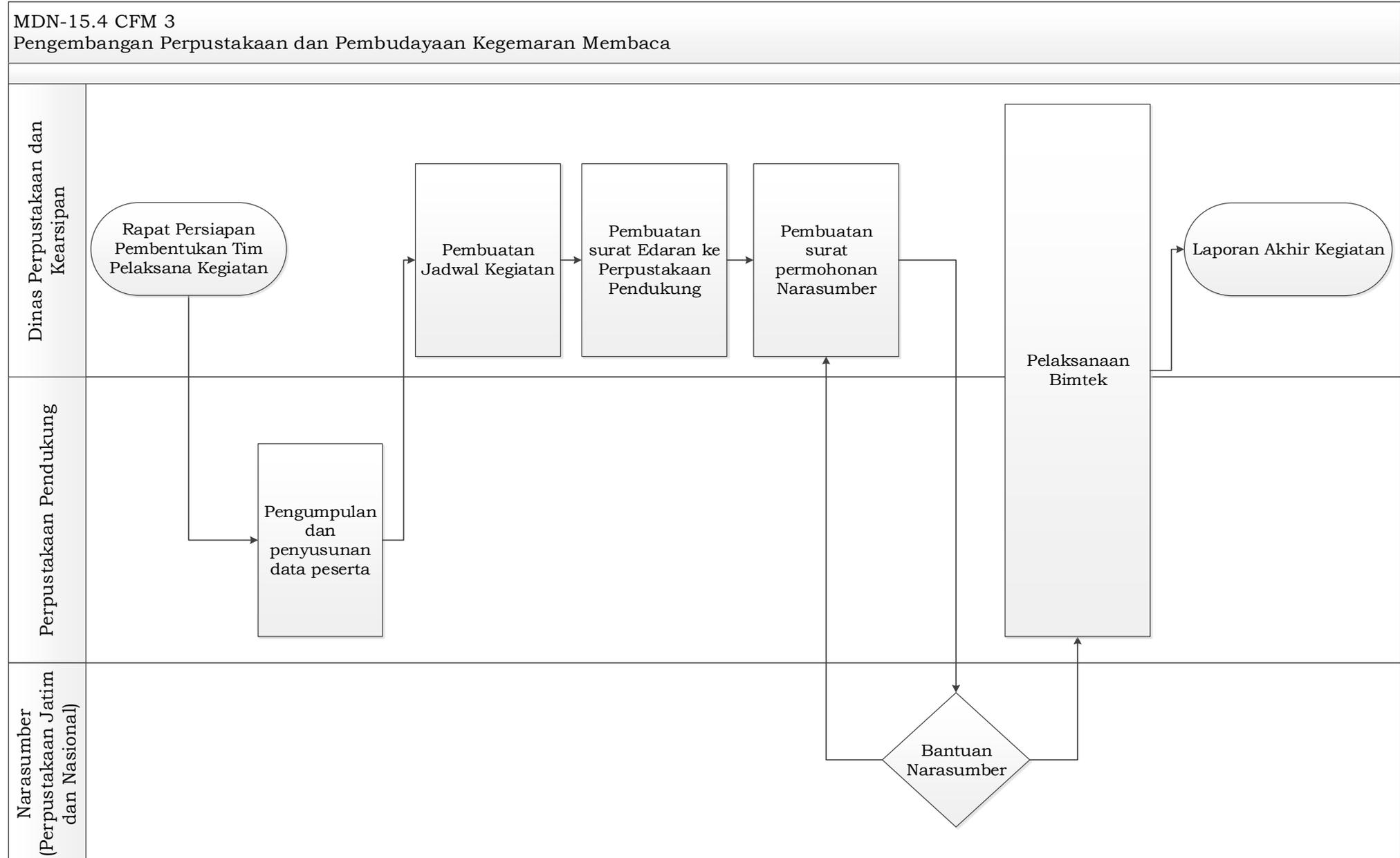


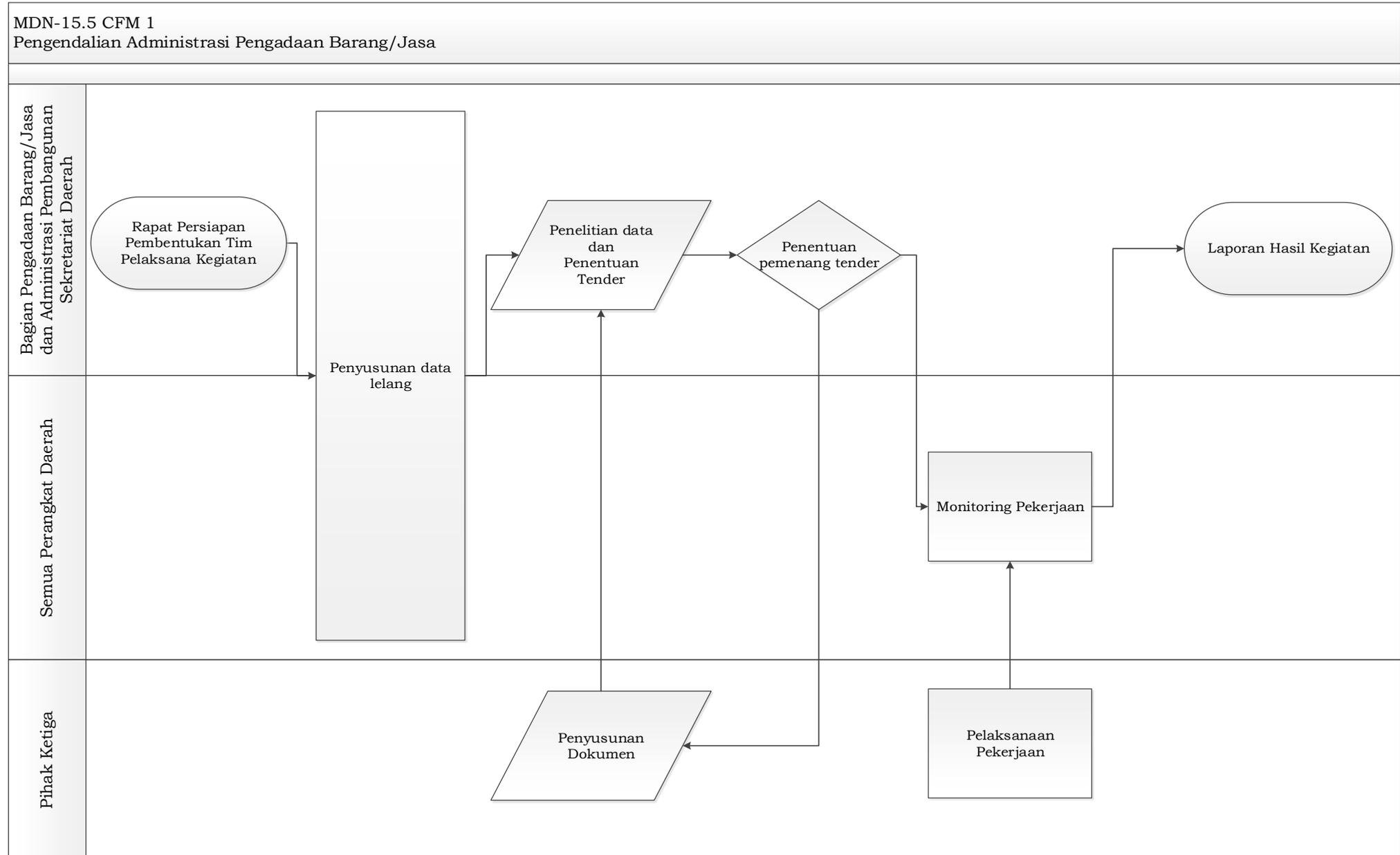


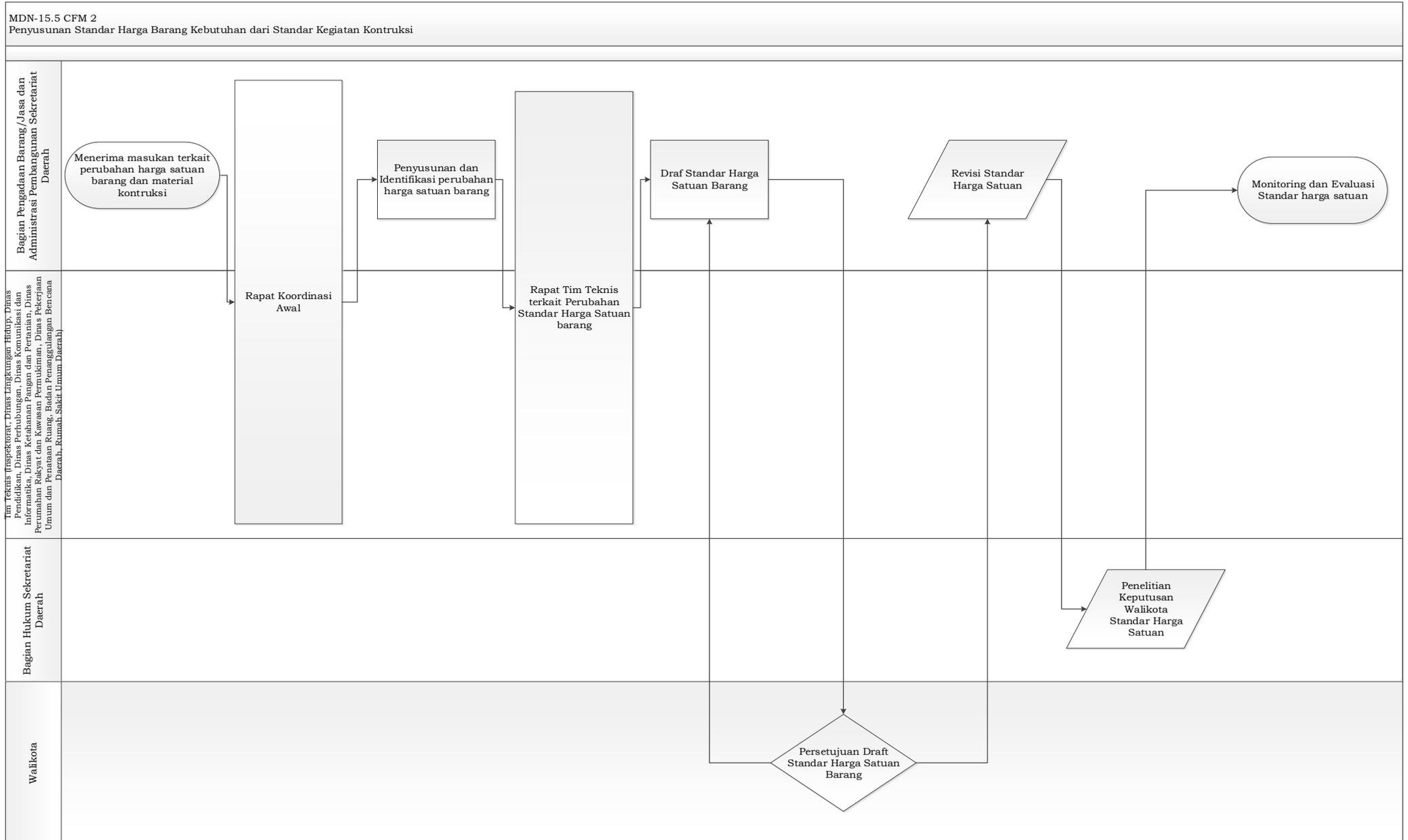


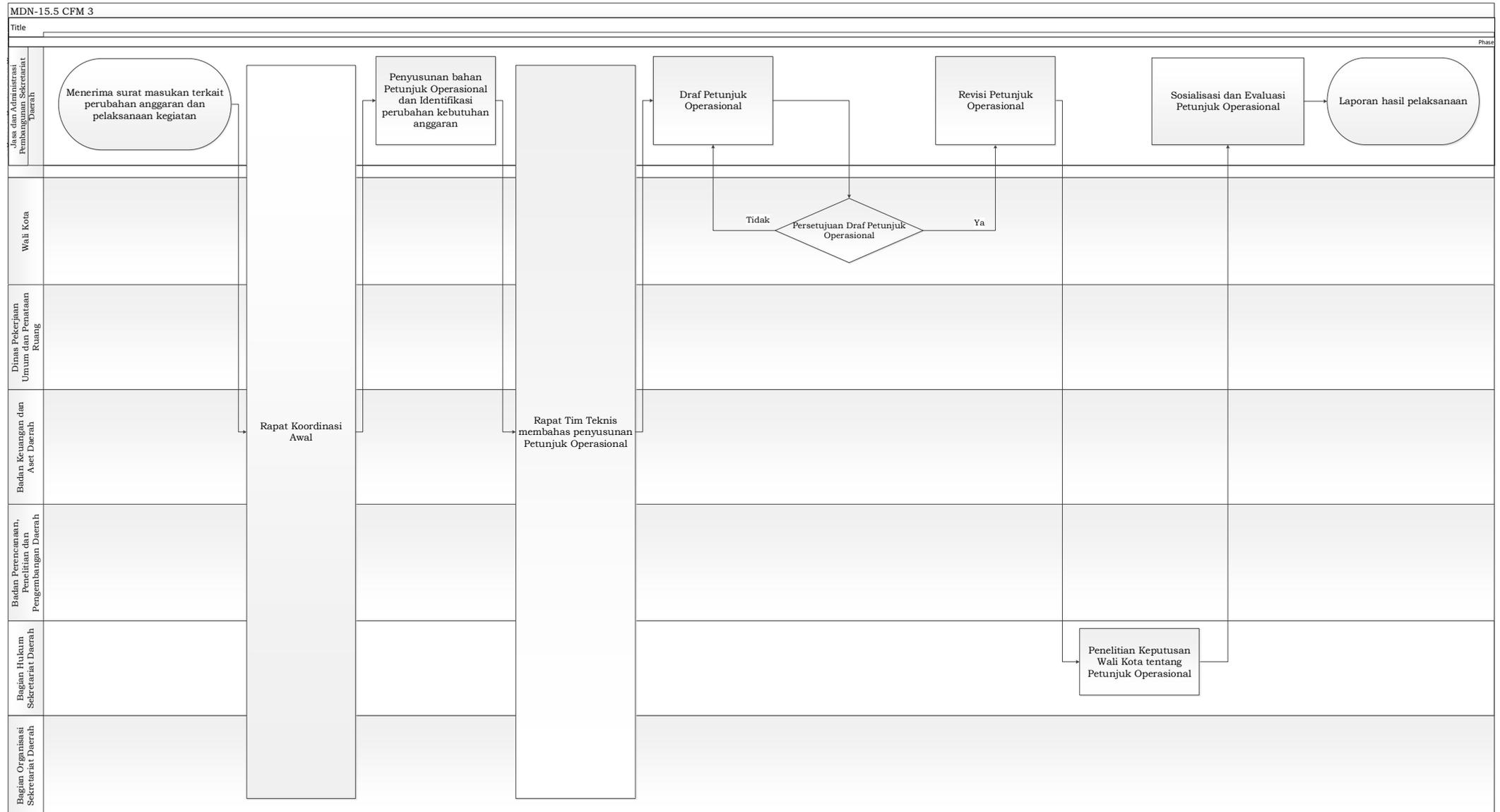


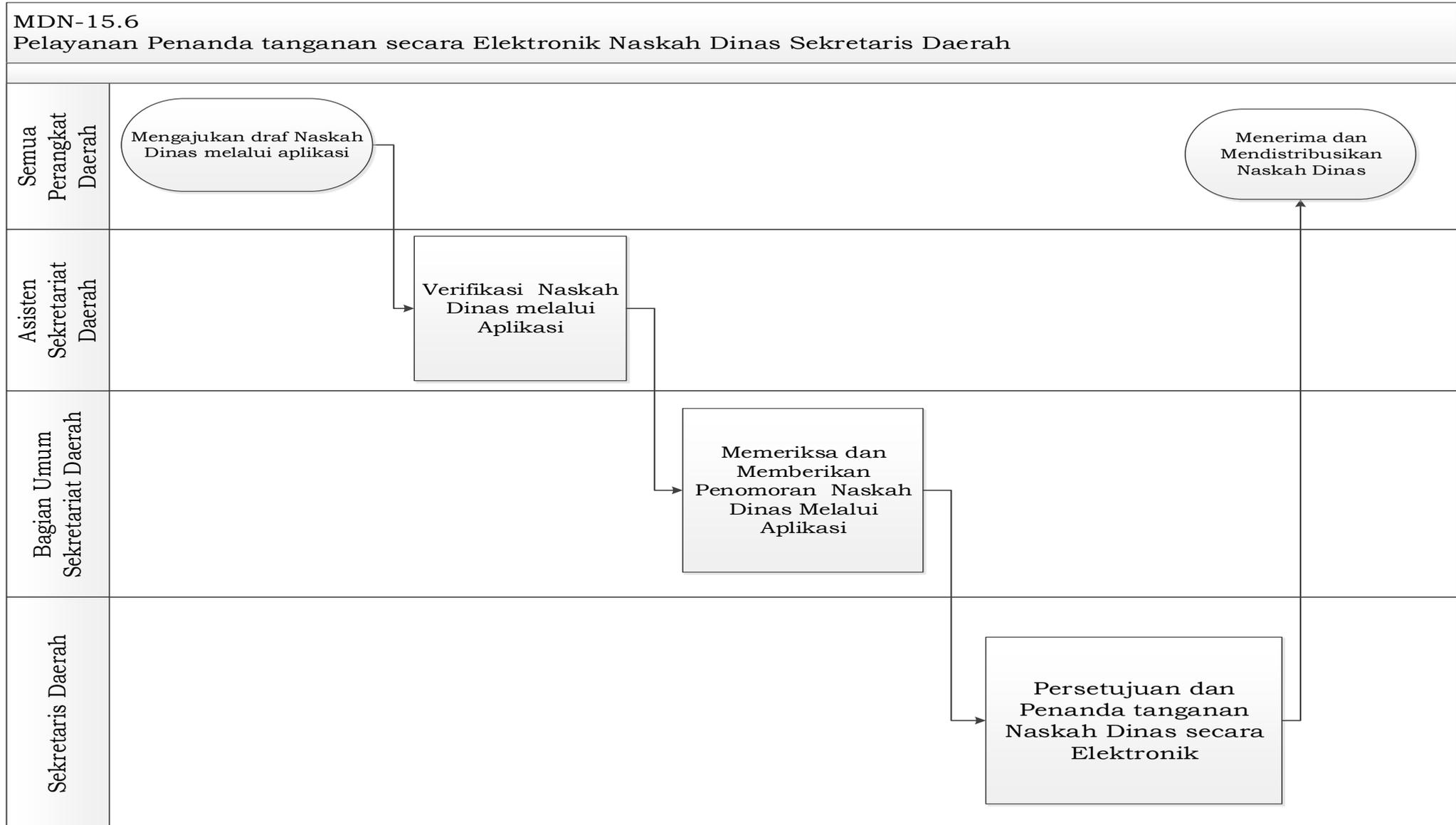


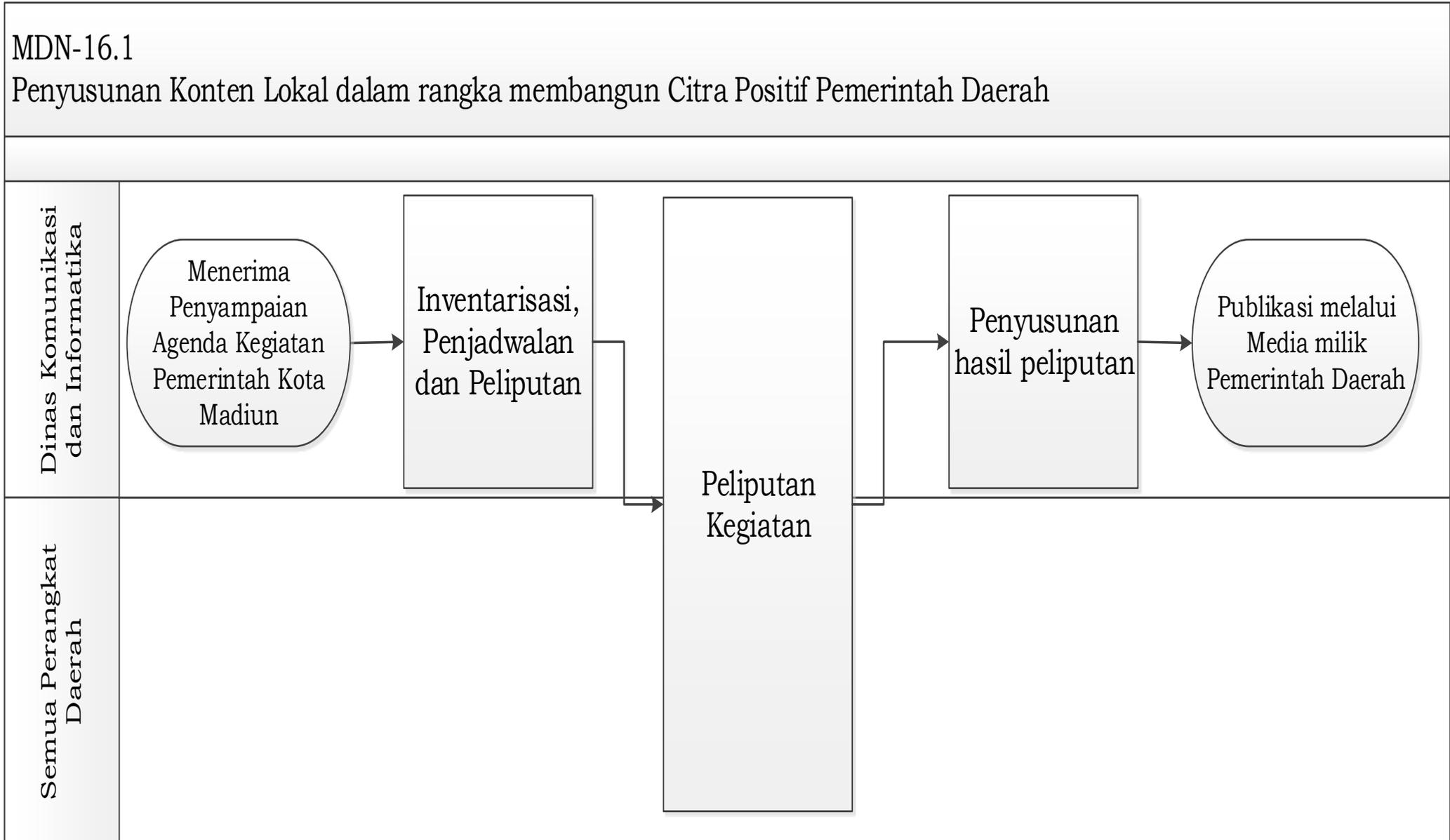


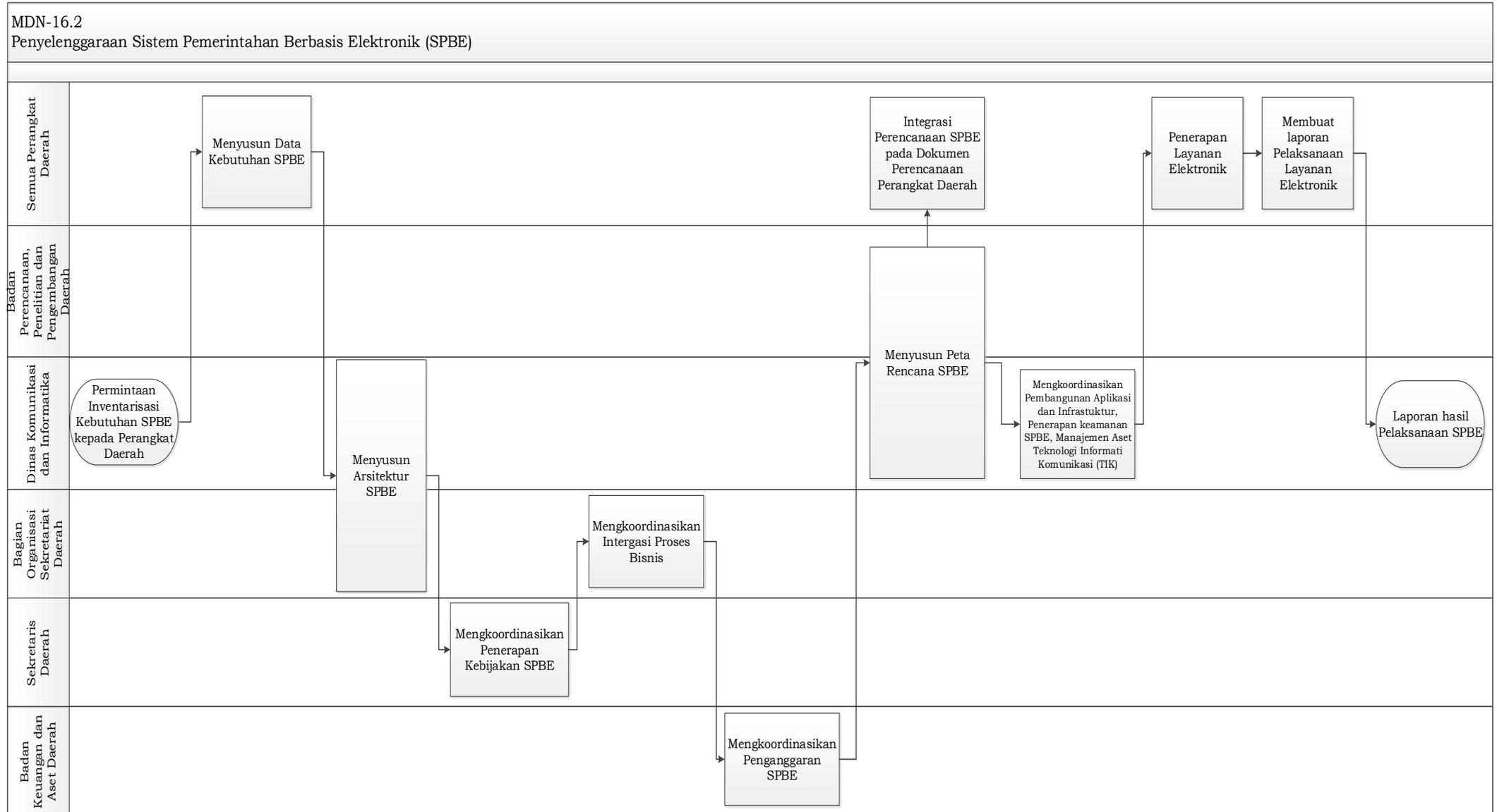






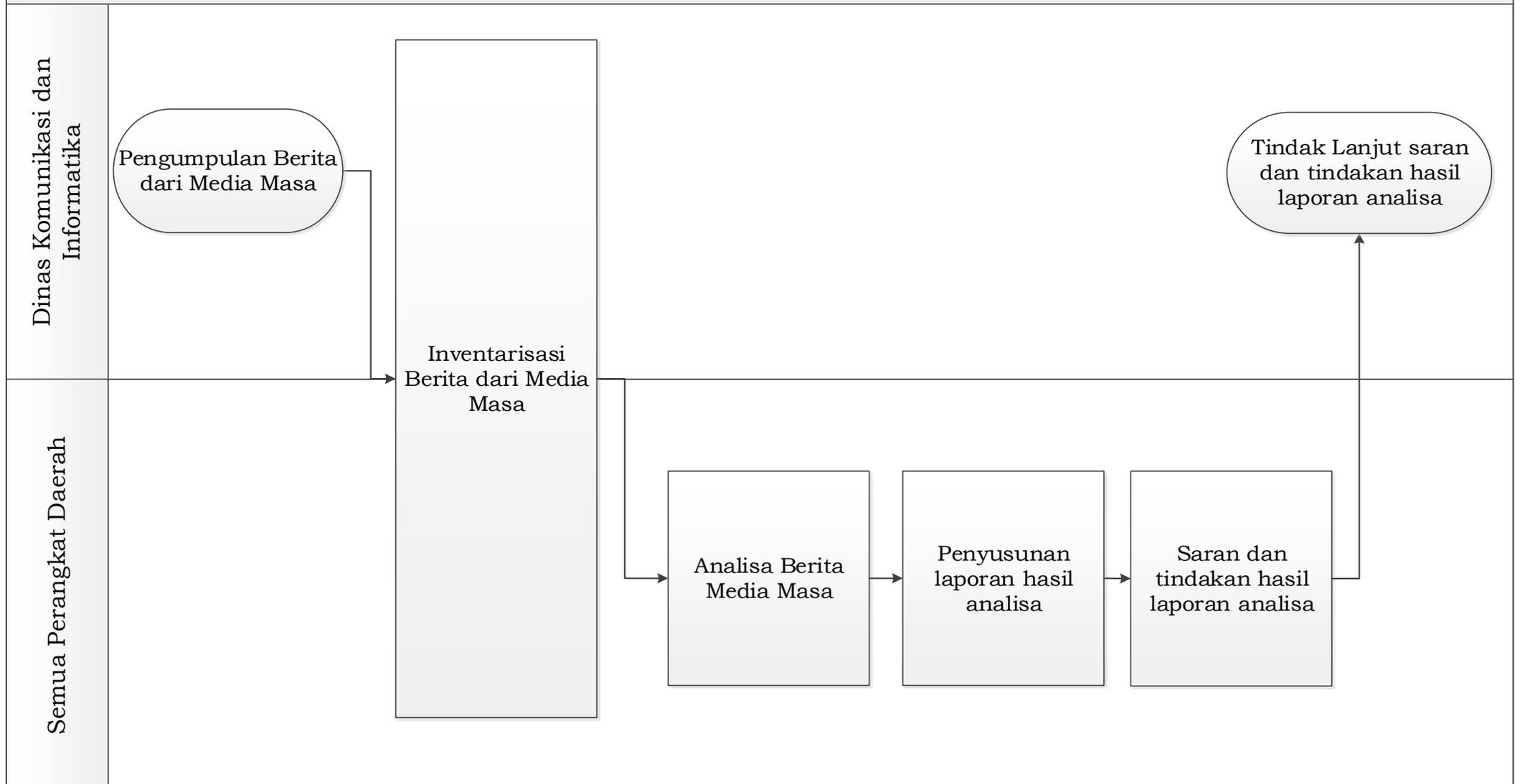


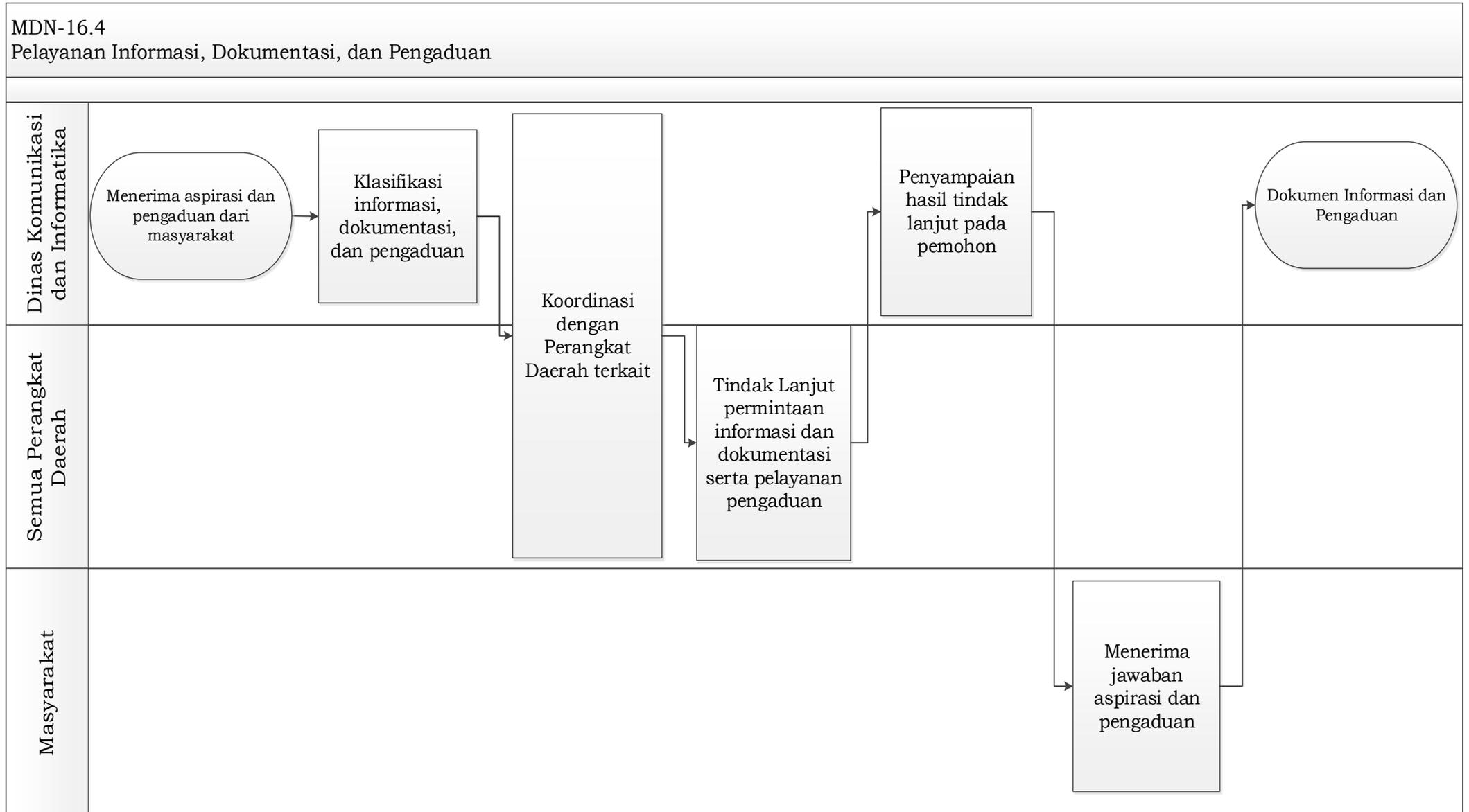


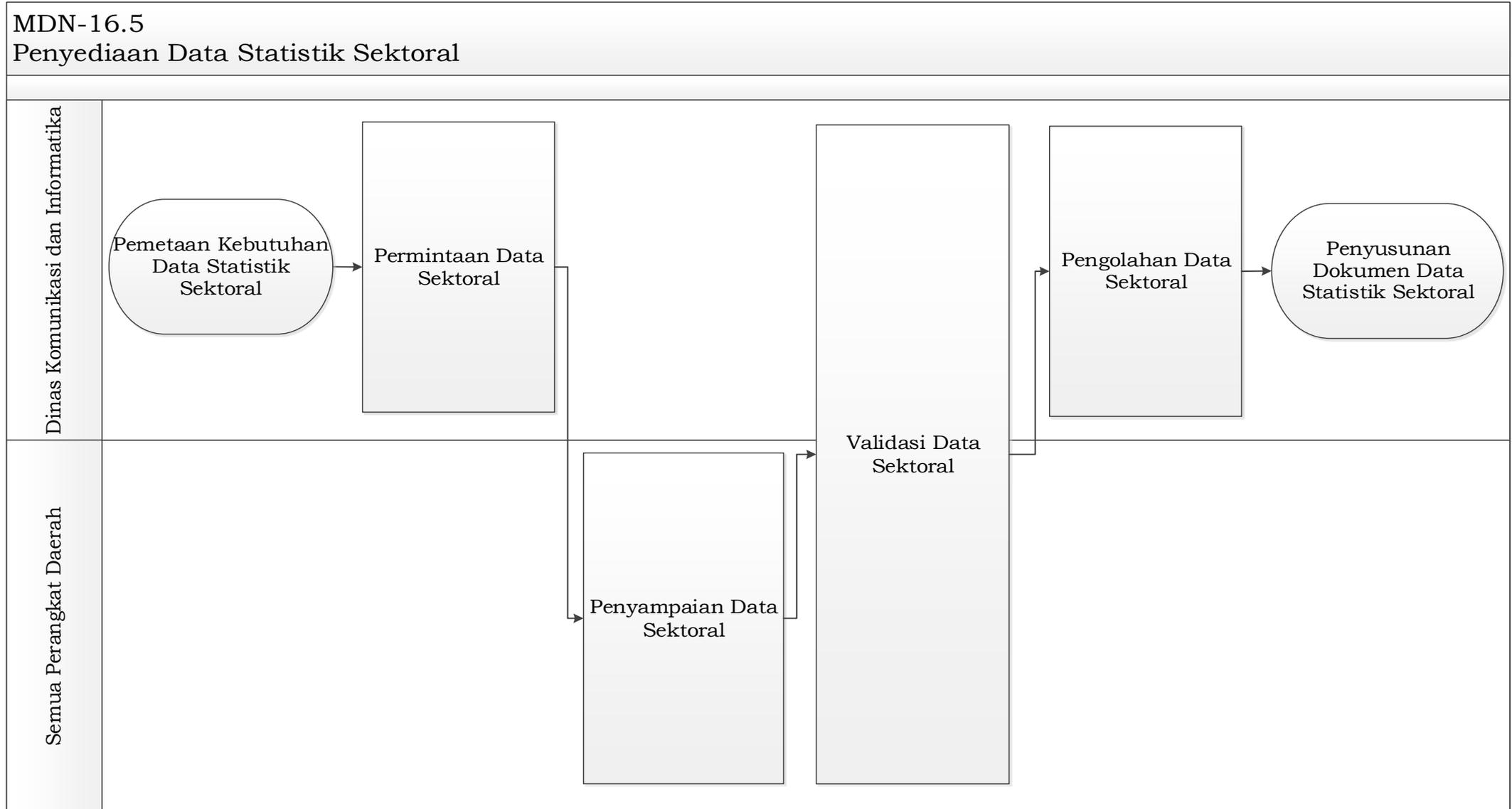


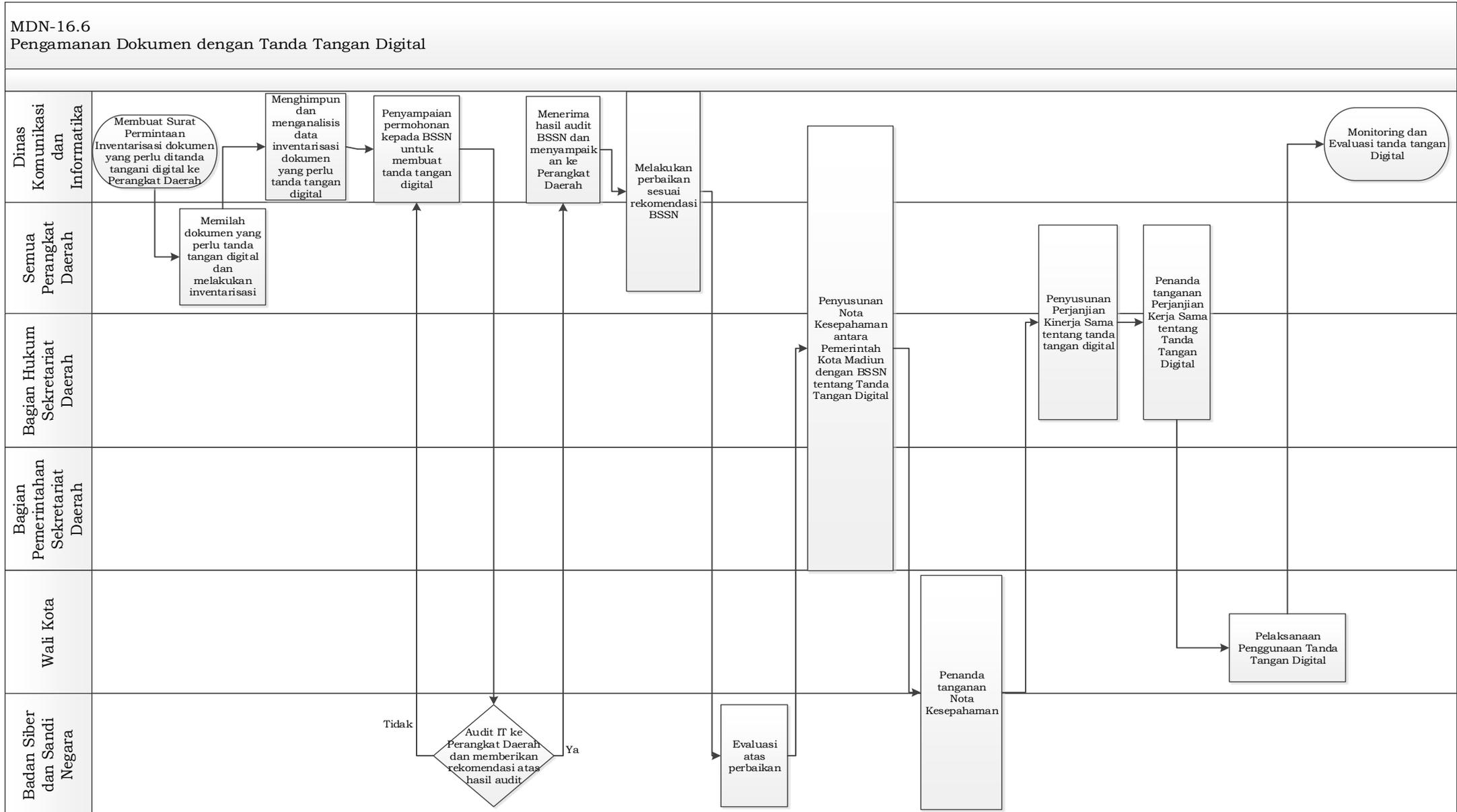
MDN-16.3

Pengelolaan Opini, Aspirasi dan Komunikasi Publik



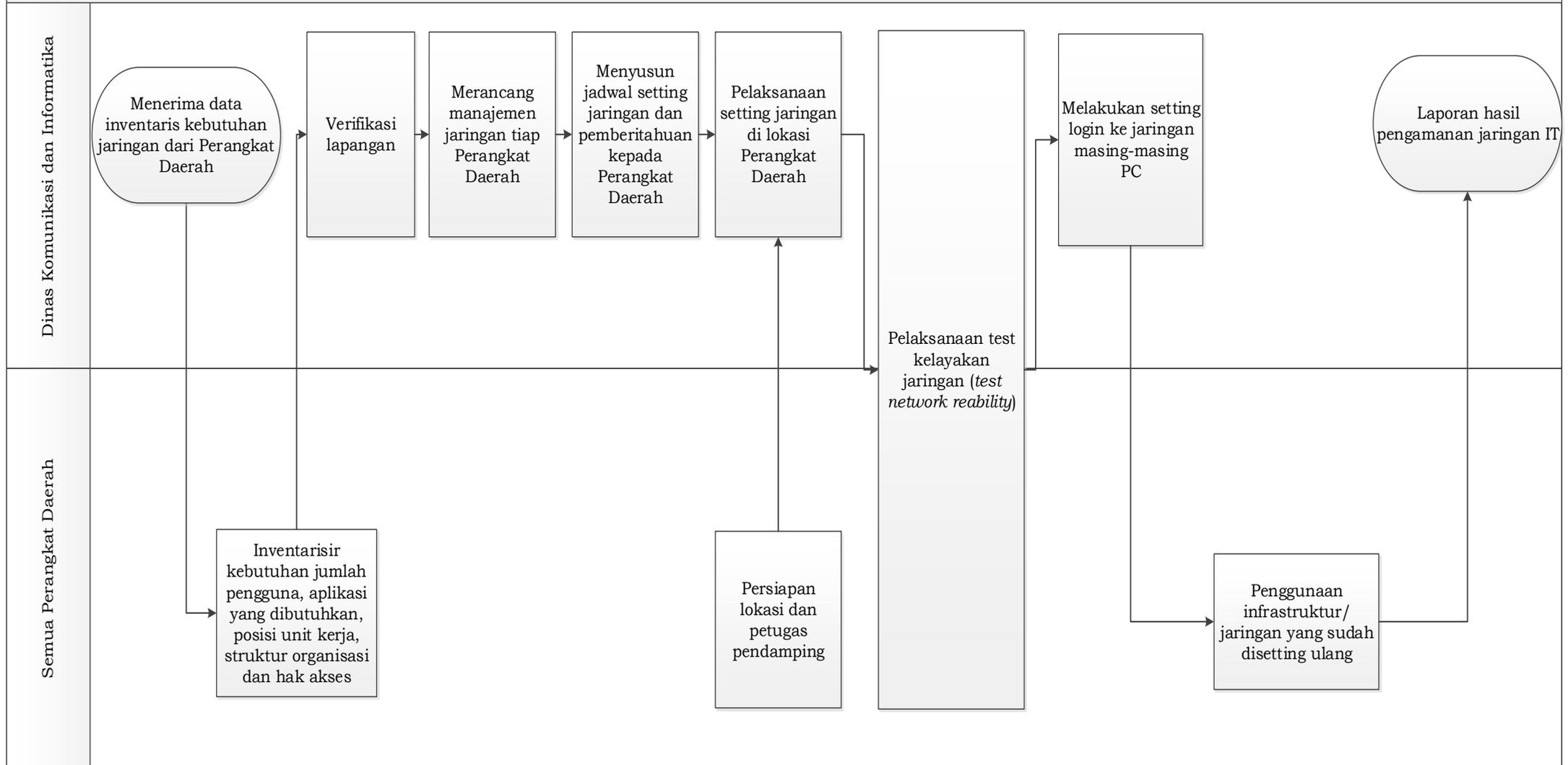






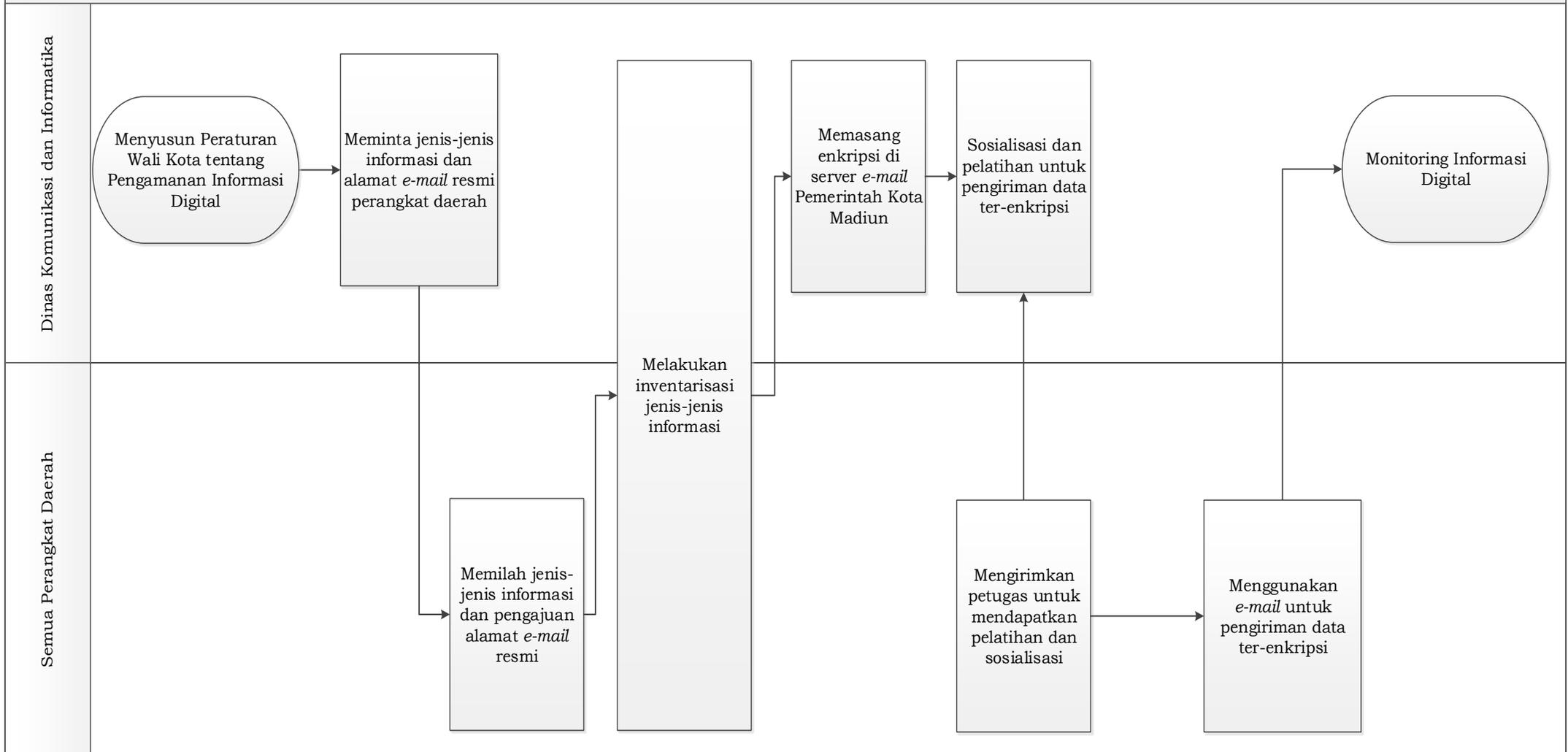
MDN-16.7

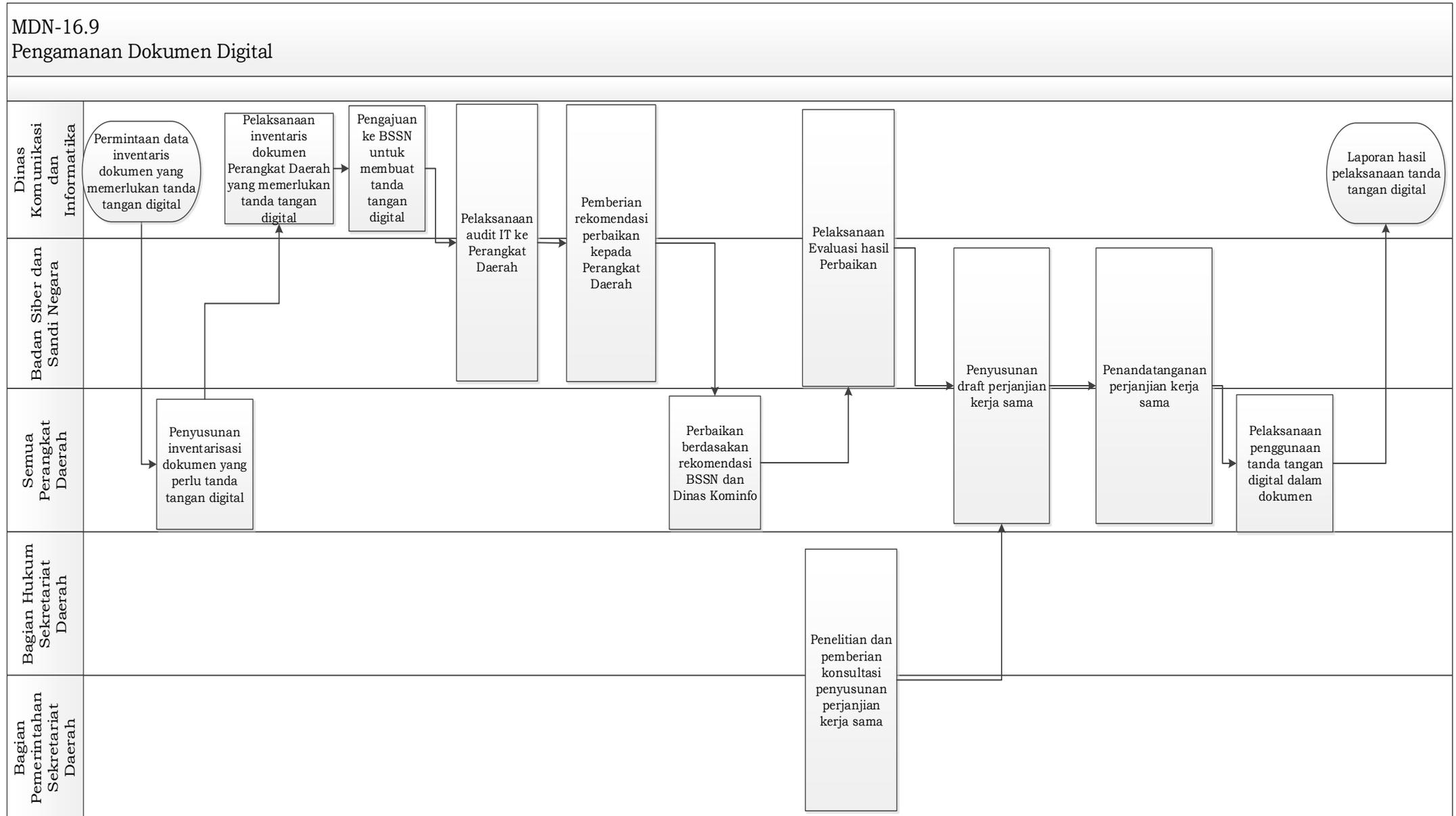
Pengamanan Jaringan Informasi Teknologi

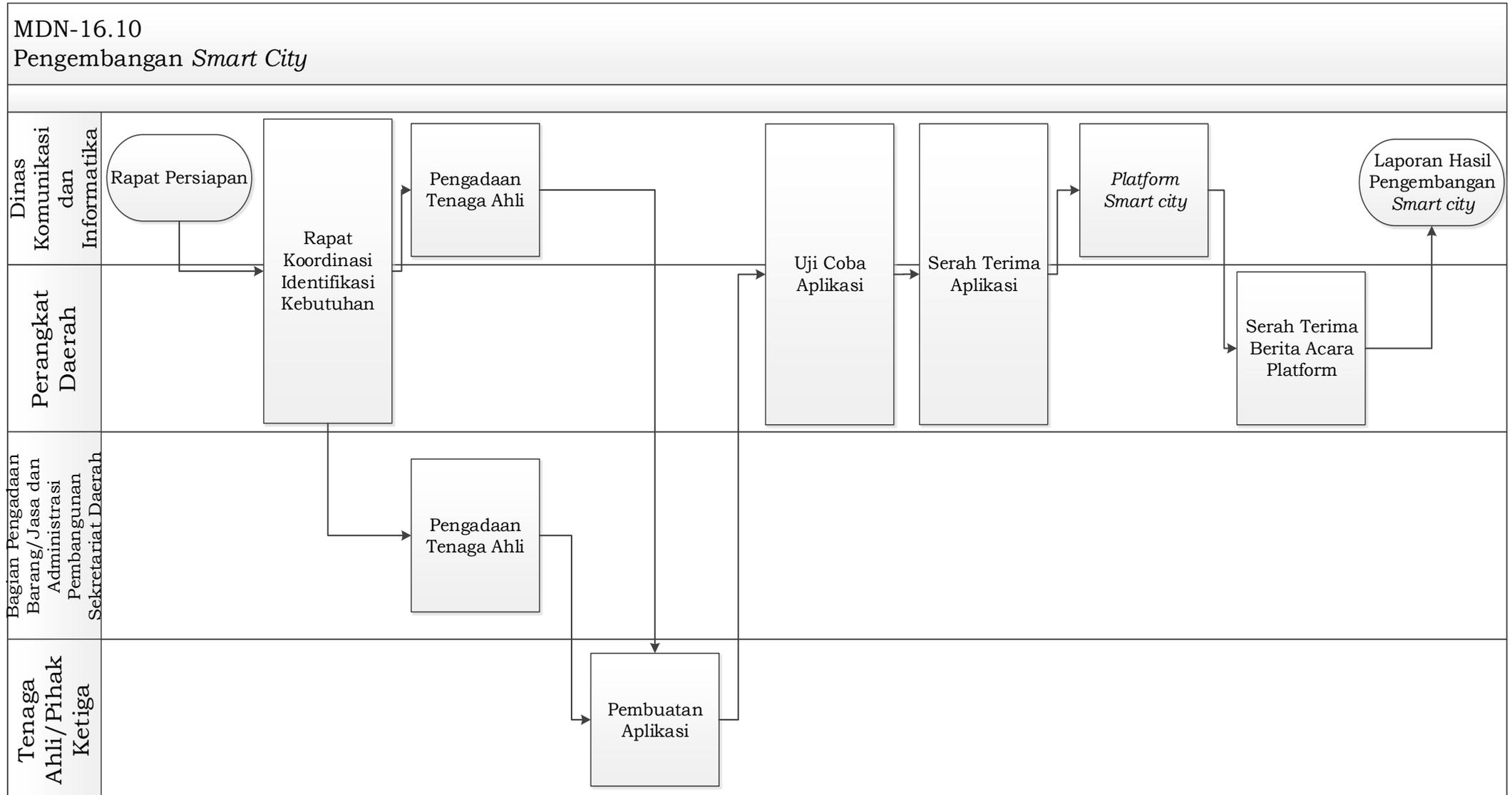


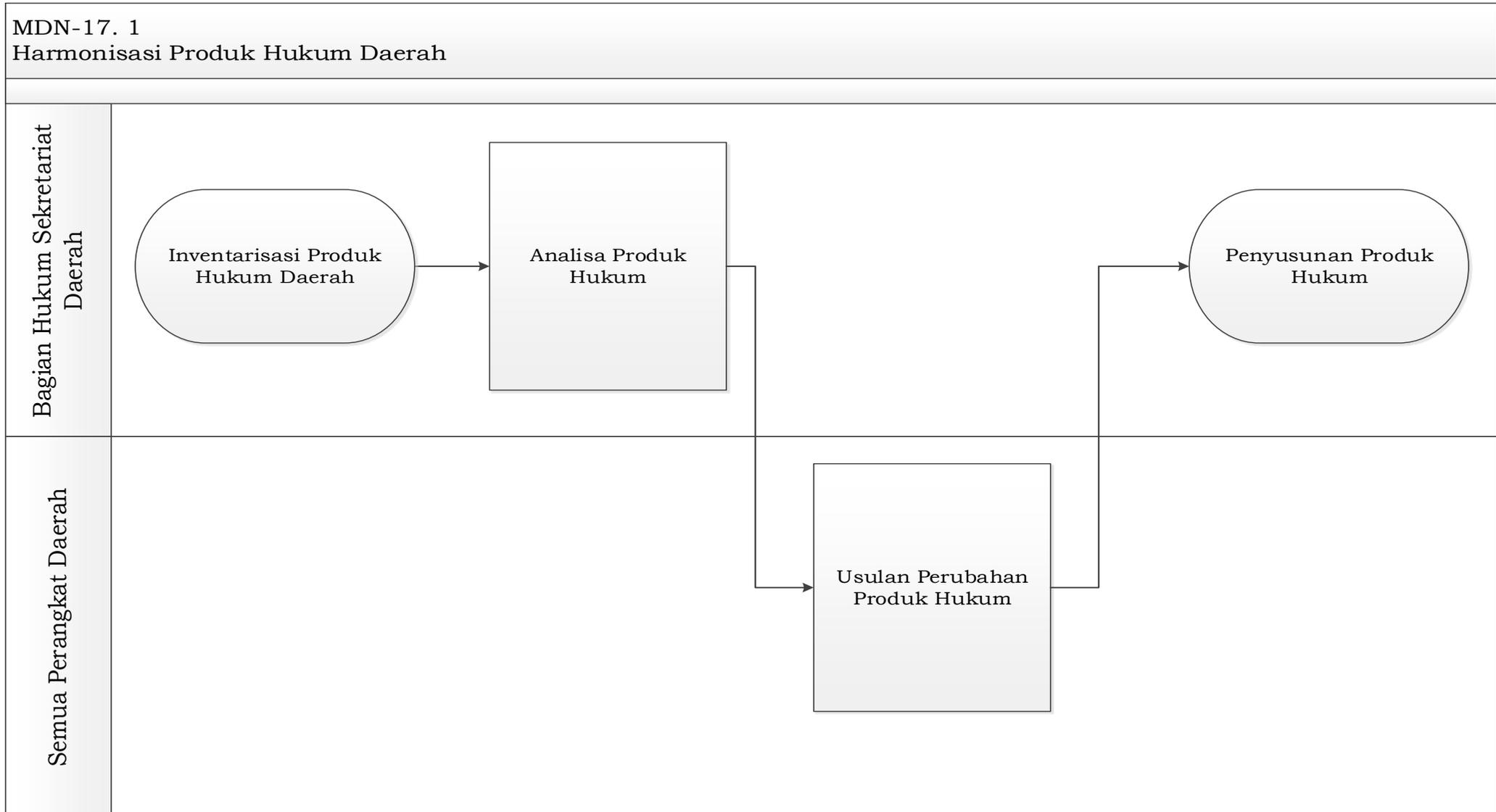
MDN-16.8

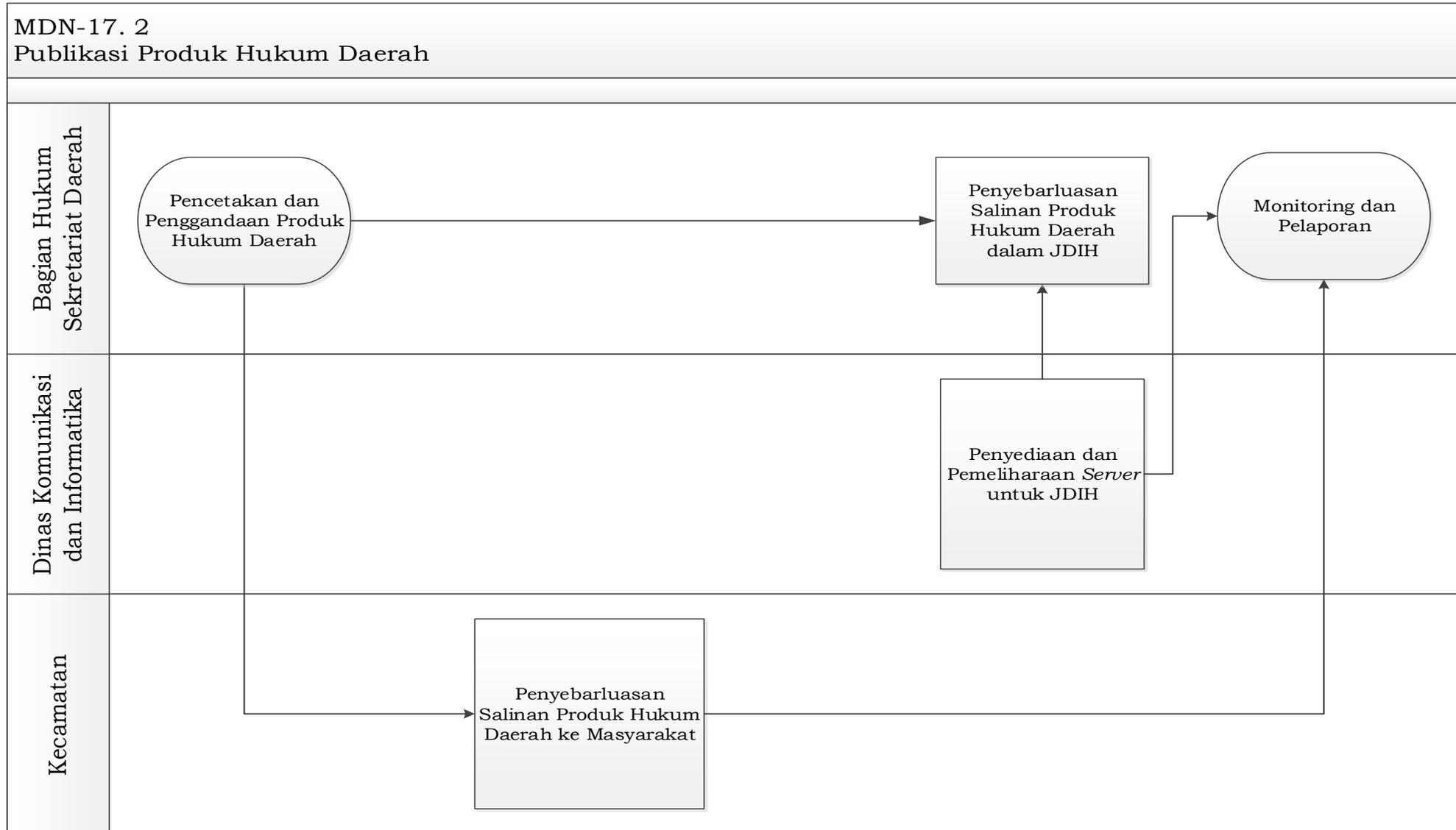
Pengamanan Pengiriman Informasi Digital



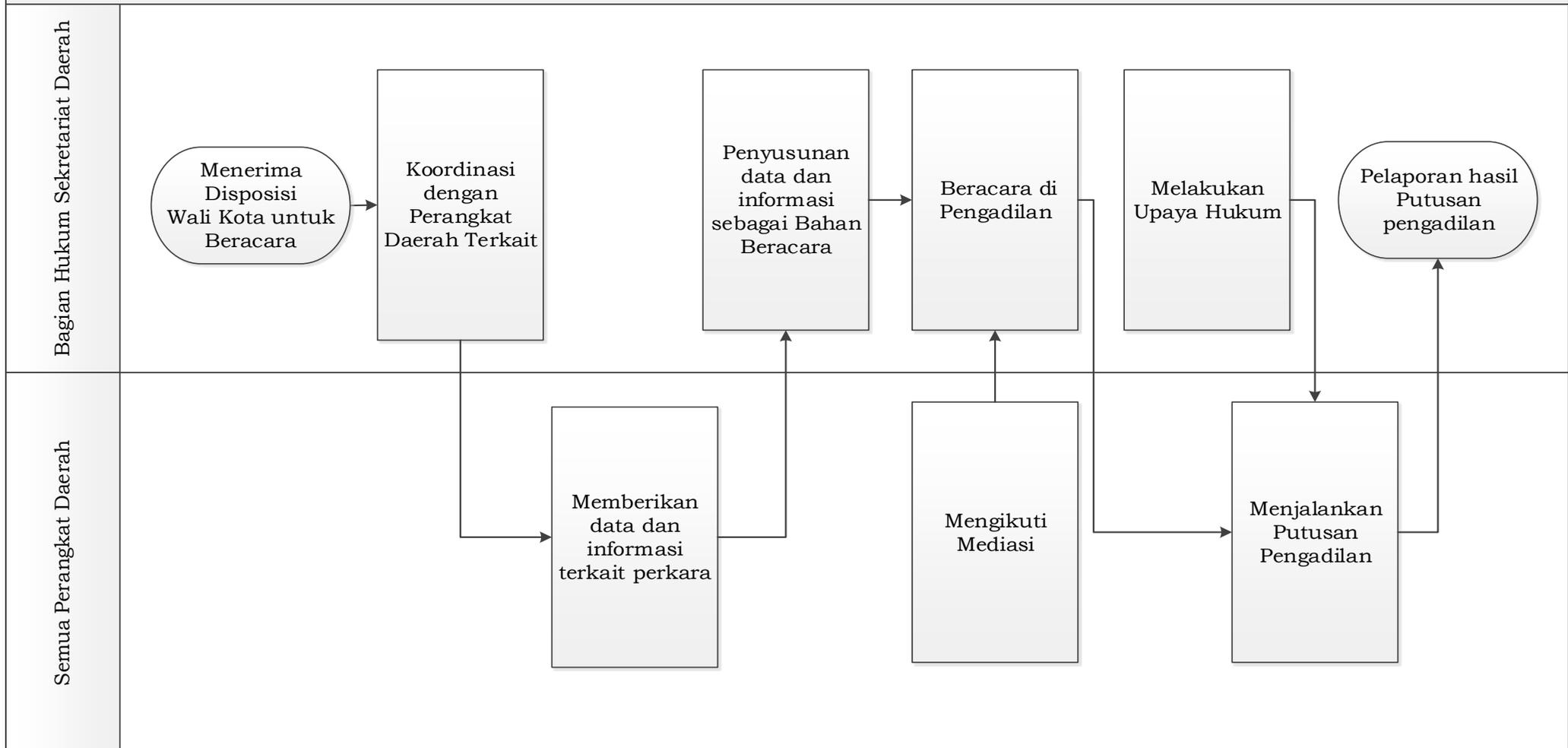






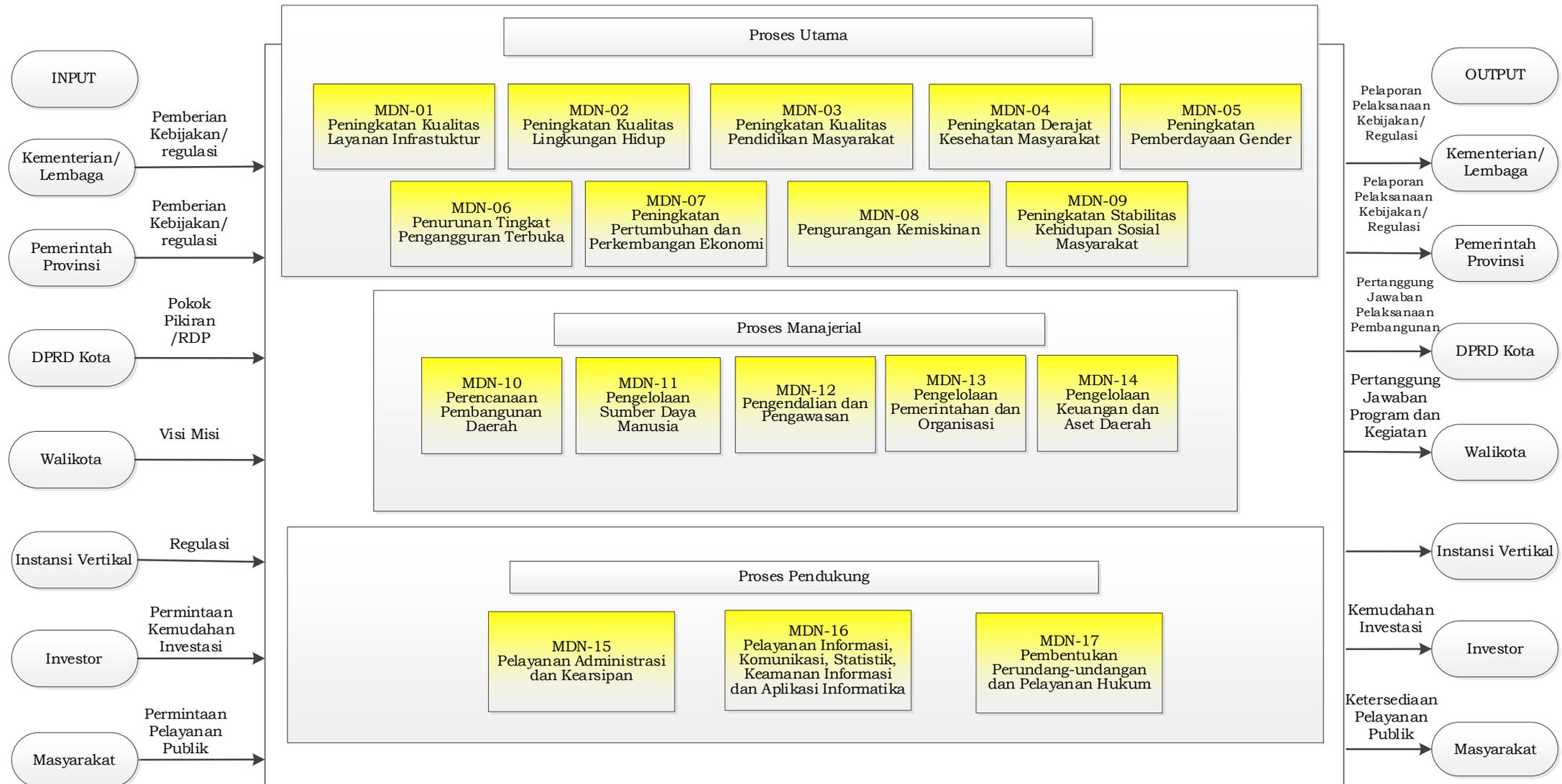


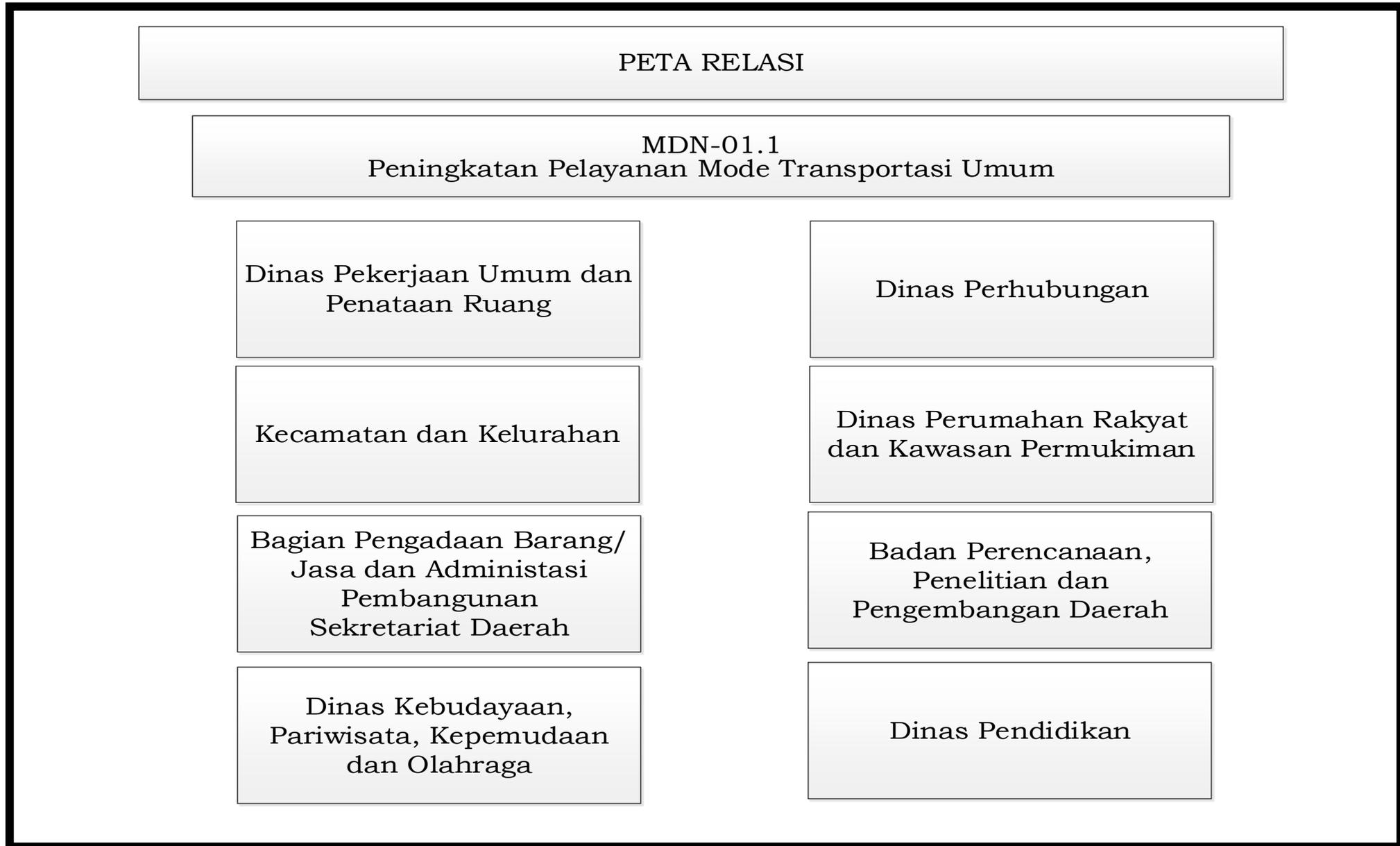
MDN-17. 3
Pemberian Bantuan Hukum



C. BAGAN PETA PROSES BISNIS

BAGAN PETA PROSES BISNIS LEVEL 0 PEMERINTAH KOTA MADIUN







PETA RELASI

MDN-01.3
Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Saluran/Drainase
dan Gedung

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Bagian Pengadaan Barang/
Jasa dan Administasi
Pembangunan Sekretariat
Daerah

Inspektorat

PETA RELASI

MDN-01.4
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman

Bagian Pengadaan Barang/
Jasa dan Administasi
Pembangunan Sekretariat
Daerah

PETA RELASI

MDN-02.1 Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penaataan Ruang

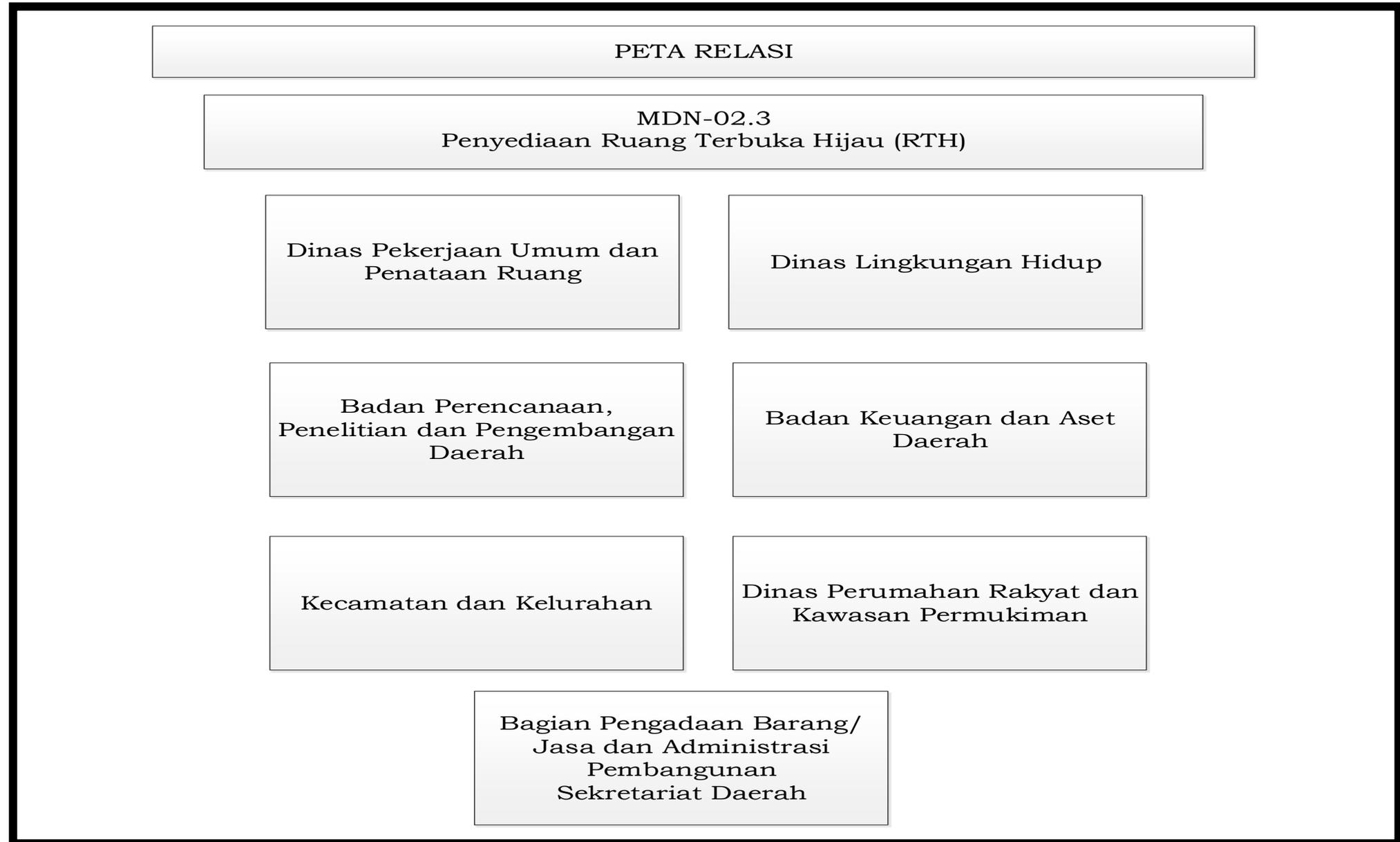
Perangkat Daerah Terkait (Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kecamatan

PETA RELASI

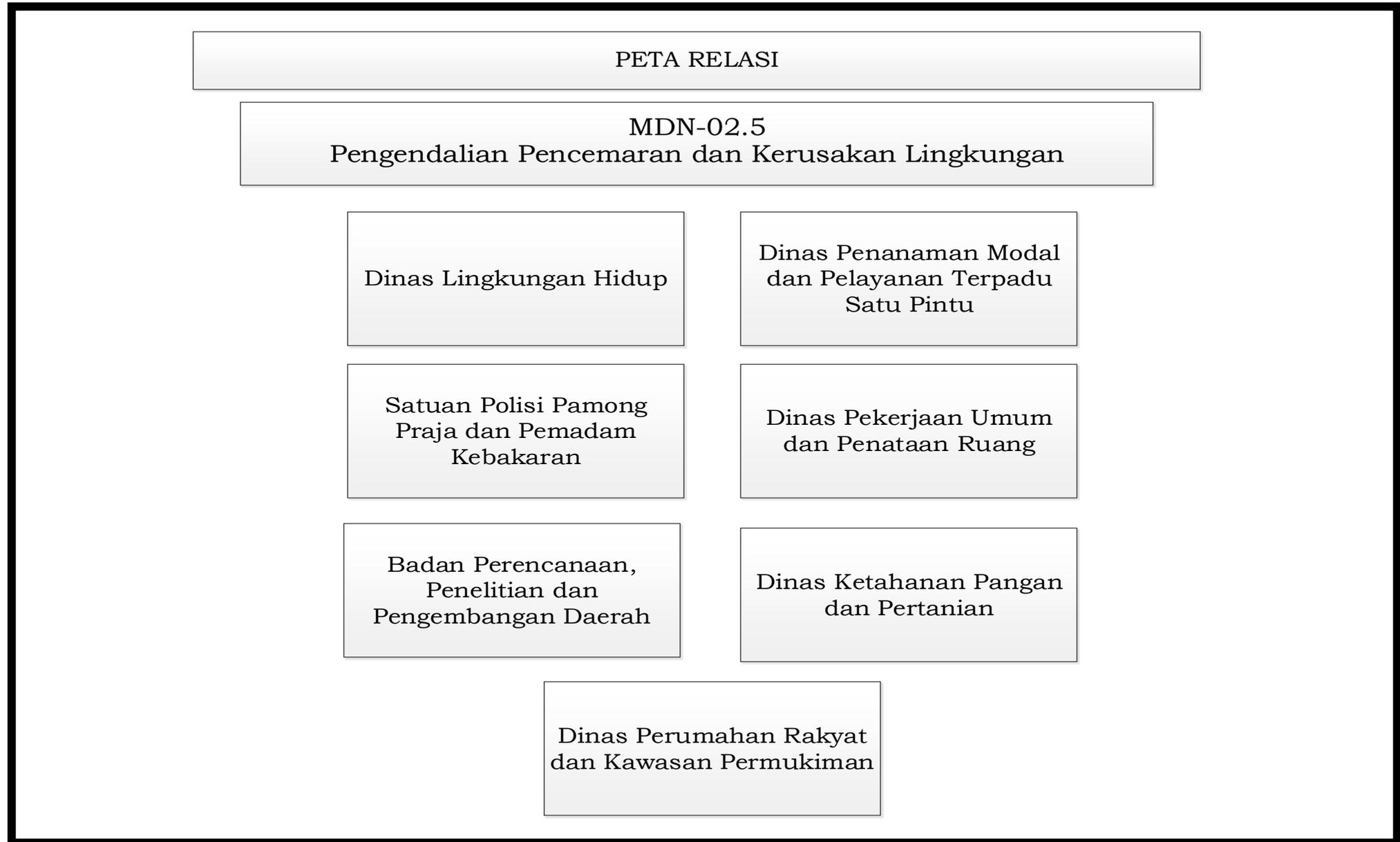
MDN-02.2
Pembinaan dan Pengawasan serta Sinergi Pemanfaatan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran









PETA RELASI

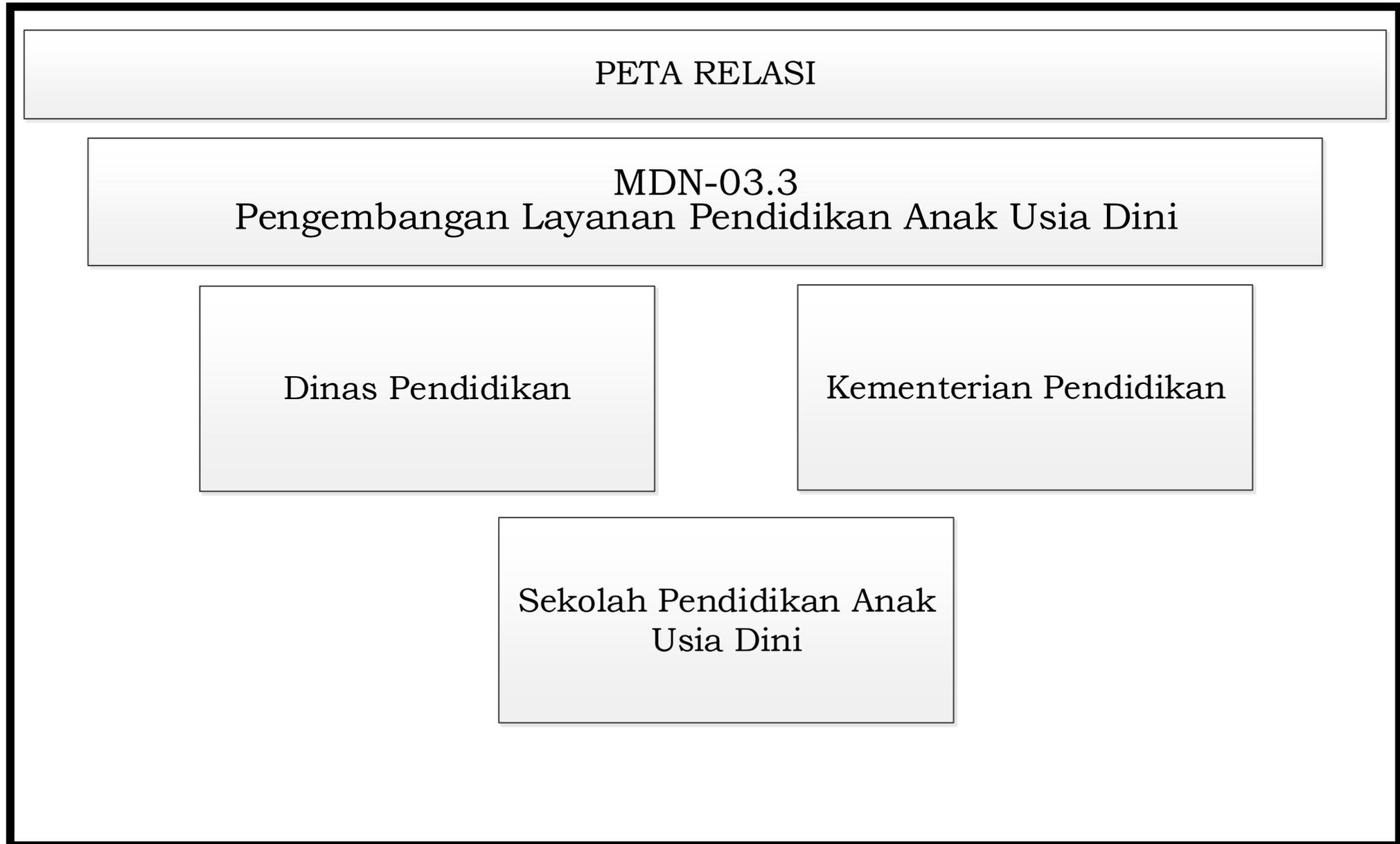
MDN-03.2 Peningkatan Kualitas Manajemen Sekolah

Dinas Pendidikan

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Bagian Hukum Sekretariat
Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah







PETA RELASI

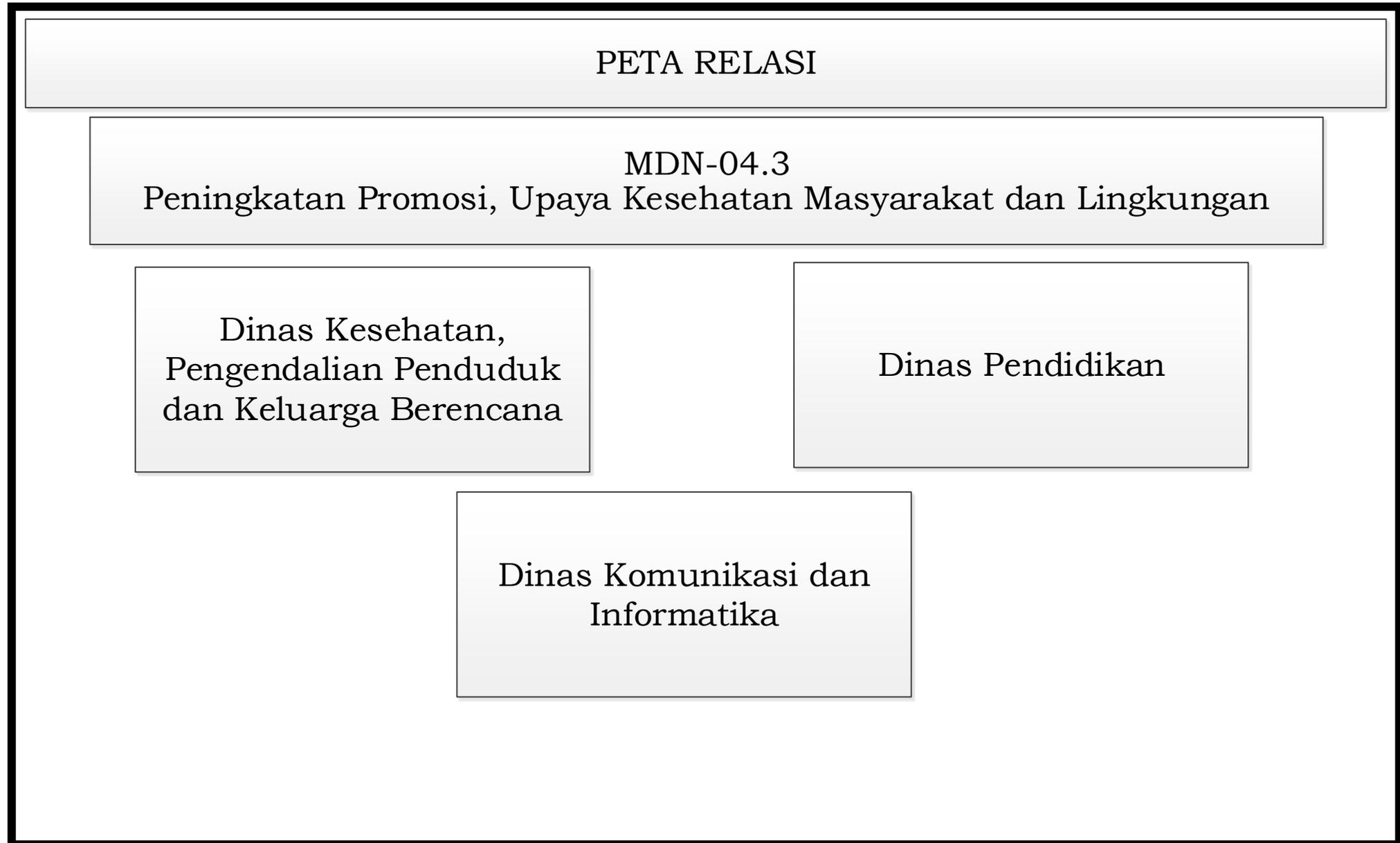
MDN-04.2 Peningkatan Sumber Daya dan Informasi Kesehatan

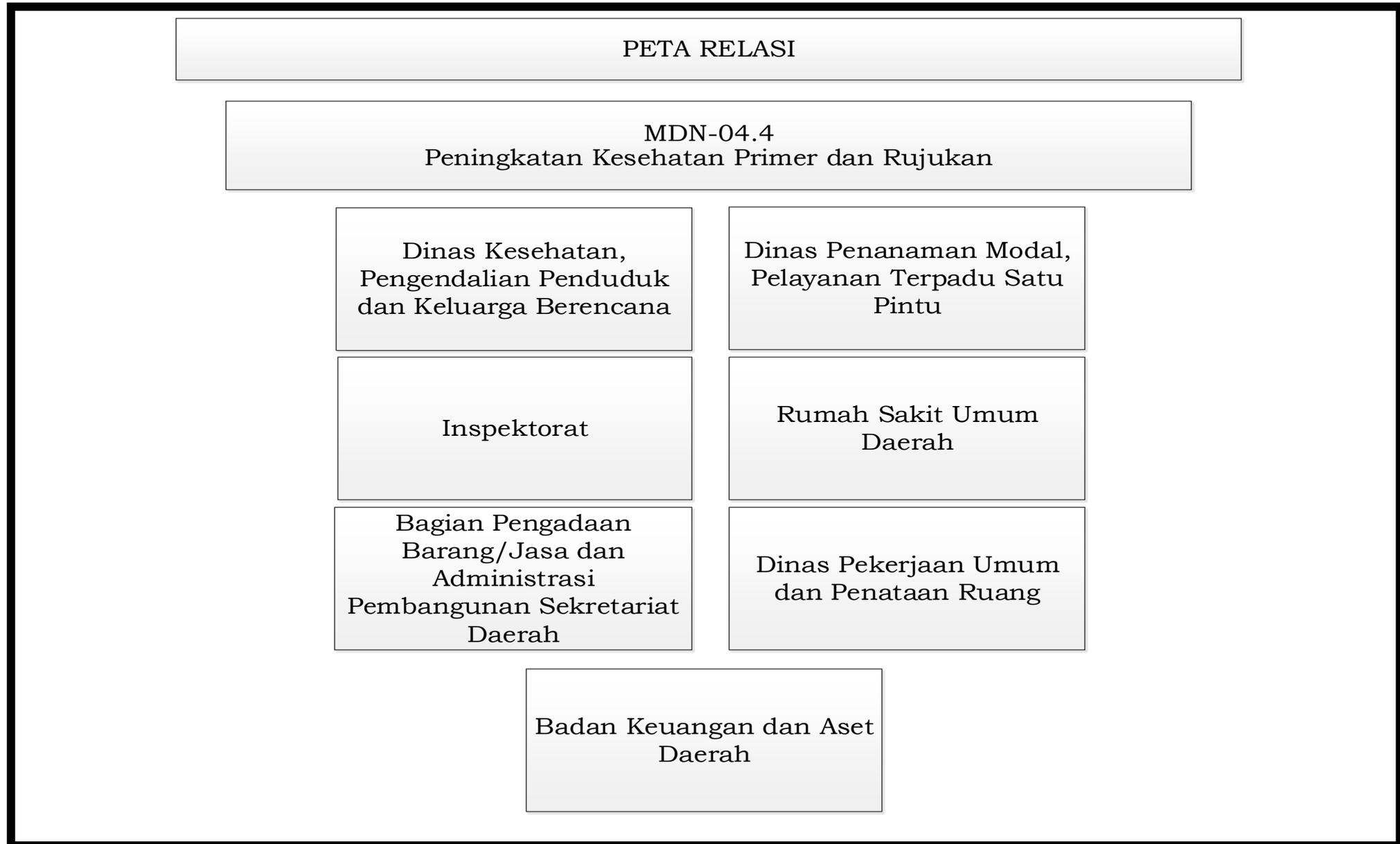
Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Kecamatan

Rumah Sakit Umum dan
UPTD Puskesmas





PETA RELASI

MDN-04.5

Peningkatan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana dan Penguatan Sistem Informasi Keluarga serta Penguatan Pemaduan dan Sinkronasi Kebijakan Pengendalian Penduduk

Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

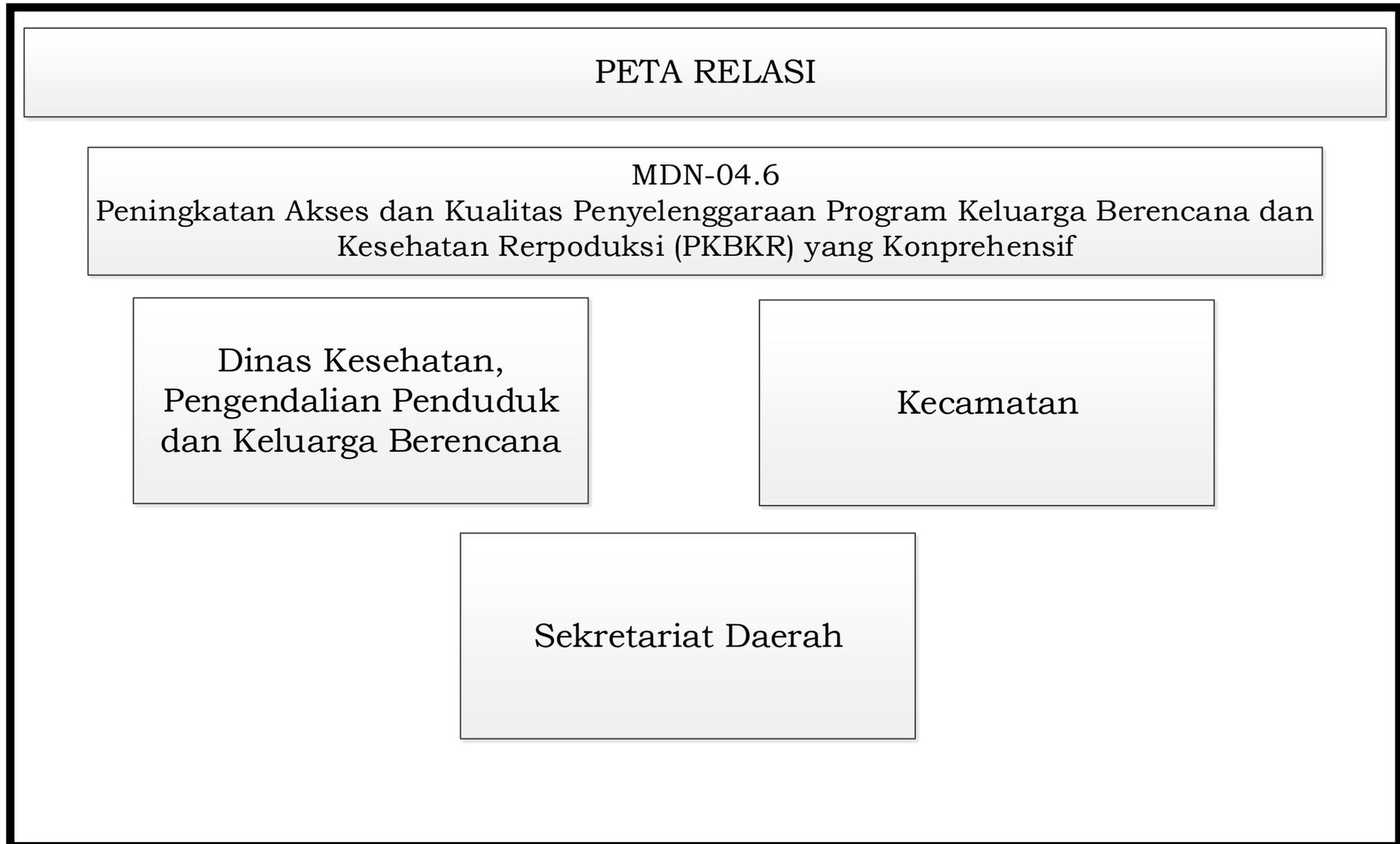
Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan

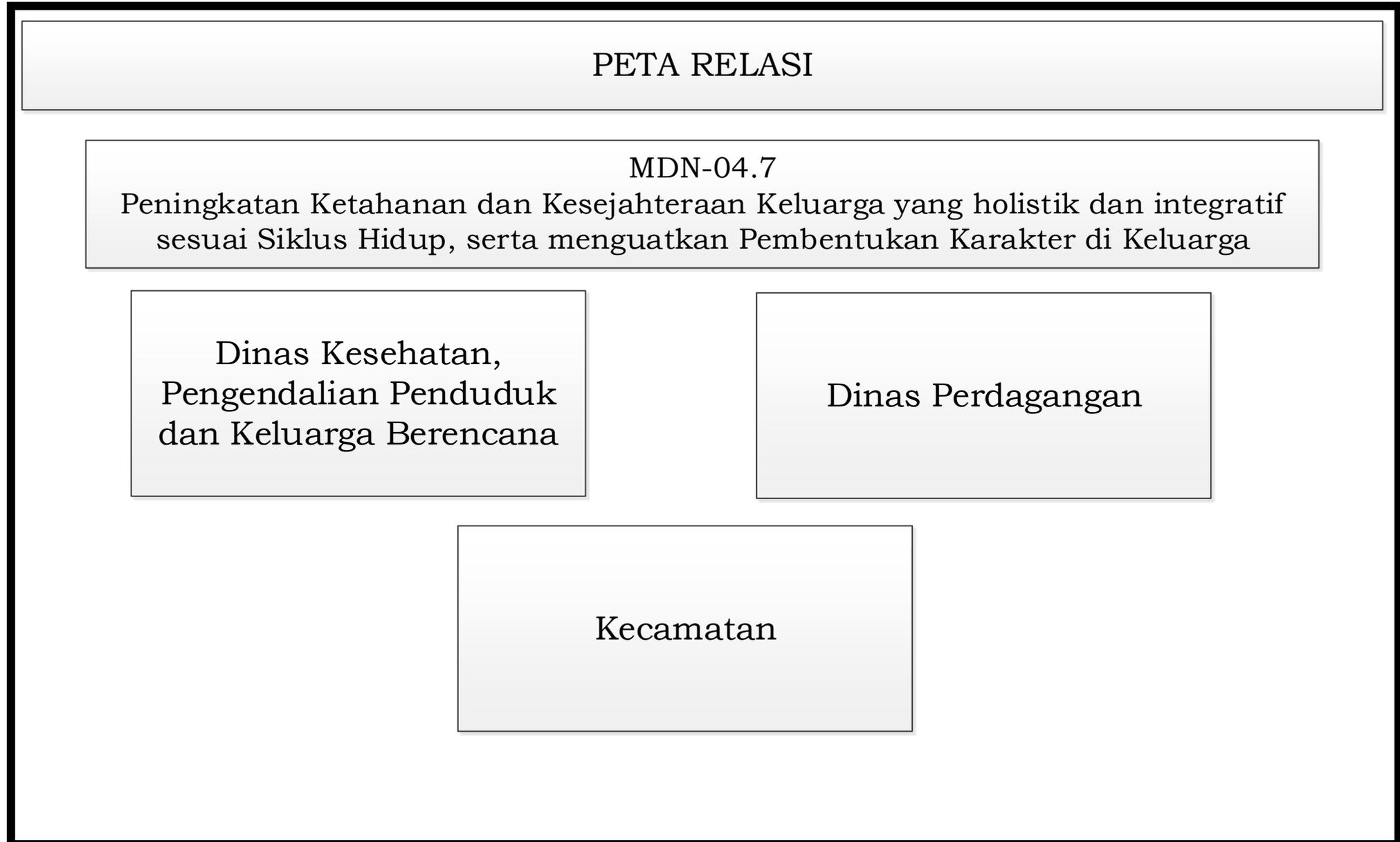
Dinas Perdagangan

Kecamatan

Dinas Pendidikan

Dinas Lingkungan Hidup





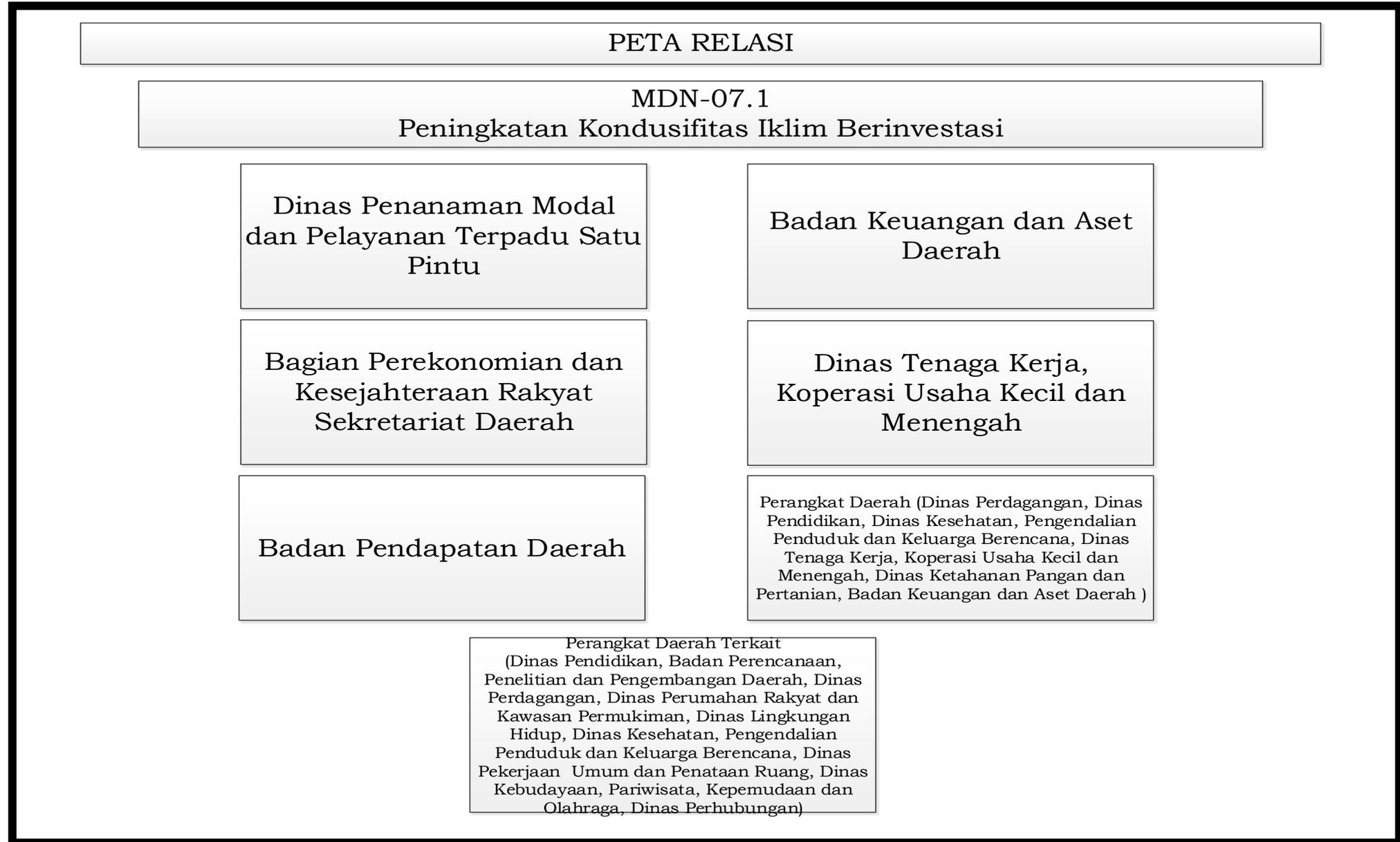


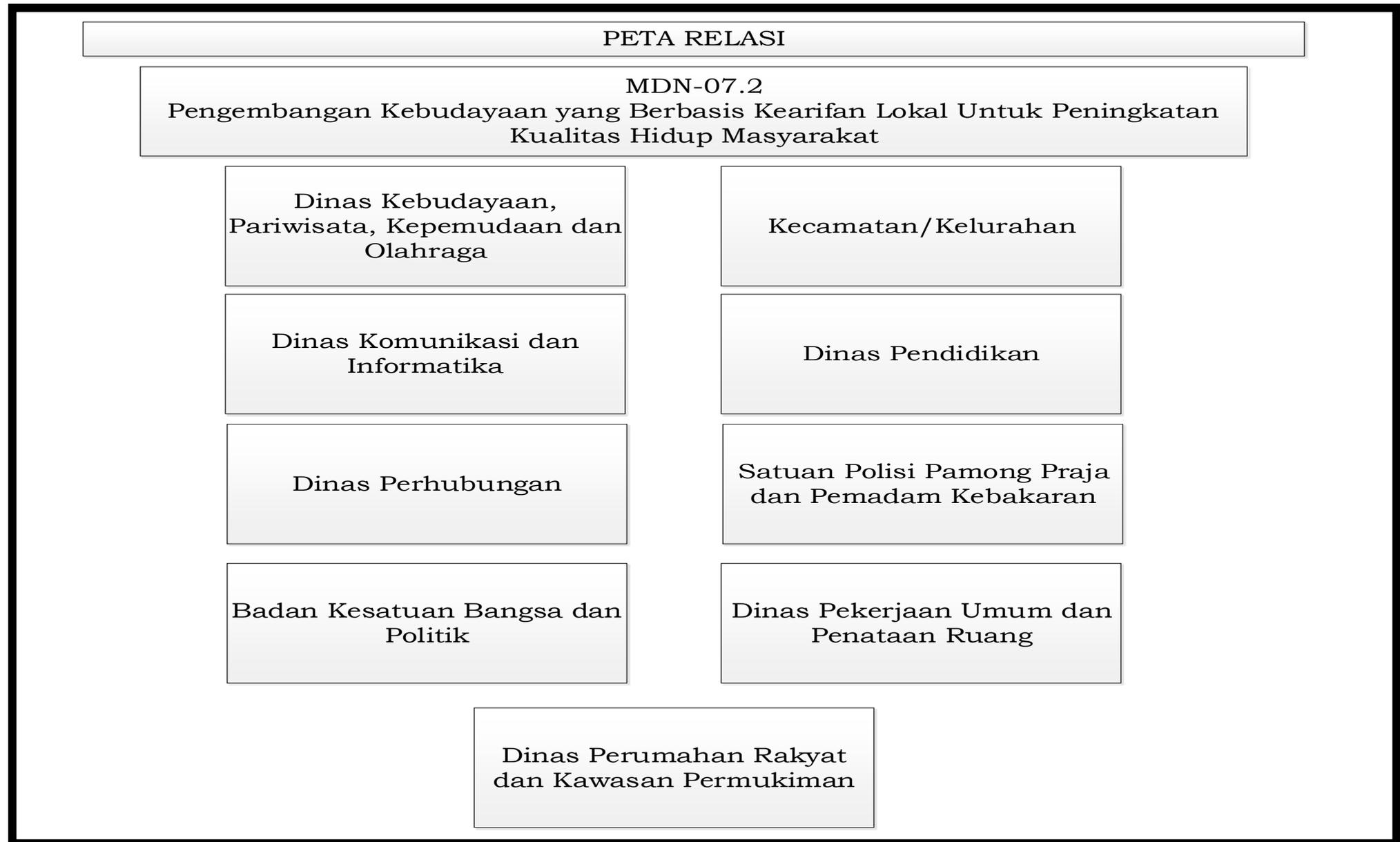
PETA RELASI

MDN-06.1
Peningkatan Jaringan Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah

Kecamatan/Kelurahan





PETA RELASI

MDN-07.3
Peningkatan Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Perekonomian

Dinas Perdagangan

Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Perhubungan

Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman

Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Dinas Tenaga Kerja,
Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

PETA RELASI

MDN-07.4

Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Usaha Mikro dan Koperasi

Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

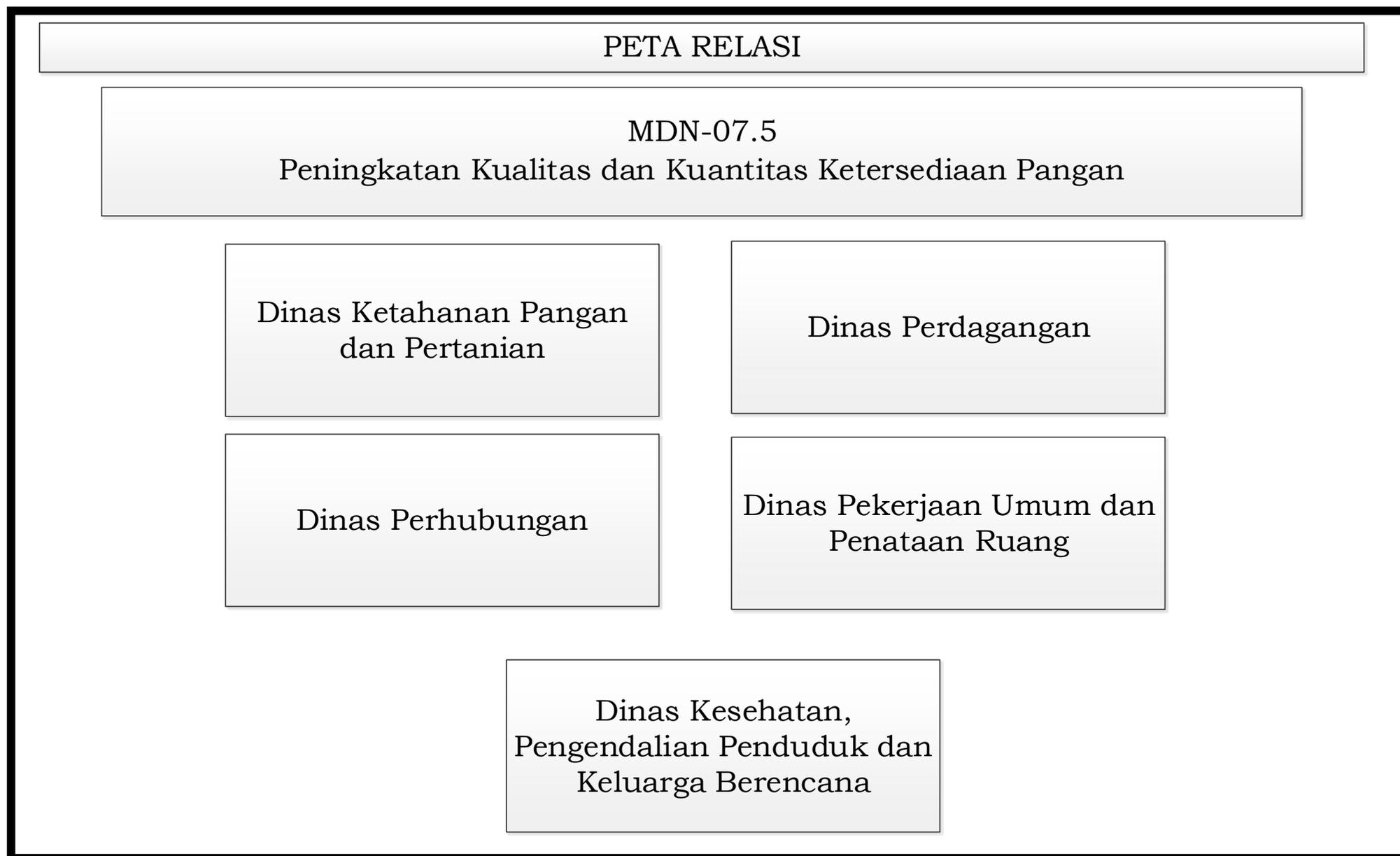
Bank Daerah

Dinas Tenaga Kerja,
Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah

Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian

Dinas Perdagangan



PETA RELASI

MDN-08.1

Penyaluran Subsidi Air Bersih bagi Masyarakat kurang Mampu

Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Taman Sari

PETA RELASI

MDN-08.2

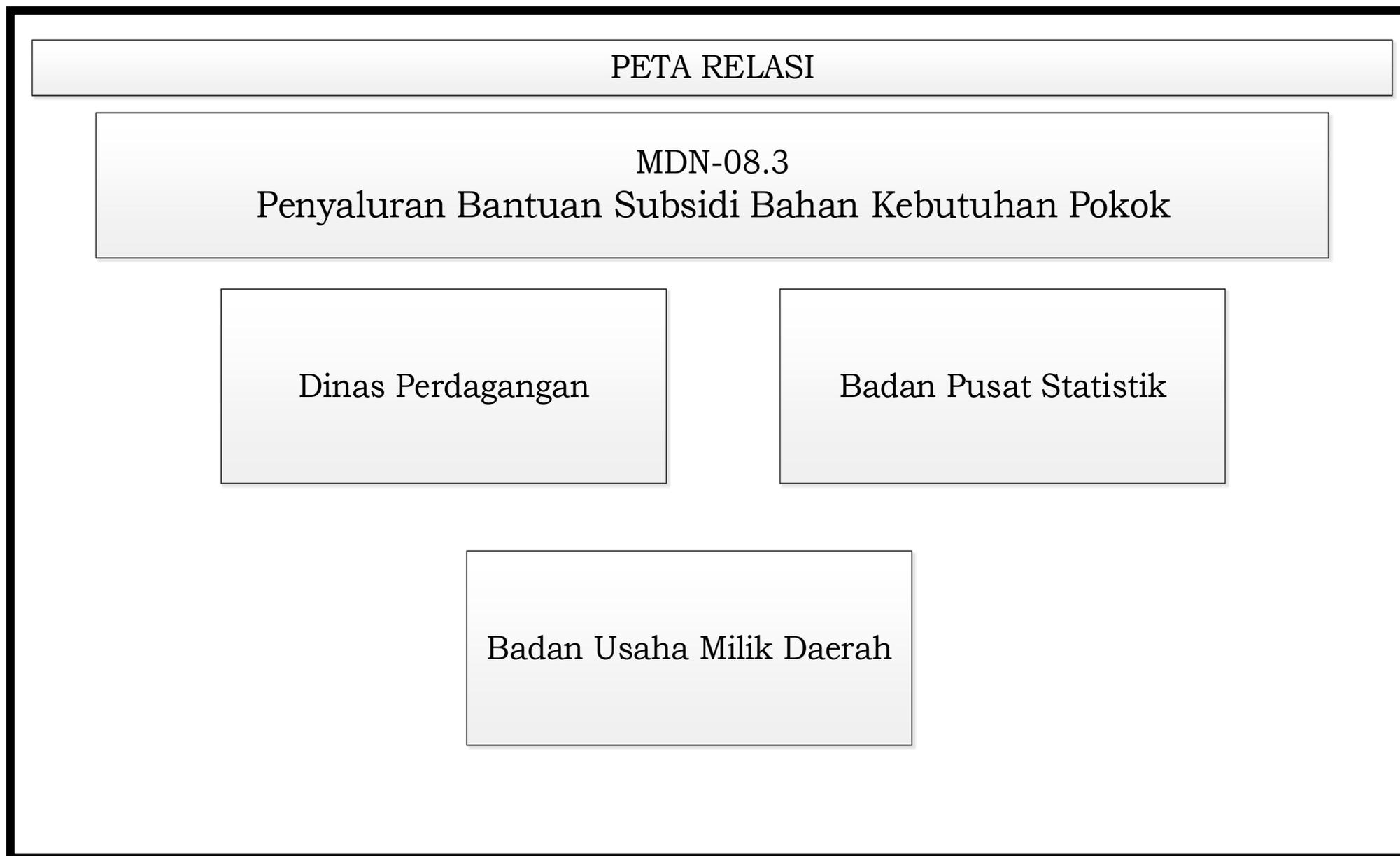
Bantuan Pemakaman bagi Masyarakat Tak Berdaya

Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

Rumah Sakit Umum Daerah

Kelurahan

Instansi Vertikal (Kepolisian)



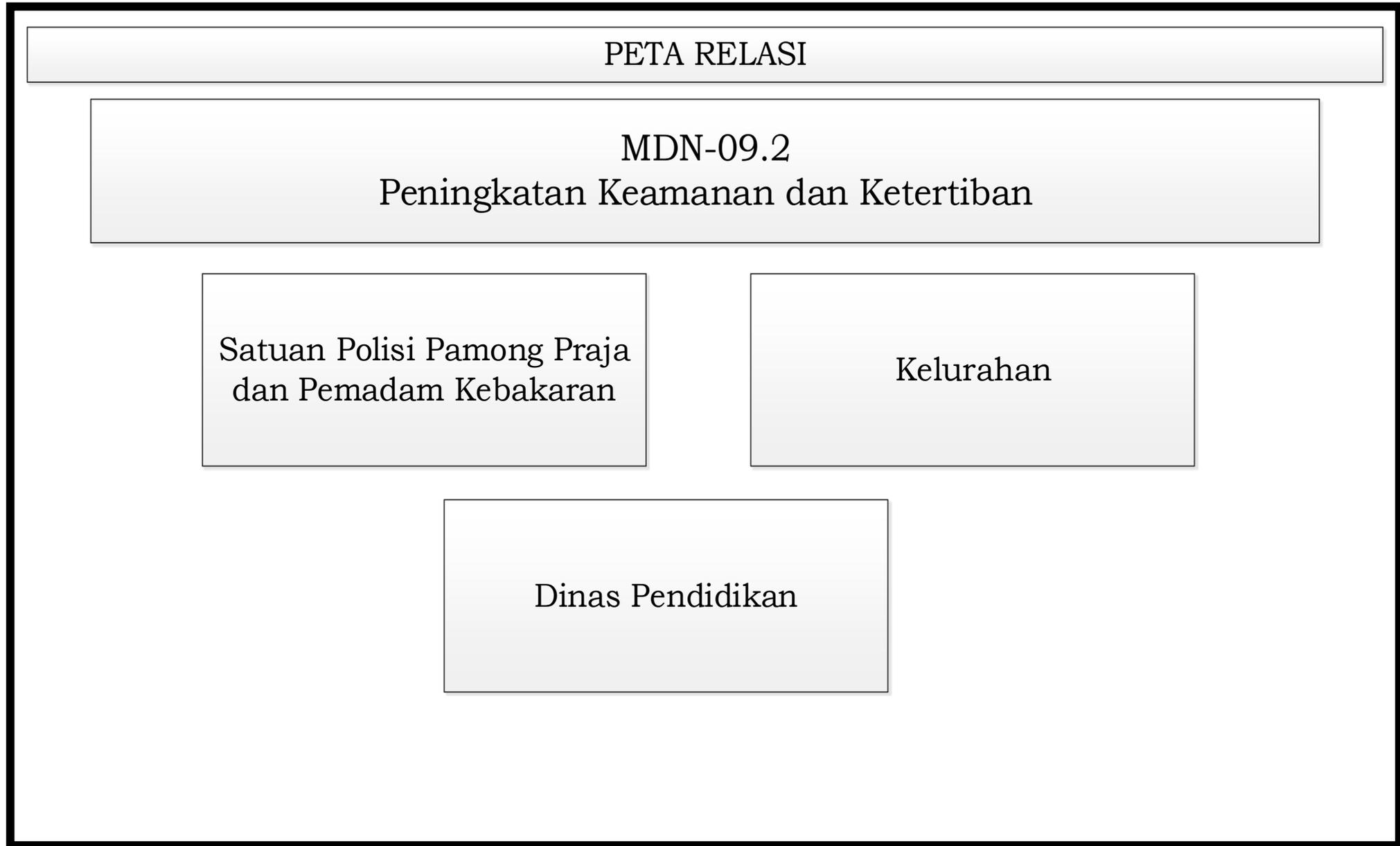
PETA RELASI

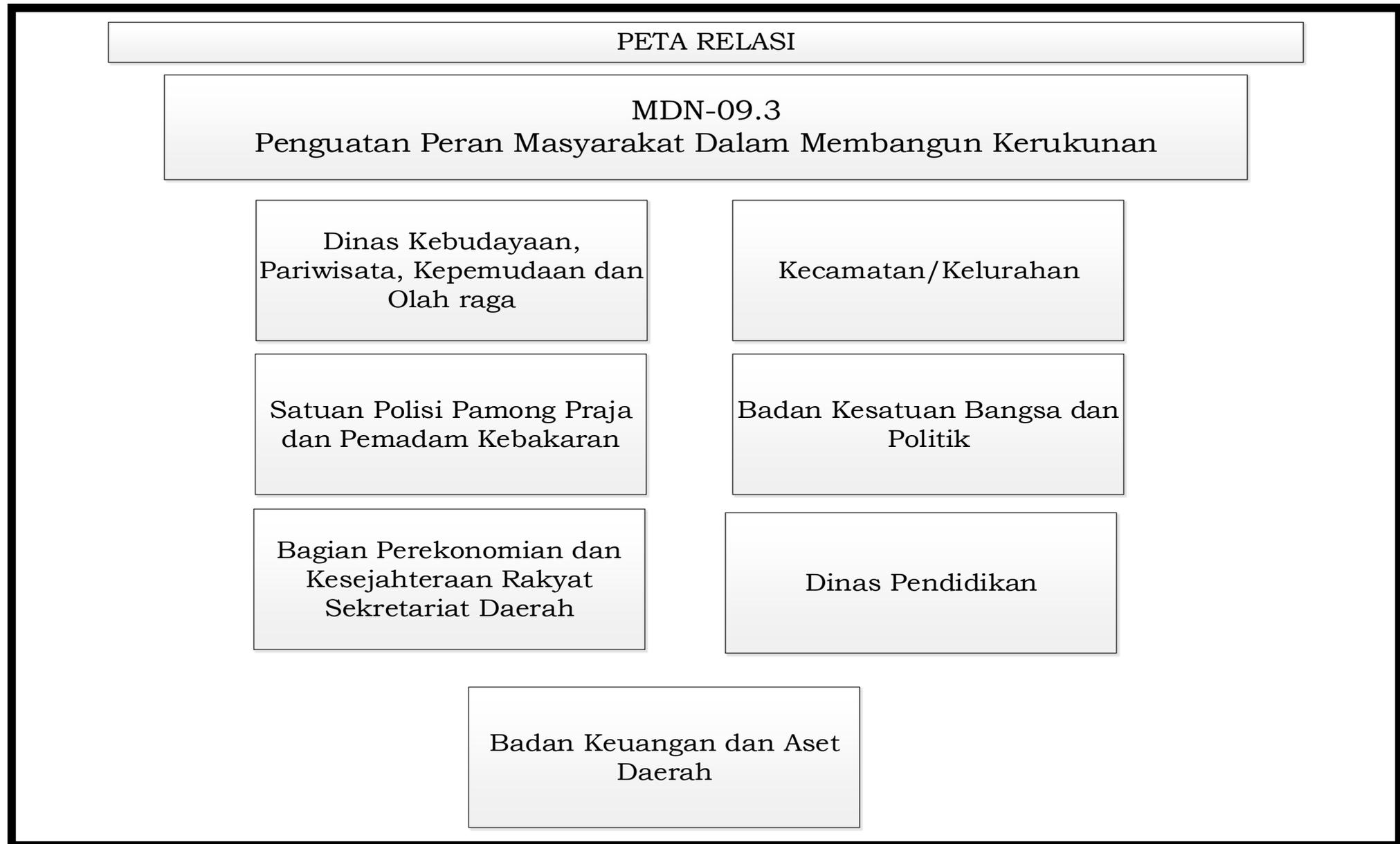
MDN-09.1

Peningkatan Masyarakat yang tertib dan patuh terhadap Peraturan
Perundang-undangan

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

Kecamatan/Kelurahan









PETA RELASI

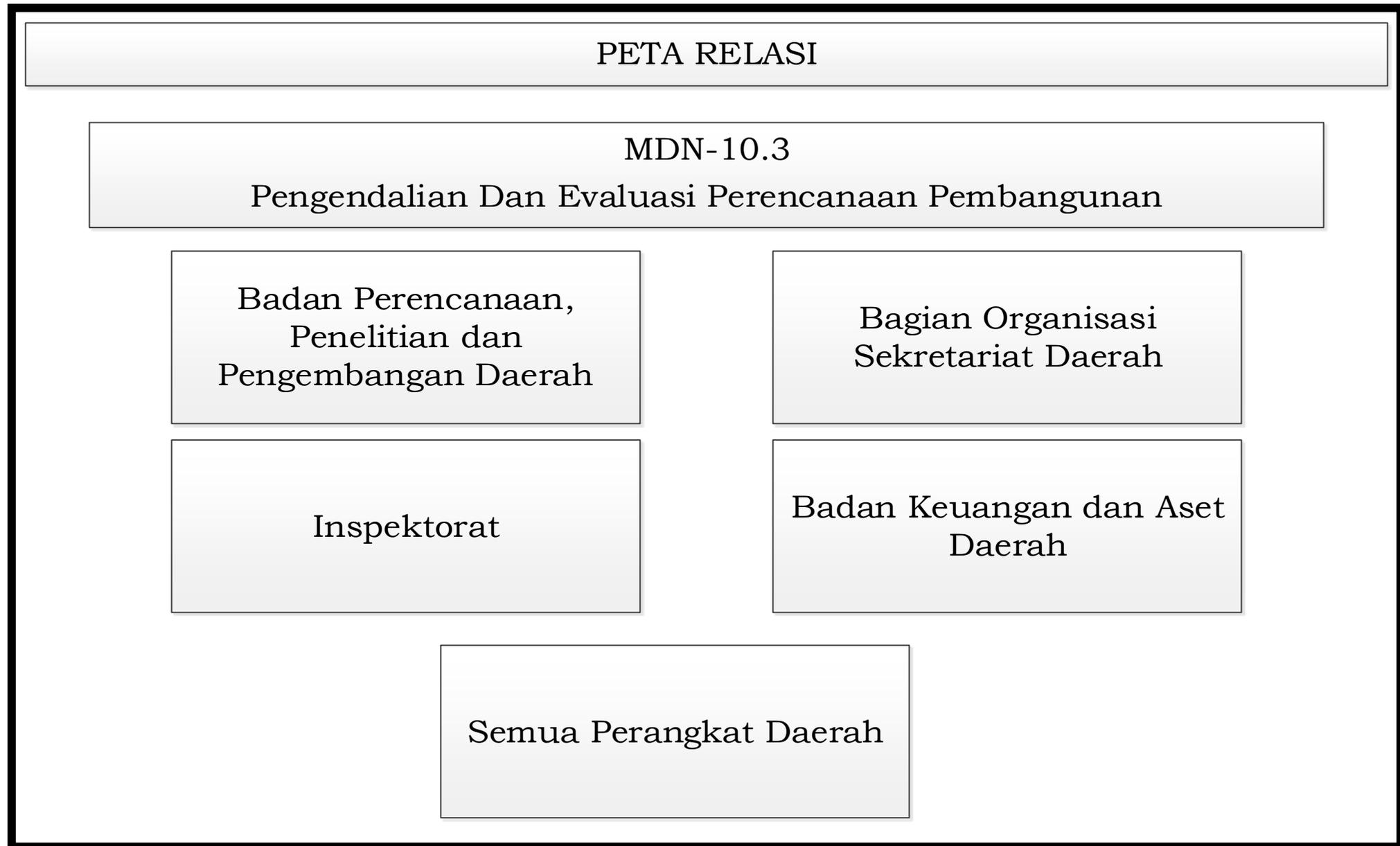
MDN-10.2
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Semua Perangkat Daerah

Tim Anggaran



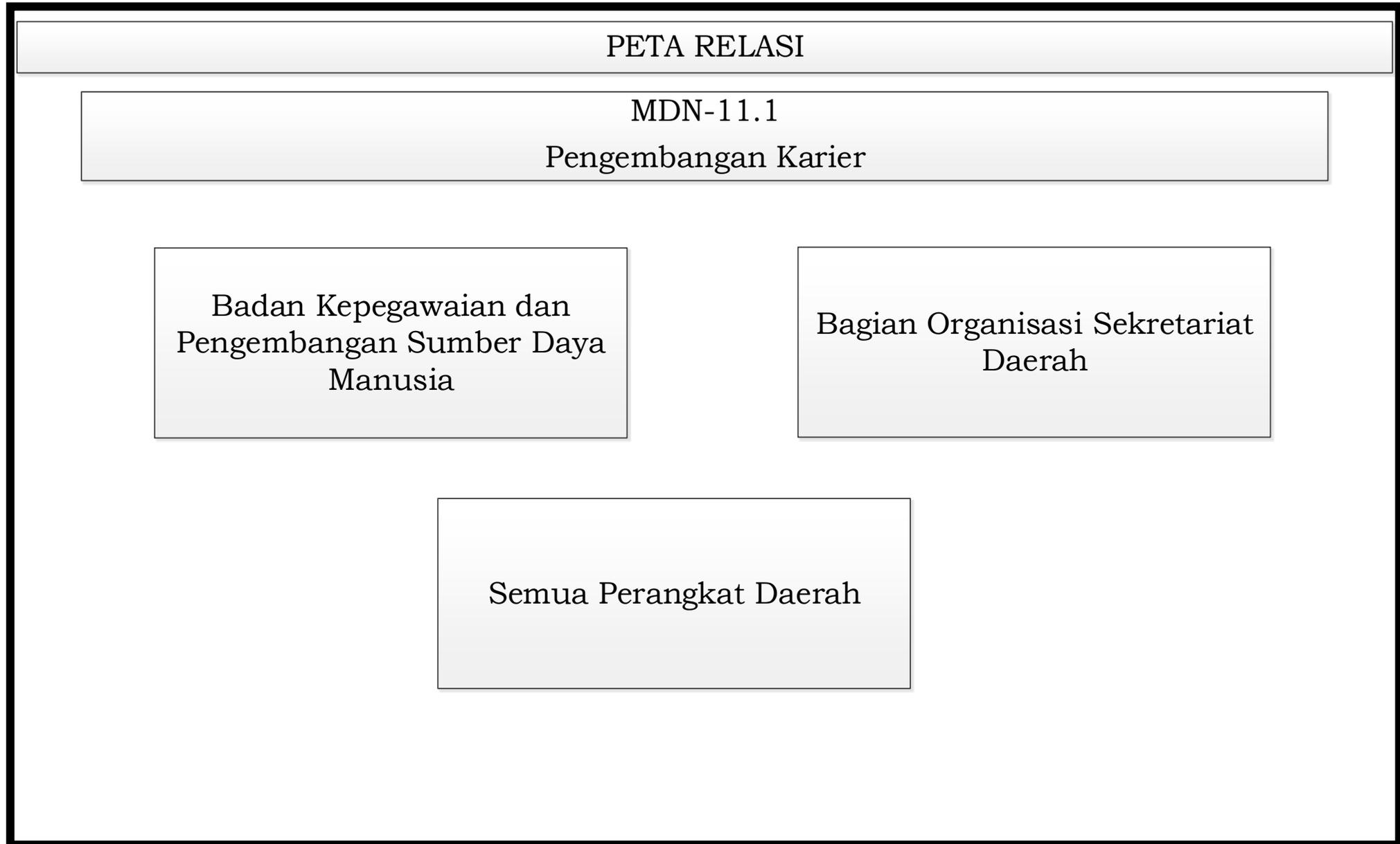


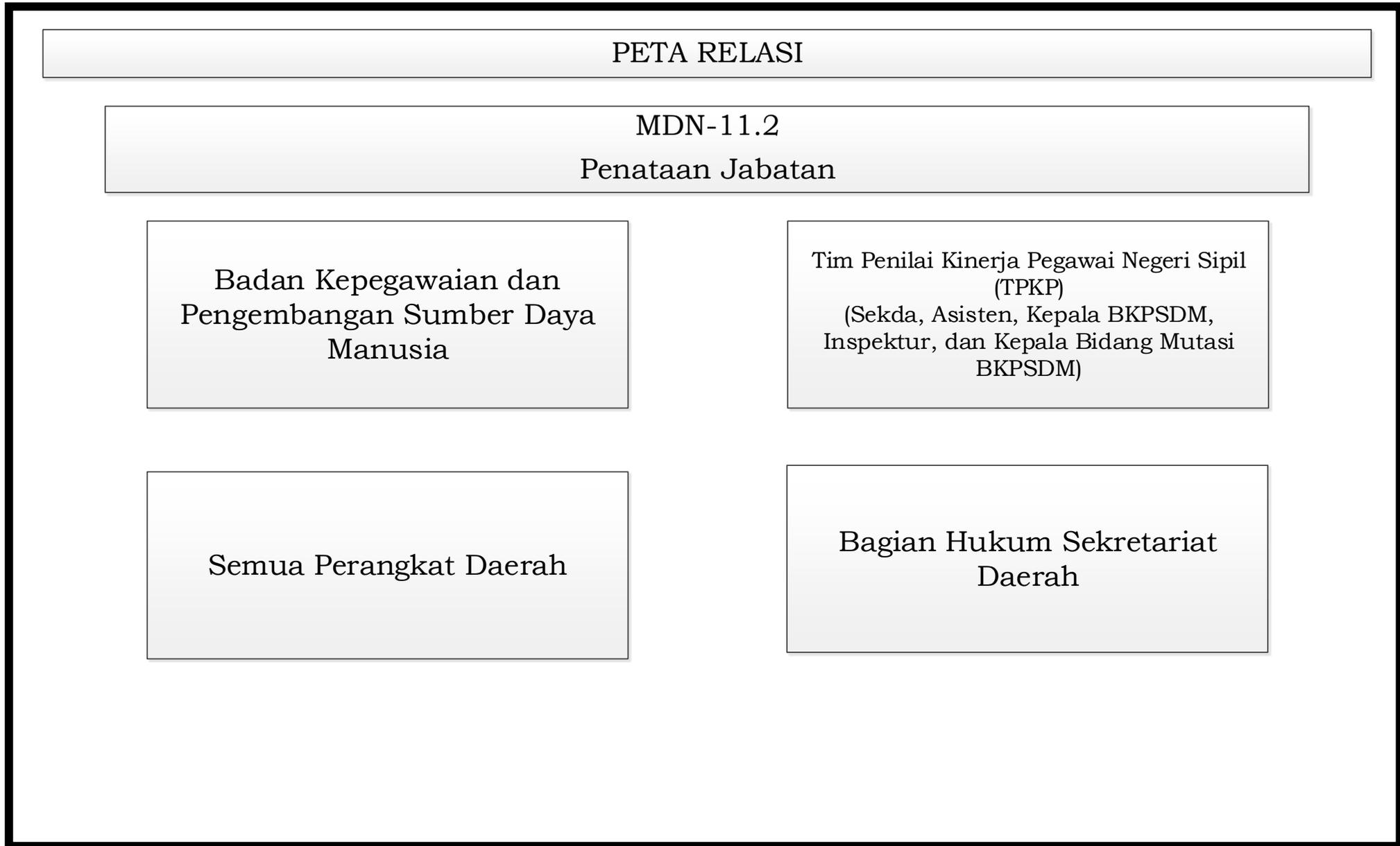
PETA RELASI

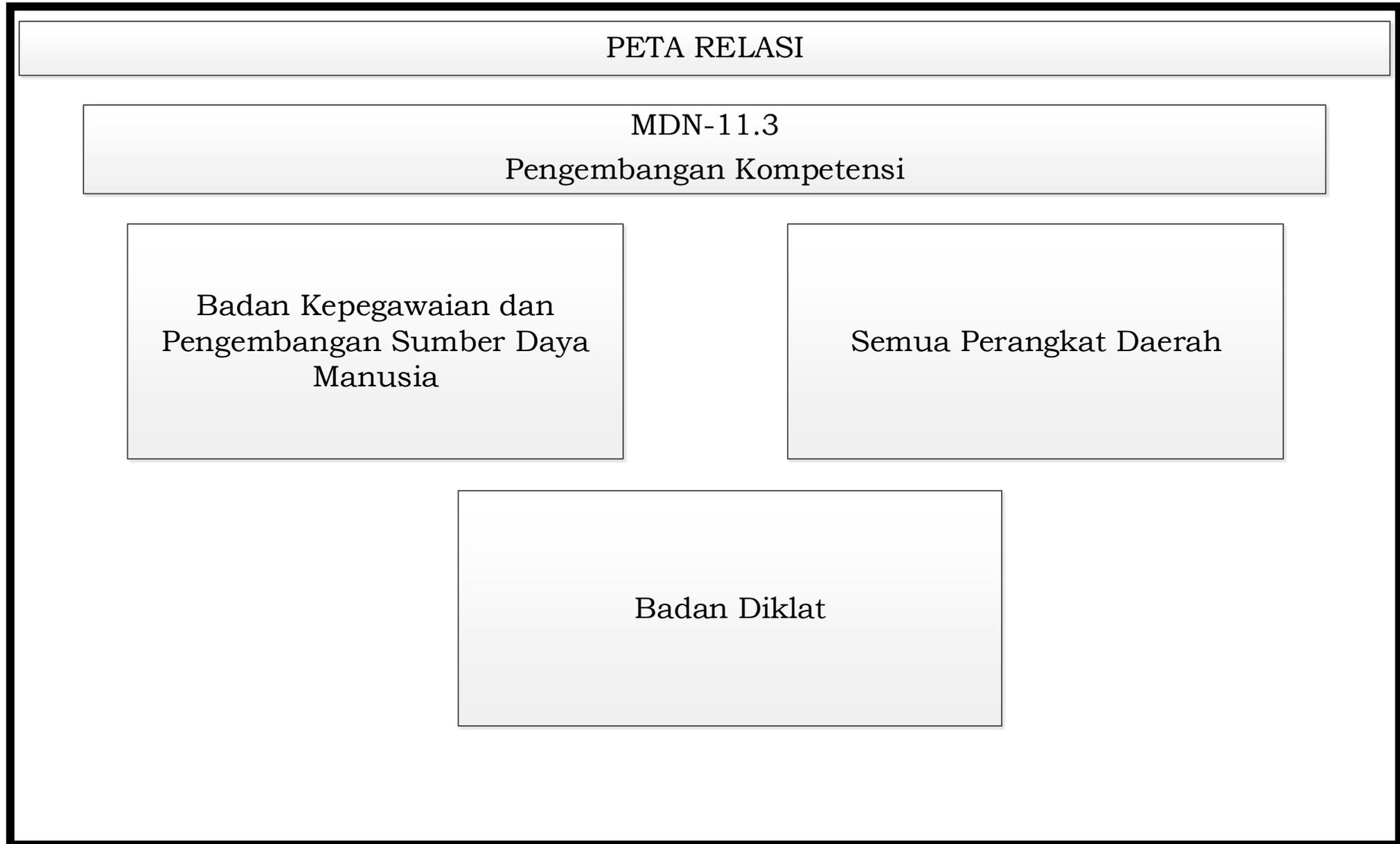
MDN-10.5 Kajian, Penelitian dan Pembangunan

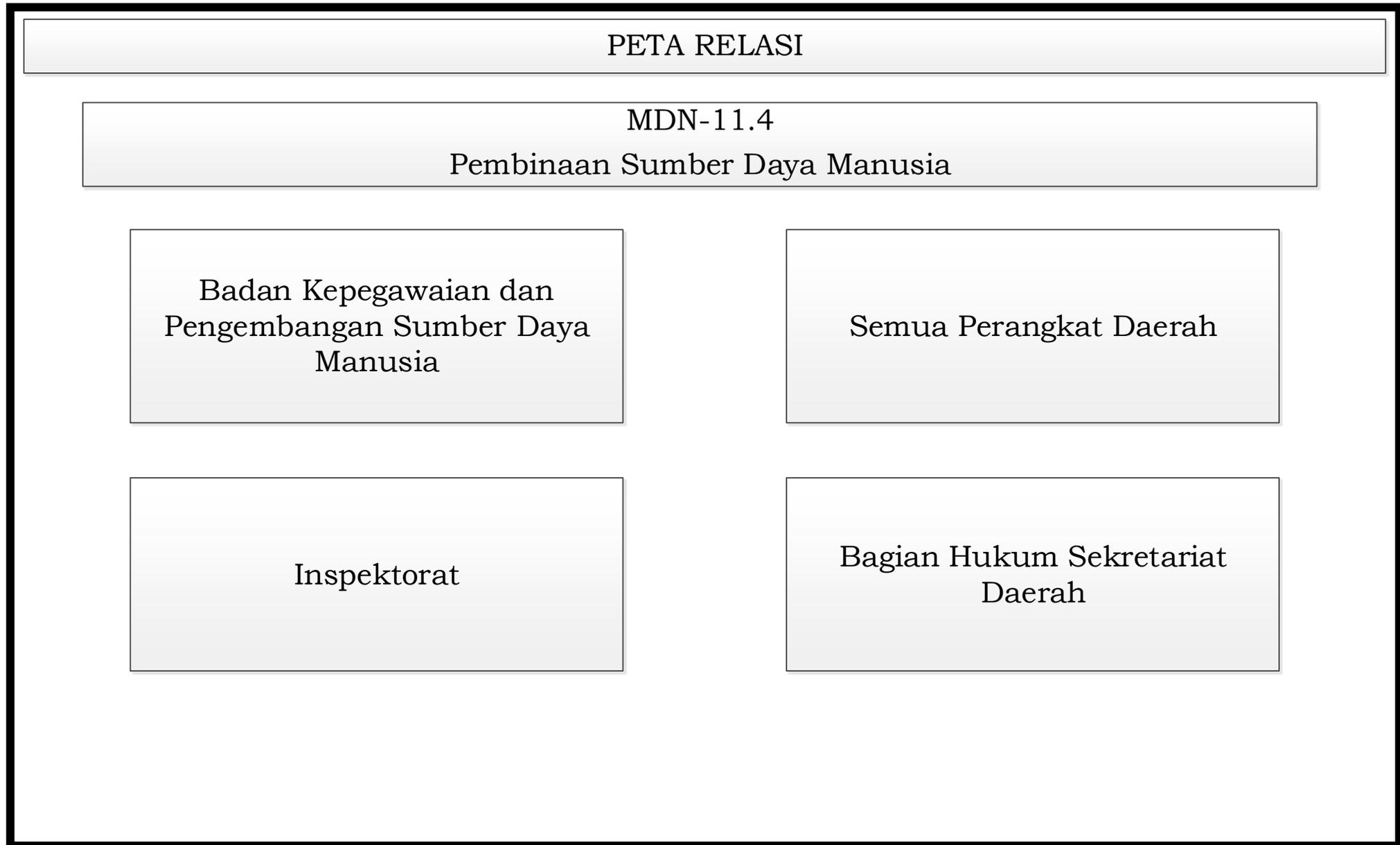
Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Semua Perangkat Daerah

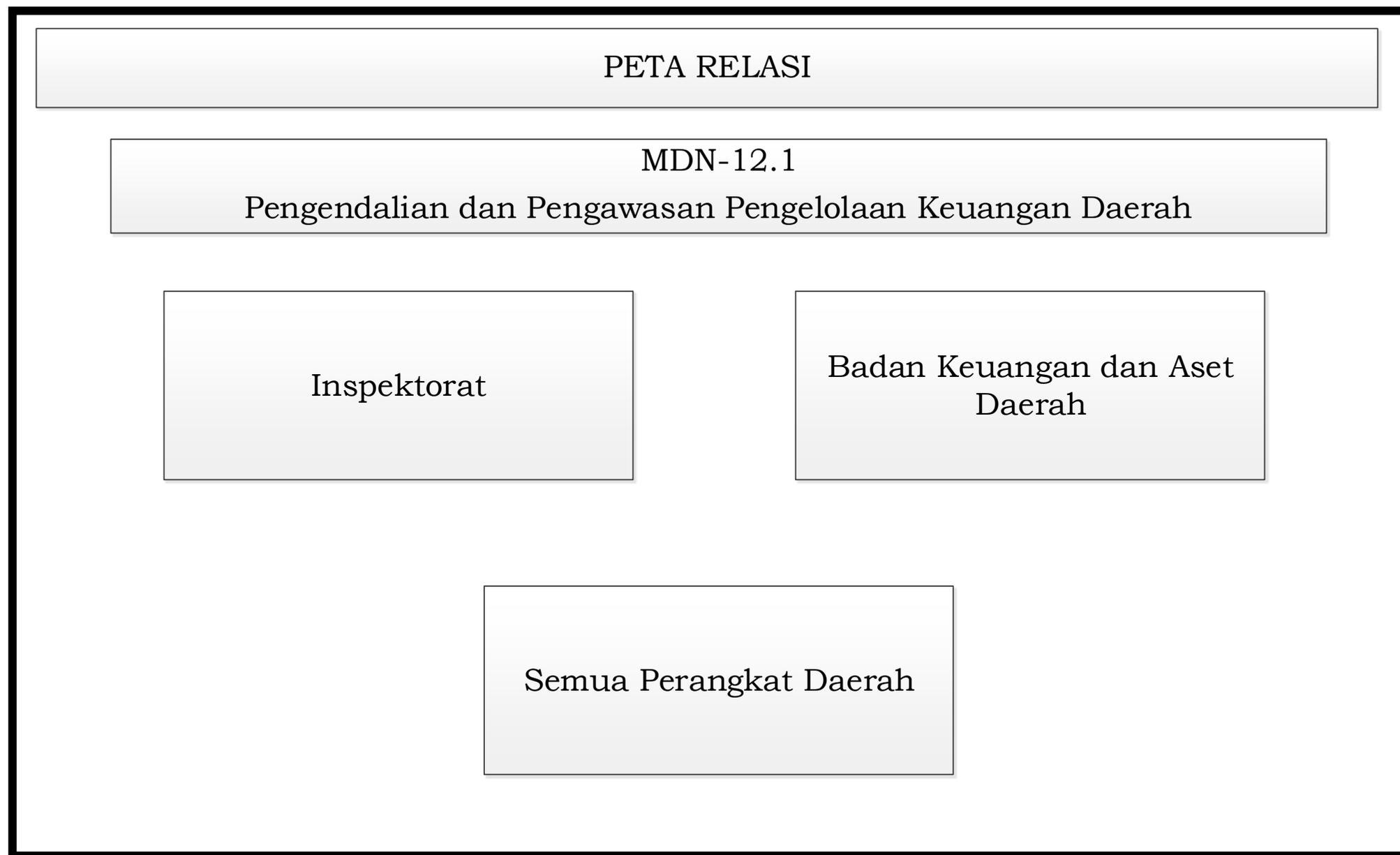












PETA RELASI

MDN-12.2

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah

Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Inspektorat

Semua Perangkat Daerah

PETA RELASI

MDN-13.1

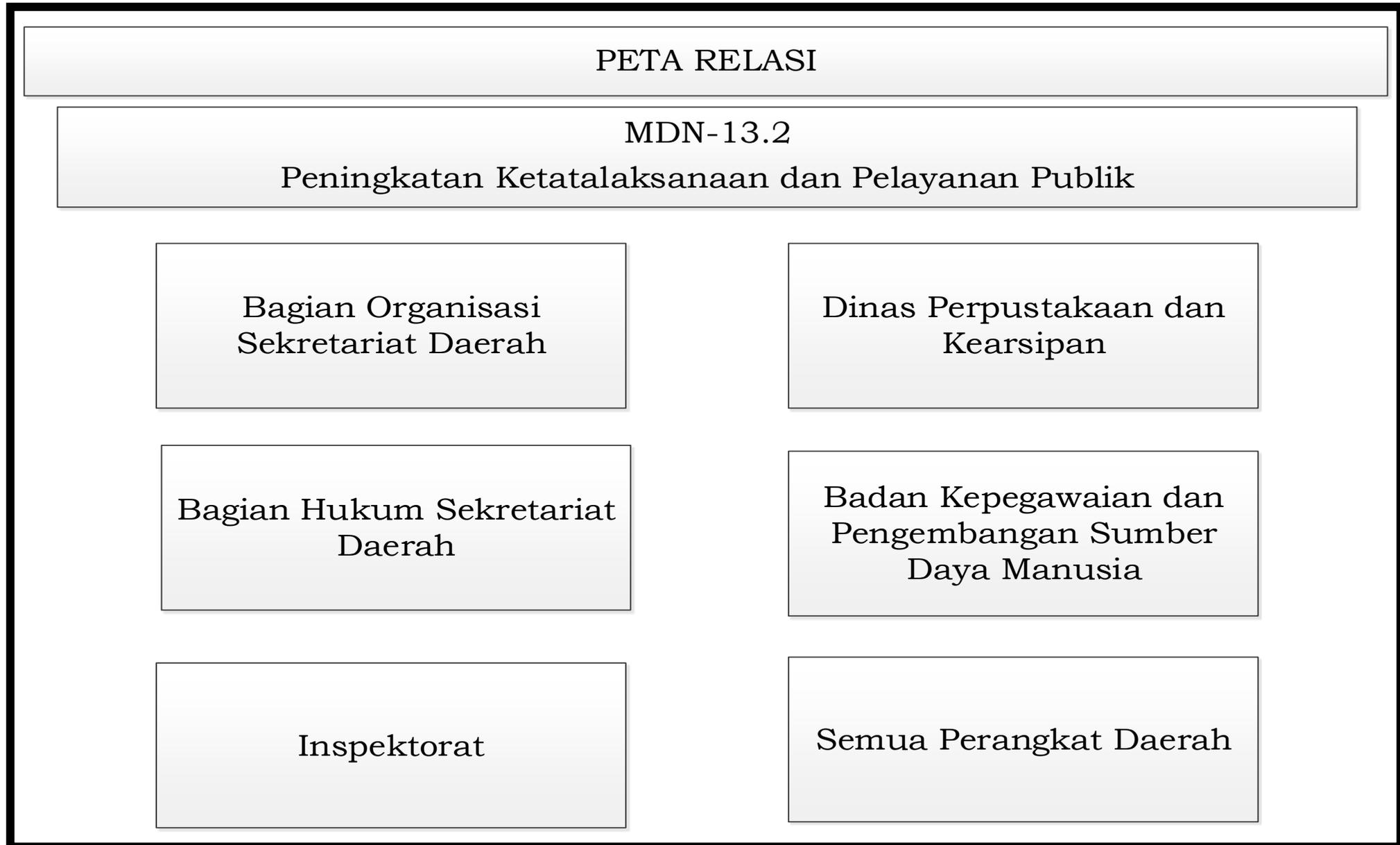
Pengembangan Kelembagaan Perangkat Daerah

Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah

Bagian Hukum Sekretariat
Daerah

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

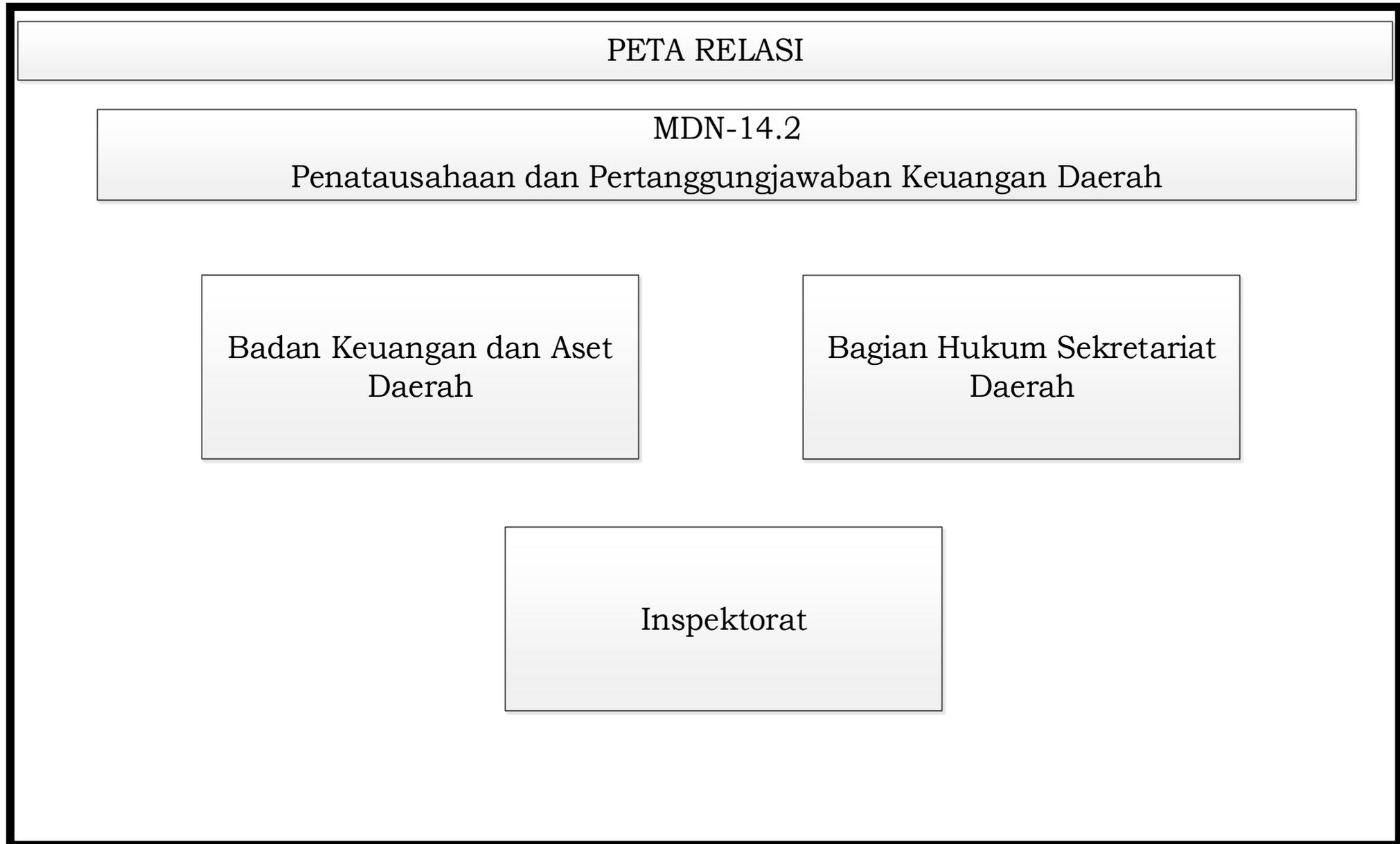
Semua Perangkat Daerah

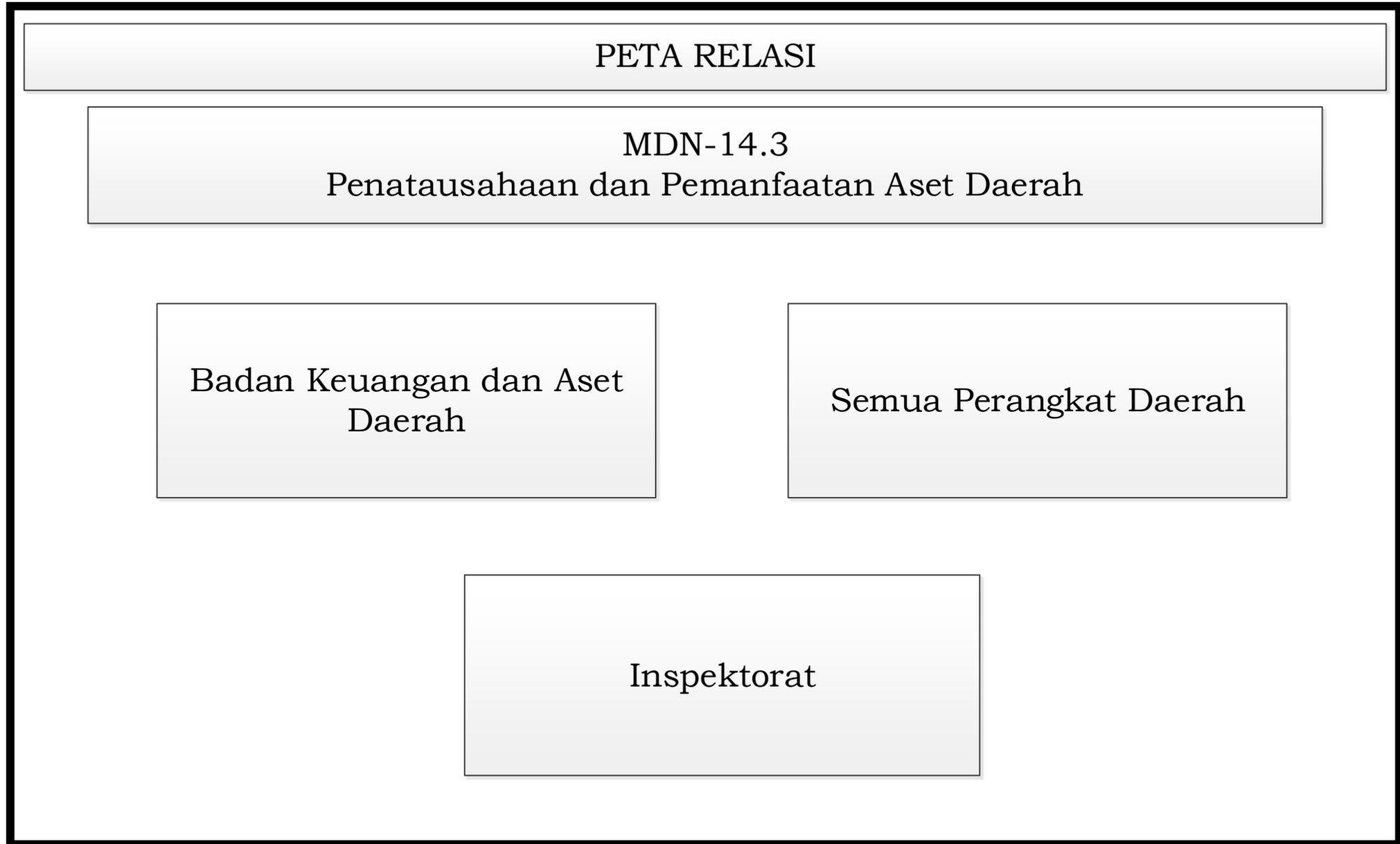












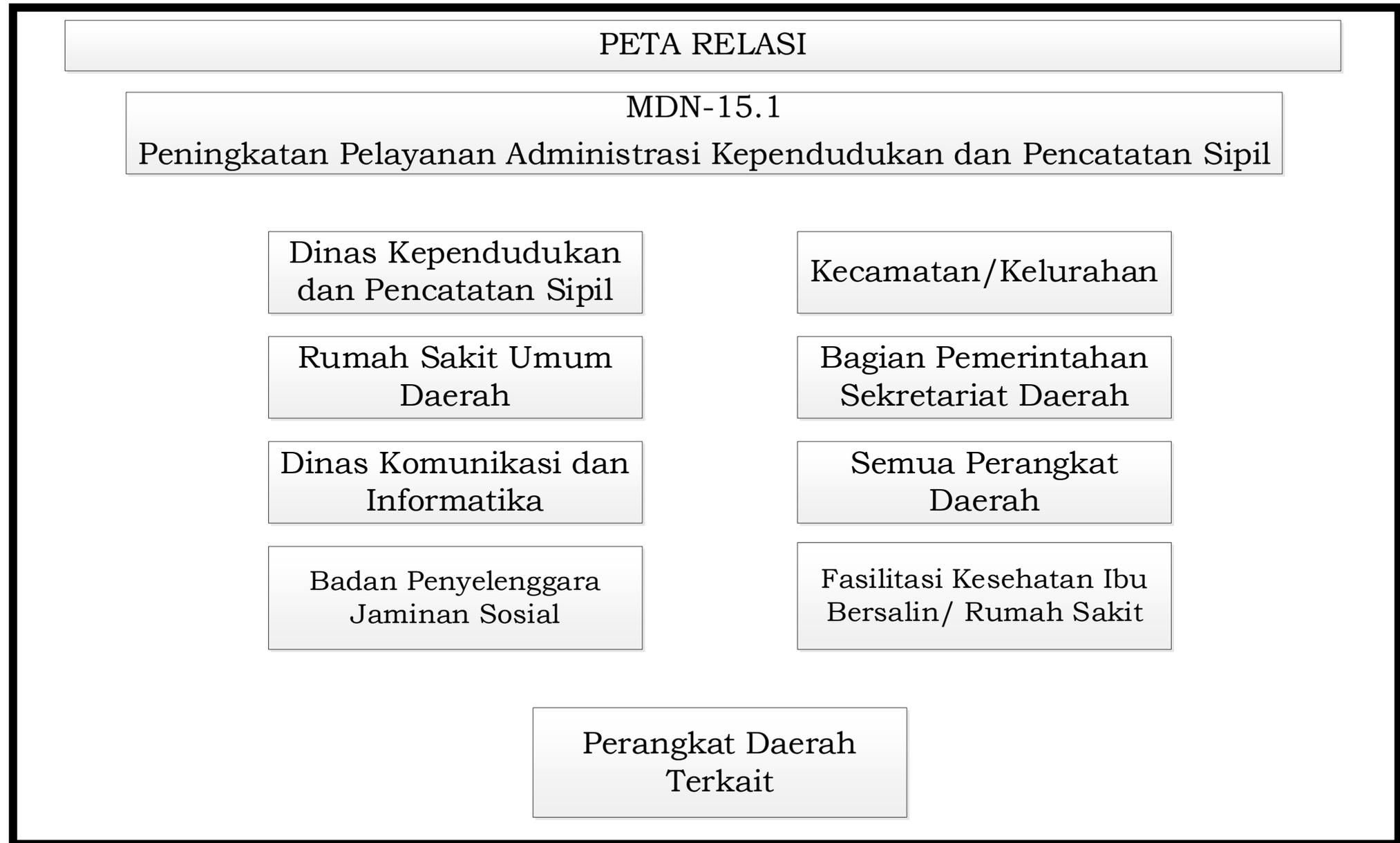
PETA RELASI

MDN-14.4
Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

Badan Keuangan dan Aset
Daerah

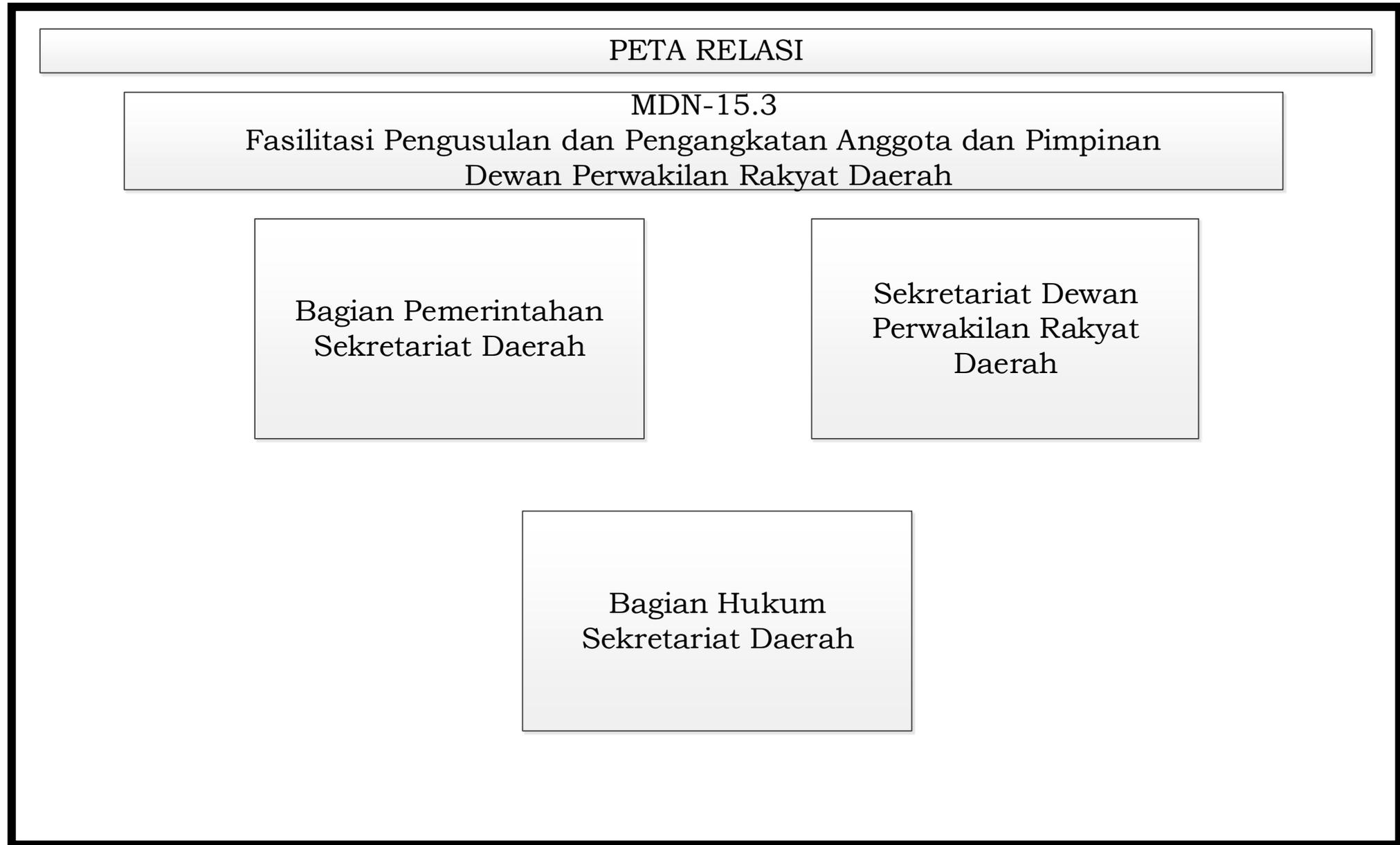


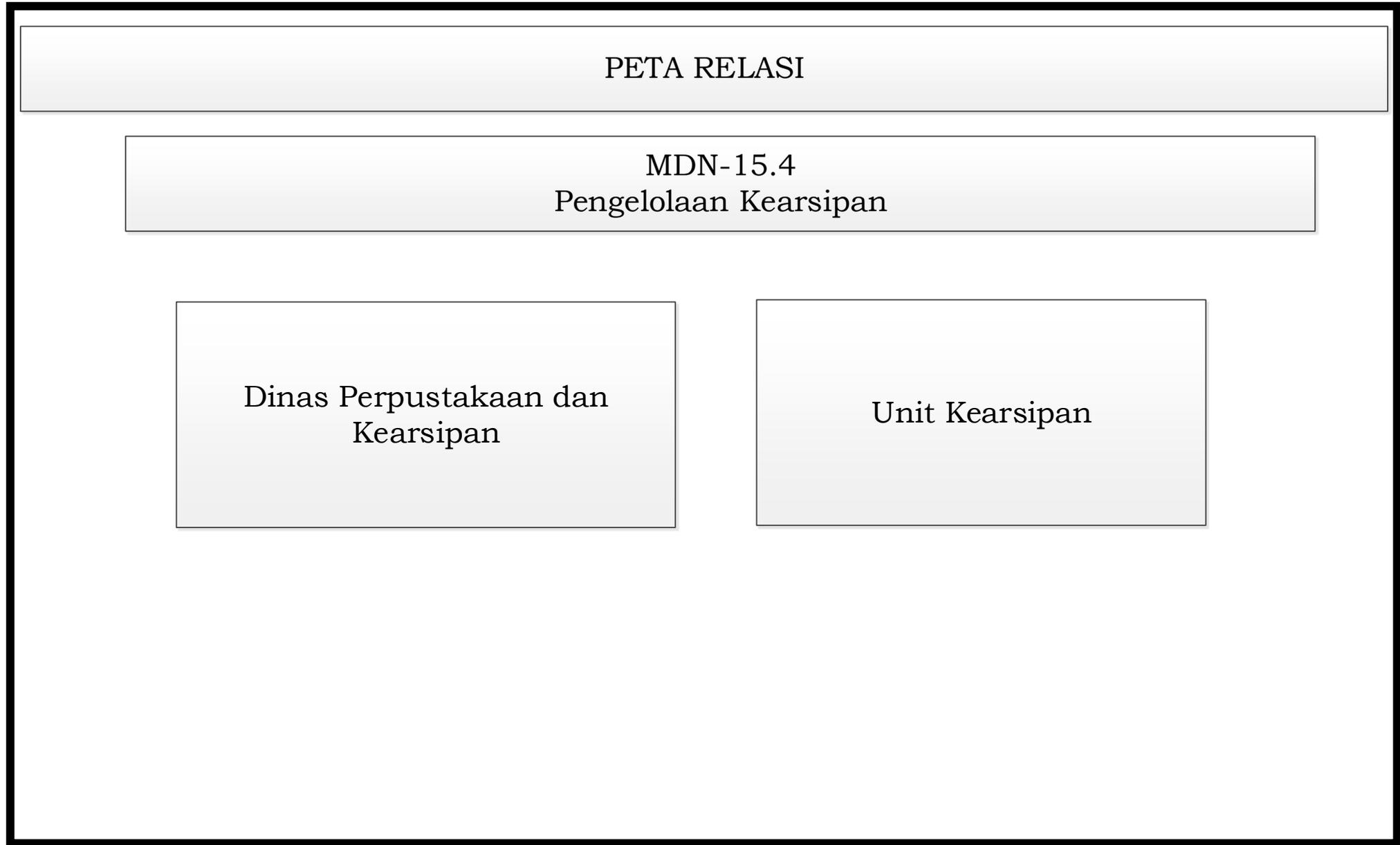
PETA RELASI

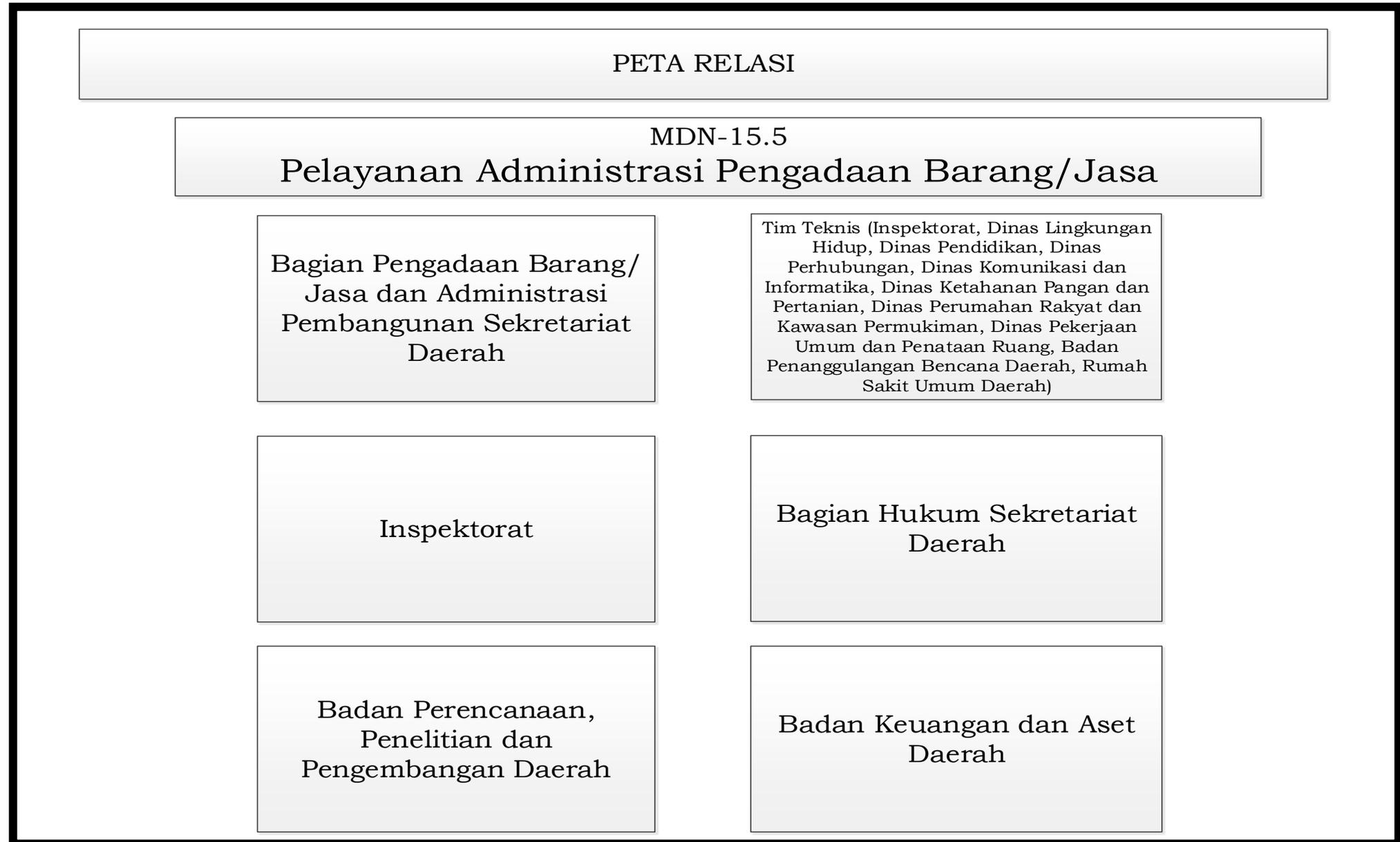
MDN-15.2
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

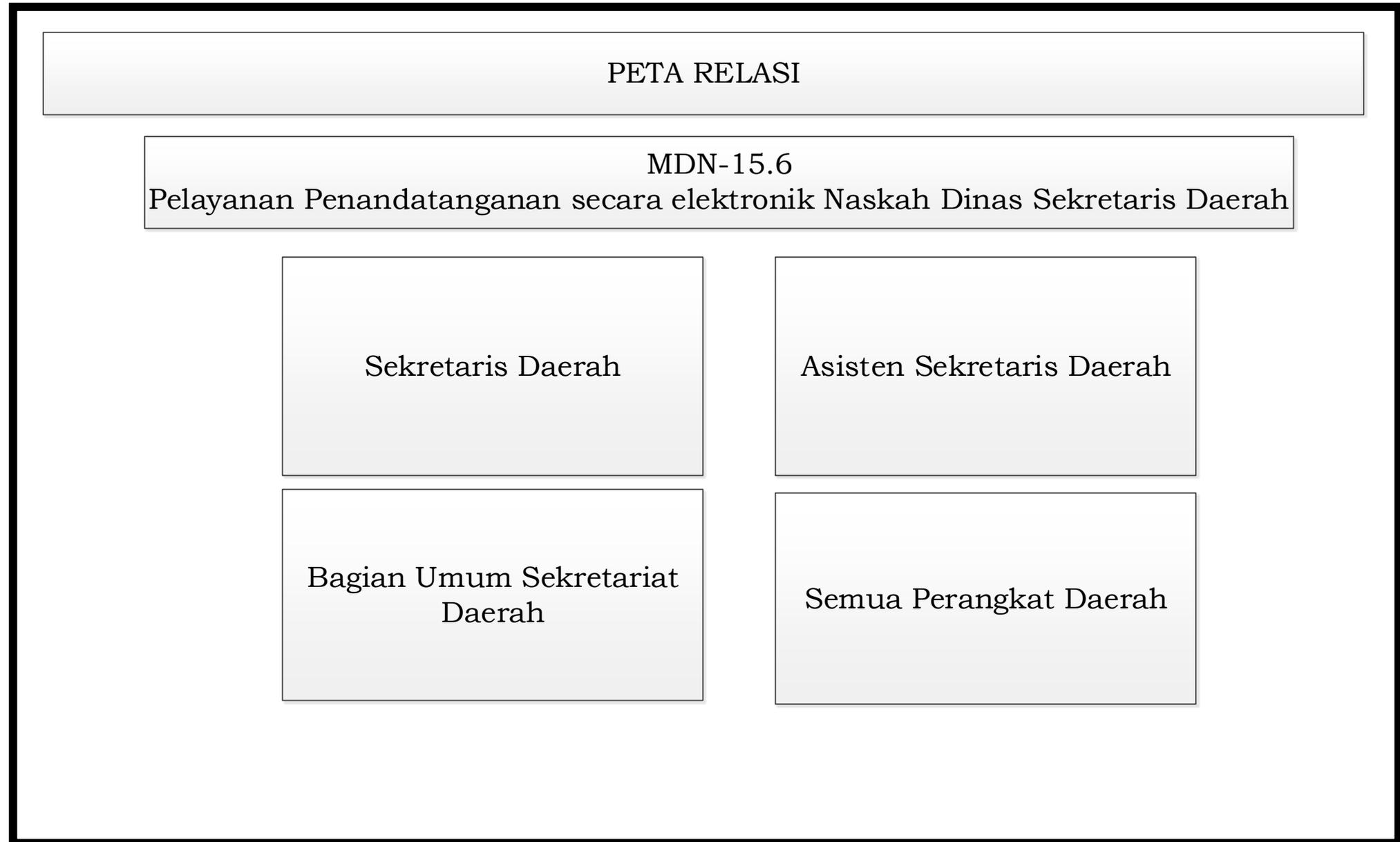
Bagian Umum Sekretariat Daerah

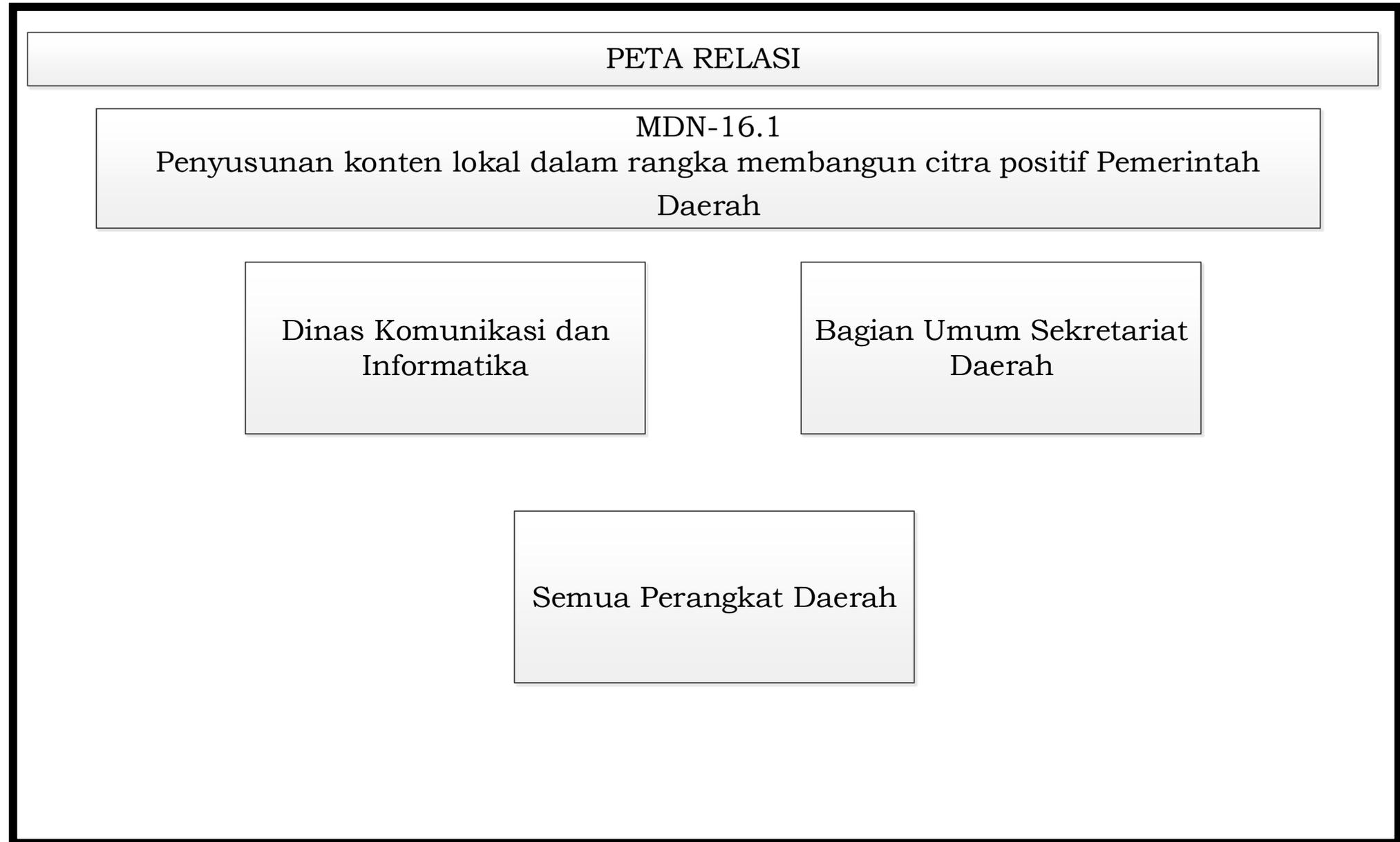
Semua Perangkat Daerah













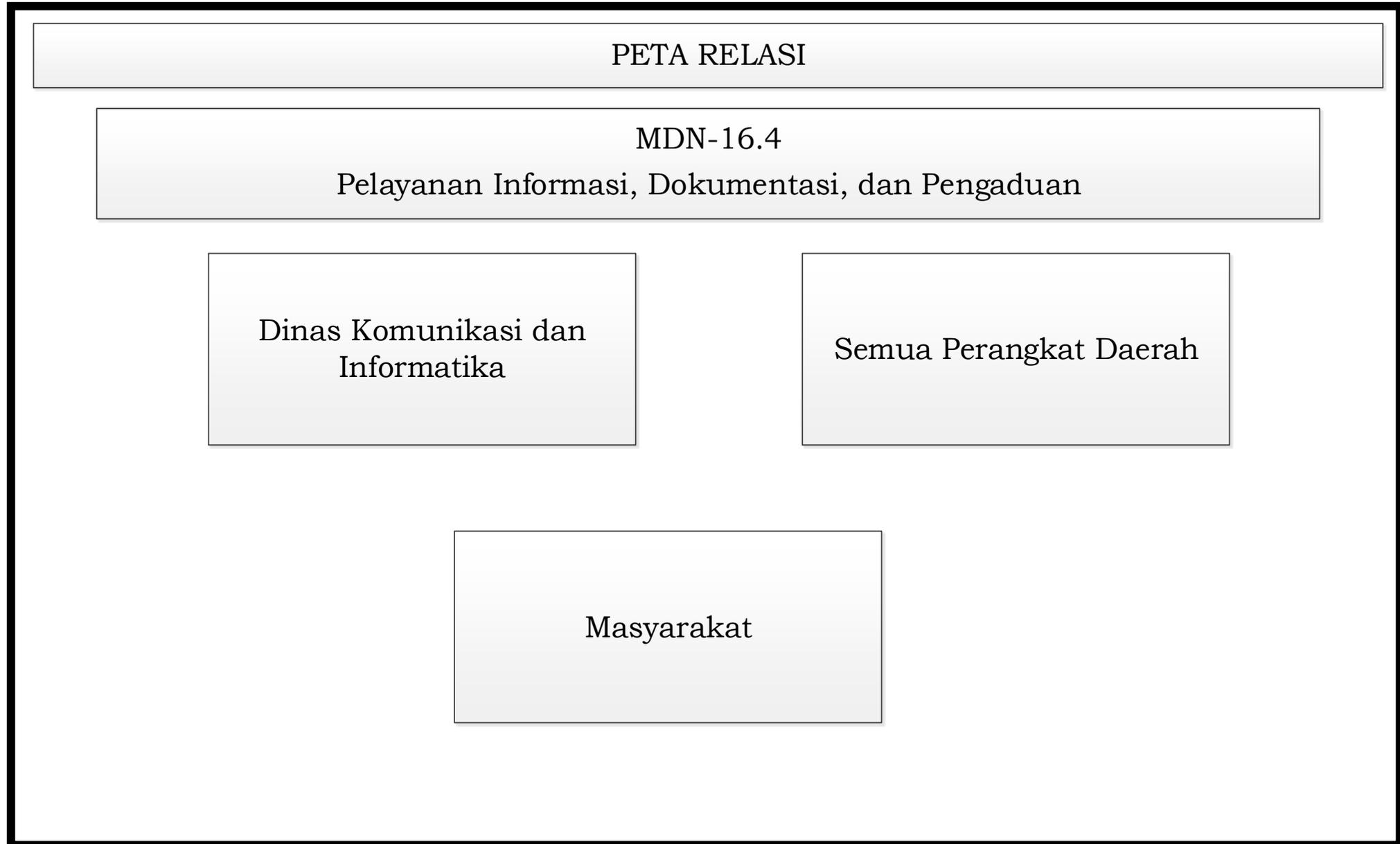
PETA RELASI

MDN-16.3

Pengelolaan Opini, Aspirasi dan Komunikasi Publik

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Semua Perangkat Daerah



PETA RELASI

MDN-16.5
Penyediaan Data Statistik Sektoral

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Semua Perangkat Daerah

PETA RELASI

MDN-16.6 Pengamanan Dokumen dengan Tanda Tangan Digital

Walikota

Badan Siber dan
Sandi Negara

Bagian Hukum
Sekretariat Daerah

Dinas Komunikasi
dan Informatika

Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah

Semua Perangkat
Daerah

PETA RELASI

MDN-16.7

Pengamanan Jaringan Informasi Teknologi

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Semua Perangkat
Daerah

PETA RELASI

MDN-16.8
Pengamanan Pengiriman Informasi Digital

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Semua Perangkat Daerah





PETA RELASI

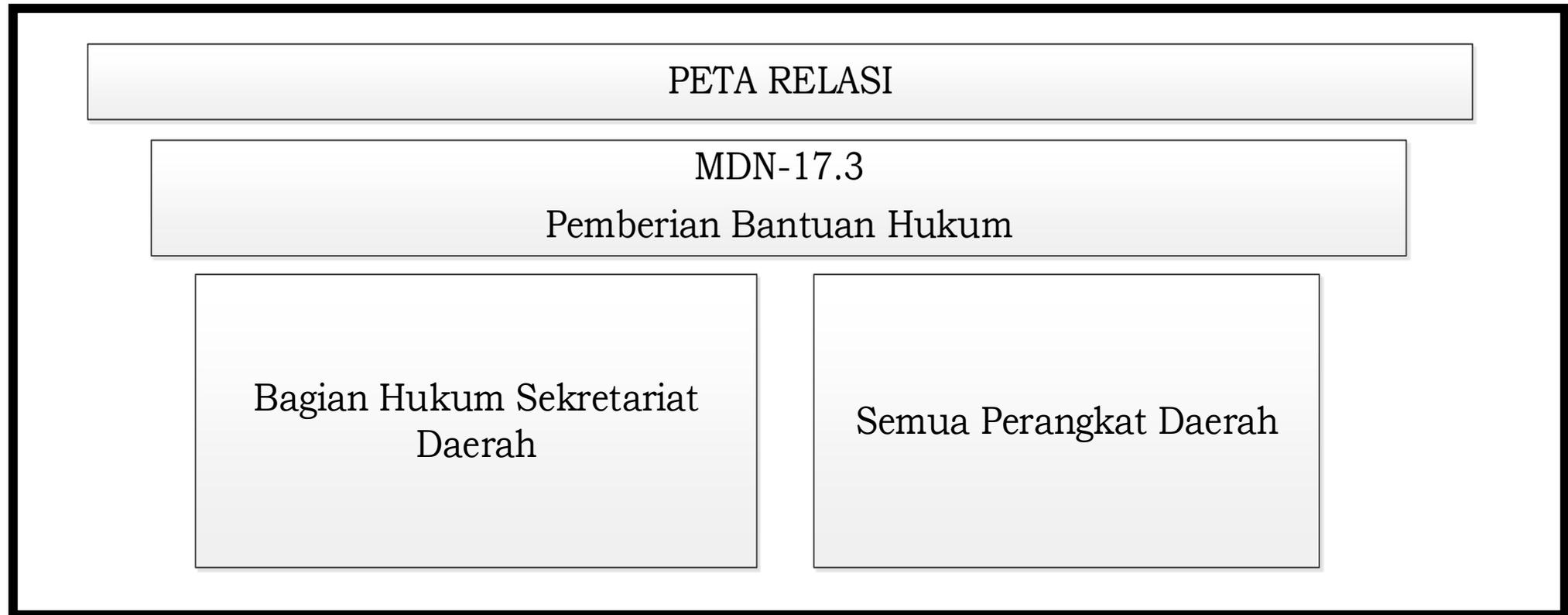
MDN-17.1

Harmonisasi Produk Hukum Daerah

Bagian Hukum
Sekretariat Daerah

Semua Perangkat Daerah





Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO